BADAN POM

LAPORAN KINERJA

Balai POM di Palopo

2025



KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya, Balai POM di Palopo dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025.

Penyusunan Laporan Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palopo Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan. Laporan Kinerja Tahun 2025 merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana Aksi Perjanjian Kinerja pada Tahun 2025.

Laporan Kinerja Tahun 2025 Balai POM di Palopo disusun tidak hanya untuk memenuhi ketentuan peraturan perundangan, namun juga merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja dan implementasi *good governance* di Balai POM di Palopo. Laporan Kinerja Tahun 2025 ini merupakan bentuk akuntabilitas untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan disahkan oleh Kepala Balai POM di Palopo dalam rangka mencapai misi melalui informasi kinerja yang terukur terhadap sasaran dan target kinerja yang seharusnya dicapai melalui penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reviu serta evaluasi kinerja selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintah dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2025 ini tertuang Perjanjian Kinerja dan Indikator, pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja Tahun 2025 serta membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya terhadap target Tahun 2025, evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran, termasuk perbandingan capaian kinerja dengan beberapa Balai POM lainnya. Tahun 2025 merupakan awal periode renstra Balai POM di Palopo.

Pengukuran kinerja merupakan salah satu dasar utama dalam menerapkan manajemen kinerja melalui analisis dan evaluasi program/kegiatan terhadap target capaian kinerja, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran serta analisis dan evaluasi terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Tahun 2024 ini diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai termasuk dalam penyusunan perencanaan jangka menengah kedepannya serta menjadi pijakan dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan (*sustainable and continuing improvement*) berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja saat ini untuk peningkatan kinerja Balai POM di Palopo pada tahun selanjutnya, sehingga target yang sudah ditetapkan dapat tercapai.

Palopo, 27 Februari 2026
Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palopo,



Drs. Darman, Apt., M.P.P.M.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Balai POM di Palopo Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban untuk pencapaian 8 (delapan) sasaran strategis dengan 28 (dua puluh delapan) indikator kinerja utama pada tahun 2025 mengacu pada Renstra BPOM di Palopo tahun 2025-2029. Tujuan yang ingin dicapai adalah terwujudnya sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu, terwujudnya masyarakat yang cerdas memilih sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu, terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri sediaan farmasi dan pangan olahan serta kemandirian bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM, terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan, dan terwujudnya organisasi yang profesional, adaptif, efektif dan efisien serta layanan public yang prima.

Pada tahun 2025, diperoleh nilai NKO sebesar 94 dengan predikat **Baik**. Hasil tersebut merupakan evaluasi dari 8 (delapan) sasaran strategis yang dibagi menjadi 28 indikator kinerja utama, Adapun sasaran strategis yang dievaluasi, diperoleh 6 (enam) sasaran strategis memperoleh capaian kategori **Sangat Baik**, 1 (satu) sasaran strategis memperoleh capaian dengan kategori **Baik**, dan 1 (satu) sasaran strategis lainnya memperoleh capaian dengan kategori **Tidak Dapat Disimpulkan**. Hasil capaian tiap sasaran strategis adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator pada sasaran strategis pertama sebesar 109,86% dengan kriteria **Sangat Baik**, menunjukkan keberhasilan BPOM di Palopo dalam meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BPOM di Palopo Tahun 2025;
2. Capaian indikator sasaran strategis kedua pada tahun 2025 sebesar 100% dengan kriteria **Sangat Baik**, ini merupakan keberhasilan BPOM di Palopo dalam meningkatkan efektivitas pengawasan Sarana Produksi pangan Fortifikasi di lingkup BPOM di Palopo;
3. Capaian indikator pada sasaran strategis ketiga sebesar 100,33% dengan kriteria **Sangat Baik**, menunjukkan keberhasilan BPOM di Palopo dalam menguatkan Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BPOM di Palopo tahun 2025;
4. Capaian indikator sasaran strategis keempat pada tahun 2025 sebesar 100% dengan kriteria **Sangat Baik**, ini merupakan keberhasilan BPOM di Palopo dalam meningkatkan efektifitas KIE di lingkup BPOM di Palopo;
5. Pada tahun 2025 pada sasaran strategis kelima yaitu meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu lingkup BPOM di Palopo, memperoleh capaian kinerja indikator utama sebesar 105,25% dengan kriteria **Sangat Baik**;

6. Pada tahun 2025 pada sasaran strategis keenam yaitu Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif lingkup BPOM di Palopo, memperoleh capaian kinerja indikator utama sebesar 110,00% dengan kriteria **Sangat Baik**;
7. Capaian indikator sasaran strategis ketujuh pada tahun 2025 sebesar 111,90% dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**, hal ini menunjukkan bahwa BPOM di Palopo berhasil dalam melaksanakan kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di lingkup kerja BPOM di Palopo;
8. Capaian indikator pada sasaran strategis kedelapan sebesar 98,93% dengan kriteria **Baik**, menunjukkan bahwa keberhasilan BPOM di Palopo dalam memberikan Layanan Publik UPT yang Prima di wilayah kerja BPOM di Palopo Tahun 2025 masih perlu untuk ditingkatkan.

Persentase capaian target indikator kinerja BPOM di Palopo pada tahun 2025 antara 98,93% sampai dengan 111,90%. Capaian indikator kinerja tertinggi terdapat pada indikator "Indeks Pelayanan Publik UPT" dan capaian indikator kinerja terendah terdapat pada indikator "Terwujudnya tata Kelola pemerintah Unit Organisasi yang Optimal".

Pelaksanaan program dan kegiatan Balai POM di Palopo pada tahun 2025 didukung anggaran APBN TA 2025 sebesar Rp6.813.032.000,00. Realisasi anggaran pada tahun 2025 adalah Rp5.504.403.709,00 atau 80,79%. Pada tahun 2025 pula Balai POM di Palopo mendapatkan Blokir Anggaran sebesar Rp1.301.824.000,00 sehingga anggaran yang tersedia yang dapat digunakan adalah sebesar Rp5.511.208.000,00. Apabila dibandingkan dengan Pagu Anggaran yang tersedia (dikurangi blokir) maka realisasi anggaran Balai POM di Palopo yaitu sebesar 99,88%. Balai POM di Palopo berupaya melakukan perbaikan secara terus-menerus dalam rangka meningkatkan kinerja pada tahun selanjutnya. Secara keseluruhan tingkat efisiensi anggaran Capaian Kinerja di Balai POM di Palopo bernilai 100% atau masuk dalam kategori Efisien.

Palopo, 27 Februari 2026
Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palopo,



Drs. Darman, Apt., M.P.P.M.

HIGHLIGHT

Selama tahun 2025, Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palopo telah menerima beberapa penghargaan dan catatan keberhasilan antara lain :

1. BPOM di Palopo berhasil meraih Indeks Pelayanan Publik Kategori “Pelayanan Prima”



2. BPOM di Palopo meraih Penghargaan Kategori PPID Pelaksana UPT Balai POM sebagai Badan Publik “Informatif”



3. BPOM di Palopo berhasil meraih Perhargaan sebagai Balai Terbaik 1 dalam “Penggalangan Pemangku Kepentingan Dalam Rangka Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan”



4. BPOM di Palopo berhasil meraih Perhargaan sebagai Balai Terbaik 2 dalam “Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan”



5. BPOM di Palopo meraih Penghargaan Terbaik II “Optimalisasi Transaksi Non Tunai: *Cash Management System* Semester 1 Tahun 2025”



6. BPOM di Palopo meraih Penghargaan Terbaik III “Optimalisasi Transaksi Non Tunai: Kartu Kredit Pemerintah Semester 1 Tahun 2025”



7. BPOM di Palopo meraih Penghargaan Sebagai “Satuan Kerja Dengan Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (Nilai 100) Semester 1 Tahun 2025”



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **2**
IKHTISAR EKSEKUTIF **4**
HIGHLIGHT **6**
DAFTAR ISI **9**
DAFTAR GAMBAR **10**
DAFTAR TABEL **11**
BAB I
PENDAHULUAN **20**
1.1 Latar Belakang 20
1.2 Gambaran Umum Organisasi 21
1.3 Struktur Organisasi 22
1.4 Isu Strategis 23
BAB II
PERENCANAAN KINERJA **29**
2.1 Uraian Singkat RENSTRA 29
2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 30
2.3 Perjanjian Kinerja (PK) 32
2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) 36
2.5 Metode Pengukuran 36
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA **41**
3.1 Capaian Kinerja Organisasi 41
3.2 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya 236
3.3 Pemanfaatan Informasi Kinerja 251
3.4 Realisasi Anggaran 252
BAB IV
PENUTUP **269**
LAMPIRAN **274**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Balai POM di Palopo..... 22
Gambar 2. Visi dan Misi..... 29
Gambar 3. Perbandingan realisasi kinerja IKSK Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Tahun 2025..... 47
Gambar 4. Perbandingan Capaian Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Tahun 2025..... 49
Gambar 5. Perbandingan realisasi kinerja IKSK Persentase Sarana Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO ke BPOM dengan UPT lainnya yang sejenis..... 54
Gambar 6. Perbandingan realisasi kinerja IKSK Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan..... 62
Gambar 7. Perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja unit lain yang sejenis..... 84
Gambar 8. Perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja unit lain yang sejenis..... 98
Gambar 9. Kesepakatan Target Capaian Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Berdasarkan Renstra 2025-2029..... 127
Gambar 10. Perbandingan realisasi kinerja IKSK Persentase Kab/Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kab/Kota Pangan Aman dengan UPT lainnya yang sejenis..... 135
Gambar 11. Perbandingan realisasi kinerja IKSK Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BPOM di Palopo..... 143
Gambar 12. Perbandingan realisasi kinerja IKSK Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja BPOM di Palopo..... 145
Gambar 13. Perbandingan realisasi kinerja IKSK Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan..... 149
Gambar 14. Perbandingan realisasi kinerja IKSK Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan..... 151
Gambar 15. Perbandingan realisasi kinerja IKSK Jumlah Desa Pangan Aman..... 156
Gambar 16. Perbandingan realisasi kinerja IKSK Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas..... 160
Gambar 17. Perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja unit lain yang setara IKSK Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas..... 161
Gambar 18. Perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja unit lain yang setara IKSK Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di BPOM di Palopo..... 177
Gambar 19. Perbandingan realisasi kinerja IKSK Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar..... 182
Gambar 20. Perbandingan realisasi kinerja IKSK Indeks Pelayanan Publik..... 185
Gambar 21. Perbandingan realisasi kinerja IKSK Indeks Pelayanan Publik..... 186
Gambar 22. Perbandingan realisasi kinerja IKSK Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM di Palopo..... 192
Gambar 23. Perbandingan Target Realisasi IKSK Nilai Pembangunan ZI UPT dengan UPT lainnya..... 193
Gambar 24. Perbandingan realisasi kinerja IKSK Nilai AKIP BPOM di Palopo..... 197
Gambar 25. Perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja unit lain yang sejenis IKSK Nilai Kinerja Anggaran..... 214
Gambar 26. Perbandingan realisasi kinerja IKSK Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM.. 231

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rencana Kinerja Tahunan 2025 Balai POM di Palopo.....31
Tabel 2. Revisi Perjanjian Kinerja Balai POM di Palopo..... 34
Tabel 3. Kategori Capaian Indikator Kinerja.....37
Tabel 4. Koreksi Capaian PK Berdasarkan Predikat AKIP.....39
Tabel 5. Predikat NKO.....40
Tabel 6. Laporan Capaian Nilai Kinerja Organisasi BPOM di Palopo.....41
Tabel 7. Perbandingan target 2025 dan realisasi kinerja tahun 2025 IKSK Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Tahun 2025.....45
Tabel 8. Perbandingan realisasi kinerja IKSK Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan target Renstra.....47
Tabel 9. Perbandingan Capaian Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Tahun 2025.....48
Tabel 10. Rekomendasi Tindak Lanjut IKSK Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Tahun 2025.....50
Tabel 11. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.....51
Tabel 12. Perbandingan target 2025 dan realisasi kinerja tahun 2025 IKSK Persentase Sarana Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO ke BPOM.....51
Tabel 13. Perbandingan realisasi kinerja IKSK Persentase Sarana Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO ke BPOM dengan target Renstra.....53
Tabel 14. Perbandingan realisasi kinerja IKSK Persentase Sarana Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO ke BPOM dengan UPT lainnya yang sejenis.....53
Tabel 15. Rekomendasi Tindak Lanjut IKSK Persentase Sarana Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO ke BPOM.....55
Tabel 16. Perbandingan target 2025 dan realisasi kinerja tahun 2025 IKSK Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan.....58
Tabel 17. Perbandingan realisasi kinerja IKSK Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti dengan target Renstra.....62
Tabel 18. Perbandingan realisasi kinerja IKSK Persentase Sarana Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO ke BPOM dengan UPT lainnya yang sejenis 63
Tabel 19. Rekomendasi Tindak Lanjut IKSK Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan.....64
Tabel 20. Perbandingan target 2025 dan realisasi kinerja tahun 2025 IKSK Persentase sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar.....66
Tabel 21. Perbandingan realisasi kinerja IKSK Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar dengan target Renstra.....67
Tabel 22. Perbandingan realisasi kinerja IKSK Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar dengan UPT lainnya yang sejenis.....68
Tabel 23. Rekomendasi Tindak Lanjut IKSK Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar.....69
Tabel 24. Perbandingan target 2025 dan realisasi kinerja tahun 2025 IKSK Persentase sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan.....70
Tabel 25. Perbandingan realisasi kinerja IKSK Presentase sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan dengan target Renstra.....73
Tabel 26. Perbandingan realisasi kinerja IKSK Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan dengan UPT lainnya yang sejenis.....73
Tabel 27. Rekomendasi Tindak Lanjut IKSK Persentase Sampel PIRT Berisiko yang

Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan..... 74
Tabel 28. Perbandingan target 2025 dan realisasi kinerja tahun 2025 IKSK Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder.....76
Tabel 29. Perbandingan realisasi kinerja IKSK Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder dengan target Renstra..... 78
Tabel 30. Perbandingan realisasi kinerja IKSK Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder dengan UPT lainnya yang sejenis.....79
Tabel 31. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja..... 80
Tabel 32. Perbandingan target 2025 dan realisasi kinerja tahun 2025 IKSK Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan..... 81
Tabel 33. Perbandingan realisasi kinerja IKSK Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan dengan target Renstra.....83
Tabel 34. Perbandingan realisasi kinerja IKSK Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan dengan UPT lainnya yang sejenis..... 83
Tabel 35. Rekomendasi Tindak Lanjut IKSK Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan.....85
Tabel 36. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja..... 86
Tabel 37. Perbandingan target 2025 dan realisasi kinerja tahun 2025 IKSK Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (Termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan.....87
Tabel 38. Perbandingan realisasi kinerja IKSK Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan dengan target Renstra.....89
Tabel 39. Perbandingan realisasi kinerja IKSK Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan dengan UPT lainnya yang sejenis..... 89
Tabel 40. Rekomendasi Tindak Lanjut IKSK Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan..... 90
Tabel 41. Perbandingan target 2025 dan realisasi kinerja tahun 2025 IKSK Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.....93
Tabel 42. Pemenuhan target pemeriksaan dan kesesuaian tindak lanjut..... 93
Tabel 43. Perbandingan realisasi kinerja IKSK Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan dengan target Renstra.....96
Tabel 44. Perbandingan realisasi kinerja IKSK Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan dengan UPT lainnya yang sejenis..... 97
Tabel 45. Rekomendasi Tindak Lanjut IKSK Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan.....99
Tabel 46. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan..... 101
Tabel 47. Perbandingan target 2025 dan realisasi kinerja tahun 2025 IKSK Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan... 103
Tabel 48. Perbandingan realisasi kinerja IKSK Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan

yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan dengan target Renstra..... 103
Tabel 49. Perbandingan realisasi kinerja IKSK Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan dengan UPT lainnya yang sejenis..... 105
Tabel 50. Rekomendasi Tindak Lanjut IKSK Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan..... 107
Tabel 51. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan..... 108
Tabel 52. Perbandingan target 2025 dan realisasi kinerja tahun 2025 IKSK Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan..... 109
Tabel 53. Perbandingan realisasi kinerja IKSK Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan dengan target Renstra..... 111
Tabel 54. Perbandingan realisasi kinerja IKSK Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan dengan UPT lainnya yang sejenis..... 112
Tabel 55. Perbandingan target 2025 dan realisasi kinerja tahun 2025 IKSK Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar..... 114
Tabel 56. Perbandingan realisasi kinerja IKSK Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar dengan target Renstra..... 115
Tabel 57. Perbandingan realisasi kinerja IKSK Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar dengan UPT lainnya yang sejenis... 116
Tabel 58. Rekomendasi Tindak Lanjut IKSK Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar..... 117
Tabel 59. Perbandingan target 2025 dan realisasi kinerja tahun 2025 IKSK Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di Wilayah Kerja BPOM Palopo..... 119
Tabel 60. Perbandingan realisasi kinerja IKSK Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di Wilayah Kerja BPOM Palopo dengan target Renstra..... 122
Tabel 61. Perbandingan realisasi kinerja IKSK Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di Wilayah Kerja BPOM Palopo dengan UPT lainnya yang sejenis..... 122
Tabel 62. Rekomendasi Tindak Lanjut IKSK Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT..... 123
Tabel 63. Perbandingan target 2025 dan realisasi kinerja tahun 2025 IKSK Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium..... 125
Tabel 64. Perbandingan realisasi kinerja IKSK Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium..... 127
dengan target Renstra..... 127
Tabel 65. Perbandingan realisasi kinerja IKSK Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium..... 128
dengan UPT lainnya yang sejenis..... 128
Tabel 66. Penilaian Komponen Standar Kemampuan Laboratorium..... 129
Tabel 67. Rekomendasi Tindak Lanjut IKSK Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium..... 130
Tabel 68. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja..... 131
Tabel 69. Perbandingan target 2025 dan realisasi kinerja tahun 2025 IKSK Persentase Kab/Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kab/Kota Pangan Aman..... 133
Tabel 70. Perbandingan realisasi kinerja IKSK Persentase Kab/Kota yang Didampingi dalam

Pencapaian Kab/Kota Pangan Aman dengan target Renstra.....134
Tabel 71. Perbandingan realisasi kinerja IKSK Persentase Kab/Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kab/Kota Pangan Aman dengan UPT lainnya yang sejenis.....134
Tabel 72. Rekomendasi Tindak Lanjut IKSK Persentase Kab/Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kab/Kota Pangan Aman.....136
Tabel 73. Perbandingan target 2025 dan realisasi kinerja tahun 2025 IKSK Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan..... 138
Tabel 74. Perbandingan realisasi kinerja IKSK Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.....139
dengan target Renstra..... 139
Tabel 75. Perbandingan realisasi kinerja IKSK Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.....140
dengan UPT lainnya yang sejenis.....140
Tabel 76. Rekomendasi Tindak Lanjut IKSK Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.....141
Tabel 77. Perbandingan target 2025 dan realisasi kinerja tahun 2025 IKSK Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja BPOM di Palopo.. 142
Tabel 78. Perbandingan realisasi kinerja IKSKTingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja BPOM di Palopo.....144
dengan target Renstra..... 144
Tabel 79. Rekomendasi Tindak Lanjut IKSK Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja BPOM di Palopo.....146
Tabel 80. Perbandingan target 2025 dan realisasi kinerja tahun 2025 IKSK Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan..... 147
Tabel 81. Perbandingan realisasi kinerja IKSK Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan dengan target Renstra..... 150
Tabel 82. Rekomendasi Tindak Lanjut IKSK Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan..... 152
Tabel 83. Kegiatan Program Desa Pangan Aman..... 154
Tabel 84. Perbandingan target 2025 dan realisasi kinerja tahun 2025 IKSK Jumlah Desa Pangan Aman..... 154
Tabel 85. Perbandingan realisasi kinerja IKSK Jumlah Desa Pangan Aman..... 155
Tabel 86. Perbandingan realisasi kinerja IKSK Desa Pangan Aman dengan target Renstra.... 155
Tabel 87. Perbandingan realisasi kinerja IKSK Jumlah Desa Pangan Aman..... 156
dengan UPT lainnya yang sejenis.....156
Tabel 88. Rekomendasi Tindak Lanjut IKSK Jumlah Desa Pangan Aman..... 157
Tabel 89. Perbandingan target 2025 dan realisasi kinerja tahun 2025 IKSK Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas..... 158
Tabel 90. Perbandingan realisasi kinerja IKSK Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dengan target Renstra..... 160
Tabel 91. Rekomendasi Tindak Lanjut IKSK Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas 162
Tabel 92. Tahapan Pendampingan UMKM Pangan Olahan.....166
Tabel 93. Tahapan Pendampingan UMKM Obat Bahan Olahan.....167
Tabel 94. Tahapan Pendampingan UMKM Obat Bahan Olahan.....168
Tabel 95. Perbandingan target 2025 dan realisasi kinerja tahun 2025 IKSK Persentase

UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan..... 169
Tabel 96. Target output pendampingan UMKM Tahun 2025 Balai POM di Palopo..... 170
Tabel 97. Jumlah sertifikat Cara Pembuatan yang Baik yang terbit di tahun 2025 dan target UMK yang didampingi selama 2025 - 2029..... 170
Tabel 98. Perbandingan realisasi kinerja IKSK Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan dengan target Renstra..... 171
Tabel 99. Perbandingan realisasi kinerja IKSK Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahandengan UPT lainnya yang sejenis..... 172
Tabel 100. Rekomendasi Tindak Lanjut IKSK Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan..... 173
Tabel 101. Perbandingan target 2025 dan realisasi kinerja Tahun 2025 IKSK Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT..... 175
Tabel 102. Perbandingan realisasi kinerja IKSK Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT dengan target Renstra..... 176
Tabel 103. Rekomendasi Tindak Lanjut IKSK Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di BPOM di Palopo..... 178
Tabel 104. Perbandingan target 2025 dan realisasi kinerja Tahun 2025 IKSK Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar..... 180
Tabel 105. Perbandingan realisasi kinerja IKSK Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar dengan target Renstra..... 181
Tabel 106. Rekomendasi Tindak Lanjut IKSK Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar..... 183
Tabel 107. Bobot Aspek Indeks Pelayanan Publik..... 184
Tabel 108. Perbandingan target 2025 dan realisasi kinerja tahun 2025 IKSK Indeks Pelayanan Publik..... 184
Tabel 109. Perbandingan realisasi kinerja IKSK Indeks Pelayanan Publik dengan target Renstra..... 185
Tabel 110. Rekomendasi Tindak Lanjut IKSK Indeks Pelayanan Publik..... 187
Tabel 111. Rekomendasi Tindak Lanjut IKSK Indeks Pelayanan Publik..... 187
Tabel 112. Rekomendasi Tindak Lanjut IKSK Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM di Palopo.... 189
Tabel 113. Perbandingan target 2025 dan realisasi kinerja tahun 2025 Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM di Palopo..... 189
Tabel 114. Perbandingan target 2025 dan realisasi kinerja tahun 2025 IKSK Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM di Palopo..... 190
Tabel 115. Perbandingan realisasi kinerja IKSK Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM di Palopo dengan target Renstra..... 192
Tabel 116. Perbandingan target 2025 dan realisasi kinerja tahun 2025 IKSK Nilai AKIP BPOM di Palopo..... 194
Tabel 117. Perbandingan target 2025 dan realisasi kinerja tahun 2025 IKSK Nilai AKIP BPOM di Palopo..... 196
Tabel 118. Perbandingan target 2025 dan realisasi kinerja tahun 2025 IKSK Nilai AKIP BPOM di Palopo..... 196

Tabel 119. Perbandingan realisasi kinerja IKSK Nilai AKIP dengan target Renstra..... 196
Tabel 120. Rekomendasi Tindak Lanjut IKSK Nilai AKIP BPOM di Palopo..... 204
Tabel 121. Perbandingan target 2025 dan realisasi kinerja tahun 2025 IKSK Nilai Kinerja Anggaran BPOM di Palopo..... 208
Tabel 122. Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Palopo Tahun 2025..... 209
Tabel 123. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Balai POM di Palopo Tahun 2025..... 211
Tabel 124. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai POM di Palopo Tahun 2025..... 212
Tabel 125. Perbandingan realisasi kinerja IKSK Nilai Kinerja Anggaran dengan target Renstra..... 213
Tabel 126. Rekomendasi Tindak Lanjut IKSK Nilai Kinerja Anggaran..... 215
Tabel 127. Daftar Risiko Semester I Tahun 2025 Balai POM di Palopo..... 217
Tabel 128. Daftar Tambahan Risiko Semester I Tahun 2025 Balai POM di Palopo..... 226
Tabel 129. Rencana Tindak Pengendalian Manajemen Risiko Tahun 2025 Balai POM di Palopo..... 227
Tabel 130. Perbandingan target 2025 dan realisasi kinerja tahun 2025 IKSK Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM..... 229
Tabel 131. Perbandingan Target 2025 Dengan Tahun-Tahun Sebelumnya IKSK Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM..... 229
Tabel 132. Perbandingan realisasi kinerja IKSK Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM dengan target Renstra..... 230
Tabel 133. Penerapan Manajemen Risiko pada Balai POM di Palopo..... 233
Tabel 134. Rekomendasi Tindak Lanjut IKSK Penerapan Manajemen Risiko Balai POM di Palopo..... 233
Tabel 135. Tindak Lanjut Rencana Tindak Pengendalian Manajemen Risiko Tahun 2025 Balai POM di Palopo..... 234
Tabel 136. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya..... 236
Tabel 137. Realisasi Kinerja Dibandingkan dengan Realisasi Anggaran pada Balai POM di Palopo Tahun 2025..... 253
Tabel 138. Realisasi Anggaran Per Sasaran Strategis beserta Capaiannya pada BPOM di Palopo Tahun 2025..... 256
Tabel 139. Realisasi Anggaran Per Kegiatan Beserta Capaiannya pada Balai POM di Palopo Tahun 2025..... 259
Tabel 140. Tingkat Efisiensi..... 262
Tabel 141. Tingkat Efisiensi Kegiatan..... 262
Tabel 142. Perhitungan Pengukuran Efisiensi..... 264

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki peran penting dalam memastikan bahwa semua produk obat dan makanan yang beredar di pasar Indonesia aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu untuk dikonsumsi masyarakat. Dalam menjalankan perannya, BPOM mengemban fungsi strategis dalam sistem kesehatan nasional. Lembaga ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap produk yang beredar di pasar telah melalui evaluasi keamanan, mutu, dan efikasi yang ketat. Hal ini tidak hanya melindungi kesehatan masyarakat tetapi juga mendukung kepercayaan konsumen terhadap produk obat dan makanan yang tersedia di pasar. Dalam Renstra BPOM 2025-2029, BPOM telah melakukan identifikasi potensi dan permasalahan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan, dan potensi yang akan dihadapi BPOM dalam rangka melaksanakan penugasan RPJMN 2025-2029.

Tugas, fungsi, dan kewenangan BPOM diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan peraturan tersebut BPOM bertugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Obat dan Makanan dimaksud terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat bahan alam, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

BPOM di Palopo sebagai Unit Pelaksana Teknis BPOM melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan melalui empat pilar kegiatan yaitu:

- Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (*pre-market*) melalui: inspeksi sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan; penguatan kapasitas laboratorium;
- Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (*post-market*) melalui: sampling dan pengujian; pengawasan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui Komunikasi Informasi dan Edukasi Obat dan Makanan kepada masyarakat dan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk, serta kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan, masyarakat dan berbagai pihak/lembaga lainnya; dan
- Penegakan hukum melalui penyidikan tindak pidana di bidang Obat dan Makanan.

Laporan Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palopo disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan serta sebagai media evaluasi capaian kinerja BBPOM di Semarang dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis BPOM Tahun 2025–2029.

1.2 Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, Balai POM di Palopo merupakan UPT BPOM yaitu satuan kerja bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Kedudukan Balai POM di Palopo berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, dipimpin oleh seorang Kepala yang secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama. Wilayah pengawasan Balai POM di Palopo terdiri dari 7 kab/kota yang meliputi Kota Palopo, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Tana Toraja, dan Kabupaten Enrekang.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan, Balai POM di Palopo mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan dalam melaksanakan tugasnya, UPT BPOM menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
e. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
g. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;

h. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
i. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
j. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
k. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
l. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan

1.3 Struktur Organisasi



Gambar 1. Struktur Organisasi Balai POM di Palopo

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 1 tahun 2023 tentang Pedoman Sistem Kerja pada Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka Balai Besar POM di Surabaya telah melaksanakan sistem kerja berdasarkan Permenpan RB nomor 6 tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN dan Permenpan RB nomor 7 tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi. Berdasarkan hal

tersebut, maka hanya ada 2 pejabat yaitu pejabat administrator (Kepala Balai POM di Palopo) dan pejabat pengawas (Kepala Sub Bagian Tata Usaha). Untuk pembagian kerja dari Kepala UPT, maka dibentuk ketua tim dan anggota tim yang merupakan pejabat fungsional. Terdapat 8 orang ketua tim kerja di Balai Besar POM di Surabaya yang mengawal pencapaian 28 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala UPT.

1.4 Isu Strategis

Beberapa isu strategis yang berpengaruh pada kinerja Balai POM di Palopo antara lain:

1. **Sistem dan Regulasi Pengawasan yang menjamin Kedudukan Balai POM di Palopo**

   BPOM dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan Organisasi dan tata kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan Peraturan Perundang Undangan tersebut, BPOM melaksanakan Tugas pemerintah di bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Pengawasan Obat dan Makanan merupakan bagian integral dari upaya pembangunan kesehatan di Indonesia.

   Balai POM di Palopo sebagai Unit Pelaksana Teknis di daerah melakukan pengawasan full spectrum terhadap Obat dan Makanan melalui pendekatan menyeluruh yang mencakup pengawasan pada seluruh tahap siklus hidup produk Obat dan Makanan, mulai dari produksi (pre-market), distribusi (post-market control) yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat (community empowerment). Balai POM di Palopo diberi kewenangan yang bersumber dari kerangka regulasi yang jelas sebagai landasan yang kuat dalam menjalankan tugas pengawasan obat dan makanan di Indonesia. Kewenangan ini tidak hanya memberikan Balai POM di Palopo kekuatan untuk mengatur dan mengawasi, tetapi juga mengimplementasikan kebijakan yang sesuai untuk melindungi kesehatan masyarakat. Kapasitas regulasi dan pengawasan ini memungkinkan Balai POM di Palopo untuk secara efektif melakukan inspeksi dan evaluasi produk, memastikan bahwa setiap obat dan makanan yang beredar di pasaran telah memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ditetapkan. Kapasitas ini bukan hanya memperkuat posisi Balai POM di Palopo dalam ekosistem kesehatan masyarakat tetapi juga menegaskan komitmen lembaga terhadap perlindungan konsumen. Dengan penguatan terus-menerus dari kerangka regulasi dan pengawasan, Balai POM di Palopo

memastikan bahwa kebijakan dan prosedur pengawasan tetap relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan baru yang muncul di bidang Obat dan Makanan.

2. **Kompetensi SDM Balai POM di Palopo yang berkompeten pada jabatannya**
   Balai POM di Palopo didukung oleh para profesional yang menunjukkan dedikasi dan komitmen tinggi dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi, dengan tujuan utama menjaga keamanan Obat dan Makanan bagi masyarakat. Melalui berbagai program pengembangan kapasitas , seperti pelatihan teknis, bimbingan teknis, sertifikasi kompetensi dan kegiatan transfer of knowledge terus secara berkesinambungan terus ditingkatkan agar selaras dengan kebutuhan organisasi. Dengan pengetahuan teknis mendalam dan keterampilan analitis yang modern, serta nilai-nilai integritas, profesioanlisme dan adaptasi dalam bekerja kualitas sumber daya manusia di Balai POM di Palopo mencerminkan standar tinggi di bidangnya.
3. **Kelembagaan Balai POM di Palopo yang terstandarisasi**
   Penerapan ISO 9001 pada Balai POM di Palopo memberikan kekuatan bagi organisasi melalui peningkatan kepuasan pelanggan, efisiensi operasional, dan keunggulan kompetitif. Standar ini mendorong budaya perbaikan berkelanjutan, menjamin kualitas produk dan proses yang konsisten, serta meningkatkan reputasi dan kepercayaan pelanggan. Selain itu, ISO 9001 juga dapat memperkuat hubungan dengan pemangku kepentingan dan memberikan landasan strategis untuk pertumbuhan jangka panjang.
4. **Dukungan Anggaran dan Teknologi Informasi yang memadai**
   Dengan dukungan anggaran dari APBN tentunya membuat Balai POM di Palopo dapat melakukan tugas dan fungsi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dengan optimal. Dukungan anggaran memberikan dukungan operasional serta menunjang menunjang pencapaian tujuan program dan kegiatan pemerintah, serta meningkatkan efektivitas pembangunan nasional. Selain itu dengan dukungan Tekonologi Informasi berupa Alat pengolah data, fasilitas jaringan internet, serta penerapan Sistem Informasi berbasis online yang tentunya membuat pengawasan menjadi lebih efektif dan memadai.
5. **Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pengujian dan Perkantoran yang belum memadai**
   BPOM Palopo sebagai Unit Pelaksana teknis dalam menjalankan tugas dan fungsinya belum dibekali sarana dan prasarana pengujian yang memadai dikarenakan BPOM di Palopo belum memiliki bangunan permanent berstatus BMN. Sarana dan prasarana masih dibekali dalam bentuk sewa perkantoran oleh

pihak ketiga sehingga keterbatasan dalam melakukan pemenuhan standar sarana dan prasarana kantor pelayanan publik dan sarpras pengujian.

6. **Pemenuhan Kebutuhan Pegawai berbasis Beban Kerja yang belum terpenuhi**

   Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan POM perlu perkuatan SDM Balai POM di Palopo baik dari kualitas maupun kuantitas SDM yang memadai dengan kompetensi serta kualifikasi yang sesuai dengan tantangan pengawasan Obat dan Makanan. Saat ini pemenuhan ABK BPOM di Palopo masih berada diangka 70% sehingga masih terdapat GAP untuk melakukan tugas dan fungsi secara optimal

7. **Dukungan Stakeholder sebagai pemangku kepentingan dalam menjalankan fungsi pengawasan Obat dan Makanan**

   Dalam pelaksanaan program-program Pengawasan Obat dan Makanan perlu adanya koordinasi lintas sektor dan tata hubungan kerja untuk efektivitas kinerja pengawasan obat dan makanan oleh karena itu diperlukan kerjasama dan kemitraan dengan lintas sektor sebagai upaya meningkatkan sinergitas dan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palopo dari hulu ke hilir. Untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari penyalahgunaan obat dan bahan berbahaya dalam Obat dan Makanan perlu dilakukan peningkatan koordinasi pembinaan dan pengawasan Obat dan Makanan di daerah. Peluang Balai POM di Palopo untuk mengembangkan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, institusi akademik serta pemerintah daerah dan suprasistem menyediakan akses yang lebih luas ke sumber daya yang beragam serta berbagai inovasi terkini. Kemitraan dengan universitas dapat memfasilitasi penelitian bersama yang menghasilkan wawasan baru tentang pengawasan Obat dan Makanan, sementara kolaborasi dengan pemerintah daerah sebagai tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan dengan koordinasi dimaksud yaitu mengkoordinasikan tugas teknis pembinaan dan pengawasan Obat dan Makanan, mengkoordinasikan pengawasan bahan berbahaya yang disalahgunakan pada Obat dan Makanan

8. **Dukungan sekaligus tuntutan masyarakat terhadap kinerja Balai POM di Palopo dalam menjalankan pengawasan Obat dan Makanan**

   Meningkatnya kesadaran dan ekspektasi masyarakat terhadap keamanan, mutu dan manfaat Obat dan Makanan menjadi peluang strategis Balai POM di Palopo untuk memperkuat peran sebagai UPT pada lembaga pengawas Obat dan Makanan. Tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap pelayanan

yang cepat, transparan dan akuntabel mendorong Balai POM di Palopo untuk terus berinovasi dalam system pengawasan dan pelayanan. Fenomena ini dapat dimanfaatkan sebagai momentum untuk memperluas jangkauan edukasi dan sosialisasi, penngembangan system pelayanan berbasis digital, serta memperkuat kemitraan dengan lintas sektor dalam mendukung pengawasan terpadu. Semakin tinggi tuntutan publik terhadap kualitas layanan, semakin besar pula peluang bagi Balai POM di Palopo untuk menunjukkan kinerja optimal yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.

9. **Dukungan Perkembangan Teknologi Informasi dalam memberikan Pelayanan Prima kepada Masyarakat**

   Perkembangan teknologi yang semakin pesat tidak hanya dipandang sebagai ancaman dalam pelanggaran terkait distribusi sediaan farmasi dan pangan olahan namun juga dapat dijadikan sebagai peluang untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Perkembangan tekonologi yang menghilangkan batas tentunya akan lebih mendekatkan BPOM Palopo dengan masyarakat yang dilayani. Adanya perkembangan tekonologi dengan dukungan analisa kebutuhan masyarakat tentunya akan membantu dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

10. **Kesadaran Masyarakat akan pola konsumsi Sediaan Farmasi dan Pangan olahan yang aman masih belum sepenuhnya baik**

    Kesadaran masyarakat yang kurang akan menimbulkan efek permintaan terhadap produk-produk yang tidak aman untuk dikonsumsi. Selain merugikan diri sendiri kurangnya kesadaran dengan adanya permintaan terhadap produk-produk yang tidak aman tentunya akan membuat pelaku kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan akan tetap memproduksi produk yang tidak aman tersebut.

11. **Kepatuhan Pelaku Usaha terhadap peraturan terkait distribusi dan produksi Obat dan Makanan yang belum optimal**

    Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk Obat dan Makanan pada dasarnya merupakan kewajiban dari pelaku usaha. Untuk itu pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai regulator dalam rangka perlindungan masyarakat. Pelaku usaha mempunyai peran dalam memberikan jaminan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat (aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu) dimulai dari proses produksi yang sesuai dengan ketentuan. Asumsinya, pelaku usaha memiliki kemampuan teknis dan

finansial untuk memelihara sistem manajemen risiko secara mandiri. Dari sisi pemerintah, BPOM bertugas menyusun kebijakan dan regulasi terkait Obat dan Makanan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dan mendorong penerapan Risk Management Program oleh industri. Peningkatan kapasitas dan komitmen pelaku usaha diasumsikan akan berkontribusi pada peningkatan daya saing Obat dan Makanan. Kepatuhan adalah suatu bentuk keberterimaan dalam melaksanakan berbagai aktivitas yang bersifat profit/nonprofit sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundanganundangan yang berlaku terkait dengan Obat dan Makanan, sementara yang dimaksud dengan pelaku usaha obat dan makanan mencakup produsen, distributor, importir, eksportir, pemilik sarana produksi dan distribusi, pedagang besar dan kecil yang memproduksi dan atau memperjualbelikan obat dan makanan Balai POM di Palopo merupakan UPT BPOM yang menjalankan fungsi pengawasan post-market setelah produk beredar termasuk melakukan tindak lanjut pengawasan berupa pemberian sanksi administratif. Walaupun sudah diberlakukan kebijakan sanksi administratif namun pelanggaran di bidang obat dan makananmasih terus terjadi. Faktor kurangnya pengetahuan terhadap suatu peraturan memunculkan sikap dan keyakinan pada pelaku usaha bahwa yang dilakukannya bukanlah suatu pelanggaran terhadap peraturan. Hal ini dikarenakan pengetahuan dan persepsi yang ada pada diri pelaku usaha yang mendasari munculnya suatu sikap dan keyakinan pada diri nya, adanya permintaan dari banyak konsumen merupakan peluang untuk dapat menaikkan penjualan sehingga berpengaruh positif pada pendapatan perusahaan, Ketidakpedulian terhadap peraturan ini dimanifestasikan dalam perilaku malas dan faktor kesibukan pada pekerjaan lain.

12. **Kemajuan Tekonologi yang sejalan dengan dinamisnya modus operandi kejahatan Obat dan Makanan**

    Kemajuan teknologi informasi secara signifikan memengaruhi dinamika modus operandi kejahatan Obat dan Makanan. Para pelaku kejahatan kini memanfaatkan kemudahan era digital, terutama penjualan daring, untuk mendistribusikan produk ilegal secara luas dan cepat.

13. **Akses Transportasi ke beberapa daerah pengawasan yang belum memadai**

    Dalam wilayah kerja BPOM Palopo masih terdapat daerah pengawasan yang akses transportasinya belum memadai. Hal ini tentunya akan menjadi kendala tersendiri untuk melakukan pengawasan pada daerah tersebut.

14. **Meningkatnya risiko insiden KLB Keracunan Pangan karena pemberian MBG**

Dalam implementasi Program MBG di Provinsi Sulawesi Selatan, salah satu ancaman strategis yang perlu diantisipasi adalah meningkatnya risiko terjadinya insiden/Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLB KP). Program ini melibatkan rantai yang panjang dan kompleks, mulai dari penerimaan bahan baku, proses produksi, hingga distribusi ke penerima manfaat. Skala yang besar dengan pemenuhan standar produksi pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan rantai distribusi yang belum seragam di seluruh wilayah berpotensi meningkatkan kerentanan terhadap insiden keamanan pangan/KLB KP. Insiden keamanan pangan/KLB KP dapat terjadi akibat kontaminasi dari pengolahan pangan yang tidak higienis, penyimpanan atau penanganan pangan yang tidak sesuai standar. Selain berdampak langsung terhadap penerima manfaat, insiden semacam ini dapat menimbulkan implikasi sosial yang luas, seperti turunnya tingkat kepercayaan publik, terganggunya proses pembelajaran, hingga berkurangnya legitimasi program MBG sebagai salah satu agenda prioritas nasional. Dalam kerangka pembangunan jangka menengah, isu ini tidak hanya menjadi tantangan teknis, tetapi juga ancaman strategis terhadap ketahanan program MBG itu sendiri. Oleh karena itu, Balai POM di Palopo sebagai UPT Badan POM memiliki peran vital dalam mengawal keamanan dan mutu pangan pada program MBG melalui strategi pengawasan yang sistematis, terintegrasi, dan berbasis risiko.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Uraian Singkat RENSTRA

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2025-2029, maka BPOM telah menetapkan Visi dan Misi sebagai berikut:



Gambar 2. Visi dan Misi

Visi ini mencerminkan dedikasi BPOM dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional. Visi BPOM untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi tersebut:

1. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman**, keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama BPOM. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar

kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.

2. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu**, BPOM berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.
3. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing**, BPOM mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.
4. **Masyarakat Sehat**, tujuan akhir dari semua upaya BPOM adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi). Terkait pangan olahan bergizi, konteks pengawasan yang dilakukan BPOM menekankan pada pentingnya pencantuman informasi nilai gizi pada label/kemasan pangan sebelum beredar, pengawasan label setelah produk beredar, serta yang tidak kalah penting adalah edukasi dan kampanye terkait pangan aman dan bergizi. Untuk memudahkan penyampaian informasi nilai gizi tersebut ke masyarakat ke depan BPOM akan menerapkan kebijakan yang mendorong pola konsumsi pangan sehat dengan mencantumkan informasi gizi pada bagian depan label / Front of Pack Nutrition Labelling (FOPNL). BPOM berupaya menyeimbangkan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dan mendorong industri pangan untuk menghasilkan produk yang aman dan bergizi. Hal ini menjadi langkah strategis yang diharapkan mampu berkontribusi dalam menurunkan angka penyakit tidak menular yang banyak dipicu oleh konsumsi GGL berlebih, serta mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat di Indonesia.

2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Untuk mewujudkan perencanaan yang selaras antara Renstra 2025-2029 dengan penyusunan anggaran, maka sebelum penyusunan anggaran maka disusunlah Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025 sebagai dasar penyusunan anggaran tahun 2025.

Tabel 1. Rencana Kinerja Tahunan 2025 Balai POM di Palopo

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26
		Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100
		Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
2	Meningkatnya tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas sektor	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	100
3	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	100
4	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
5	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	14
6	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	94.40
		Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	4

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
		Jumlah desa pangan aman	1
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
7	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	82
8	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	100
9	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT	14
10	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.51
11	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	75
		Nilai AKIP UPT BPOM	81.81
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	90
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3.2

2.3 Perjanjian Kinerja (PK)

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel yang berorientasi hasil, Kepala Balai POM di Palopo menandatangani Perjanjian Kinerja tahun 2025 untuk mencapai target seperti yang telah tertuang dalam Rencana Strategis Balai POM di Palopo Tahun 2025-2029 dan DIPA Balai POM di Palopo. Perjanjian Kinerja wajib disusun sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014, sehingga Balai POM di Palopo sebagai Unit pelaksana teknis BPOM harus menyusun Perjanjian Kinerja antara Kepala Balai Besar di Palopo dengan Kepala BPOM untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas dan kinerja pemerintahan. Perjanjian Kinerja juga digunakan pimpinan untuk memantau

dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja dan sebagai acuan menilai keberhasilan organisasi.

Berdasarkan Surat Sekretaris Utama Nomor B-PR.07.2.02.25.91 perihal Penetapan PK dan RAPK 2025 Unit Kerja di Lingkungan BPOM Tahun 2025, di dalam surat tersebut termuat bahwa untuk Tahun 2025 secara teknis ditetapkan pada Aplikasi Simetris melalui proses review dokumen dari Biro Perencanaan dan Keuangan. Tahun 2025 sebagai awal RENSTRA periode 2025-2029 ada terdapat 9 Sasaran kegiatan dan 25 indikator Kinerja Sasaran Kegiatan, jumlah Sasaran Kegiatan, Indikator Kegiatan serta target berbeda dengan RKT karena RKT disusun di Tahun 2024 mengacu ranwal renstra sebagai dasar penyusunan Anggaran 2025 sedangkan pada penyusunan PK 2025 penetapan target dimutakhirkan dengan rancangan RENSTRA dan hasil kinerja 2024.

Berdasarkan Nota Dinas dari Sekretaris Utama Badan POM nomor PR.07.2.08.25.451 tanggal 14 Agustus 2025 perihal Permintaan Revisi PK dan RAPK 2025. Sehubungan dengan proses pemutakhiran Rencana Strategis BPOM 2025-2029 yang mengakibatkan adanya perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran maka berdasarkan ketentuan Keputusan Kepala BPOM Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BPOM perlu dilakukan revisi terhadap dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2025.

Karena hal tersebut maka dilakukan perubahan/ Revisi PK 2025 terkait:

1. Adanya tambahan 3 (tiga) indikator kinerja yaitu:
   - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar;
   - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT; dan
   - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman.
2. Perubahan Alokasi anggaran DIPA tahun 2025.
3. perubahan target indikator yang mengacu pada hasil kesepakatan desk pemutakhiran target tanggal 25-26 Juni 2025.
4. Indikator yang seluruh anggaran terdampak blokir penetapan target hanya di B12.
5. Target RAPK B1-B7 tetap mengacu dokumen RAPK awal.
6. Indikator yang mengalami perubahan Manual IKU terutama terkait cara perhitungan seluruhnya dilakukan perhitungan ulang untuk Triwulan I dan II

berdasarkan Manual IKU baru agar capaian kinerja TW III dapat dibandingkan.Indikator yang mengalami perubahan perhitungan yaitu:

a. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
b. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kosmetik yang baik da0tau IP CPPOB pangan olahan

7. Perubahan jumlah sasaran kegiatan yang awalnya ada 9 (Sembilan) menjadi 8 (delapan (delapan) Sasaran kegiatan yaitu pada Sasaran Kegiatan Menguatnya laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, sedangkan untuk indikator yang mendukung sasaran kegiatan tersebut masuk ke dalam sasaran kegiatan Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Perjanjian Kinerja memuat sasaran strategis yang seharusnya terwujud pada tahun 2025 dengan indikator kinerja yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan serta target kinerja yang akan dicapai oleh Balai POM di Palopo.

Tabel 2. Revisi Perjanjian Kinerja Balai POM di Palopo

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	83 Persen
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26 Persen
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75 Persen
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100 Persen
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91 Persen
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	91.7 Persen
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80 Persen
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persen
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90 Persen

		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80 Persen
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	90.6 Persen
		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	91 Persen
		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100 Persen
		Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	14 Nilai
		Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	14.29 Persen
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	67 Persen
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	85.01 Nilai
		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	4 Nilai
		Jumlah desa pangan aman	1 Nilai
		Jumlah pasar panga naman berbasis komunitas	1 Nilai
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	13.04 Persen
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	95
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90 Persen
7	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.2 Nilai
8	Terwujudnya tata Kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	71 Nilai
No.	Kegiatan :		Anggaran :

1	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	2.927.817.000
2	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	3.867.983.000

2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

Sebagai bentuk evaluasi terhadap Perjanjian Kinerja disusunlah Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) yaitu dengan menentukan target setiap bulan atau sesuai dengan yang tertuang di manual IKU. Capaian realisasinya selalu dilakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan melalui Bit.ly.capaian kinerja UPT, dan setiap Triwulan melalui aplikasi e-*performance* yang terhubung dengan SIMAKIN terkait capaian kinerja Kepala Balai.

Pada bulan Agustus dilakukan revisi RAPK berdasarkan Nota Dinas dari Sekretaris Utama terkait:

- Perubahan target indikator yang mengacu pada hasil kesepakatan desk pemutakhiran target tanggal 25-26 Juni 2025;
- Target RAPK B1-B7 tetap mengacu dokumen RAPK awal
- Indikator yang mengalami perubahan Manual IKU terutama terkait cara perhitungan seluruhnya dilakukan perhitungan ulang untuk Triwulan I dan II berdasarkan Manual IKU baru agar capaian kinerja TW III dapat dibandingkan; dan
- Perubahan jumlah sasaran kegiatan yang awalnya ada 9 (Sembilan) menjadi 8 (delapan).

Adapun dokumen RAPK revisi BPOM Palopo dapat dilihat sebagaimana terlampir pada lampiran

2.5 Metode Pengukuran

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 676 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Surat Edaran Nomor PR.09.01.2.03.25.10 Tahun 2025 Tentang Pengukuran dan Pelaporan Kinerja Unit/Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas, dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk mewujudkan organisasi yang akuntabel. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja termasuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dan disahkan.

Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/ semesteran) dan tahunan sesuai tipe Indikator Kinerja untuk kinerja level organisasi dan level satker/unit kerja. Setiap Indikator Kinerja memiliki cara dan periode pengukuran yang berbeda, yang dituangkan dalam Manual Indikator Kinerja. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengukuran kinerja yaitu:

1. Capaian Indikator Kinerja

   Capaian indikator kinerja merupakan perbandingan antara realisasi dan target setiap indikator kinerja dengan memperhitungkan polarisasi indikator kinerja.

   Penetapan capaian indikator kinerja dilakukan sesuai ketentuan sebagai berikut:

   a. Normalisasi capaian perjanjian kinerja
      1) Jika capaian kinerja setiap indikator >110% maka akan dinormalisasi menjadi 110%; dan
      2) Jika capaian kinerja setiap indikator ≤110% maka tidak dilakukan normalisasi.
   b. Capaian indikator kinerja dinyatakan dalam kategori sebagai berikut:

Tabel 3. Kategori Capaian Indikator Kinerja

Kategori	Capaian IK	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	>110%	
Sangat Baik	100% < x ≤ 110%	
Baik	90% < x ≤ 100%	
Cukup	60% ≤ x ≤ 90%	
Kurang	<60%	

2. Mekanisme Pengukuran Kinerja

   Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan secara berjenjang dengan tahapan sebagai berikut:

   a) Melakukan perhitungan dan mendokumentasikan data mentah (Raw Data) dengan tertib.
   b) Menghitung Realisasi Indikator Kinerja.
   c) Memasukkan data realisasi indikator kinerja pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kinerja Terintegrasi (SIMETRIS) menu e-Performance melalui tautan:

https://simetris.pom.go.id/eperformance_new. Data realisasi indikator kinerja yang diinput pada aplikasi SIMETRIS merupakan data final hasil evaluasi internal dan digunakan dalam penyusunan laporan evaluasi internal, sehingga tidak terdapat perbedaan data realisasi indikator kinerja.

d) Pimpinan Unit Kerja/Satker melakukan validasi data untuk memastikan bahwa data yang diinput:
   1) valid, yakni diukur menggunakan alat ukur yang tepat, sesuai dengan manual indikator kinerja;
   2) reliable, yakni meskipun diukur berulang-ulang hasilnya tetap konsisten; dan
   3) obyektif, yakni bebas dari intervensi/kepentingan.

e) Biro Perencanaan dan Keuangan melakukan verifikasi data, informasi dan kelengkapan dokumen pendukung hasil pengukuran kinerja sesuai dengan manual indikator kinerja melalui aplikasi SIMETRIS.

B. Nilai Kinerja Organisasi

1) Jenis Nilai Kinerja Organisasi

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) di lingkungan BPOM terdiri dari:

a) NKO Periodik

NKO periodik merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja secara triwulanan. NKO periodik dihitung dari total capaian indikator perjanjian kinerja periodik tertentu yang telah dinormalisasi dibagi dengan jumlah indikator kinerja yang memiliki capaian kinerja pada periode tersebut.

b) NKO Tahunan

NKO tahunan merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja pada akhir tahun anggaran. NKO tahunan digunakan untuk menetapkan sebaran (pola distribusi) predikat kinerja tahunan pegawai.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BIrokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi, NKO tahunan terdiri dari 2 komponen yaitu:

1. Capaian Perjanjian Kinerja

   Capaian perjanjian kinerja merupakan hasil pengukuran terhadap kinerja unit/satuan kerja setiap tahunnya yang dituangkan dalam laporan kinerja.

2. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga merupakan hasil evaluasi yang diterbitkan oleh Kementerian PAN RB setiap tahunnya kepada seluruh Instansi Pemerintah. Sementara hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada Entitas Akuntabilitas Kinerja dalam Kementerian/Lembaga (satuan kerja) diterbitkan oleh inspektorat/unit kerja yang ditunjuk sebagai evaluator internal Instansi Pemerintah.

Predikat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah menjadi faktor koreksi besaran capaian perjanjian kinerja yang disampaikan melalui laporan kinerja. Semakin tinggi predikat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah menunjukkan bahwa manajemen kinerja organisasi semakin baik, sehingga semakin tinggi pula capaian perjanjian kinerja yang diakui. Sebaliknya, semakin rendah predikat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah semakin rendah pula capaian perjanjian kinerja yang diakui sebagaimana yang tertera pada tabel berikut.

Tabel 4. Koreksi Capaian PK Berdasarkan Predikat AKIP

Predikat AKIP	Koreksi Capaian PK setelah Normalisasi
AA	0%
A	
BB	10%
B	15%
CC	20%
C	30%
DD	

3. Nilai Akhir Capaian Perjanjian Kinerja

   Nilai akhir capaian perjanjian kinerja merupakan hasil perkalian nilai normalisasi capaian perjanjian kinerja dengan hasil pengurangan 100% dengan nilai koreksi capaian perjanjian kinerja berdasarkan predikat AKIP, dikalikan 100.

Nilai Akhir: {(1)x[(100%-(2)]x100)

4. Total Capaian Perjanjian Kinerja

   Total capaian perjanjian kinerja merupakan hasil penjumlahan seluruh nilai akhir capaian perjanjian kinerja pada setiap indikator kinerja.

5. Nilai Kinerja Organisasi

   Nilai kinerja organisasi merupakan hasil penghitungan dari total capaian perjanjian kinerja dibagi dengan jumlah indikator kinerja (rata-rata).

2) Predikat Nilai Kinerja Organisasi

Hasil NKO dikelompokan menjadi 5 (lima) predikat, yaitu 1) Sangat Kurang; 2) Kurang; 3) Butuh Perbaikan; 4) Baik; dan 5) Istimewa dengan rincian sesuai tabel berikut.

Tabel 5. Predikat NKO

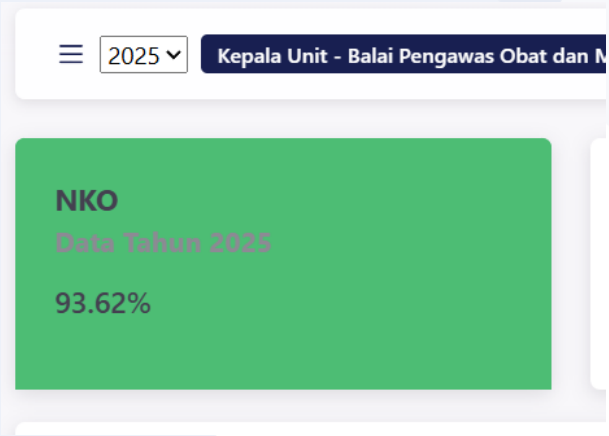
Predikat NKO	Nilai Kinerja Organisasi (NKO)	Notifikasi Warna
Istimewa	>110%	
Baik	80% < x ≤ 100%	
Butuh Perbaikan	60% < x ≤ 80%	
Kurang	20% < x ≤ 60%	
Sangat Kurang	0% ≤ x ≤ 20%	

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2025 dihitung dari total capaian indikator perjanjian kinerja Tahun 2025 yang telah dinormalisasikan dibagi dengan jumlah indikator kinerja yang memiliki capaian kinerja pada Tahun 2025. Selanjutnya NKO digunakan untuk menetapkan sebaran pola distribusi predikat kinerja periodik pegawai.

Predikat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah menjadi faktor koreksi besaran capaian perjanjian kinerja yang disampaikan melalui laporan kinerja. Semakin tinggi predikat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah menunjukkan bahwa manajemen kinerja organisasi semakin baik, sehingga semakin tinggi pula capaian perjanjian kinerja yang diakui. Sebaliknya, semakin rendah predikat akuntabilitas kinerja



Instansi Pemerintah semakin rendah pula capaian perjanjian kinerja nilai NKO BPOM Palopo pada aplikasi simetris dengan capaian 93.62 dengan kategori BAIK. Hal ini dikarenakan karena Nilai AKIP BPOM Palopo masih berada pada predikat Sangat Baik BB, sehingga capaian realisasi terdapat koreksi penilaian sebesar 10%.

Tabel 6. Laporan Capaian Nilai Kinerja Organisasi BPOM di Palopo

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Predikat Capaian	Capaian Dinormalisasi	Bobot Nilai AKIP	Capaian Final
A									
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	83.00	100	120.48	Tidak Dapat Disimpulkan	110.00	90	99.00

2	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26.00	26.67	102.58	Sangat Baik	102.58	90	92.32
3	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75.00	100	133.33	Tidak Dapat Disimpulkan	110.00	90	99.00
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.00	100	109.89	Sangat Baik	109.89	90	98.90
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	91.70	91.7	100.00	Baik	100.00	90	90.00
6	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80.00	100	125.00	Tidak Dapat Disimpulkan	110.00	90	99.00
7	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	92.47	108.79	Sangat Baik	108.79	90	97.91
8	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90.00	93.37	103.74	Sangat Baik	103.74	90	93.37
9	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80.00	86.67	108.34	Sangat Baik	108.34	90	97.51

10	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	90.60	97.47	107.58	Sangat Baik	107.58	90	96.82
11	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	91.00	93.8	103.08	Sangat Baik	103.08	90	92.77
12	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100.00	103.96	103.96	Sangat Baik	103.96	90	93.56
13	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	14.00	15.19	108.50	Sangat Baik	108.50	90	97.65
14	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	14.29	14.29	100.00	Baik	100.00	90	90.00
15	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	67.00	67	100.00	Baik	100.00	90	90.00
16	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	85.01	86.14	101.33	Sangat Baik	101.33	90	91.20
17	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	4.00	4	100.00	Baik	100.00	90	90.00
18	Meningkatnya efektivitas KIE di	Jumlah desa pangan aman	1.00	1	100.00	Baik	100.00	90	90.00

	masing-masing wilayah kerja UPT								
19	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1.00	1	100.00	Baik	100.00	90	90.00
20	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	13.04	13.04	100.00	Baik	100.00	90	90.00
21	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	95.00	100	105.26	Sangat Baik	105.26	90	94.73
22	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90.00	99	110.00	Sangat Baik	110.00	90	99.00
23	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.20	4.7	111.90	Tidak Dapat Disimpulkan	110.00	90	99.00
24	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	71.00	70.29	99.00	Baik	99.00	90	89.10
25	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai AKIP UPT BPOM	79.62	77.18	96.94	Baik	96.94	90	87.25
26	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5.00	5	100.00	Baik	100.00	90	90.00
27	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.60	2.59	99.62	Baik	99.62	90	89.66

Analisis Akuntabilitas Kinerja

IKU.1 Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Perbandingan Target 2025 dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel 7. Perbandingan target 2025 dan realisasi kinerja tahun 2025 IKSK Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Palopo	Persentase sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025	83%	100%	120,48	Tidak Dapat Disimpulkan

Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan menggambarkan kondisi obat yang beredar di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Definisi dari sediaan farmasi mencakup obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang disampling menggunakan metode targeted atau purposive sampling dan diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko sebagaimana diatur melalui pedoman sampling dan pengujian. Tindak lanjut pada sampel melibatkan beberapa tahap, dimulai dari pelaksanaan sampling, penanganan sampel, pengawasan penandaan/label, pelaksanaan pengujian, hingga pelaporan hasil. Unit Pelaksana Teknis (UPT) juga diwajibkan melaporkan tanggapan terhadap surat tindak lanjut yang dikirimkan oleh pusat, sesuai pedoman tindak lanjut yang berlaku. Sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium, pedoman tindak lanjut, serta *timeline* yang telah ditetapkan dalam pedoman atau SOP terkait. Sampel Sediaan Farmasi mencakup sampel yang disampling oleh Balai POM di Palopo di tahun berjalan. Sampel Sediaan Farmasi yang dimaksud adalah Sediaan Farmasi yang disampling oleh Balai POM di Palopo sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 95 Tahun 2025 tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, sampel tersebut dilakukan pengujian di Balai Besar POM di Makassar dan Balai Penguji Region Makassar (Balai POM di Kendari, Balai POM di Mamuju, dan Balai POM di Ambon) sesuai dengan Petunjuk Teknis

Regionalisasi Laboratorium pada lampiran Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 100 Tahun 2025. Kriteria Sediaan Farmasi Tidak Memenuhi Syarat, meliputi :

1. Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk produk dengan nomor izin edar yang sudah habis masa berlaku)
2. Produk kedaluwarsa
3. Produk rusak
4. Tidak memenuhi ketentuan penandaan
5. Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian

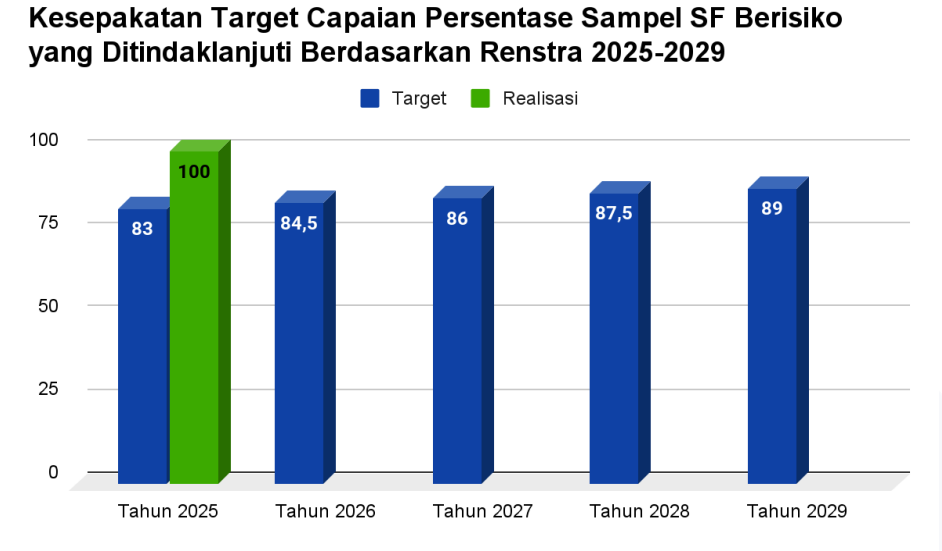
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan = (A + B + C + D) / 4

Keterangan:

A. Persentase Sampel Obat Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan
B. Persentase Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan
C. Persentase Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan
D. Persentase Sampel Kosmetik Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Berdasarkan tabel diatas realisasi persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025 yaitu sebesar 100% dari target yang ditetapkan 83%, sedangkan capaian diperoleh sebesar 120,48% dengan kriteria “Tidak Dapat Disimpulkan”. Indikator ini merupakan indikator yang baru untuk periode Renstra 2025-2029 sehingga tidak terdapat baseline data pada tahun sebelumnya untuk menjadi baseline target awal Renstra di tahun 2025 ini. Tahun 2025 ini juga merupakan tahun pertama Renstra, sehingga pengukuran capaian dari UPT belum dapat tergambarkan. Perhitungan indikator ini tidak lagi memperhitungkan hasil pengawasan penandaan maupun hasil pengujian yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS), namun lebih menekankan kepada kesesuaian sampling, pengawasan penandaan dan pengujian dengan pedoman yang berlaku, baik Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium ataupun pedoman atau SOP lainnya yang terkait.

b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun - tahun sebelumnya



Gambar 3. Perbandingan realisasi kinerja IKSK Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Tahun 2025

Dari pembahasan di atas telah diketahui bahwa Tahun 2025 merupakan tahun pertama penerapan Renstra sehingga tren perbandingan realisasi dan capaian kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya belum dapat dipetakan. Berdasarkan hasil *desk* kesepakatan target UPT terkait target Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Balai POM di Palopo dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 akan terus meningkat seperti grafik pada gambar disamping. Hal ini menjadi dorongan Balai POM di Palopo untuk dapat melakukan upaya dalam meningkatkan efektivitas pengawasan *post market* berbasis risiko untuk menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk sediaan farmasi dengan terus melakukan evaluasi kualitas sediaan farmasi yang beredar di pasaran, di area atau wilayah tertentu; peningkatan upaya deteksi dini terhadap potensi kejahatan peredaran produk sediaan farmasi yang tidak memenuhi syarat di masyarakat; serta identifikasi sediaan farmasi yang termasuk kategori tidak memenuhi standar dalam menentukan tingkat risiko terhadap kesehatan masyarakat, mendukung upaya penegakan hukum, serta menyusun langkah-langkah strategis guna mencegah peredaran produk serupa di masa mendatang.

c. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Renstra

Tabel 8. Perbandingan realisasi kinerja IKSK Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan target Renstra

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra 2029	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria

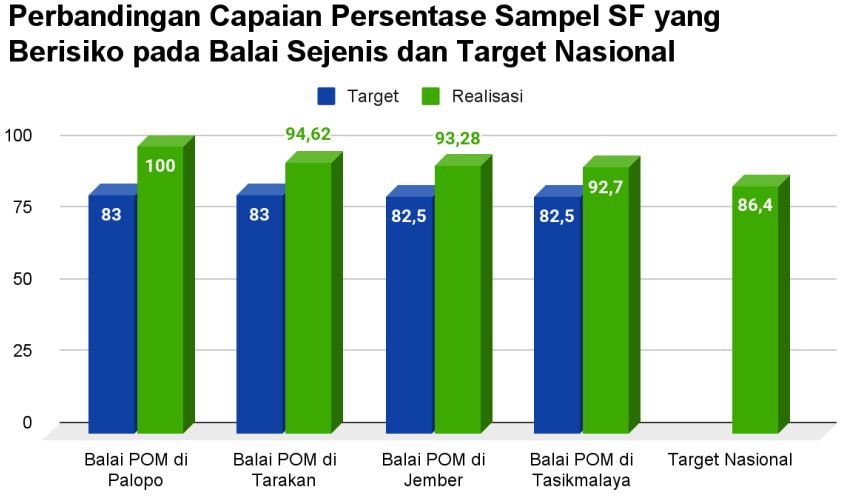
Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Palopo	Presentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89%	100%	112,36	▲ Tercapai / Melampaui

Nilai persentase capaian diperoleh dari perbandingan antara nilai realisasi kinerja tahun 2025 dan target jangka menengah yang diambil dari nilai target tahun terakhir periode Renstra. Pada tahun 2025 sebagai tahun pertama dari periode Renstra 2025-2029, Balai POM di Palopo telah mencapai nilai persentase capaian lebih dari 100% sehingga dikategorikan **Melampaui** target Renstra yang dimaksud.

d. Perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja unit lain yang sejenis

Tabel 9. Perbandingan Capaian Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Tahun 2025

Unit Kerja	Target 2025	Realisasi	Capaian
Balai POM di Palopo	83%	100%	120,48%
Balai POM di Tarakan	83%	94,62%	114%
Balai POM di Jember	82,5%	93,28%	113,07%
Balai POM di Tasikmalaya	82,5%	92,7%	112,36%
Target Nasional	**86,4%**		



Gambar 4. Perbandingan Capaian Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Tahun 2025

Balai sejenis yang dimaksud adalah Balai Pengawas Obat dan Makanan di tingkat Kabupaten/Kota yang baru ditingkatkan klasifikasinya dari Loka Pengawas Obat dan Makanan (Loka POM). Balai sejenis yang dipilih diantaranya Balai POM di tarakan, Balai POM di Jember dan Balai POM di Tasikmalaya yang secara bersamaan ditingkatkan klasifikasinya dengan Balai POM di Palopo berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Seperti yang terlihat pada grafik di atas, bahwa perbandingan keempat balai sejenis telah mencapai kesepakatan target dengan persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan tertinggi diperoleh oleh Balai POM di Palopo dengan angka persentase realisasi sebesar 100%. Terhadap target nasional yang ditentukan, keempat balai telah memenuhi target sehingga diharapkan dapat terus meningkatkan kinerjanya dalam meningkatkan efektivitas pengawasan *post market* berbasis risiko terutama Balai POM di Palopo untuk secara signifikan dapat mempertahankan kinerja dalam pelaksanaan IKU ini.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Realisasi persentase sampel sediaan farmasi yang berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada tahun 2025 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 83%. Kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai target IKU Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan antara lain:

a. Memantau dan mengevaluasi secara rutin perencanaan dan realisasi pelaksanaan sampling sesuai kategori, ketepatan waktu pelaksanaan sampling, ketepatan dalam pengambilan kesimpulan terkait penandaan serta melaksanakan tanggapan surat tindak lanjut untuk komoditi Obat, Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.
b. Mendorong petugas sampling untuk membuat laporan penarikan Obat, OBA, SK dan Kosmetik tepat waktu.
c. Mendorong penguji untuk melakukan pengujian dengan memperhatikan ketepatan waktu, kesesuaian parameter uji, kelengkapan laporan pengujian, ketepatan dalam pengambilan kesimpulan dan ketepatan dalam pelaporan sampel.

Dalam keberjalanan pemenuhan IKU ini, ditemui beberapa kendala yang kemudian dikelola untuk memperoleh tindak lanjut berupa rekomendasi perbaikan kinerja ke depan disertai dengan *timeline* penyelesaian yang terdokumentasi dalam aplikasi SAPA APIP dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 10. Rekomendasi Tindak Lanjut IKSK Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Tahun 2025

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	1. Target sampling sediaan farmasi tidak tercapai 2. Target tercapai tetapi tidak sesuai dengan perencanaan	1. Mengikuti pelatihan sampling sediaan farmasi di Ideas 2. Briefing sebelum sampling sediaan farmasi setiap bulan 3. Koordinasi dengan PIC sampling sediaan farmasi dan penguji Balai Penguji dan/atau pusat	1. Mengikuti pelatihan sampling sediaan farmasi di Ideas 2. Briefing sebelum sampling sediaan farmasi setiap bulan 3. Koordinasi dengan PIC sampling sediaan farmasi dan penguji Balai Penguji dan/atau pusat	Januari s.d. Desember 2025	Y	SDM-01	Terjadi kesalahan sampling yang tidak sesuai dengan pedoman sampling

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan/atau informasi deskriptif program/kegiatan yang paling mendukung ketercapaian kinerja dan yang tidak terlalu mendukung ketercapaian kinerja berdasarkan besaran alokasi anggaran

Berdasarkan besaran alokasi anggaran, dapat dinyatakan bahwa penggunaan anggaran digunakan seoptimal mungkin dalam menyelenggarakan kegiatan atau program yang mendukung terwujudnya capaian indikator Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang

Ditindaklanjuti sesuai Ketentuan. Kegiatan atau program yang dilaksanakan dijabarkan pada data di bawah.

Tabel 11. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

INDIKATOR	PJ KEGIATAN	KODE	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		TARGET ANGGARAN (Rp)	RELAISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN ANGGARAN (%)	TNGKAT EFISIENSI
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Pemeriksaan	QIA.002.053	Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	1	Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	91,457,000	91,455,495	100	Efisien

IKU.2 Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO

Farmakovigilans merupakan ilmu dan aktivitas tentang deteksi, pengkajian, pemahaman dan pencegahan efek samping atau masalah lainnya terkait dengan penggunaan obat. Tujuan farmakovigilans antara lain untuk menemukan masalah terkait dengan penggunaan obat dan menyampaikan temuan tersebut pada saat yang tepat untuk memberikan kontribusi dalam penilaian manfaat, bahaya, khasiat, dan risiko obat untuk mencegah dampak yang merugikan dan untuk memaksimalkan manfaat obat tersebut.

Menurut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Farmakovigilans, Kejadian Tak Diinginkan (KTD) adalah kejadian medis yang tidak diinginkan yang terjadi selama terapi menggunakan obat namun belum tentu disebabkan oleh obat tersebut. Sedangkan Efek Samping Obat (ESO) adalah respon terhadap suatu obat yang merugikan dan tidak diinginkan yang terjadi setelah pemberian obat dengan dosis yang biasanya digunakan pada manusia untuk pencegahan, diagnosis, atau terapi penyakit atau untuk modifikasi fungsi fisiologik.

a. Perbandingan Target 2025 dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel 12. Perbandingan target 2025 dan realisasi kinerja tahun 2025 IKSK Persentase Sarana Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO ke BPOM

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria

Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Palopo	Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26%	26,26%	102,59	Sangat Baik

Pengukuran terhadap indikator ini dilakukan dengan membandingkan antara jumlah fasyankes yang telah melaporkan KTD/ESO setelah sebelumnya diberikan KIE Farmakovigilans, dengan jumlah total fasyankes yang telah diberikan KIE Farmakovigilans pada tahun 2025. KIE Farmakovigilans dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahaman, pengetahuan, dan *awareness* tenaga kesehatan/tenaga medis di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) terutama dalam hal pelaporan KTD/ESO. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah dan kualitas laporan KTD/ESO oleh tenaga kesehatan/tenaga medis di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM yang nantinya dapat digunakan untuk mengevaluasi profil keamanan obat beredar di

Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO ke BPOM	$= \frac{A}{B} x100\%$

Indonesia. Cara perhitungan indikator ini adalah :

Keterangan :

A. Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan.
B. Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan.

Pelaksanaan KIE Farmakovigilans di wilayah kerja BPOM di Palopo dilaksanakan sebanyak satu kali pertemuan pada Triwulan II 2025, yaitu pada tanggal 25 Juni 2025. Jumlah fasyankes yang mengikuti KIE adalah sebanyak 45 tenaga kesehatan yang mewakili 45 fasyankes yang ada di wilayah kerja Balai POM di Palopo. Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025, jumlah fasyankes yang telah melaporkan KTD/ESO melalui aplikasi e-MESO adalah

sebanyak 12 fasyankes atau 26,67% dari seluruh fasyankes yang telah diberikan KIE Farmakovigilans.

b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun - tahun sebelumnya

Indikator Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO ke BPOM merupakan indikator yang baru diukur pada periode Renstra 2025-2029 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan realisasi pada tahun-tahun sebelumnya.

c. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Renstra

Tabel 13. Perbandingan realisasi kinerja IKSK Persentase Sarana Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO ke BPOM dengan target Renstra

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra 2029	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Palopo	Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	30%	26,67%	88,9	▲ Akan Tercapai

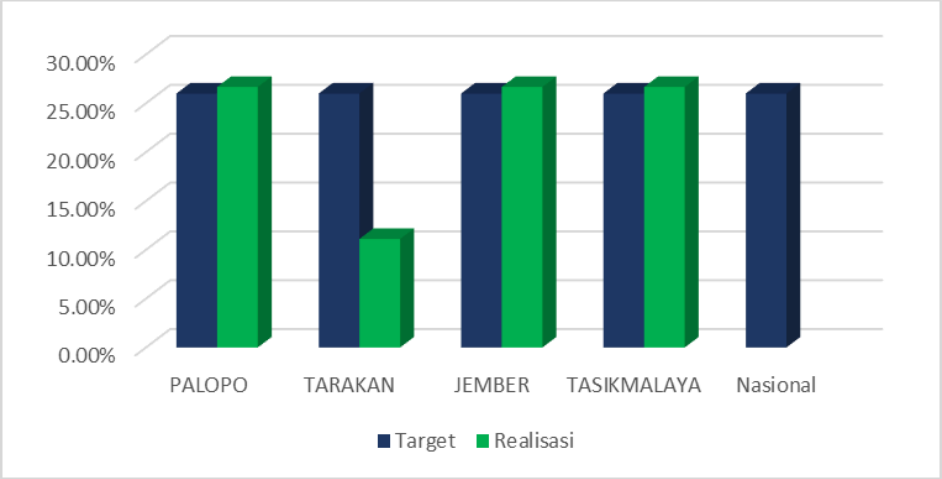
KTD/ESO ke BPOM tahun 2025 sebesar 26,67%. Apabila dibandingkan dengan target akhir periode Renstra 2025-2029 sebesar 30%, capaiannya telah mencapai mencapai 88,90% dari target akhir Renstra. Capaian ini dinilai progresif dan berada pada jalur yang tepat untuk memenuhi target pada akhir periode Renstra. Hal ini mengingat tahun 2025 merupakan tahun pertama periode Renstra sekaligus tahun awal pengukuran indikator ini, sehingga masih diperlukan upaya-upaya pembinaan, dan pendampingan kepada fasyankes guna meningkatkan pelaporan KTD/ESO secara berkelanjutan sehingga dapat mencapai target yang ditetapkan.

d. Perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja unit lain yang sejenis

Tabel 14. Perbandingan realisasi kinerja IKSK Persentase Sarana Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO ke BPOM dengan UPT lainnya yang sejenis

Unit Kerja	Target 2025	Realisasi	Capaian
Balai POM di Palopo	26%	26,27%	102,58%

Balai POM di Tarakan	26%	11%	42,31%
Balai POM di Jember	26%	26,67%	102,58%
Balai POM di Tasikmalaya	26%	26,67%	102,58%
Target Nasional	**26%**		



Gambar 5. Perbandingan realisasi kinerja IKSK Persentase Sarana Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO ke BPOM dengan UPT lainnya yang sejenis

Berdasarkan grafik di atas, secara komparatif, realisasi Balai POM di Palopo setara dengan Balai POM di Jember dan Balai POM di Tasikmalaya yang juga mencapai 26,67%, serta berada di atas Balai POM di Tarakan yang mendapatkan realisasi sebesar 11%. Hal ini menunjukkan kinerja Balai POM di Palopo berada pada kelompok kinerja tinggi dan telah selaras dengan capaian UPT sejenis yang memiliki performa optimal pada indikator yang sama.

Sedangkan bila dibandingkan dengan target nasional (26%), Balai POM di Palopo, Balai POM di Jember dan Balai POM di Tasikmalaya telah melampaui target nasional.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Capaian terhadap indikator Persentase Sarana Pelayanan Kefarmasian yang Telah Melaporkan KTD/ESO ke BPOM pada tahun pertama pengukuran menunjukkan kinerja yang sangat baik, yaitu 102,58% dari target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi telah melampaui target tahunan dan mencerminkan efektivitas pelaksanaan kegiatan KIE Farmakovigilans yang telah dilakukan.

KTD/ESO yang selama ini mungkin sudah sering terjadi namun tidak

dilakukan pemantauan secara menyeluruh oleh UPT BPOM di seluruh Indonesia. Tenaga kesehatan yang bekerja di fasyankes juga pada umumnya sering menemui KTD/ESO dari pasien yang diberikan terapi obat, tetapi tidak memiliki pengetahuan terkait cara melaporkannya kepada Badan POM sebagai Pusat Farmakovigilans Nasional. Melalui KIE Farmakovigilans yang diberikan, tenaga kesehatan telah memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk melaporkan KTD/ESO kepada BPOM. Namun demikian, masih terdapat kendala berupa belum meratanya pemahaman dan kepatuhan sebagian fasyankes dalam melakukan pelaporan KTD/ESO secara konsisten. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun target telah terlampaui, penguatan sistem dan pendampingan tetap diperlukan untuk menjaga keberlanjutan capaian serta mencegah potensi penurunan pelaporan pada tahun berikutnya.

Sebagai upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan, akan dilakukan percepatan pelaksanaan KIE Farmakovigilans pada Triwulan I tahun anggaran 2026 dan adanya pendampingan pelaporan secara lebih intensif oleh Vocal Point Farmakovigilans Balai POM di palopo kepada tenaga kesehatan yang telah diberikan KIE Farmakovigilans nantinya.

Tabel 15. Rekomendasi Tindak Lanjut IKSK Persentase Sarana Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO ke BPOM

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase Sarana Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO ke BPOM	Masih rendahnya pemahaman dan kepatuhan sebagian fasyankes dalam pelaporan KTD/ESO	Peningkatan sosialisasi dan pendampingan bagi tenaga kesehatan di fasyankes terkait pelaporan KTD/ESO	1. Pelaksanaan KIE Farmakovigilans dilakukan lebih awal pada tahun 2026. 2. Dilakukan pendampingan pelaporan oleh Vocal Point Farmakovigilans Balai POM di Palopo kepada fasyankes yang telah diberikan KIE Farmakovigilans.	Maret s.d. Desember 2025	Y	O-09	Tidak ada laporan KTD/ESO yang diterima dari sarana pelayanan kesehatan yang telah diberikan KIE

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan/atau informasi deskriptif program/kegiatan yang paling mendukung ketercapaian kinerja dan yang tidak terlalu mendukung ketercapaian kinerja berdasarkan besaran alokasi anggaran

Pencapaian indikator Persentase Sarana Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO ke BPOM yang mencapai 102,58% dari target, didukung oleh pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Farmakovigilans yang telah diselenggarakan pada Triwulan II tahun anggaran 2025 oleh Balai POM di Palopo. Kegiatan ini memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan pengetahuan dan pemahaman tenaga kesehatan mengenai konsep farmakovigilans serta pentingnya pelaporan KTD/ESO.

Dalam kegiatan KIE Farmakovigilans yang dilaksanakan, dilakukan sosialisasi penggunaan Aplikasi e-MESO yang merupakan sistem pelaporan yang dibangun oleh Badan POM untuk memfasilitasi tenaga kesehatan dan industri farmasi dalam menyampaikan laporan KTD/ESO secara online. Aplikasi ini berfungsi sebagai sarana komunikasi antara Badan POM dengan pelapor, serta mempermudah proses penyampaian dan pengumpulan laporan KTD/ESO secara elektronik, sehingga meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi pelaporan.

Pelaksanaan KIE Farmakovigilans yang baru dilaksanakan pada triwulan II tahun 2025 berdampak cukup signifikan terhadap peningkatan jumlah tenaga kesehatan yang menyampaikan laporan KTD/ESO. Namun demikian, masa efektif pelaporan yang dapat dihitung setelah pelaksanaan KIE menjadi relatif singkat, yaitu sekitar enam bulan. Kondisi ini menyebabkan peran Vocal Point Farmakovigilans menjadi sangat strategis dalam melakukan pendampingan, monitoring, serta mendorong tenaga kesehatan untuk mengidentifikasi, mendokumentasikan, dan melaporkan KTD/ESO secara tepat waktu. Di sisi lain, adanya kebijakan efisiensi anggaran yang berlangsung sejak awal hingga akhir Tahun Anggaran 2025 berdampak pada keterbatasan pelaksanaan KIE dan pendampingan secara tatap muka.

Secara keseluruhan, capaian indikator yang melampaui target menunjukkan bahwa strategi KIE Farmakovigilans yang dilaksanakan telah efektif, meskipun masih terdapat tantangan dalam aspek durasi implementasi dan dukungan anggaran. Ke depan, diperlukan perencanaan waktu pelaksanaan KIE yang lebih awal serta penguatan pendampingan berkelanjutan agar tren

peningkatan pelaporan KTD/ESO dapat dipertahankan dan ditingkatkan secara konsisten.

IKU.3 Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, dikecualikan pangan industri rumah tangga (PIRT). Pada Pangan Olahan ini, termasuk pula Bahan Tambahan Pangan (BTP), pangan fortifikasi, dan Sampel *Emerging Issue/* Pangan Tertentu. Terdapat beberapa kategori sampel yang termasuk ke dalam Sampel *Emerging Issue/* Pangan Tertentu, yaitu : sampel kasus pangan, sampel pengaduan masyarakat, sampel Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLB KP), sampel dalam rangka *emerging issue* dan sampel pendampingan UMK/ pangan risiko menengah rendah. Sampel Pangan Olahan Berisiko dipilih berdasarkan evaluasi dan kajian risiko sesuai Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 95 Tahun 2025 tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Yang dimaksud dengan “Diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling” adalah pengambilan sampel dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling yang meliputi:

1. Kesesuaian target sampel UPT;
2. Kesesuaian parameter uji;
3. Ketepatan pengambilan kesimpulan;
4. Ketepatan waktu pengambilan sampel;
5. Ketepatan pelaporan sampling dan pengujian

Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut pengawasan ketentuan lainnya antara lain:

1. Tindak Lanjut terhadap produk TIE dan/atau Rusak dan atau Kedaluwarsa dan TMS Pengujian;
2. Pembinaan terhadap Sarana Distribusi dan/atau Sarana Produksi
3. Pemeriksaan Sarana Produksi dan/atau Sarana Distribusi terhadap implementasi CPPOB/CPerPOB terkait dengan hasil sampling dan pengujian produk TMS;
4. Koordinasi pusat dan lintas UPT terkait penyampaian hasil uji produk TMS;

5. Tindak lanjut terhadap sampel TIE/ rusak kedaluwarsa termasuk dalam bentuk persuasi kepada pelaku usaha untuk melakukan pemusnahan secara sukarela terhadap produk, serta upaya lain untuk memastikan produk tidak beredar.

a. Perbandingan Target 2025 dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel 16. Perbandingan target 2025 dan realisasi kinerja tahun 2025 IKSK Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Palopo	Persentase Sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75%	100%	133,33	Tidak Dapat Disimpulkan

Pada tahun 2025, target *output* sampel Pangan Olahan Balai POM di Palopo sebanyak 122 (seratus dua puluh dua) sampel dari total target tahunan sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) sampel, yang terdiri dari 85% kategori sampel Pangan Olahan dan 7% sampel *Emerging Issue/* Pangan Tertentu. Keseluruhan target sampel ini telah tercapai di tahun 2025 dan telah dilakukan evaluasi penandaan terhadap 117 (seratus tujuh belas) sampel dengan hasil evaluasi 83 sampel Memenuhi Ketentuan (MK) Penandaan dan 34 sampel Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) Penandaan. Terdapat 5 (lima) sampel yang tidak dilakukan evaluasi penandaan karena merupakan sampel pendampingan UMK yang tidak wajib untuk dilakukan evaluasi. Seluruh hasil sampling dan penandaan dilaporkan melalui SIPT.

Pada tahun 2025, Balai POM di Palopo belum melakukan pengujian mandiri untuk sampel rutin sehingga sebagian besar parameter uji untuk sampel Pangan Olahan Balai POM di Palopo dilakukan di Balai Besar POM di Makassar serta balai lain sesuai dengan balai unggul/ penunjukan, yaitu Balai Besar POM di Makassar sebagai balai regional (laboratorium regional, cemaran logam, laboratorium air), Balai Besar POM di Jayapura (bahan kontak pangan, BTP Khusus) dan Balai POM di Kendari (cemaran hasil proses, mikotoksin, residu pestisida). Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 100 Tahun 2025 tentang Regionalisasi

Laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan yang ditetapkan pada tanggal 14 Februari 2025, terjadi perubahan anggota region Makassar dimana Balai Besar POM di Jayapura ditunjuk sebagai laboratorium regional Jayapura sedangkan Balai POM di Ambon yang semula merupakan anggota region Manado menjadi anggota region Makassar sehingga balai unggul/ penunjukan bahan kontak pangan dan BTP Khusus dilakukan di Balai POM di Ambon. Adapun pemilihan parameter uji sampel Pangan Olahan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 95 Tahun 2025 tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Seluruh hasil pengujian sampel Pangan Olahan dilaporkan melalui SIPT, dimana dari 122 (seratus dua puluh dua) sampel yang diuji, terdapat 112 sampel dengan hasil uji Memenuhi Syarat (MS) dan 10 sampel dengan hasil uji Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Dari total 10 sampel dengan hasil uji Tidak Memenuhi Syarat (TMS), kategori pangan 14.1.12 (Air Minum Dalam Kemasan) merupakan kategori dengan jumlah hasil TMS terbanyak. Selain itu, tercatat sebanyak 21 sampel pangan olahan yang tidak dilakukan pengujian mikrobiologi sesuai dengan parameter uji pada pedoman sampling. Terhadap sampel dengan hasil uji TMS yang diproduksi di wilayah kerja Balai POM di Palopo, telah ditindaklanjuti melalui pemeriksaan sarana produksi sedangkan yang diproduksi di luar wilayah kerja Balai POM di Palopo telah dilaporkan melalui SIPT.

Berdasarkan manual IKU, cara perhitungan dan formula persentase pangan olahan beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebagai berikut:

20%A + 20%B + 20%C + 10%D + 10%E +20%F

Keterangan:

A. Kesesuaian Target Sampel

Cara perhitungan:

(A1 + A2) /2

A1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling (*)/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%

A2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling (**) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%.

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT (termasuk pengujian menggunakan test kit), untuk Loka/ Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

Catatan: Balai POM di Palopo hanya melakukan perhitungan A1 karena belum melakukan pengujian secara mandiri di tahun 2025.

B. Kesesuaian Parameter Uji

Cara Perhitungan:

(Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diuji) x 100%

Parameter uji dilakukan sesuai dengan parameter uji wajib yang ditetapkan pada pedoman sampling. Kesesuaian parameter uji menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

C. Ketepatan Pengambilan Kesimpulan

Cara Perhitungan:

(Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diperiksa dan diuji) x 100%

Kesimpulan pangan olahan yang aman dan bermutu adalah berdasarkan hasil pengujian. Hasil evaluasi penandaan/ label tidak mempengaruhi kesimpulan akhir sampel. Sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa dapat disimpulkan sebagai sampel yang tidak aman dan bermutu. Ketepatan pengambilan kesimpulan menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

D. Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel

Cara Perhitungan:

(Jumlah sampel yang diperiksa tepat waktu sesuai renlak/ jumlah sampel yang diperiksa) x 100%

E. Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian

Cara Perhitungan:

(Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji yang dilaporkan tepat waktu sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diperiksa dan diuji) x 100% Pelaporan sampling dan pengujian yang tepat waktu sesuai pedoman sampling, yaitu tanggal 15 di bulan berikutnya.

F. Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya

Cara Perhitungan:

((Jumlah sampel yang ditindaklanjuti/ total jumlah sampel yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE atau Rusak atau Kedaluwarsa atau TMS Pengujian)) x 100%

Pembilang dan penyebut untuk penghitungan pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n.

$$\% \text{ B3} = \frac{Total\ pembilang\ (B1+B2+B3)}{Total\ penyebut\ (B1+B2+B3)} \text{ x } 100\%$$

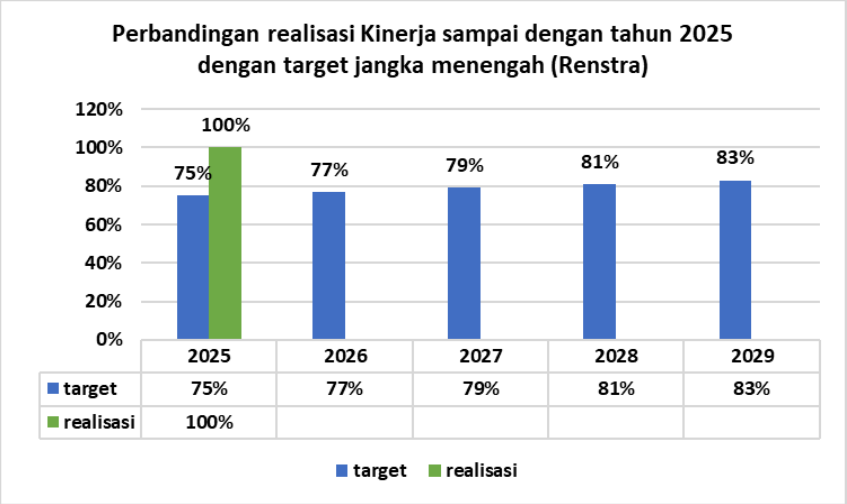
Pada tahun 2025, pada indikator Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, Balai POM di Palopo telah berhasil melampaui target dengan capaian sebesar 133,33% berdasarkan realisasi sebesar 100% dari target 75%. Parameter perhitungan untuk mencapai realisasi ini berdasarkan kesesuaian target sampel (perhitungan pada poin A1) karena Balai POM di Palopo belum melakukan pengujian sampel rutin sehingga realisasi belum didasarkan pada perhitungan pada poin A2 hingga F.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun - Tahun Sebelumnya

Indikator persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Balai POM di Palopo mulai diimplementasikan pada tahun 2025 sebagai bagian dari periode Renstra 2025–2029. Indikator ini merupakan indikator baru sehingga data pembanding untuk melihat tren realisasi dan capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya belum tersedia.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Renstra

Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan oleh Balai POM di Palopo pada periode tahun 2025 hingga 2029 diproyeksikan mengalami peningkatan setiap tahunnya, sebagaimana ditunjukkan pada grafik gambar perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah (renstra).



Gambar 6. Perbandingan realisasi kinerja IKSK Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Tabel 17. Perbandingan realisasi kinerja IKSK Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti dengan target Renstra

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra 2029	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Palopo	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti	83%	100%	120,48	▲ Tercapai / Melampaui

Pada tahun pertama pelaksanaan, realisasi indikator kinerja mencapai angka 100%. Jika dibandingkan dengan target tahun 2025 sebesar 75%, maka persentase capaian mencapai 133,33%. Hal ini menunjukkan bahwa pada awal periode perencanaan, kinerja telah melampaui target yang ditetapkan dan berada di atas proyeksi tahapan peningkatan yang dirancang dalam rencana jangka menengah. Proyeksi ini menjadi dasar perumusan langkah strategis bagi Balai POM di Palopo untuk terus mengoptimalkan berbagai upaya untuk mencapai target tersebut, melalui penguatan pada beberapa komponen utama, yaitu kesesuaian target sampel, kesesuaian parameter pengujian, ketepatan dalam penarikan kesimpulan, ketepatan waktu penetapan kesimpulan, ketepatan waktu pelaporan sampling dan hasil

pengujian, serta pelaksanaan tindak lanjut sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku.

Nilai persentase capaian dihitung berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah yang mengacu pada target tahun terakhir periode Renstra, yaitu tahun 2029. Pada tahun pertama implementasi indikator persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan di Balai POM di Palopo, persentase capaian tercatat sebesar 120,48% terhadap target Renstra 2029 sebesar 83%, dengan realisasi mencapai nilai 100%. Dengan demikian, capaian kinerja tersebut termasuk dalam kategori tercapai atau melampaui target yang ditetapkan.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Lain yang Sejenis

Tabel 18. Perbandingan realisasi kinerja IKSK Persentase Sarana Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO ke BPOM dengan UPT lainnya yang sejenis

Unit Kerja	Target 2025	Realisasi	Capaian
Balai POM di Palopo	75%	100%	133,33%
Balai POM di Tarakan	80%	91,97%	114,96%
Balai POM di Jember	75%	99,53%	132,71%
Balai POM di Tasikmalaya	75%	96,52%	128,69%
Target Nasional	**84,61%**		

Dari data perbandingan realisasi kinerja Balai POM di Palopo dengan UPT lain yang sejenis, seluruhnya telah mencapai target tahunan dan telah melampaui target nasional, dimana realisasi tertinggi yaitu Balai POM di Palopo sebesar 100% dari target 75% sedangkan terendah yaitu Balai POM di Tarakan sebesar 91,97% dari target 80%.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Keberhasilan Balai POM di Palopo dalam mencapai target pada indikator persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan ini dipengaruhi oleh perhitungan realisasi pada tahun berjalan, dimana parameter yang dinilai belum secara keseluruhan melainkan hanya pada 1 (satu) poin, yakni kesesuaian sampel (poin A1) sebab Balai POM di Palopo belum melakukan pengujian sampel rutin. Selain itu, keberhasilan

pencapaian target ini juga didukung oleh terjalinnya koordinasi yang baik antara tim sampling di Balai POM di Palopo dengan penguji, baik penguji Balai POM di Palopo maupun laboratorium lain di region Makassar dan tersedianya informasi jadwal uji setiap balai unggul/ penunjukan yang dapat diakses secara *online* oleh seluruh anggota region yang mendukung tercapainya pemenuhan kesesuaian parameter uji. Adanya dukungan dari Balai Besar POM di Makassar selaku laboratorium regional dalam hal penggunaan sarana dan prasarana pengujian, kepenyeliaan dan pendampingan pengujian juga memberikan peran penting dalam mengatasi kendala pada standar kemampuan laboratorium Balai POM di Palopo, dimana masih terbatasnya metode analisis yang sudah diverifikasi, kompetensi penguji yang belum memadai, serta kelengkapan alat yang belum tersedia menyebabkan pada tahun 2025 Balai POM di Palopo belum dapat melakukan pengujian rutin sampel pangan olahan.

Di balik keberhasilan pencapaian target pada indikator ini, masih terdapat kendala yang dihadapi, yaitu adanya potensi ketidaksesuaian sampel dengan perencanaan (meskipun target tercapai) akibat masih belum utuhnya pemahaman petugas sampling terhadap pedoman sampling terbaru. Selain itu, perlu diatur strategi dalam pencapaian target jika di kemudian hari Balai POM di Palopo akan melakukan pengujian sampel rutin secara mandiri sebab akan semakin banyak parameter yang berpengaruh dalam perhitungan realisasi indikator ini.

Tabel 19. Rekomendasi Tindak Lanjut IKSK Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Petugas belum memahami pedoman sampling terbaru secara utuh sehingga terdapat potensi ketidaksesuaian sampel dengan perencanaan	Peningkatan kompetensi petugas sampling	1. Mengikuti pelatihan sampling pangan di Ideas 2. Briefing sebelum sampling pangan setiap bulan 3. Koordinasi PIC sampling pangan dan	Desember 2025	Y	SDM-02	Terjadi kesalahan sampling yang tidak sesuai dengan pedoman sampling

		(meskipun target tercapai)		penguji Balai Penguji dan/atau pusat				

f. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja dan/atau Informasi Deskriptif Program/Kegiatan yang Paling Mendukung Ketercapaian Kinerja dan yang Tidak Terlalu Mendukung Ketercapaian Kinerja Berdasarkan Besaran Lokasi Anggaran

Dalam pencapaian indikator "Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan", dukungan anggaran pada kegiatan sampling maupun pengujian memiliki peran yang sangat penting, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) QIA.001 Sampel Makanan yang diperiksa oleh UPT

1. Ketersediaan anggaran belanja bahan pengadaan sampel sebesar Rp24.090.000 untuk 133 sampel (termasuk PIRT) merupakan faktor yang paling mendukung ketercapaian pemenuhan sampel berbasis risiko dengan jumlah yang memadai untuk pengujian.
2. Ketersediaan belanja perjalanan dinas juga merupakan faktor yang mendukung ketercapaian pemenuhan sampel, namun terbatasnya alokasi anggaran di tahun 2025 menyebabkan sering kali kegiatan sampling dilakukan bersamaan dengan penugasan lain, misalnya pemeriksaan sarana distribusi yang menyebabkan kegiatan sampling tidak dapat dilaksanakan secara maksimal dan mengakibatkan timbulnya potensi kesalahan dalam pelaksanaannya

b) PDD.001 Laboratorium pengawasan obat dan makanan yang sesuai standar kemampuan laboratorium

1. Pada tahun 2025 tidak tersedia alokasi anggaran khusus untuk pengadaan reagen kimia dan media mikrobiologi dalam rangka pengujian rutin (QIA). Kebutuhan pengadaan tersebut selanjutnya dipenuhi melalui anggaran pengembangan laboratorium (PDD). Anggaran pengembangan laboratorium (PDD) tersebut dialokasikan pada belanja barang persediaan barang konsumsi, yang mencakup pengadaan reagen kimia sebesar Rp16.658.000 dan pengadaan media mikrobiologi sebesar Rp8.673.000. Besaran anggaran pengadaan reagen kimia dan media mikrobiologi tersebut pada dasarnya belum mencukupi untuk menunjang kebutuhan pengujian sampel secara optimal. Namun demikian, pada tahun 2025

pelaksanaan pengujian rutin masih dilakukan di balai besar POM di Makassar, sehingga kebutuhan reagen kimia dan media mikrobiologi untuk kegiatan pengujian masih didukung dan difasilitasi oleh balai besar POM di Makassar.

IKU.4 Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar

a. Perbandingan Target 2025 dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel 20. Perbandingan target 2025 dan realisasi kinerja tahun 2025 IKSK Persentase sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Palopo	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100%	NIHIL		

Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar diperoleh dengan rumus:

$$\frac{\Sigma\,(30\%\ x\ A_1, A_2, \ldots\ldots, A_n) + (35\%\ x\ B_1, B_2, \ldots\ldots, B_n) + (30\%\ x\ C_1, C_2, \ldots\ldots, C_n)}{n}$$

Keterangan:

A = jumlah parameter sampel yang diuji sesuai dengan hasil investigasi/ total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi x 100%

B = jumlah parameter yang diuji sesuai dengan pedoman sampling/ total parameter uji dalam pedoman sampling x 100%

C = jumlah parameter yang terkonfirmasi/ total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi terkonfirmasi x 100%

n = total sampel

Sampel KLB Keracunan Pangan adalah sampel pangan yang diduga sebagai penyebab KLB keracunan pangan berdasarkan hasil investigasi atau diduga sebagai penyebab dua orang atau lebih menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan dari lokasi yang sama, dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut diidentifikasi sebagai sumber keracunan. Sampel dapat berupa pangan olahan dalam kemasan

atau pangan olahan siap saji yang diuji oleh laboratorium BPOM dengan sampel berasal dari internal BPOM dan/atau dari eksternal BPOM (Dinas dan K/L).

Sesuai standar adalah kesesuaian parameter pengujian sesuai dengan hasil penelusuran dugaan KLB KP berupa kesesuaian dengan gejala korban, masa inkubasi agen penyebab, kesesuaian antara pasangan bahaya dengan pangan, atau sesuai dengan parameter permintaan uji Dinas Kesehatan. Lebih lanjut untuk PODK juga memperhatikan kesesuaian dengan standar dalam regulasi terkait pangan dimaksud dan parameter dalam Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan Olahan BPOM. Sesuai standar berdasarkan:

1) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.06.1.54.2797 tanggal 7 Juli 2009 tentang Tata Cara Pengambilan Contoh Pangan, Pengujian Laboratorium dan Pelaporan Penyebab Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan; dan
2) Pedoman Investigasi epidemiologi, pengambilan dan pengujian sampel pangan pada KLB Keracunan Pangan tahun 2023.

Berdasarkan tabel diatas, realisasi persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar pada tahun 2025 adalah 0% dari target yang ditentukan 100%. Indikator ini merupakan indikator yang baru untuk periode Renstra 2025-2029 sehingga tidak terdapat baseline data pada tahun sebelumnya untuk menjadi baseline target awal Renstra di tahun 2025 ini. Tahun 2025 ini juga merupakan tahun pertama Renstra, sehingga pengukuran capaian dari UPT belum dapat tergambarkan.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun - Tahun Sebelumnya

Indikator ini merupakan indikator yang baru untuk periode Renstra 2025-2029 sehingga tidak terdapat baseline data pada tahun sebelumnya untuk menjadi baseline target awal Renstra di tahun 2025 ini.

Sebagaimana diketahui bahwa di tahun 2025, Balai POM di Palopo belum ada sampel KLB keracunan pangan sehingga belum ada realisasi pengujian sampel KLB keracunan pangan.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Renstra

Tabel 21. Perbandingan realisasi kinerja IKSK Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar dengan target Renstra

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria

Kegiatan	Kinerja	Renstra 2029		(%)	
Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Palopo	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100%	NIHIL		

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa realisasi untuk indikator persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar belum terpenuhi dan jauh dari target renstra yang telah ditetapkan.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Lain yang Sejenis

Tabel 22. Perbandingan realisasi kinerja IKSK Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar dengan UPT lainnya yang sejenis

Unit Kerja	Target 2025	Realisasi	Capaian
Balai POM di Palopo	100%	NIHIL	
Balai POM di Tarakan	100%	100%	100%
Balai POM di Jember	100%	NIHIL	
Balai POM di Tasikmalaya	100%	NIHIL	
Target Nasional	**100%**		

Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa yang memenuhi target untuk pemenuhan persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar hanya Balai POM di Tarakan, sementara untuk Balai POM di Palopo, Balai POM di Jember, dan Balai POM di Tasikmalaya belum memenuhi target yang ditetapkan.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Dalam rangka mewujudkan capaian indikator terkait nilai persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar, dilakukan kegiatan atau program dukungan berupa pemantauan terhadap kejadian KLB keracunan

pangan di wilayah pengawasan Balai POM di Palopo, serta berkoordinasi dengan lintas sektor terkait terkait kejadian KLB keracunan pangan.

Tabel 23. Rekomendasi Tindak Lanjut IKSK Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar	Belum dapat melakukan pengujian sampel KLB secara mandiri	- Melakukan peningkatan komptensi terkait pengujian KLB - Pengadaan media dan reagen untuk pengujian KLB - Merujuk (mengirimkan) sampel KLB yang tidak dapat diuji secara mandiri ke Balai lain yang mampu melakukan pengujian secara mandiri dan lengkap	- Melakukan peningkatan komptensi terkait pengujian KLB - Pengadaan media dan reagen untuk pengujian KLB - Merujuk (mengirimkan) sampel KLB yang tidak dapat diuji secara mandiri ke Balai lain yang mampu melakukan pengujian secara mandiri dan lengkap	2025	Y	SDM-06	Terbatasnya parameter uji yang dapat dilakukan untuk pengujian KLB

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja dan/atau Informasi Deskriptif Program/Kegiatan yang Paling Mendukung Ketercapaian Kinerja dan yang Tidak Terlalu Mendukung Ketercapaian Kinerja Berdasarkan Besaran Alokasi Anggaran

Belum terdapat realisasi yang digunakan untuk melakukan pengujian sampel KLB keracunan pangan di tahun 2025.

IKU.5 Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan. Sampel PIRT berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode *targeted* berbasis analisis risiko sesuai Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 95 Tahun 2025 tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Ditindaklanjuti sesuai ketentuan meliputi diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya.

Yang dimaksud dengan "Diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling" adalah pengambilan sampel dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling yang meliputi:

1. Kesesuaian target sampel Balai POM di Palopo
2. Kesesuaian parameter uji
3. Ketepatan waktu pengambilan sampel dan
4. Ketepatan pelaporan sampling dan pengujian.

Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya adalah tahapan awal tindak lanjut oleh Balai POM di Palopo terhadap sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya kepada pelaku usaha (IRTP) maupun kepada lintas sektor seperti Dinas Kesehatan/ DPM-PTSP (OPD penerbit SPP-IRT) dll dan atau melaporkan ke Pusat jika kasus lintas wilayah.

a. Perbandingan Target 2025 dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel 24. Perbandingan target 2025 dan realisasi kinerja tahun 2025 IKSK Persentase sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Palopo	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91%	100%	109,89	Tidak Dapat Disimpulkan

Pada tahun 2025, target *output* sampel PIRT Balai POM di Palopo sebanyak 11 (sebelas) sampel atau sebanyak 8% dari target keseluruhan sampel untuk komoditi pangan olahan di tahun berjalan. Keseluruhan target sampel ini telah tercapai di tahun 2025 dan telah dilakukan evaluasi penandaan dengan hasil evaluasi 1 sampel Memenuhi Ketentuan (MK) Penandaan dan 10 sampel Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) Penandaan dengan hasil uji Memenuhi Syarat (MS) 100%. Seluruh hasil sampling dan penandaan dilaporkan melalui SIPT.

Pada tahun 2025, Balai POM di Palopo belum melakukan pengujian mandiri untuk sampel rutin sehingga seluruh parameter uji untuk sampel PIRT Balai POM di Palopo dilakukan di Balai Besar POM di Makassar sebagai balai regional. Adapun pemilihan parameter uji sampel PIRT berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 95 Tahun 2025 tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Cara perhitungan dan formula persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sebagai berikut:

= 20%A + 20%B + 20%C + 10%D + 10%E + 20%F

Keterangan:

A. Kesesuaian target sampel PIRT

Cara Perhitungan:

(A1 + A2) /2

A1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling (*)/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%

A2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling (**)/ jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT, untuk Loka/ Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

Catatan: Balai POM di Palopo hanya melakukan perhitungan A1 karena belum melakukan pengujian secara mandiri di tahun 2025.

B. Kesesuaian Parameter Uji

Cara Perhitungan:

(Jumlah sampel sesuai/ Total Sampel PIRT) X 100%

C. **Ketepatan Pengambilan Kesimpulan**

Cara Perhitungan:

(Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diperiksa dan diuji) x 100%

D. **Ketepatan waktu pengambilan sampel**

Cara Perhitungan:

(Jumlah sampel diambil di TW 1/ Total Sampel PIRT) X 100%

E. **Ketepatan waktu pelaporan (sebelum tanggal 15 dibulan berikutnya)**

Cara Perhitungan:

(Jumlah sampel tepat waktu/ Total Sampel PIRT) X 100%

F. **Tindak lanjut Sampel PIRT**

Tindak lanjut sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) tahapan awal sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya.

Cara Perhitungan:

(Jumlah Sampel PIRT yang ditindaklanjuti/Total jumlah sampel yang TMS) x100%

Pada tahun 2025, pada indikator Persentase Sampel PIRT Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, Balai POM di Palopo telah berhasil melampaui target dengan capaian sebesar 109,89% berdasarkan realisasi sebesar 100% dari target 91%. Parameter perhitungan untuk mencapai realisasi ini berdasarkan kesesuaian target sampel (perhitungan pada poin A1) karena Balai POM di Palopo belum melakukan pengujian sampel rutin sehingga realisasi belum didasarkan pada perhitungan pada poin A2 hingga F.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun - Tahun Sebelumnya

Indikator persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Balai POM di Palopo mulai diimplementasikan pada tahun 2025 sebagai bagian dari periode Renstra 2025–2029. Indikator ini merupakan indikator baru sehingga data pembanding untuk melihat tren realisasi dan capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya belum tersedia.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Renstra

Persentase sampel PIRT beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan oleh Balai POM di Palopo pada periode tahun 2025 hingga 2029 diproyeksikan

mengalami peningkatan setiap tahunnya, sebagaimana ditunjukkan pada grafik gambar perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah (Renstra) berikut:

Tabel 25. Perbandingan realisasi kinerja IKSK Presentase sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan dengan target Renstra

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra 2029	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Palopo	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95%	100%	105,26	▲ Tercapai / Melampaui

Pada tahun pertama pelaksanaan, realisasi indikator kinerja mencapai 100%, melampaui target tahun 2025 sebesar 91% dengan tingkat capaian 105,26%. Pencapaian ini menunjukkan bahwa kinerja pada awal periode Renstra telah berada di atas jalur proyeksi yang direncanakan. Dengan demikian, kinerja pada tahun pertama implementasi indikator persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan telah melampaui target akhir periode.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Lain yang Sejenis

Tabel 26. Perbandingan realisasi kinerja IKSK Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan dengan UPT lainnya yang sejenis

Unit Kerja	Target 2025	Realisasi	Capaian
Balai POM di Palopo	91%	100%	109,89%
Balai POM di Tarakan	85%	90%	105,88%
Balai POM di Jember	91%	98,57%	108,32%
Balai POM di Tasikmalaya	85%	97%	114,12%
Target Nasional	**85,97%**		

Dari data perbandingan realisasi kinerja Balai POM di Palopo dengan UPT lain yang sejenis, seluruhnya telah mencapai target tahunan dan telah melampaui target nasional, dimana realisasi tertinggi yaitu Balai POM di Palopo sebesar 100% dari target 91% sedangkan terendah yaitu Balai POM di Tarakan sebesar 90% dari target 85%.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Keberhasilan Balai POM di Palopo dalam mencapai target pada indikator persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan ini dipengaruhi oleh perhitungan realisasi pada tahun berjalan, dimana parameter yang dinilai belum secara keseluruhan melainkan hanya pada 1 (satu) poin, yakni kesesuaian sampel (poin A1) sebab Balai POM di Palopo belum melakukan pengujian sampel rutin. Selain itu, keberhasilan pencapaian target ini juga didukung oleh terjalinnya koordinasi yang baik antara tim sampling di Balai POM di Palopo dengan penguji, baik penguji Balai POM di Palopo maupun Balai Besar POM di Makassar yang mendukung tercapainya pemenuhan sampel dan kesesuaian parameter uji sampel PIRT. Adanya dukungan dari Balai Besar POM di Makassar selaku laboratorium regional dalam hal penggunaan sarana dan prasarana pengujian, kepenyeliaan dan pendampingan pengujian juga memberikan peran penting dalam mengatasi kendala pada standar kemampuan laboratorium Balai POM di Palopo, dimana masih terbatasnya metode analisis yang sudah diverifikasi, kompetensi penguji yang belum memadai, serta kelengkapan alat yang belum tersedia menyebabkan pada tahun 2025 Balai POM di Palopo belum dapat melakukan pengujian rutin sampel PIRT.

Di balik keberhasilan pencapaian target pada indikator ini, masih terdapat kendala yang dihadapi, yaitu pada umumnya masa simpan sampel PIRT cenderung pendek (sekitar 3 bulan). Selain itu, terdapat sampel PIRT yang diuji di Balai Besar POM di Makassar mengalami keterlambatan pengujian dikarenakan adanya *overload* beban sampel sehingga sampel PIRT Balai POM di Palopo tertunda pengerjaannya hingga bulan berikutnya, dimana keterlambatan pengujian ini berakibat pada keterlambatan pelaporan hasil uji pada SIPT. Berdasarkan hal tersebut, perlu diatur strategi dalam pencapaian target jika di kemudian hari Balai POM di Palopo akan melakukan pengujian sampel rutin secara mandiri sebab akan semakin banyak parameter yang berpengaruh dalam perhitungan realisasi indikator ini, termasuk pemenuhan waktu pengujian.

Tabel 27. Rekomendasi Tindak Lanjut IKSK Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

No	Indikator	Kendala /	Rekomendasi	Rencana Tindak	Timeline	Apakah	Kode	Peristiwa

		Permasalahan		Lanjut		sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Risiko	Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Sampel PIRT yang tersedia di pasaran memiliki masa simpan sampai 3 (tiga) bulan	Melakukan koordinasi dengan balai penguji terkait kondisi masa simpan sampel PIRT yang ditemui di lapangan	Melakukan koordinas dengan balai penguji	Desember 2025	Y	O-01	Adanya kesulitan memperoleh sampel PIRT dengan masa simpan lebih dari 6 (enam) bulan
		1. Kapasitas penguji di balai penguji overload atau tidak optimal 2. Prioritas pengujian di Balai lain (penguji) tidak sinkron dengan kebutuhan Balai POM di Palopo	Menugaskan penguji dari balai POM di Palopo untuk melakukan pengujian di balai besar POM di Makassar	1. Melakukan pemantauan atau monitoring berkala terhadap progres pengujian di Balai Penguji (tracking progress) 2. Menyampaikan reminder atau follow-up resmi (melakukan persuratan) jika melebihi SLA		Y	O-08	Keterlambatan penerimaan hasil uji dari Balai lain yang melakukan pengujian terhadap sampel Balai POM di Palopo

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja dan/atau Informasi Deskriptif Program/Kegiatan yang Paling Mendukung Ketercapaian Kinerja dan Tidak Terlalu Mendukung Ketercapaian Kinerja Berdasarkan Besaran Alokasi Anggaran

A. QIA.001 Sampel Makanan yang diperiksa oleh UPT

1. Ketersediaan anggaran belanja bahan pengadaan sampel sebesar Rp24.090.000 untuk 133 sampel (PIRT dan Pangan Olahan) merupakan faktor yang paling mendukung ketercapaian pemenuhan sampel berbasis risiko dengan jumlah yang memadai untuk pengujian.
2. Ketersediaan belanja perjalanan dinas juga merupakan faktor yang mendukung ketercapaian pemenuhan sampel, namun terbatasnya alokasi anggaran di tahun 2025 menyebabkan sering kali kegiatan sampling dilakukan bersamaan dengan penugasan lain, misalnya

pemeriksaan sarana distribusi yang menyebabkan kegiatan sampling tidak dapat dilaksanakan secara maksimal dan mengakibatkan timbulnya potensi kesalahan dalam pelaksanaannya

B. PDD.001 Laboratorium pengawasan obat dan makanan yang sesuai standar kemampuan laboratorium

1. Pada tahun 2025 tidak tersedia alokasi anggaran khusus untuk pengadaan reagen kimia dan media mikrobiologi dalam rangka pengujian rutin (QIA). Kebutuhan pengadaan tersebut selanjutnya dipenuhi melalui anggaran pengembangan laboratorium (PDD). Anggaran pengembangan laboratorium (PDD) tersebut dialokasikan pada belanja barang persediaan barang konsumsi, yang mencakup pengadaan reagen kimia sebesar Rp16.658.000 dan pengadaan media mikrobiologi sebesar Rp8.673.000. Besaran anggaran pengadaan reagen kimia dan media mikrobiologi tersebut pada dasarnya belum mencukupi untuk menunjang kebutuhan pengujian sampel secara optimal. Namun demikian, pada tahun 2025 pelaksanaan pengujian rutin masih dilakukan di balai besar POM di Makassar, sehingga kebutuhan reagen kimia dan media mikrobiologi untuk kegiatan pengujian masih didukung dan difasilitasi oleh balai besar POM di Makassar.

IKU.6 Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

a. Perbandingan Target 2025 dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel 28. Perbandingan target 2025 dan realisasi kinerja tahun 2025 IKSK Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Palopo	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	91,7%	91,7%	100	Baik

Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder didefinisikan sebagai berikut.

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:

- Pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan);
- Lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Tindak lanjut adalah feedback/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT. Dasar penerbitan keputusan/rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan.

Cara perhitungan dan formula :

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan = (A+B)/2

A = Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha / Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha) x 100%

B = Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor / Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor) x 100%

Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi keputusan/rekomendasi sampai dengan bulan n.

Contoh:

%B3 = (Total pembilang (B1+B2+B3)) / (Total penyebut (B1+B2+B3)) x 100%

Pada Tahun 2025, jumlah keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Balai POM di Palopo adalah 265 (dua ratus enam puluh lima). Diperoleh keputusan/rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha sebesar 91,7 % dan keputusan/rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor 91,71 %. Sehingga diperoleh realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan sebesar 91,70 % dengan capaian 100%. Target tercapai dengan kategori **baik**.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun - Tahun Sebelumnya

Tahun 2025 merupakan tahun pertama penerapan Renstra sehingga tren perbandingan realisasi dan capaian kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya belum dapat dipetakan.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Renstra

Tabel 29. Perbandingan realisasi kinerja IKSK Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder dengan target Renstra

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra 2029	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Palopo	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh Stakeholder	92,50%	91,70%	99,14	▲ Akan Tercapai

Nilai persentase capaian diperoleh dari perbandingan antara nilai realisasi kinerja tahun 2025 dan target jangka menengah yang diambil dari nilai target tahun terakhir periode Renstra. Pada tahun 2025 sebagai tahun pertama dari periode Renstra 2025-2029, Balai POM di Palopo belum mencapai target renstra Tahun 2029 dengan kriteria **Akan Tercapai.**

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja Lain yang Sejenis

Tabel 30. Perbandingan realisasi kinerja IKSK Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder dengan UPT lainnya yang sejenis

Unit Kerja	Target 2025	Realisasi	Capaian
Balai POM di Palopo	91,70%	91,70%	100%
Balai POM di Tarakan	93%	99,47%	106,96%
Balai POM di Jember	86%	91,67%	106,59%
Balai POM di Tasikmalaya	82%	88,61%	108,06%
Target Nasional	**84,85%**		

Balai sejenis yang dimaksud adalah Balai Pengawas Obat dan Makanan di tingkat Kabupaten/Kota yang baru ditingkatkan klasifikasinya dari Loka Pengawas Obat dan Makanan (Loka POM). Balai sejenis yang dipilih diantaranya Balai POM di tarakan, Balai POM di Jember dan Balai POM di Tasikmalaya yang secara bersamaan ditingkatkan klasifikasinya dengan Balai POM di Palopo berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Seperti yang terlihat pada grafik di atas, keempat balai telah memenuhi target yang ditentukan. Balai POM di Palopo memperoleh persentase realisasi 91,7% dengan capaian 100% dengan kategori **Baik.** Sedangkan Balai POM di Tarakan, Balai POM Jember, dan Balai POM di Tasikmalaya memperoleh kategori **Sangat Baik**, dimana persentase capaiannya lebih dari 100%.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Keberhasilan pencapaian kinerja pada IKU ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain:

- Intensitas yang lebih tinggi dan detail dalam monitoring dan evaluasi terhadap rangkaian kegiatan pemeriksaan dan tindak lanjut yang dapat dipantau melalui *link* RELAKSASI.
- Kepatuhan pelaku usaha dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan
- Petugas rutin mengingatkan pelaku usaha agar mengirimkan *CAPA (Corrective Actions and Preventive Actions)* sesuai *timeline* yang diberikan.

- Melakukan kunjungan langsung ke sarana yang belum mengirimkan *CAPA* hingga timeline yang diberikan telah berakhir.

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja dan/atau Informasi Deskriptif Program/Kegiatan yang Paling Mendukung Ketercapaian Kinerja dan yang Tidak Terlalu Mendukung Ketercapaian Kinerja Berdasarkan Alokasi Anggaran

Tercapainya target indikator ini didukung oleh tersedianya anggaran untuk melakukan kunjungan langsung ke sarana dalam rangka monev *CAPA* untuk sarana yang belum mengirimkan *CAPA* hingga timeline yang diberikan telah berakhir.

Tabel 31. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

INDIKATOR	PJ KEGIATAN	KODE	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET ANGGARAN (Rp)	RELAISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN ANGGARAN (%)	TNGKAT EFISIENSI
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Pemeriksaan	QIC.004.053.C	Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	Pengawalan tindak lanjut hasil pemeriksaan	3.724.000	3.724.000	100	Efisien

IKU.7 Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Sarana produksi (Sarprod) sediaan farmasi mencakup berbagai jenis fasilitas, antara lain Sarana Produksi Obat, Bahan Baku Obat, Produk Biologi, serta Sarana Khusus seperti Unit Transfusi Darah, Fasilitas Radiofarmaka, Sel Punca, dan Rumah Sakit. Selain itu, sarana yang melakukan pembuatan ekstrak bahan alam, produk obat bahan alam, dan/atau suplemen kesehatan—baik untuk seluruh tahapan maupun sebagian tahapan produksi—meliputi industri obat tradisional, industri ekstrak bahan alam, usaha kecil obat tradisional, usaha mikro obat tradisional, dan industri suplemen kesehatan. Fasilitas produksi kosmetik juga menjadi objek pengawasan, termasuk industri kosmetik golongan A dan golongan B. Pemeriksaan dan tindak lanjut terhadap sarana-sarana tersebut dilakukan melalui tahapan yang sistematis, dimulai dari perencanaan pengawasan,

pelaksanaan inspeksi, pelaporan hasil, hingga pemberian tindak lanjut atas hasil pengawasan. Seluruh proses ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mengacu pada regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang telah ditetapkan dalam pedoman dan Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait.

Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Balai POM di Palopo diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan:

= rata-rata dari % Sarprod Obat, % Sarprod Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, % Sarprod Kosmetik yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

Cara perhitungan:

% Sarprod Kosmetik = Rata-rata (A+B+C+D)

1. Pelaksanaan inspeksi = (Jumlah realisasi pengawasan sarana/ jumlah target tahunan) X 100%.
2. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%.
3. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang sesuai / jumlah sarana yang selesai diperiksa) × 100%.
4. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = (Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindaklanjut) x 100%.

a. Perbandingan Target 2025 dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel 32. Perbandingan target 2025 dan realisasi kinerja tahun 2025 IKSK Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Meningkatnya efektivitas	Persentase sarana	80%	100%	125	Tidak Dapat

pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Palopo	produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan				Disimpulkan

Indikator Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan merupakan indikator kinerja baru yang mulai diterapkan pada tahun 2025, sekaligus menandai dimulainya periode Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029. Pada tahun 2025, telah dilaksanakan pemeriksaan terhadap 1 (satu) sarana produksi Mala kosmetik by Apt. Ira berlokasi di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan dengan nama produk ketty deodorant spray berbagai varian aroma dengan 6 (enam) nomor izin edar yang telah diterbitkan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan menunjukkan realisasi kinerja sebesar 100%, yang mencakup pelaksanaan pelaksanaan inspeksi, Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat, akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi maupun kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana. Capaian ini melampaui target yang ditetapkan sebesar 80%, dengan tingkat capaian akhir sebesar 125% dan termasuk dalam kategori “Tidak dapat disimpulkan.” Hal ini menunjukkan penetapan target yang terlalu rendah sehingga perlu dilakukan reviu target pada sisa periode renstra yaitu target tahun 2027-2029.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun - Tahun Sebelumnya

Perbandingan Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan tahun 2025 merupakan indikator yang baru diukur pada periode Renstra 2025-2029 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan realisasi pada tahun-tahun sebelumnya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Renstra

Perbandingan realisasi kinerja dengan target Renstra menyajikan evaluasi capaian kinerja Balai POM terhadap target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) hingga tahun 2029. Hal ini bertujuan untuk melihat konsistensi dan percepatan pencapaian target organisasi.

Tabel 33. Perbandingan realisasi kinerja IKSK Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan dengan target Renstra

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra 2029	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Palopo	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88%	100%	113,64	▲ Tercapai / Melampaui

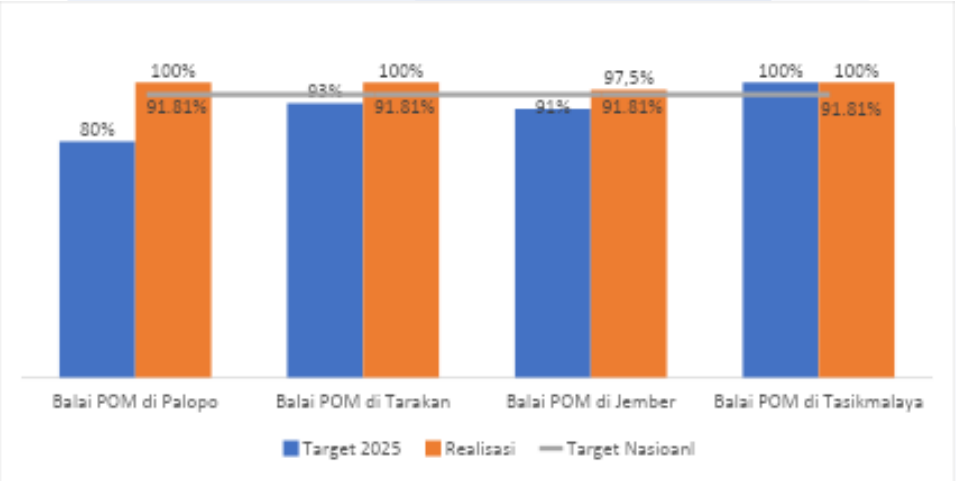
Perbandingan realisasi kinerja dengan target Rencana Strategis (Renstra) hingga tahun 2029 menunjukkan capaian yang sangat baik pada Balai POM di Palopo. Pada sasaran kegiatan *"Meningkatnya efektivitas Pengawasan Produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Palopo,"* indikator yang digunakan adalah persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Target Renstra tahun 2029 ditetapkan sebesar 88%, sedangkan realisasi yang telah dicapai mencapai 100%. Dengan demikian, tingkat capaian terhadap target Renstra adalah sebesar 113,64% dan termasuk dalam kriteria tercapai/melampaui target. Hasil ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan telah berjalan secara konsisten, efektif, dan melampaui proyeksi target jangka menengah yang telah ditetapkan.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Lain yang Sejenis

Tabel 34. Perbandingan realisasi kinerja IKSK Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan dengan UPT lainnya yang sejenis

Unit Kerja	Target 2025	Realisasi	Capaian
Balai POM di Palopo	80%	100%	125%

Balai POM di Tarakan	93%	100%	107,53%
Balai POM di Jember	91%	97,5%	107,14%
Balai POM di Tasikmalaya	100%	100%	100%
Target Nasional	**91,81%**		



Gambar 7. Perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja unit lain yang sejenis

Dalam rangka mengukur efektivitas dan posisi capaian organisasi, dilakukan analisis perbandingan kinerja Balai POM di Palopo terhadap beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT) sejenis serta Target Nasional tahun 2025. Berdasarkan data, Balai POM di Palopo mencatatkan realisasi sebesar **100%** dari target yang ditetapkan sebesar **80%**. Keberhasilan tersebut menghasilkan persentase capaian kinerja sebesar **125%**, yang menunjukkan tingkat pemenuhan target yang lebih besar jika dibandingkan dengan Balai POM di Tarakan (**107,53%**), Balai POM di Jember (**107,14%**), maupun Balai POM di Tasikmalaya (**100%**).

Lebih lanjut, realisasi Balai POM di Palopo yang mencapai angka **100%** ini berada di atas **Target Nasional** yang ditetapkan pada angka **91,81%**. Hal tersebut merefleksikan bahwa efektivitas pengawasan yang dijalankan di wilayah kerja Balai POM di Palopo telah memenuhi standar performa nasional. Pencapaian target dengan margin yang cukup signifikan ini mengindikasikan adanya tata kelola sumber daya yang memadai serta komitmen organisasi dalam menyelesaikan agenda pengawasan sesuai dengan ekspektasi yang telah ditentukan pada awal tahun anggaran.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja

ke Depan

Pada tahun 2025, sarana produksi sediaan farmasi di wilayah kerja Balai POM di Palopo berjumlah 1 (satu) sarana, yaitu Mala Kosmetik by Apt. Ira yang merupakan UMK dan telah memperoleh pendampingan serta notifikasi/izin edar pada tahun 2024. Sarana tersebut ditetapkan sebagai target pengawasan tahun 2025 dan seluruhnya telah dilakukan pemeriksaan sehingga capaian kinerja secara kuantitatif memenuhi bahkan melebihi target. Namun demikian, pemeriksaan yang dilaksanakan belum sepenuhnya menyeluruh, sehingga meskipun target tercapai, kualitas pelaksanaan pengawasan masih perlu ditingkatkan, terutama pada aspek perencanaan serta monitoring dan evaluasi.

Perencanaan pemeriksaan belum disusun secara rinci sehingga belum mencakup seluruh aspek sesuai ketentuan, serta monitoring dan evaluasi belum dilakukan secara sistematis. Meskipun risiko telah diidentifikasi dan dikelola dalam manajemen risiko, diperlukan perbaikan melalui penyusunan rencana pemeriksaan berbasis regulasi dan risiko yang lebih terstruktur, optimalisasi pengawasan, serta peningkatan kapasitas petugas agar capaian kinerja ke depan lebih optimal baik dari sisi kuantitas maupun kualitas.

Rekomendasi perbaikan kinerja ke depan disertai dengan timeline penyelesaian dengan format sebagai berikut:

Tabel 35. Rekomendasi Tindak Lanjut IKSK Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas tidak menyeluruh	Sarana produksi sediaan farmasi baru menjadi target pengawasan pada tahun 2025 secara kuantitas tercapai melebihi target namun secara perencanan dan	1. Membuat perencanaan pemeriksaan 2. Melaksanakan pemeriksaan sarana produksi Sediaan Farmasi sesuai perencanaan 3. Melakukan monitoring dan evaluasi	Desember 2026	Y	O-02	Pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas tidak menyeluruh

			monitoring pencapaian target belum optimal					

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja dan/atau Informasi Deskriptif Program/Kegiatan yang Paling Mendukung Ketercapaian Kinerja dan yang Tidak Terlalu Mendukung Ketercapaian Kinerja Berdasarkan Besaran Alokasi Anggaran

Upaya perbaikan dilakukan melalui penyesuaian strategi pengawasan berbasis risiko dengan menyusun perencanaan pemeriksaan yang lebih terarah serta memastikan petugas dan tim pemeriksa melaksanakan kegiatan sesuai rencana yang telah ditetapkan. Selain itu, peningkatan kapasitas petugas dilakukan melalui partisipasi dalam pelatihan pengawasan sarana produksi sediaan farmasi guna mendukung pemeriksaan yang lebih komprehensif dan sesuai ketentuan. Evaluasi efektivitas pengawasan juga dilaksanakan secara berkala untuk memastikan setiap tahapan kegiatan berjalan optimal dan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pengawasan.

Tercapainya target indikator kinerja ini turut didukung oleh ketersediaan anggaran yang memadai untuk pelaksanaan kunjungan langsung ke sarana produksi dalam rangka pemeriksaan. Dukungan anggaran melalui pembukan blokir tersebut memastikan seluruh tahapan pengawasan dapat dilaksanakan sesuai perencanaan sehingga target yang ditetapkan dapat dicapai dan diselesaikan tepat waktu.

Berikut realisasi anggaran:

Tabel 36. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Indikator	Pj Kegiatan	Kode	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Anggaran (Rp)	Relaisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran (%)	Memadi/Tidak memadai
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi	Pemeriksaan	QIC.001.055.A	Pengawasan Sarana Produksi Obat, Obat Tradisional, Kosmetika,	Pemeriksaan Sarana Produksi Omka	43,991,000	43,988,160	99.99	Memadai

yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan			Napza, Prekursor, Makanan Dan Bahan Berbahaya					

Berdasarkan data realisasi anggaran Tahun 2025, indikator persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan didukung oleh kegiatan yang tercantum dalam POK, meliputi perencanaan pemeriksaan, koordinasi tim, kunjungan langsung ke sarana produksi kosmetika, pemeriksaan aspek teknis dan administratif, serta penyusunan laporan dan tindak lanjut. Alokasi anggaran sebesar Rp43.991.000 dengan realisasi Rp43.988.160 (99,99%) menunjukkan bahwa anggaran dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pelaksanaan pengawasan.

Besaran dan realisasi anggaran tersebut dinilai memadai karena seluruh tahapan pemeriksaan dapat dilaksanakan sesuai rencana sehingga target yang ditetapkan tercapai. Tingkat serapan anggaran yang hampir penuh mencerminkan keselarasan antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, sehingga pengawasan sarana produksi kosmetika dapat berjalan efektif dan tepat waktu.

IKU.8 Persentase sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Perbandingan Target 2025 dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel 37. Perbandingan target 2025 dan realisasi kinerja tahun 2025 IKSK Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (Termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan	Persentase sarana produksi Pangan Olahan (termasuk	85%	92,47%	108,79	Sangat Baik

Olahan di wilayah kerja Balai POM di Palopo	IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan				

Sarana Produksi pangan olahan meliputi fasilitas produksi pangan olahan, baik yang memproduksi pangan olahan dengan izin edar MD, izin edar PIRT maupun pangan olahan untuk ekspor atau bahan baku produksi sarana lain. Indikator ini mengukur sejauh mana tindak lanjut yang dilakukan terhadap pemeriksaan sarana produksi pangan olahan yang dianggap beresiko, berdasarkan pedoman pemeriksaan dan ketentuan yang berlaku, termasuk pengelolaan data sarana produksi pangan olahan. Formula yang digunakan untuk memperoleh persentase sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti = jumlah sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan / jumlah seluruh sarana yang diperiksa x 100%.

Tahun 2025 pemeriksaan sarana produksi pangan dilaksanakan sesuai SE BPOM Nomor PW.04.09.5.53.01.24.04 tahun 2024 tentang Kewajiban Produsen Pangan Olahan Memiliki Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan dan SE BPOM Nomor T-PW.04.01.5.01.25.05 tahun 2025 tentang Percepatan Kewajiban Produsen Pangan Olahan Memiliki Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik ditujukan untuk Industri Pangan yang belum memiliki IP CPPOB. Sampai dengan akhir tahun 2025 diperoleh ketepatan waktu 83,87%, ketepatan tindaklanjut 93,55%, evaluasi ketepatan grading 100%. Dengan demikian Persentase sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan memperoleh realisasi 92,47% dan capaian 108,79% dengan kategori Sangat Baik.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun - Tahun Sebelumnya

Indikator Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan indikator yang baru diukur pada periode Renstra 2025-2029 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan realisasi pada tahun-tahun sebelumnya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Renstra

Tabel 38. Perbandingan realisasi kinerja IKSK Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan dengan target Renstra

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra 2029	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Palopo	Persentase sarana produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95%	92,47%	97,34	▲ Akan Tercapai

Realisasi IKSK Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 92,47 % . Apabila dibandingkan dengan target akhir periode Renstra 2025 – 2029 sebesar 95 %, capaiannya telah mencapai 97,34 % dari target akhir Renstra. Capaian ini dinilai progresif dan berada pada jalur yang tepat untuk memenuhi target pada akhir periode Renstra. Hal ini mengingat tahun 2025 merupakan tahun pertama periode Renstra sekaligus tahun awal pengukuran indikator ini, sehingga masih diperlukan upaya Upaya pembinaan kepada pelaku usaha produksi pangan olahan dan pembinaan kepada petugas yang akan melakukan pemeriksaan sarana produksi pangan olahan.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Lain yang Sejenis

Tabel 39. Perbandingan realisasi kinerja IKSK Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan dengan UPT lainnya yang sejenis

Unit Kerja	Target 2025	Realisasi	Capaian
Balai POM di Palopo	85%	92,47%	108,79%
Balai POM di Tarakan	88%	100%	113,64%
Balai POM di Jember	80%	88,27%	110,34%
Balai POM di Tasikmalaya	91%	100%	109,89%
Target Nasional	**87,6%**		

Balai Sejenis yang dimaksud adalah Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tingkat Kabupaten/Kota yang baru ditingkatkan klasifikasinya dari Loka Pengawas Obat dan Makanan (Loka POM). Balai sejenis yang dipilih diantaranya Balai POM di Tarakan, Balai POM di Jember dan Balai POM di Tasikmalaya yang secara bersamaan ditingkatkan klasifikasinya dengan Balai POM di Palopo berdasarkan PerBPOM No. 19 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Seperti yang terlihat pada tabel di atas, bahwa perbandingan keempat balai sejenis telah mencapai target dengan persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tertinggi diperoleh Balai POM di Tarakan dengan persentase capaian sebesar 113,64 %. Terhadap target nasional yang ditentukan, keempat Balai telah memenuhi target sehingga diharapkan dapat terus meningkatkan kinerjanya dalam melakukan pemeriksaan sarana produksi pangan olahan.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Realisasi Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada tahun 2025 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 85 %. Kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai target Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan antara lain :

Tabel 40. Rekomendasi Tindak Lanjut IKSK Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase sarana produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti	Minimnya pengetahuan pelaku usaha terkait regulasi Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik	1. Pembinaan langsung pada saat pemeriksaan sarana 2. Menyampaikan informasi kegiatan	Monitoring Tindakan Perbaikan dan Pencegahan dari Pelaku Usaha.	Desember 2025	Y	SDM-04	Tidak diterapkannya Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik

			Badan POM terkait produksi pelatihan pangan olahan kepada pelaku usaha melalui kegiatan SI JALLING (Sumber Informasi Sertifikasi, Produksi, Distribusi dan Pengujian Keliling).					

Pada tahun 2025 telah diperiksa sebanyak 31 sarana produksi pangan olahan yang terdiri dari 22 sarana produksi pangan olahan MD dan 9 sarana produksi pangan olahan PIRT dengan hasil 26 sarana yang diperiksa tepat waktu, 29 sarana yang memenuhi ketepatan tindak lanjut dan 31 sarana memiliki ketepatan grading, dengan realisasi 92,47 % dan capaian 108,79 %. Masih terdapat pemeriksaan sarana yang ditindak lanjuti tidak tepat oleh petugas yang meliputi Surat Tindak lanjut yang tidak tepat dan pelaporan yang tidak tepat. Upaya yang telah dilakukan adalah Monitoring dan Evaluasi Persentase sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan rutin setiap bulan.

f. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Kegiatan yang menunjang capaian Persentase sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan antara lain :

a) Mengirim petugas mengikuti pelatihan FI Dasar tahap I pada bulan Maret 2025.
b) Mengingatkan petugas agar membuat Surat Tindak Lanjut sesuai ketentuan dan melaporkan tepat waktu melalui SIPT.

c) Melakukan Monitoring dan Evaluasi Persentase sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan rutin setiap bulan.

d) adanya dukungan anggaran berupa biaya perjalanan Dinas dalam dan luar kota yang memadai dalam melakukan pemeriksaan sarana produksi pangan olahan di wilayah kerja BPOM Palopo.

IKU.9 Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Sarana distribusi sediaan farmasi adalah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan dan melakukan distribusi sediaan farmasi, yang meliputi:

- Fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi obat dan bahan obat meliputi Pedagang Besar Farmasi dan Fasilitasi Pengelolaan Kefarmasian;
- Fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat meliputi Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, Apotek, Toko Obat dan fasilitas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Sarana yang melakukan distribusi obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang terdiri dari usaha perorangan badan usaha di bidang pemasaran suplemen kesehatan, distributor, agen, swalayan, apotik, toko obat, depot jamu, stokis MLM, dan pengecer;
- Fasilitas distribusi sediaan farmasi meliputi fasilitas distribusi kosmetik, yaitu fasilitas distribusi pemilik notifikasi dan fasilitas distribusi bukan pemilik notifikasi.

Indikator ini mengukur persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang telah diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pengawasan yang berlaku, meliputi perencanaan pengawasan, pelaksanaan inspeksi, pelaporan hasil pengawasan, serta penyelesaian tindak lanjut sesuai timeline dan standar pengawasan.

Cara Perhitungan dan Formula Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan = (A+B+C)/3

A. Persentase Fasilitas Distribusi Obat yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan.
B. Persentase Fasilitas Distribusi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan.
C. Persentase Fasilitas Distribusi Kosmetik yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan.

a. Perbandingan Target 2025 dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel 41. Perbandingan target 2025 dan realisasi kinerja tahun 2025 IKSK Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Palopo	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90%	93,37%	103,74	Sangat Baik

Berdasarkan data capaian kinerja tahun 2025, persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mencapai 93,37% dari target yang ditetapkan sebesar 90%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 103,74%.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan sarana distribusi sediaan farmasi telah melampaui target kinerja yang ditetapkan. Keberhasilan ini mencerminkan optimalnya pelaksanaan pemeriksaan, ketepatan pelaporan, serta kesesuaian tindak lanjut hasil pengawasan dengan standar dan ketentuan yang berlaku.

Tabel 42. Pemenuhan target pemeriksaan dan kesesuaian tindak lanjut

Sarana Distribusi Sediaan Farmasi	Total Diperiksa	Kesimpulan Hasil Pemeriksaan		Kesesuaian dengan Pusat	Tren Semua
		MK	TMK		
PBF / Gudang PBF	4	3	1	Sesuai	Terdapat potensi menyebabkan kerusakan mutu pada produk obat dan Pengelolaan OOT merk Komix dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dan

					menyebabkan terjadinya diversi
IFK	7	0	7	Sesuai	Kurangnya perhatian terhadap sistem mutu, sehingga obat dapat tercemar dan berdampak pada kelalaian dalam penanganan penyimpanan, pengelolaan dan penyaluran
Rumah Sakit	11	5	6	Sesuai	Suhu penyimpanan tidak sesuai persyaratan (ruang >25°C, CCP tidak sesuai pada suhu 2–8°C), Monitoring suhu tidak rutin, Termometer & chiller tidak dikalibrasi, *Trolley emergency* tidak terkendali (tanpa segel/kunci, suhu tidak dipantau)
Klinik	13	4	9	Sesuai	Suhu penyimpanan tidak sesuai / tidak dimonitor / alat tidak terkalibrasi, stok opname tidak rutin atau tidak menyeluruh, dokumen pengadaan tidak terarsip sesuai ketentuan, resep tidak memuat SIP / tanda tangan dokter, Obat kedaluwarsa tidak dipisahkan atau tidak diinventaris
Puskesmas	14	9	5	Sesuai	Tidak ada atau tidak berfungsi alat monitoring suhu (ruang & kulkas), Produk rantai dingin (oxytocin, vaksin, dll.) disimpan di kulkas rumah tangga tanpa pemantauan, Tidak ada pencatatan suhu

					rutin / alat tidak terkalibrasi, ketidaktertiban pencatatan dan kartu stok, Proses penerimaan dan pengarsipan belum sesuai.
Apotek	38	16	22	Terdapat 5 ketidaksesuaian dengan hasil kesimpulan tindak lanjut pusat pusat	Terkait selisih stok fisik dengan pencatatan kartu stok, pengadaan & penyimpanan yang tidak sesuai ketentuan
Toko Obat	8	3	5	Sesuai	Stok opname tidak dilakukan secara rutin atau tidak terdokumentasi; pencatatan kartu stok tidak lengkap, selisih stok tidak diinvestigasi dan tidak terdokumentasi
Fasilitas Distribusi Obat Bahan Alam	39	20	19	Terdapat 2 sarana yang tidak sesuai dengan hasil kesimpulan Pusat	Peredaran produk TIE (Tanpa Izin Edar) yang sering disertai dengan temuan produk kedaluwarsa serta penyimpanan yang tidak sesuai (bercampur antar komoditi)
Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan	15	2	13	Terdapat 7 sarana yang tidak sesuai dengan hasil kesimpulan Pusat	Temuan pada fasilitas penyimpanan yang bercampur dengan komoditi lain dan suhu penyimpanan yang tidak sesuai
Fasilitas Distribusi Kosmetik	44	8	36	Sesuai	Kosmetik TIE dan/atau mengandung Bahan Berbahaya

Secara total, terdapat 154 sarana yang diperiksa, yang terbagi ke dalam berbagai kategori mulai dari PBF hingga fasilitas distribusi kosmetik. Hasil

pemeriksaan dikategorikan menjadi MK (Memenuhi Ketentuan) dan TMK (Tidak Memenuhi Ketentuan). Dilihat dari tingkat kepatuhan sarana, dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1) Fasilitas Distribusi Kosmetik: Memiliki angka TMK tertinggi yaitu 36 sarana dari 44 yang diperiksa.
2) Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan: Menunjukkan tingkat ketidakpatuhan yang tinggi, di mana 13 dari 15 sarana dinyatakan TMK.
3) IFK (Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota): 7 dari 7 sarana dinyatakan TMK.
4) Puskesmas memiliki performa cukup baik dengan 9 MK dari 14 sarana.
5) PBF / Gudang PBF menunjukkan tingkat kepatuhan yang relatif tinggi (3 MK dari 4 sarana).

Hasil kesesuaian tindak lanjut dengan evaluasi pusat sudah sesuai pada kategori sarana BF, IFK, RS, Klinik, Puskesmas, Toko Obat, terdapat 5 ketidaksesuaian dalam kesimpulan tindak lanjut apotek dan 2 sarana yang tidak sesuai dengan evaluasi pusat pada Fasilitas Distribusi Obat Bahan Alam. Hal ini menunjukkan kompetensi petugas telah cukup memadai dan diperlukan upaya pembinaan komprehensif kepada sarana-sarana yang memiliki tingkat penilaian TMK tertinggi.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun - Tahun Sebelumnya

Perbandingan persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025 merupakan indikator yang baru diukur pada periode Renstra 2025-2029 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan realisasi pada tahun-tahun sebelumnya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Renstra

Tabel 43. Perbandingan realisasi kinerja IKSK Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan dengan target Renstra

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra 2029	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93,25%	93,37%	100,13	▲ Tercapai / Melampaui

Palopo					

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 terhadap target jangka menengah (Renstra), persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mencapai **93,37%** dari target **93,25%** untuk capaian tahun 2029, dengan tingkat capaian **100,12%** (kategori melampaui target).

Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan fasilitas distribusi sediaan farmasi telah sesuai dengan perencanaan strategis. Keberhasilan ini mencerminkan keterlaksanaan seluruh tahapan pengawasan, mulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan inspeksi, pelaporan hasil pengawasan, hingga tindak lanjut hasil pemeriksaan yang mengacu pada regulasi, pedoman teknis, dan SOP yang berlaku.

Pencapaian pada tahun 2025 di atas target Renstra tahun 2029 juga menunjukkan bahwa tingkat pemenuhan target pemeriksaan dan kesesuaian tindak lanjut hasil pengawasan telah dilaksanakan secara optimal oleh Balai POM di Palopo. Hal ini dapat menjadi pertimbangan dalam mempertahankan angka realisasi agar tidak menurun di tahun-tahun mendatang dengan terus melaksanakan kesesuaian pelaksanaan inspeksi, target pengawasan sesuai renlak, memperhatikan kelengkapan pelaporan dan ketepatan waktu pelaporan, serta akurasi dalam penentuan kesimpulan pengawasan sarana. Balai POM di Palopo terus melakukan pembinaan, pemberian informasi edukasi melalui media sosial, dan pemberian tindak lanjut sesuai dengan pedoman dimana pemberian sanksi administratif dapat menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kepatuhan sarana distribusi sediaan farmasi.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Lain yang Sejenis

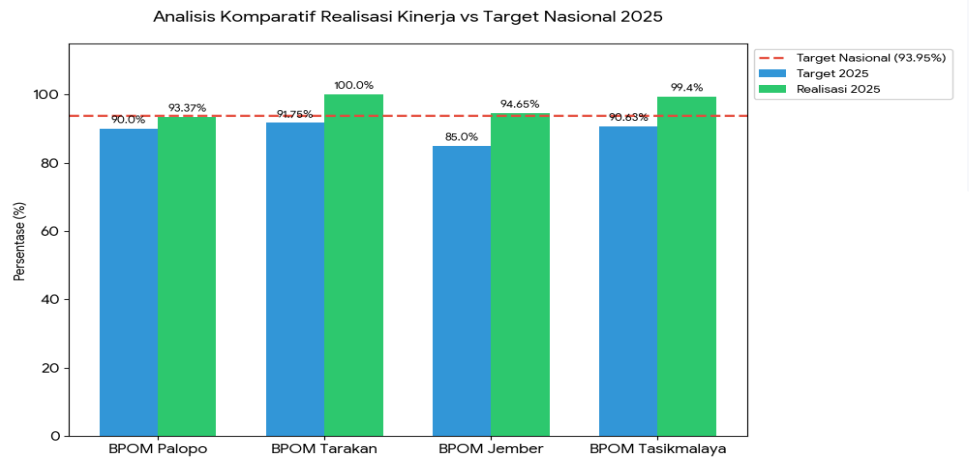
Tabel 44. Perbandingan realisasi kinerja IKSK Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan dengan UPT lainnya yang sejenis

Unit Kerja	Target 2025	Realisasi	Capaian
Balai POM di Palopo	91,70%	91,70%	100%
Balai POM di Tarakan	93%	99,47%	106,96%
Balai POM di Jember	86%	91,67%	106,59%
Balai POM di Tasikmalaya	82%	88,61%	108,06%
Target Nasional	**84,85%**		

Berdasarkan data di atas, dapat ditarik beberapa poin analisis strategis:

- Pencapaian Melampaui Target Internal: Balai POM di Palopo berhasil merealisasikan kinerja sebesar 93,37%, yang berarti melampaui target yang ditetapkan (90%). Dengan nilai capaian 103,74%, performa unit kerja dikategorikan Sangat Baik.
- Posisi Terhadap Target Nasional: Realisasi Palopo (93,37%) berada sangat dekat dengan Target Nasional (93,95%), dengan selisih tipis hanya 0,58%. Meskipun secara teknis sedikit di bawah rata-rata nasional, tren ini menunjukkan konsistensi Balai POM di Palopo dalam menjaga kualitas pengawasan di level standar tinggi.

Secara keseluruhan, Balai POM di Palopo menunjukkan performa yang solid. Meskipun realisasinya belum melampaui Target Nasional, nilai capaian di atas membuktikan bahwa unit kerja telah bekerja melampaui ekspektasi rencana kerja tahunan. Untuk meningkatkan posisi di tahun mendatang, fokus dapat diarahkan pada kesesuaian tindak lanjut agar realisasi dapat menembus angka di atas 94% guna melampaui rata-rata nasional.



Gambar 8. Perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja unit lain yang sejenis

e. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Terdapat analisis penyebab keberhasilan capaian persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan diantaranya yaitu:

1. Pelaksanaan pengawasan sarana distribusi sediaan farmasi sesuai rencana kerja (Renlak) dan perencanaan analisis berbasis risiko.

   Pemeriksaan sarana distribusi dilaksanakan sesuai target dan jadwal yang telah ditetapkan, sehingga realisasi pengawasan dapat tercapai bahkan melampaui target.

2. Kepatuhan sarana dalam melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan, dan ketepatan waktu penyampaian hasil pengawasan melalui sistem pelaporan yang berlaku yaitu SIPT.
3. Penerapan pedoman, SOP serta peraturan yang mendasari acuan tindak lanjut hasil pengawasan secara konsisten dilakukan oleh petugas.
   Pelaksanaan pemeriksaan dan tindak lanjut mengacu pada petunjuk teknis dan pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, sehingga meningkatkan kualitas kesimpulan inspeksi dan akurasi tindak lanjut.
4. Kesesuaian dokumen yang diunggah pada pelaporan SIPT serta kelengkapan pengisian penginputan data oleh petugas yang dilakukan secara tepat waktu dan sesuai dengan hasil kesimpulan pengawasan oleh BPOM Pusat.

Adapun pemenuhan capaian belum mencapai 100% terdapat beberapa poin yang mendasari:

1. Terdapat laporan hasil tindak lanjut hasil pemeriksaan yang belum sesuai dengan penilaian *independent supervisor* melalui aplikasi SIPT.
2. Kendala pengiriman SIPT yang belum tepat waktu dan kelengkapan pelaporan yang belum sesuai untuk Sarana Distribusi OBA/SK/KOS.
3. Penentuan kesimpulan hasil inspeksi belum akurat untuk Sarana Distribusi OBA/SK/KOS.
4. Dokumen hasil pemeriksaan yang diunggah kurang lengkap.

Berikut adalah rekomendasi perbaikan kinerja yang ditelah diinput ke SAPAAPIP sebagai bagian dari penerapan manajemen risiko Balai POM di Palopo.

Tabel 45. Rekomendasi Tindak Lanjut IKSK Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi Yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti	Pengawasan fasilitas distribusi sediaan farmasi belum merata ke seluruh wilayah,	Melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait	Koordinasi lintas sektor terkait rencana perjalanan ke daerah yang sulit akses transportasinya, via telepon atau	Selama tahun 2025 belum dapat dilaksanakan dan akan	Y	O-03	Masih adanya sarana sediaan farmasi yang belum diperiksa di

	Sesuai Ketentuan	khususnya ke sarana yang akses kesana terdapat kendala transportasi.		melalui pesan *whatsapp*	direkomendasikan kembali ke tahun 2026.			wilayah yang sulit dijangkau

Berdasarkan tabel di atas pengawasan fasilitas distribusi sediaan farmasi belum dapat dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah kerja, khususnya pada daerah dengan akses yang sulit dijangkau. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan transportasi serta hambatan geografis yang menyebabkan beberapa sarana distribusi belum dapat diperiksa sesuai ketentuan.

Permasalahan ini telah diidentifikasi dan dicatat sebagai risiko organisasi dengan kode risiko O-03, yaitu masih adanya sarana distribusi yang belum diperiksa di wilayah sulit dijangkau. Risiko tersebut telah dikelola dalam sistem manajemen risiko, namun efektivitas pengendaliannya belum optimal karena langkah mitigasi yang direncanakan belum sepenuhnya dilaksanakan pada tahun 2025.

Sebagai upaya pengendalian, telah direkomendasikan pelaksanaan koordinasi lintas sektor serta perencanaan kunjungan pengawasan ke daerah dengan akses terbatas, termasuk pemanfaatan komunikasi jarak jauh melalui telepon atau pesan daring. Namun demikian, selama tahun 2025 rencana tersebut belum dapat direalisasikan dan direkomendasikan untuk dilaksanakan kembali pada tahun 2026.

Kondisi ini berpotensi mempengaruhi capaian indikator kinerja, karena pemeriksaan yang belum merata dapat berdampak pada tidak optimalnya pengawasan distribusi sediaan farmasi. Oleh karena itu, pada tahun 2026 perlu dilakukan penguatan implementasi pengawasan berbasis risiko, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta perencanaan operasional yang lebih terintegrasi agar seluruh fasilitas distribusi dapat terjangkau dan indikator kinerja dapat tercapai secara optimal.

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja dan/atau Informasi Deskriptif Program/Kegiatan yang Paling Mendukung Ketercapaian Kinerja dan yang Tidak Terlalu Mendukung Ketercapaian Kinerja Berdasarkan Besaran Alokasi Anggaran

Capaian kinerja pada indikator sarana distribusi farmasi didukung oleh

pelaksanaan program pembinaan dan pengawasan yang terencana serta ketersediaan anggaran yang memadai. Kegiatan yang paling berkontribusi terhadap ketercapaian kinerja meliputi pelaksanaan bimbingan teknis (bimtek) CDOB kepada pelaku usaha secara rutin, pelaksanaan bimtek yang didukung Dana Alokasi Khusus (DAK), serta kegiatan pemantauan dan tindak lanjut *Corrective and Preventive Action* (CAPA). Program pembinaan melalui pemeriksaan rutin berbasis analisis risiko terbukti efektif dalam meningkatkan tingkat kepatuhan sarana distribusi farmasi terhadap ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan kegiatan pembinaan secara berkelanjutan berdampak pada meningkatnya tingkat pemahaman dan kesadaran pelaku usaha terhadap regulasi. Pemilihan sarana yang diperiksa berdasarkan analisis risiko serta realisasi kegiatan yang sesuai dengan rencana kerja turut meningkatkan efektivitas pemanfaatan anggaran.

Dari aspek penguatan kapasitas internal, kegiatan pengembangan kompetensi sumber daya manusia memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas pelaksanaan pengawasan. Pada tahun 2025, staf fungsi pemeriksaan dan sertifikasi mengikuti Pelatihan Inspektur CDOB Junior sebanyak 1 orang, Inspektur CDOB Senior 1 orang dan Pelatihan Inspektur Kosmetik Junior sebanyak 1 orang. Kegiatan ini mendukung peningkatan profesionalisme dan mutu pelaksanaan pemeriksaan serta pembinaan sarana.

Berdasarkan realisasi anggaran dan capaian output kegiatan, seluruh program utama menunjukkan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian kinerja. Tidak terdapat kegiatan dengan tingkat dukungan yang rendah terhadap ketercapaian indikator. Secara umum, kecukupan anggaran dan pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan menjadi faktor utama yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja.

Tabel 46. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

INDIKATOR	PJ KEGIATAN	KODE	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		TARGET ANGGARAN (Rp)	RELAISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN ANGGARAN (%)	TNGKAT EFISIENSI
Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan	Pemeriksaan	QIC.004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan	1	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan	399,498,000	399,390,531	99,97%	Efisien

Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan			dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		Makanan yang Diperiksa oleh UPT				

IKU.10 Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Tahapan pemeriksaan dimulai dari perencanaan cakupan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan, hingga tindak lanjut hasil pengawasan. Seluruh tahapan tersebut dilaksanakan sesuai dengan pedoman pemeriksaan sarana peredaran, pedoman tindak lanjut, serta Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait, yang meliputi:

a. Pemenuhan target sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa;
b. Ketepatan waktu pelaporan; dan
c. Kesesuaian tindak lanjut (tindak lanjut pemeriksaan dihitung berdasarkan tindak lanjut pertama yang diberikan setelah pemeriksaan sarana).

Cara perhitungan:

Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan dapat dihitung dengan formula sebagai berikut:

Keterangan:

✔ Jumlah sarana yang diperiksa adalah total jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan ke Pusat melalui SIPT

✔ Jumlah sarana yang diperiksa sesuai ketentuan adalah penjumlahan dari komponen- komponen sebagai berikut: jumlah sarana yang diperiksa sesuai target, ketepatan waktu pelaporan, serta ketepatan tindak lanjut (A+B+C), yaitu:

A : Pemenuhan target sarana distribusi yang diperiksa =

$$20\% \text{x } \frac{Jumlah\ Sarana\ yang\ Diperiksa\ Target}{Jumlah\ Sarana\ yang\ Diperiksa} \times 100\%$$

B : Ketepatan tindak lanjut =

$$70\% \text{x } \frac{Jumlah\ Sarana\ yang\ Ditindaktanjuti\ Sesuai\ Ketentuan}{Jumlah\ Sarana\ yang\ Diperiksa} \times 100\%$$

C : Kesesuaian waktu pelaporan =

$$10\% \text{x } \frac{Jumlah\ Sarana\ yang\ Diperiksa\ dan\ Dilaporkan\ Tepat\ Waktu}{Jumlah\ Sarana\ yang\ Diperiksa} \times 100\%$$

a. Perbandingan Target 2025 dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel 47. Perbandingan target 2025 dan realisasi kinerja tahun 2025 IKSK Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Palopo	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80%	86,67%	108,34	Sangat Baik

Realisasi indikator pemeriksaan dan tindak lanjut sarana distribusi pangan olahan Balai POM di Palopo pada tahun 2025 mencapai **86,67%**, atau setara dengan **108,34%** dari target awal sebesar **80%**. Capaian ini mencakup 63 sarana yang tersebar di seluruh wilayah kerja, dengan kontribusi nilai dari pemenuhan target (20%), ketepatan tindak lanjut (65,43%), dan ketepatan waktu pelaporan (1,24%) . Hasil tersebut menempatkan kinerja tahun 2025 pada kategori **'Sangat Baik'**.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun - Tahun Sebelumnya

Perbandingan Realisasi Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025 merupakan indikator yang baru diukur pada periode Renstra 2025-2029 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan realisasi pada tahun-tahun sebelumnya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Renstra

Tabel 48. Perbandingan realisasi kinerja IKSK Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan dengan target Renstra

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra 2029	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pengawasan	Persentase sarana distribusi	90%	86,67%	96,3	Akan

Berdasarkan data tabel di atas, berikut adalah penjelasan mengenai capaian kinerja Balai POM di Palopo:

1. **Progresivitas Target Jangka Panjang:** Realisasi saat ini sebesar **86,67%** menunjukkan bahwa Balai POM di Palopo berada pada jalur yang tepat (*on track*) menuju target akhir Rencana Strategis (Renstra) tahun 2029 sebesar **90,00%**. Selisih sebesar **3,33%** merupakan margin yang relatif kecil, sehingga target tersebut optimis dapat tercapai dalam sisa periode yang tersedia.
2. **Efektivitas Manajemen Pengawasan:** Capaian sebesar **96,30%** dengan predikat **"Akan Tercapai"** mencerminkan bahwa proses pengawasan dan tindak lanjut terhadap sarana distribusi pangan olahan telah berjalan secara sistematis. Hal ini menunjukkan kepatuhan unit kerja dalam menjalankan prosedur pemeriksaan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
3. **Optimalisasi Target:** Status **"Akan Tercapai"** memberikan indikasi kuat bahwa dengan optimalisasi sumber daya yang konsisten, Balai POM di Palopo berpotensi memenuhi target Renstra lebih awal dari tahun yang diproyeksikan (2029).

Strategi Akselerasi Menuju Target 100%

Sebagai langkah strategis pada periode Renstra 2025-2029, Balai POM di Palopo menetapkan langkah-langkah berikut untuk menutup celah (*gap*) sebesar **3,33%**:

1. **Pengawasan Berbasis Risiko:** Memprioritaskan pemeriksaan pada sarana distribusi dengan tingkat risiko tinggi. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan tanpa menimbulkan beban administratif yang berlebihan.
2. **Sinergi Lintas Sektor:** Memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Daerah dan instansi terkait untuk melakukan pembinaan terpadu bagi pelaku usaha yang belum memenuhi standar teknis.
3. **Kemandirian Pelaku Usaha:** Mendorong pengelola sarana agar mampu menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan secara mandiri. Perbaikan

tersebut diarahkan untuk meningkatkan implementasi Cara Distribusi Pangan Olahan yang Baik (CDPOB) secara berkelanjutan.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Lain yang Sejenis

Tabel 49. Perbandingan realisasi kinerja IKSK Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan dengan UPT lainnya yang sejenis

Unit Kerja	Target 2025	Realisasi	Capaian
Balai POM di Palopo	80%	86,67%	108,34%
Balai POM di Tarakan	85%	100%	117,65%
Balai POM di Jember	80%	95,17%	118,96%
Balai POM di Tasikmalaya	100%	98,74%	98,74%
Target Nasional	**86,78%**		

Berdasarkan data di atas, beberapa poin penting yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut:

1. **Efektivitas Internal:** Balai POM di Palopo berhasil melampaui target internal yang ditetapkan (**80%**) dengan realisasi sebesar **86,67%**. Capaian ini mencerminkan performa yang sangat baik dengan tingkat efektivitas kinerja mencapai **108,34%** (Kategori **Sangat Baik**).
2. **Komparasi Antar-Unit Kerja:** Meskipun menunjukkan performa positif, capaian Balai POM di Palopo masih berada di bawah Balai POM di Jember (**118,96%**) dan Tarakan. Namun, dari sisi efektivitas pencapaian target, Palopo lebih unggul dibandingkan Balai POM di Tasikmalaya yang belum mampu memenuhi target tingginya (**98,74%** dari target **100%**).
3. **Analisis Terhadap Target Nasional:** Realisasi Balai POM di Palopo (**86,67%**) terpaut tipis sebesar **1,11%** di bawah rata-rata Target Nasional (**87,78%**). Hal ini menjadi catatan strategis bahwa meskipun target internal terlampaui, diperlukan akselerasi kinerja agar dapat sejajar atau melampaui standar nasional pada periode mendatang.

Rekomendasi Strategis

Secara keseluruhan, kinerja Balai POM di Palopo tahun 2025 sudah berada pada jalur yang tepat (*on track*). Untuk meningkatkan daya saing dan kontribusi terhadap capaian nasional, unit kerja disarankan untuk:

1. **Melaksanakan Studi Tiru:** Mengkaji proses bisnis di Balai POM Jember atau Tarakan untuk mengadopsi strategi praktis dalam mempercepat realisasi target.

2. **Optimalisasi Sumber Daya:** Mengidentifikasi secara mendalam hambatan teknis yang menyebabkan realisasi belum menembus ambang batas nasional, serta mengalokasikan sumber daya secara lebih presisi untuk menutup celah (*gap*) kinerja tersebut.

e. Perbandingan Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

1. Untuk menunjang keberhasilan capaian kinerja pada indikator kinerja ini telah dilakukan kegiatan yang mendukung diantaranya:
   a. Pelaksanaan pengawasan sesuai perencanaan dan melakukan verifikasi pelaporan hasil pengawasan sesuai dengan pedoman yang berlaku yang akan dilakukan setiap bulan untuk mempertahankan capaian kinerja tetap baik.
   b. Adanya peningkatan kesadaran pelaku usaha di wilayah kerja Palopo dalam mengikuti rekomendasi perbaikan pasca-pemeriksaan.
   c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaporan hasil pemeriksaan sarana melalui aplikasi SIPT sesuai batas waktu yang telah ditentukan.
2. Untuk penyempurnaan dan meminimalkan penurunan kinerja sebagai rekomendasi perbaikan dilakukan upaya diantaranya :
   a. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan target pemeriksaan, pelaporan dan tindak lanjutnya.
   b. Pelatihan dan Refreshment terkait Cara Distribusi Pangan Olahan yang Baik akan dapat meningkatkan pemahaman dan ketepatan pemeriksaan sarana distribusi pangan.
   c. Mengingatkan petugas agar membuat Surat Tindak Lanjut sesuai ketentuan dan melaporkan tepat waktu melalui SIPT.
   d. Memaksimalkan alokasi anggaran untuk menunjang pengawasan yang optimal.
   e. Melakukan pembinaan langsung disarana distribusi pangan olahan untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha sarana distribusi pangan olahan.

Rekomendasi perbaikan kinerja ke depan disertai dengan timeline penyelesaian dengan format sebagai berikut:

Tabel 50. Rekomendasi Tindak Lanjut IKSK Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Minimnya pengetahuan pelaku usaha terkait regulasi cara produksi pangan olahan yang baik	1. Pembinaan langsung pada saat pemeriksaan sarana 2. Menyampaikan informasi kegiatan Badan POM terkait pelatihan pangan olahan kepada pelaku usaha melalui kegiatan SI JALING (Sumber Informasi Sertifikasi, Produksim Distribusi dan Pengujian Keliling)	4. Pelaksanaan pemeriksaan yang dirangkaikan dengan pembinaan bagi pelaku usaha di sarana distribusi pangan olahan sepanjang tahun 2026 5. Edukasi pelaku usaha distribusi pangan olahan melalui chat WA atau flyer dan lain - lain	Desember 2025	Y	O-04	Tidak diterapkannya cara produksi pangan olahan yang baik

f. Perbandingan Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja dan/atau Informasi Deskriptif Program/Kegiatan yang Paling Mendukung Ketercapaian Kinerja dan yang Tidak Terlalu Mendukung Ketercapaian Kinerja Berdasarkan Besaran Alokasi Anggaran

Beberapa kegiatan utama yang menunjang tercapainya indikator persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan meliputi optimalisasi penyusunan rekomendasi dan pelaporan, di mana seluruh petugas pemeriksa secara konsisten menyusun rekomendasi tindak lanjut serta melakukan pelaporan melalui sistem SIPT secara tepat waktu, sehingga berkontribusi signifikan terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Selain itu, pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara rutin setiap bulan terhadap progres pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan juga menjadi faktor pendukung, dengan ruang lingkup evaluasi yang

mencakup kesesuaian jumlah sarana yang diperiksa, pemenuhan target, serta ketepatan waktu pelaporan dan tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

Tercapainya target indikator kinerja ini turut didukung oleh ketersediaan anggaran yang memadai untuk pelaksanaan kunjungan langsung ke sarana produksi dalam rangka pemeriksaan. Dukungan anggaran melalui pembukan blokir tersebut memastikan seluruh tahapan pengawasan dapat dilaksanakan sesuai perencanaan sehingga target yang ditetapkan dapat dicapai dan diselesaikan tepat waktu. Berikut realisasi anggaran:

Tabel 51. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator	Pj Kegiatan	Kode	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Anggaran (Rp)	Relaisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran (%)	Memadi/ Tidak memadai
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Pemeriksaan	QIC.003.055.A	Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	Pemeriksaan Sarana Distribusi OMKA	189,267,000	189,266,621	100	Memadai

Tercapainya target indikator persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan didukung oleh ketersediaan anggaran yang memadai untuk pelaksanaan kegiatan pemeriksaan. Dukungan anggaran, termasuk melalui pembukaan blokir, memungkinkan dilaksanakannya kunjungan langsung ke sarana distribusi sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, seluruh tahapan pengawasan, mulai dari persiapan, pelaksanaan pemeriksaan, hingga pelaporan dan tindak lanjut, dapat berjalan tepat waktu dan sesuai ketentuan.

Berdasarkan data realisasi anggaran, kegiatan dilaksanakan melalui kode QIC.003.055.A pada subkegiatan Pemeriksaan Sarana Distribusi OMKA dengan alokasi anggaran sebesar Rp189.267.000 dan realisasi sebesar Rp189.266.621 atau mencapai 100%. Tingkat serapan anggaran tersebut menunjukkan bahwa alokasi yang tersedia telah dimanfaatkan secara optimal

dan dinilai memadai dalam mendukung ketercapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

IKU.11 Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

a. Perbandingan Target 2025 dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel 52. Perbandingan target 2025 dan realisasi kinerja tahun 2025 IKSK Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Palopo	Persentase iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	90,6%	97,47%	107,58	Sangat Baik

Iklan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan dalam bentuk visual, audio, audiovisual, untuk pemasaran dan/atau perdagangan Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan.

Cara Perhitungan: Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan = (A+B+C+D+E)/5.

A. Persentase Iklan obat yang diawasi sesuai ketentuan = (a+b)/2
   a) Pemenuhan jumlah target pengawasan
      = (Jumlah iklan yang selesai diawasi)/(Jumlah target iklan yang diawasi) x 100%
   b) Ketepatan waktu pelaporan
      = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu)/(Jumlah target iklan yang diawasi) x 100%

B. Persentase iklan kosmetik yang diawasi sesuai ketentuan = (a+b) / 2

a) Rerata persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target = Jumlah persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target / jumlah media (4)
   - Persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target = (capaian jumlah iklan per media / jumlah target per media) x 100%.
     Keterangan: capaian per media tidak lebih dari sama dengan 100%

b) Rerata persentase iklan yang dilaporkan tepat waktu = (Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT + Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat) / 2
   - Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT = (Jumlah iklan yang evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT yang tepat waktu / jumlah iklan yang dievaluasi) x 100%
   - Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat = (Jumlah iklan yang dilaporkan ke Operator Pusat yang tepat waktu / jumlah iklan yang dievaluasi) x 100%

C. Persentase iklan Obat Bahan Alam yang diawasi sesuai ketentuan = rata-rata (a+b+c)
   a) Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang selesai diawasi/ jumlah target iklan pengawasan sesuai Renlak) X 100%
   b) Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah iklan yang selesai diawasi) X 100%
   c) Akurasi pengambilan keputusan = (Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai/ jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan) X 100%

D. Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang diawasi sesuai ketentuan = rata-rata (a+b+c)
   a) Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang selesai diawasi/ jumlah target iklan pengawasan sesuai Renlak) X 100%
   b) Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah iklan yang selesai diawasi) X 100%
   c) Akurasi pengambilan keputusan = (Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai/ jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan) X 100%

E. Persentase iklan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan = (a+b+c)

a) Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang diawasi/ jumlah target iklan sesuai renlak) X 40%

b) Kesesuaian proporsi media iklan yang disampling = Rata-rata dari perhitungan ((jumlah iklan yang diawasi permedia iklan/jumlah iklan yang diawasi) / proporsi target media)X 20%

c) Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah iklan yang diawasi) X 40%

Catatan: poin a dan b, jika realisasi di atas target maka realisasi maksimal dihitung 100%.

Realisasi hasil pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan Tahun 2025 adalah 97,47 % dengan capaian 107,58%. Target tercapai dengan kategori **Sangat Baik.**

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun - Tahun Sebelumnya

Tahun 2025 merupakan tahun pertama penerapan Renstra sehingga tren perbandingan realisasi dan capaian kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya belum dapat dipetakan.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Renstra

Tabel 53. Perbandingan realisasi kinerja IKSK Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan dengan target Renstra

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra 2029	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Palopo	Persentase iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	95%	97,47%	102,6	▲ Tercapai / Melampaui

Nilai persentase capaian diperoleh dari perbandingan antara nilai realisasi kinerja tahun 2025 dan target jangka menengah yang diambil dari nilai target tahun terakhir periode Renstra. Pada tahun 2025 sebagai tahun pertama dari

periode Renstra 2025-2029, Balai POM di Palopo sudah tercapai target renstra 2029 dengan kriteria **Tercapai/Melampaui**.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Lain yang Sejenis

Tabel 54. Perbandingan realisasi kinerja IKSK Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan dengan UPT lainnya yang sejenis

Unit Kerja	Target 2025	Realisasi	Capaian
Balai POM di Palopo	90,6%	97,47%	107,58%
Balai POM di Tarakan	89,14%	99,84%	112%
Balai POM di Jember	90,8%	96,28%	106,04%
Balai POM di Tasikmalaya	91%	99,95%	109,84%
Target Nasional	**90,55%**		

Dari tabel dapat dilihat bahwa target keempat unit kerja yang dibandingkan berbeda dan berada pada rentang 89,14 – 91%, dimana keempat unit kerja yang dibandingkan telah melampaui target yang ditetapkan. Balai POM di Tarakan pencapaian dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan,** sedangkan Balai POM di Palopo, Balai POM di Jember, dan Balai POM di Tasikmalaya pencapaian dengan kriteria **Sangat Baik.** Sehingga dapat disampaikan bahwa dari keempat unit kerja yang dibandingkan telah mampu mencapai target dengan kriteria **sangat baik dan tidak dapat disimpulkan.**

e. Analis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan pada tahun 2025 sebesar 107,58% dengan kriteria tercapai/melampaui dikarenakan telah dilakukan upaya-upaya pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan antara lain:

1. Melakukan pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai target yang telah ditetapkan oleh unit pengampu.
2. Melakukan pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai target proporsi media periklanan yang diawasi yang telah ditetapkan oleh unit pengampu.
3. Melaporkan pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan melalui SIPT tepat waktu.
4. Melakukan pengambilan keputusan pengawasan iklan dan sediaan farmasi sesuai ketentuan.

5. Melakukan koordinasi dan komunikasi kepada unit pengampu apabila ada hal-hal yang perlu didiskusikan dan dikonfirmasi.
6. Melakukan monitoring dan evaluasi capaian pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan.
7. Petugas pengawasan iklan mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis dalam rangka meningkatkan kompetensi di bidang pengawasan iklan.

f. Analis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja dan/atau Informasi Deskriptif Program/Kegiatan yang Paling Mendukung Ketercapaian Kinerja dan yang Tidak Terlalu Mendukung Ketercapaian Kinerja dan yang Tidak Terlalu Mendukung Ketercapaian Kinerja Berdasarkan Besaran Alokasi Anggaran

Tercapainya target indikator ini didukung oleh beberapa faktor sebagai berikut:

a. Tersedianya anggaran perjalanan dinas untuk pelaksanaan pengawasan langsung di lapangan. Namun demikian, keterbatasan anggaran pada tahun 2025 mengakibatkan kegiatan pengawasan iklan belum dapat dilaksanakan secara optimal dan harus dilakukan bersamaan dengan penugasan lain, seperti pemeriksaan sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi serta pangan olahan.
b. Petugas pengawasan iklan mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis yang diselenggarakan secara daring sebagai upaya peningkatan kompetensi dan kapasitas dalam pelaksanaan pengawasan iklan.

IKU.12 Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar

Label Produk tembakau dan/atau rokok elektronik adalah setiap keterangan mengenai produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada produk tembakau, dimasukkan ke dalam, ditempatkan pada atau merupakan bagian dari kemasan produk tembakau. Pengawasan Label dilaksanakan dengan menilai kesesuaian terhadap standar pencantuman Peringatan Kesehatan termasuk Informasi pada Kemasan Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik. Pengawasan Label dilakukan terhadap kemasan sampel Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang diambil di peredaran (tempat penjualan dan/atau distributor). Sesuai standar berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan

mencakup peraturan pemerintah, petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan produk tembakau; pedoman tindak lanjut dan ketentuan lain yang berlaku.

Cara Perhitungan: % label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar = A+B/2

Keterangan:

1. Persentase Pemenuhan jumlah target pengawasan label : (Jumlah label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang selesai diawasi / Jumlah target pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi) x 100%.
2. Persentase ketepatan waktu pelaporan label: (Jumlah label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang selesai diawasi dan dilaporkan tepat waktu / Jumlah target pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi) x 100%.

a. Perbandingan Target 2025 dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel 55. Perbandingan target 2025 dan realisasi kinerja tahun 2025 IKSK Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Palopo	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	91%	100%	109,89	Sangat Baik

Pada Tahun 2025, target yang ditetapkan sebesar 91%, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 100%, sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 109,89% dengan kategori Sangat Baik.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik telah berhasil dilaksanakan dan melampaui target yang ditetapkan. Seluruh label produk yang menjadi objek

pengawasan dapat diperiksa sesuai standar, serta pelaporan hasil pengawasan dilakukan tepat waktu sesuai ketentuan.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun - Tahun Sebelumnya

Perbandingan persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar merupakan indikator yang baru diukur pada periode Renstra 2025-2029 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan realisasi pada tahun-tahun sebelumnya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Renstra

Tabel 56. Perbandingan realisasi kinerja IKSK Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar dengan target Renstra

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra 2029	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Palopo	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	95%	100%	105,26	▲ Tercapai / Melampaui

Berdasarkan tabel perbandingan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2025 terhadap target jangka menengah (Renstra 2029), diketahui bahwa indikator *Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar* memiliki target Renstra sebesar 95%.

Sampai dengan Tahun 2025, realisasi yang dicapai adalah sebesar 100%, sehingga diperoleh capaian sebesar 105,26% dengan kriteria melampaui target jangka menengah.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik telah melampaui target yang direncanakan dalam dokumen perencanaan strategis. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan pengawasan telah berjalan sesuai dengan rencana pelaksanaan dan konsisten, baik dari sisi pemenuhan jumlah target pengawasan maupun ketepatan waktu pelaporan hasil pengawasan.

Keberhasilan melampaui target Renstra sebelum berakhirnya periode perencanaan mencerminkan:

1. Perencanaan kegiatan pengawasan yang realistis dan terukur.
2. Optimalisasi pelaksanaan sampling dan evaluasi kesesuaian label sesuai standar.
3. Kompetensi petugas dalam pengawasan produk tembakau cukup memadai.

Meskipun target jangka menengah telah terlampaui, diperlukan upaya untuk mempertahankan capaian tersebut secara berkelanjutan, antara lain melalui peningkatan kompetensi pegawai secara berkesinambungan dan mampu menyesuaikan jika terjadi perubahan regulasi.

Secara keseluruhan, capaian ini memberikan kontribusi positif terhadap sasaran meningkatnya efektivitas pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja Balai POM di Palopo.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Lain yang Sejenis

Tabel 57. Perbandingan realisasi kinerja IKSK Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar dengan UPT lainnya yang sejenis

Unit Kerja	Target 2025	Realisasi	Capaian
Balai POM di Palopo	91%	100%	109,89%
Balai POM di Tarakan	91%	95,1%	104,5%
Balai POM di Jember	91%	97,22%	106,83%
Balai POM di Tasikmalaya	80%	89,93%	112,41%
Target Nasional	**86%**		

Berdasarkan tabel perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 pada indikator persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar, seluruh unit kerja menunjukkan capaian di atas target yang telah ditetapkan.

Adapun perbandingan realisasi antar unit kerja adalah sebagai berikut:

- Balai POM di Palopo merealisasikan capaian sebesar 100% dari target 91%, dengan persentase capaian 109,89%.
- Balai POM di Jember merealisasikan 97,22% dari target 91%, dengan capaian 106,83%.
- Balai POM di Tarakan merealisasikan 95,10% dari target 91%, dengan capaian 104,50%.
- Balai POM di Tasikmalaya merealisasikan 89,93% dari target 80%, dengan capaian 112,41%.

- Target nasional ditetapkan sebesar 86%.

Realisasi tertinggi dicapai oleh Balai POM di Palopo (100%), sedangkan capaian persentase tertinggi diperoleh Balai POM di Tasikmalaya (112,41%) karena target yang ditetapkan lebih rendah dibanding unit kerja lainnya.

Apabila dibandingkan dengan target nasional (86%), seluruh unit kerja telah melampaui standar nasional yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik pada masing-masing unit kerja telah berada di atas ekspektasi nasional.

Dari sisi perbandingan kinerja sejenis, Balai POM di Palopo menunjukkan posisi kinerja yang sangat kompetitif karena tidak hanya melampaui target internal, tetapi juga mencatat realisasi tertinggi.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Komitmen petugas dalam melaksanakan pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik dilakukan dengan pemenuhan target pengawasan label. dalam sebulan ditargetkan 2 petugas untuk melaksanakan sampling produk tembakau, sehingga terdapat kerja sama tim yang baik dan pembagian tugas yang jelas. Hasil pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik diawasi sesuai ketentuan regulasi peraturan perundang-undangan dan dilaporkan tepat waktu yaitu sebelum tanggal 5 bulan berikutnya. kompetensi pegawai cukup memadai dan telah menyesuaikan dengan regulasi terbaru dalam melakukan pengawasan. adapun pengawasan produk tembakau elektronik terdapat 2 (dua) target pada tahun 2025 dan seluruhnya dilaporkan dan dikirim tepat waktu ke Balai Penguji.

Tabel 58. Rekomendasi Tindak Lanjut IKSK Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai	Terdapat penambahan petugas, sehingga akan berdampak pada variasi	Meningkatkan kompetensi petugas dan pemahaman regulasi	Diperlukan *sharing knowledge, mentoring coaching* dari	Januari 2026	T		Pada tahun baru saat penambahan IKU berada saat

	standar	hasil penilaian jika kompetensi petugas yang baru belum memadai	terkait pengawasan label produk tembakau	petugas yang telah memiliki kompetensi				menjelang akhir tahun, sehingga belum dimasukkan pada daftar risiko tahun 2025.

Pada tahun 2025, indikator kinerja ini belum dimasukkan ke dalam daftar risiko karena proses identifikasi risiko telah dilaksanakan sebelum adanya penambahan indikator terkait persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar. Dengan demikian, indikator dimaksud belum terakomodasi dalam dokumen manajemen risiko pada tahun berjalan.

Sebagai tindak lanjut, pada Tahun 2026 akan direncanakan penyesuaian melalui pemutakhiran daftar risiko. Selain itu, akan dilakukan perubahan dan/atau penambahan anggota tim pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik guna mendukung optimalisasi pencapaian persentase pengawasan sesuai standar, sekaligus untuk pemerataan kompetensi pegawai dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan.

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja dan/atau Informasi Deskriptif Program/Kegiatan yang Paling Mendukung Ketercapaian Kinerja dan yang Tidak Terlalu Mendukung Ketercapaian Kinerja Berdasarkan Besaran Alokasi Anggaran

Berdasarkan capaian indikator Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar yang memperoleh kategori Sangat Baik dan melampaui target Rencana Strategis, dapat disimpulkan bahwa program pengawasan telah berhasil dilaksanakan.

Keberhasilan pencapaian kinerja tersebut didukung oleh beberapa faktor utama, yaitu:

1. Kerja sama tim yang solid, sehingga proses perencanaan, pelaksanaan sampling, pemeriksaan kesesuaian label, serta pelaporan hasil pengawasan dapat berjalan tepat waktu.
2. Kompetensi pegawai yang memadai, khususnya dalam memahami ketentuan regulasi pelabelan produk tembakau dan/atau rokok elektronik,

sehingga evaluasi kesesuaian label dapat dilakukan secara akurat dan sesuai standar.

3. Dukungan anggaran yang memadai, baik untuk pembelian sampel maupun untuk kegiatan perjalanan dinas dalam rangka pengawasan di wilayah kerja. Ketersediaan anggaran yang cukup memungkinkan pelaksanaan pengawasan berjalan sesuai rencana dan target yang telah ditetapkan.

Pada Tahun 2025, dilakukan sampling produk tembakau guna pengawasan label produk tembakau sebanyak 151 (seratus lima puluh satu) sampel dan 3 (tiga) sampel rokok elektronik. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa alokasi anggaran yang tersedia mampu mendukung pencapaian target pengawasan secara optimal.

IKU.13 Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT

a. Perbandingan Target 2025 dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel 59. Perbandingan target 2025 dan realisasi kinerja tahun 2025 IKSK Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di Wilayah Kerja BPOM Palopo

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Palopo	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah kerja BPOM Palopo	100%	103,96%	103,96	Sangat Baik

Resistensi Antimikroba (Antimicrobial Resistance/AMR) Adalah kemampuan mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur dan parasit untuk bertahan hidup atau berkembang meskipun telah diberikan antimikroba yang seharusnya dapat membunuh atau menghambat pertumbuhannya. Pengendalian resistensi antimicrobe (AMR) merupakan isu strategis yang menjadi perhatian global. Pengendalian AMR juga merupakan salah satu program prioritas Kepala Badan POM yang disampaikan pada Rapat Evaluasi Nasional tahun

2024. Sebagai bentuk komitmen terhadap rencana aksi nasional pengendalian AMR, diperlukan indikator Kinerja Utama khusus terkait AMR yang dapat memantau efektivitas intervensi program pengendalian resistensi antimikroba secara terukur dan berkelanjutan. Untuk level UPT, ditetapkan indikator yaitu Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT. Indikator ini mengukur kesesuaian UPT BPOM dalam melaksanakan kegiatan pengendalian AMR dan mencapai target yang telah ditetapkan.

Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di Wilayah UPT dihitung berdasarkan rerata capaian UPT dalam melaksanakan rencana aksi pengendalian AMR sesuai target yang ditetapkan, yaitu :

1. Penggunaan Tools Pengawasan AMR (A)
2. Pelaksanaan Bimtek (B)
3. Pelaksanaan Advokasi ©
4. Pelaksanaan Publikasi (D)

Penilaian pemenuhan target pengendalian AMR dihitung dengan cara :

1. 25% dari persentase jumlah penggunaan dan ketepatan pengisian tools antibiotik pada pemeriksaan apotek (A). (A) dihitung berdasarkan jumlah penggunaan tools antibiotik terhadap jumlah target apotek dan ketepatan pengisian setiap pertanyaan dalam tools antibiotik.
2. 25 % dari persentase capaian pelaksanaan bimbingan teknis terkait pengendalian resistensi antimikroba (B). (B) dihitung berdasarkan jumlah kegiatan bimbingan teknis kepada sarana pelayanan kefarmasian khususnya apotek dengan topik pengendalian resistensi antimikroba dibandingkan target tahunan bagi setiap UPT.
3. 25 % dari persentase capaian pelaksanaan advokasi lintas sektor terkait penendalian resistensi antimikroba (C). C dihitung berdasarkan jumlah kegiatan advokasi dengan stakeholder dalam topik pengendalian resistensi antimikroba dibandingkan dengan target tahunan bagi setiap UPT.
4. 25 % dari persentase capaian publikasi hasil pengawasan apotek yang menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter (D). (D) dihitung berdasarkan jumlah publikasi hasil pengawasan apotek yang menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter.

Formula : Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT **= 25 % A + 25 % B + 25 % C + 25 % D**

Pada tahun 2025 capaian dari dari target masing – masing rencana aksi pengendalian antimikroba di Balai POM Palopo adalah sebagai berikut :

1. Untuk penggunaan dan ketepatan pengisian tools antibiotik sebesar 92,67 % sementara target apotek dan ketepatan pengisian setiapikpertanyaan sebesar 80 %, sehingga nilai (A) yaitu persentase jumlah penggunaan dan ketepatan pengisian tools antibiotik sebesar 115,84 %.
2. Untuk pelaksanaan bimbingan teknis sebanyak 1 x, sementara target pelaksanaan bimbingan teknis dalam setahun sebanyak 1 x di kab. Luwu, sehingga nilai (B) yaitu Persentase capaian pelaksanaan bimbingan teknis terkait pengendalian AMR sebesar 100 %.
3. Untuk pelaksanaan advokasi terkait AMR ke lintas sektor dilaksanakan sebanyak 1 x kegiatan di Palopo, sementara target advokasi dalam setahun sebanyak 1 x, sehingga nilai (C) yaitu persentase capaian pelaksanaan advokasi lintas sektor terkait AMR sebesar 100 %.
4. Untuk pelaksanaan publikasi hasil pengawasan apotek yang menyerahkan antibiotik tanpa resep dilaksanakan sebanyak 2 x yaitu pada Tri Wulan III dan Tri Wulan IV tahun 2025, sementara target publikasi hasil pengawasan apotek yang menyerahkan antibiotik tanpa resep dalam setahun sebanyak 2 x, sehingga nilai (D) yaitu persentase capaian publikasi hasil pengawasan apotek yang menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter sebesar 100%.

Dari 4 komponen diatas kemudian masing-masing dijumlahkan lalu dibagi 4, sehingga diperoleh nilai Indikator Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah BPOM Palopo sebesar 103,96% dengan kriteria sangat baik.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun - Tahun Sebelumnya

Indikator Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT merupakan indikator yang baru diukur pada periode Renstra 2025-2029 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan realisasi pada tahun-tahun sebelumnya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Renstra

Tabel 60. Perbandingan realisasi kinerja IKSK Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di Wilayah Kerja BPOM Palopo dengan target Renstra

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria

Kegiatan	Kinerja	Renstra 2029		(%)	
Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Palopo	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah kerja BPOM Palopo	100%	103,96%	103,96	▲ Tercapai / Melampaui

Nilai Persentase capaian diperoleh dari perbandingan antara nilai realisasi kinerja tahun 2025 dan target jangka menengah yang diambil dari nilai target tahun terakhir periode Renstra. Pada tahun 2025 sebagai tahun pertama dari periode Renstra 2025-2029, Balai POM di Palopo telah mencapai nilai persentase capaian lebih dari 100% sehingga dikategorikan **Melampaui** target Renstra yang dimaksud.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Lain yang Sejenis

Tabel 61. Perbandingan realisasi kinerja IKSK Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di Wilayah Kerja BPOM Palopo dengan UPT lainnya yang sejenis

Unit Kerja	Target 2025	Realisasi	Capaian
Balai POM di Palopo	100%	103,96%	103,96%
Balai POM di Tarakan	100%	106,25%	106,25%
Balai POM di Jember	100%	106,08%	106,08%
Balai POM di Tasikmalaya	100%	105,47%	105,47%
Target Nasional	**100%**		

Balai Sejenis yang dimaksud adalah Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Tingkat Kabupaten/Kota yang baru ditingkatkan klasifikasinya dari Loka Pengawas Obat dan Makanan (Loka POM). Balai sejenis yang dipilih diantaranya Balai POM di Tarakan, Balai POM di Jember dan Balai POM di Tasikmalaya yang secara bersamaan ditingkatkan klasifikasinya dengan Balai POM di Palopo berdasarkan PerBPOM No. 19 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Seperti yang terlihat pada grafik di atas, bahwa perbandingan keempat balai sejenis telah mencapai target dengan persentase pemenuhan target pengendalian AMR tertinggi diperoleh Balai POM di Tarakan dengan

persentase realisasi sebesar 106,25 %. Terhadap target nasional yang ditentukan, keempat Balai telah memenuhi target sehingga diharapkan dapat terus meningkatkan kinerjanya dalam program pengendalian resistensi anti mikroba.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Realisasi indikator persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT pada tahun 2025 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 100 %. Kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai target Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT antara lain :

1. Mengingatkan petugas untuk senantiasa konsisten mengisi tools antibiotik dalam pemeriksaan Apotek.
2. Melakukan publikasi hasil pengawasan penyerahan antibiotik tanpa resep di media sosial yang dimiliki oleh BPOM di Palopo.
3. Melakukan advokasi kepada lintas sektor terkait pengendalian AMR, untuk tahun 2025 telah dilakukan kepada lintas sektor di Kota Palopo.
4. Memberikan bimbingan teknis kepada Penanggungjawab dan pemilik fasilitas pelayanan kefarmasian yang mengelola Antibiotik

Meskipun indikator kinerja persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT sudah tercapai namun masih ditemukan beberapa kendala dalam upaya pemenuhan target pengendalian AMR sebagai berikut :

Tabel 62. Rekomendasi Tindak Lanjut IKSK Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	1. Masih tingginya penyalahgunaan antibiotik oleh masyarakat 2. Risiko kesehatan masyarakat makin	1. Penggunaan tools AMR dalam pemeriksaan Apotek 2. Advokasi dengan pemerintah daerah untuk menggala	1. Penggunaan tools AMR dalam pemeriksaan Apotek 2. Advokasi dengan pemerintah daerah untuk menggalang komitmen penanggulang	Januari s.d. Desember 2025	T		

		meningkat 3. Resistensi antimikroba semakin cepat	ng komitmen penanggulangan resistensi antimikroba 3. Pelaksanaan bimbingan teknis terkait AMR kepada tenaga kesehatan 4. KIE terkait pencegahan resistensi antimikroba 5. Melakukan publikasi hasil pengawasan apotek yang masih menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter	an resistensi antimikroba 3. Pelaksanaan bimbingan teknis terkait AMR kepada tenaga kesehatan 4. KIE terkait pencegahan resistensi antimikroba 5. Melakukan publikasi hasil pengawasan apotek yang masih menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter				

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja dan/atau Informasi Deskriptif Program/Kegiatan yang Paling Mendukung Ketercapaian Kinerja dan yang Tidak Terlalu Mendukung Ketercapaian Kinerja Berdasarkan Besaran Alokasi Anggaran

Pencapaian indikator Persentase pemenuhan target pengendalian resistensi Antimikroba di wilayah UPT yang telah memenuhi target yaitu dengan capaian 103,96 % didukung oleh pelaksanaan beberapa kegiatan yaitu :

1. Pengisian tools antibiotik dengan benar pada setiap pemeriksaan Apotek sehingga dapat diketahui profil penyaluran antibiotik di masyarakat.
2. Advokasi ke lintas sektor terkait dan mengupayakan output dari advokasi berupa peraturan daerah atau pun surat edaran yang mengatur tentang penyerahan antibiotik di masyarakat.
3. Melakukan bimbingan teknis tidak hanya kepada pengelola fasilitas pelayanan kesehatan tetapi juga kepada pemilik fasilitas sehingga mereka mengetahui bagaimana mengelola antibiotik dengan baik.

4. Melakukan KIE terkait penggunaan antibiotik kepada masyarakat sehingga mereka dapat menggunakan antibiotik sesuai aturan.
5. Melakukan publikasi hasil pengawasan penyerahan antibiotik di fasilitas pelayanan kefarmasian.

IKU.14 Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

a. Perbandingan target 2025 dan realisasi kinerja tahun 2025

Tabel 63. Perbandingan target 2025 dan realisasi kinerja tahun 2025 IKSK Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Palopo	Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	14%	15,19%	108,5	Sangat Baik

Upaya pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan didasari pada ketetapan dan pemberlakuan Standar Kemampuan Laboratorium Unit Pelaksana Teknis (SKL UPT) yang diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 161 Tahun 2025 tentang Standar Kemampuan Laboratorium Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Standar Kemampuan Laboratorium UPT BPOM merupakan acuan bagi UPT yang disusun berdasarkan *Good Laboratory Practice* (GLP) untuk melakukan pemantauan kapasitas dan kapabilitas laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan; melakukan pemantauan ketersediaan peralatan laboratorium; melakukan pemantauan kompetensi personel laboratorium; dan melakukan pemantauan terhadap metode yang harus diverifikasi oleh laboratorium.

Dalam Manual IKU penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) yang disepakati bersama dengan unit pengampu, berikut cara perhitungan dan formula Nilai Standar Kemampuan Laboratorium sesuai tingkat laboratorium yakni tingkat 2 untuk Balai POM di Palopo.

Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 2 untuk Laboratorium Balai POM di tingkat Kabupaten/Kota =

(75 x a) + (15% x b) + (10 % x c)

a : Nilai pemenuhan SRL Balai POM di kab/kota = (rata-rata nilai pemenuhan SRL kimia + nilai pemenuhan SRL biologi) / 2.

b : Nilai pemenuhan Standar Peralatan Balai POM di kab/kota = (nilai pemenuhan standar Peralatan kimia + nilai pemenuhan standar biologi) / 2.

c : Nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium Balai POM di kab/kota = jumlah dari nilai kompetensi lab.

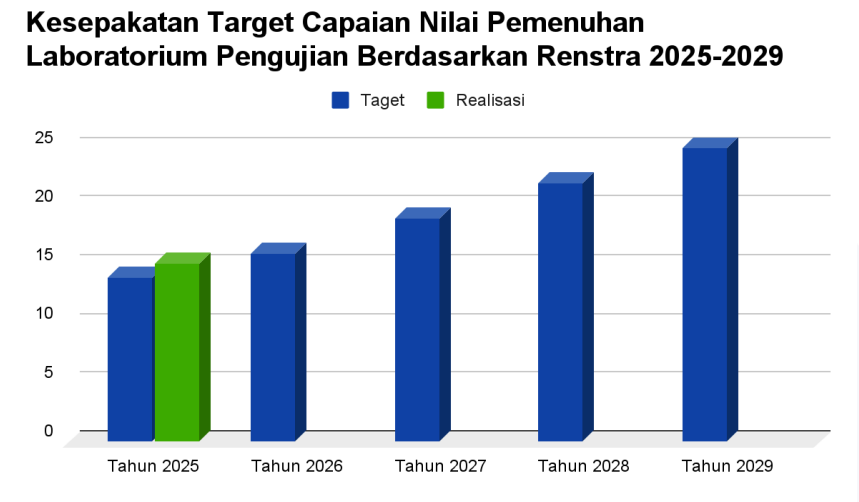
Berdasarkan penilaian capaian pemenuhan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan (PPPOMN) terkait SKL UPT pada tahun 2025, dinyatakan bahwa Balai POM di Palopo mencapai realisasi 15,19. Realisasi tersebut dibandingkan dengan kesepakatan target dan diperoleh persentase capaian pemenuhan IKU 108,5% dengan kategori capaian **Sangat Baik** seperti yang ditampilkan pada tabel 62. Keberhasilan pencapaian ini didukung oleh telah terpenuhinya kompetensi penguji untuk penilaian standar kemampuan laboratorium pada TW IV; telah terealisasinya target pengujian obat secara *rapid test* dan verifikasi metode analisis mikrobiologi menggunakan media *ready to use*; serta telah terselesaikannya pengadaan alat laboratorium tahun 2025.

IKU ini merupakan indikator yang baru untuk periode Renstra 2025-2029 sehingga tidak terdapat *baseline data* pada tahun sebelumnya untuk menjadi *baseline* target awal Renstra di tahun 2025. Oleh karena tahun 2025 ini juga merupakan tahun pertama pemberlakuan perubahan Renstra, maka pengukuran capaian dari UPT belum dapat tergambarkan.

b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun - tahun sebelumnya

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa IKU pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan UPT sesuai SKL pada Balai POM di Palopo pertama kali diterapkan pada tahun 2025

sehingga tren perbandingan realisasi dan capaian kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya belum dapat digambarkan.



Gambar 9. Kesepakatan Target Capaian Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Berdasarkan Renstra 2025-2029

Berdasarkan hasil *desk* kesepakatan target UPT terkait target nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai SKL Balai POM di Palopo dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 akan terus meningkat seperti grafik pada gambar. Hal ini menjadi dorongan Balai POM di Palopo untuk dapat melakukan upaya dalam meningkatkan kualitas laboratorium pengujian dengan terus melakukan peningkatan komponen-komponen SKL berupa Standar Ruang Lingkup (SRL), Standar Peralatan dan Standar Kompetensi Personel Laboratorium.

c. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Renstra

Tabel 64. Perbandingan realisasi kinerja IKSK Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium dengan target Renstra

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra 2029	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Palopo	Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan	25%	15,19%	60,76	▼ Perlu Upaya Keras

	Laboratorium				

Nilai persentase capaian diperoleh dari perbandingan antara nilai realisasi kinerja tahun 2025 dan target jangka menengah yang diambil dari nilai target tahun terakhir periode Renstra. Dari tahun pertama pelaksanaan IKU pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan pada Balai POM di Palopo, nilai persentase capaian masih kurang dari 70% sehingga dikategorikan masih **Perlu Upaya Keras** dalam mencapai target Renstra yang dimaksud.

Hal yang mendasari capaian masih belum sesuai dengan ekspektasi yakni nilai realisasi yang diperoleh Balai POM di Palopo merupakan pencapaian tahun pertama pemberlakuan IKU pemenuhan laboratorium pengujian sehingga masih diperlukan waktu untuk meningkatkan angka realisasi. Dengan peroleh nilai persentase capaian tersebut, diharapkan Balai POM di Palopo dalam empat tahun kedepan dapat mencapai target jangka menengah.

d. Perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja unit lain yang sejenis

Tabel 65. Perbandingan realisasi kinerja IKSK Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium dengan UPT lainnya yang sejenis

Unit Kerja	Target 2025	Realisasi	Capaian
Balai POM di Palopo	14%	15,19%	108,50%
Balai POM di Tarakan	39,10%	42,80%	109,46%
Balai POM di Jember	14%	15,25%	108,93%
Balai POM di Tasikmalaya	14%	14,92%	106,57%
Target Nasional	**60,80%**		

Balai sejenis yang dimaksud adalah Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten/Kota yang mulai mengelola laboratoriumnya sendiri. Laboratorium pada balai tersebut dikategorikan sebagai Laboratorium Tingkat 2. Seperti yang terlihat pada grafik, bahwa keempat balai sejenis telah mencapai kesepakatan target dengan nilai pemenuhan laboratorium pengujian tertinggi diperoleh oleh Balai POM di Tarakan. Terhadap target nasional yang

ditentukan, keempat balai belum memenuhi target sehingga diharapkan dapat terus meningkatkan kinerjanya dalam pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Mengacu pada perbandingan target dan realisasi kinerja Balai POM di Palopo untuk IKU nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan tahun 2025, terpenuhinya target dengan capaian yang sangat baik diperoleh unsur penilaian pada TW IV sebagai berikut:

Tabel 66. Penilaian Komponen Standar Kemampuan Laboratorium

NO	KOMPONEN STANDAR KEMAMPUAN LABORATORIUM	NILAI (%)	NILAI SKL (%)	TARGET (%)	CAPAIAN (%)
1	Standar Ruang Lingkup	4,40	15,19	14	108,48
2	Standar Peralatan	39,24			
3	Standar Kompetensi Laboratorium	60,00			

Upaya yang telah dilakukan pada tahun 2025 untuk mencapai target antara lain :

a. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan setiap komponen pemenuhan SKL untuk diselesaikan sesuai target.
b. Melakukan pengujian dan verifikasi metode analisis pada laboratorium kimia secara *rapid test* dan pada laboratorium mikrobiologi menggunakan media *ready to use* semaksimal mungkin sesuai jadwal.
c. Melakukan pengadaan peralatan yang harus dimiliki laboratorium tingkat 2 agar dapat menguji sesuai lingkup. Dilanjutkan dengan pemeliharaan, perawatan dan kalibrasi peralatan sesuai standar operasional penggunaan alat.
d. Mendorong personel untuk menyelesaikan target kebutuhan peningkatan kompetensi sehingga setiap parameter ruang lingkup yang diampu dapat dikuasai minimal dua penguji.

Adapun dalam keberjalanan pelaksanaan IKU pemenuhan laboratorium pengujian ini ditemui beberapa kendala yang kemudian dikelola untuk memperoleh tindak lanjut berupa rekomendasi perbaikan kinerja ke depan

disertai dengan *timeline* penyelesaian yang terdokumentasi dalam aplikasi SAPA APIP dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 67. Rekomendasi Tindak Lanjut IKSK Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Tidak dapat dilakukan pemenuhan alat secara maksimal dan pembangunan laboratorium sesuai dengan grand design yang ditetapkan	Mengoptimalkan Laboratorium yang tersedia	Mengoptimalkan Laboratorium yang tersedia	Januari s.d. Desember 2025	Y	O-07	Sarana dan Prasarana belum memadai untuk pemenuhan alat laboratorium
2	Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Belum dapat melakukan pengujian secara mandiri dan menyeluruh	1. Memaksimalkan usulan pengadaan alat laboratorium untuk TA 2026 2. Menyesuaikan target SRL dari PPPOMN terkait pengujian yang dilakukan di Balai POM Palopo	1. Memaksimalkan usulan pengadaan alat laboratorium untuk TA 2026 2. Menyesuaikan target SRL dari PPPOMN terkait pengujian yang dilakukan di Balai POM Palopo	Januari s.d. Desember 2025	Y	O-08	Peralatan yang terdapat di Laboratorium hanya tersedia untuk beberapa parameter uji
3	Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Pelaksanaan pengujian tidak optimal karena terbatasnya personel Fungsi Tim Kerja Pengujian di Balai POM Palopo	1. Penyesuaian pembagian beban kerja dan rotasi internal sesuai kompetensi 2. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan	1. Penyesuaian pembagian beban kerja dan rotasi internal sesuai kompetensi 2. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan sertifikasi kompetensi	Januari s.d. Desember 2025	Y	SDM-07	Kelebihan beban kerja Fungsi Tim Kerja Pengujian

			sertifikasi kompetensi					

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan/atau informasi deskriptif program/kegiatan yang paling mendukung ketercapaian kinerja dan yang tidak terlalu mendukung ketercapaian kinerja berdasarkan besaran alokasi anggaran

Dalam rangka mewujudkan capaian indikator terkait nilai pemenuhan laboratorium pengujian, dilakukan kegiatan atau program dukungan berupa bimbingan teknis pengujian internal, pelatihan sistem mutu, peningkatan kompetensi pegawai, penyediaan operasional laboratorium, pengadaan suku cadang, rekalibrasi serta verifikasi metode analisis yang lebih lanjut dijelaskan pada tabel di bawah.

Tabel 68. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

INDIKATOR	PJ KEGIATAN	KODE	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		TARGET ANGGARAN (Rp)	RELAISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN ANGGARAN (%)	TNGKAT EFISIENSI
Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Pengujian	PDD.001.051	Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium	1	Pengembangan Kompetensi Pengujian di BBPOM di Makassar	63.765.000	63.763.757	100	Efisien
				2	Bimbingan Teknis Internal dalam Verifikasi Metode Analisis	14.094.000	14.093.200	99,99	Efisien
		PDD.001.054	Peningkatan Ruang Lingkup Pengujian	1	Kebutuhan penunjang Laboratorium	152.139.000	151. 806.269	99,78	Efisien
				2	Optimalisasi Fungsi Laboratorium Keliling	11.769.000	11.768.170	99,99	Efisien
				3	Koordinasi dan Advokasi dalam Rangka Peningkatan Kemampuan Laboratorium	16.056.000	16.055.780	100	Efisien
				4	Penunjang Laboratorium	13.562.000	13.561.497	100	Efisien

					Lainnya				
		RAB.001.051	Pemenuhan/ Peremajaan Alat Laboratorium	1	Pengadaan Alat Lab	548.036.000	542.943.793	99,07	Efisien
				2	Program Dukungan Manajemen	3.695.214.000	3.694.290.410	99,98	Efisien

Berdasarkan besaran alokasi anggaran yang dijabarkan pada di atas, dapat dinyatakan bahwa penggunaan anggaran digunakan seoptimal mungkin dalam menyelenggarakan kegiatan atau program yang mendukung terwujudnya capaian indikator yang sangat baik. Namun, diperlukan revisi anggaran untuk tahun ke depan agar dapat memadai untuk menyelesaikan kegiatan atau program pendukung dengan pertimbangan bertambahnya personel pengujian pada tahun 2025. Penambahan personel ini berkaitan dengan hal-hal terutama dalam peningkatan kompetensi.

IKU.15 Persentase kabupaten/kota yang didampingi dalam pencapaian kabupaten/kota pangan aman

Keamanan pangan berkontribusi besar pada beberapa isu/kebijakan pemerintah maupun isu global, diantaranya penurunan stunting, Sustainable Development Goals (SDGs), Program Makan Bergizi Gratis, dan Indonesia Emas 2045. Kabupaten/Kota Pangan Aman adalah kab/kota yang menyelenggarakan pengawasan dan pemberdayaan keamanan pangan sesuai dengan ketentuan. Kab/kota yang didampingi adalah kab/kota yang berpotensi menyelenggarakan pengawasan dan pemberdayaan keamanan pangan di sepanjang rantai pangan sesuai dengan ketentuan. Pendampingan dilakukan oleh Balai POM di Palopo yang meliputi: a) Advokasi kepada kab/kota terkait penyelenggaraan keamanan pangan di daerah, b) Mengaktivasi Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM di kab/kota, c) Mendampingi dan memastikan kab/kota mengisi tools penilaian mandiri dalam kerangka kerja TKPPOM.

Kriteria kab/kota yang berhasil didampingi antara lain:

a) Kab/kota mengisi tools penilaian mandiri secara lengkap, yang meliputi seluruh kriteria penilaian (komitmen, perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi, serta inovasi) sesuai dengan ketentuan;
b) Kab/kota mengirimkan tools penilaian mandiri (dengan nilai minimal 60).

Formula perhitungan yang digunakan adalah:

Kab/Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kab/Kota Pangan Aman	$= \frac{A}{B} x100\%$

Keterangan:
A: Jumlah kab/kota yang berhasil didampingi sesuai pedoman
B: Jumlah kab/kota di wilayah kerja UPT

a. Perbandingan target 2025 dan realisasi kinerja tahun 2025

Tabel 69. Perbandingan target 2025 dan realisasi kinerja tahun 2025 IKSK Persentase Kab/Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kab/Kota Pangan Aman

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi	Capaian (%)	Kinerja
Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BPOM Palopo	Persentase Kab/Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kab/Kota Pangan Aman	14,29%	14,29%	100%	Sangat Baik

Pada tahun 2025, indikator kinerja Persentase Kab/Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kab/Kota Pangan Aman ditetapkan dengan target sebesar 14,29%. Realisasi yang dicapai pada akhir tahun anggaran juga sebesar 14,29%, yang dihitung dari satu kabupaten yang telah didampingi dalam mengisi tools penilaian mandiri dengan nilai 65,40 dibandingkan dengan jumlah kab/kota di wilayah kerja Balai POM di Palopo yaitu sebanyak 7 kab/kota. Realisasi ini memberikan capaian sebesar 100% dengan kriteria sangat baik.

Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pendampingan kepada pemerintah kab/kota dalam rangka mewujudkan kab/kota pangan aman telah terlaksana sesuai dengan perencanaan.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Indikator Persentase Kab/Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kab/Kota Pangan Aman merupakan indikator yang baru diukur pada periode Renstra 2025-2029 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan realisasi pada tahun-tahun sebelumnya.

c. Perbandingan realisasi kinerja dengan target RENSTRA

Tabel 70. Perbandingan realisasi kinerja IKSK Persentase Kab/Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kab/Kota Pangan Aman dengan target Renstra

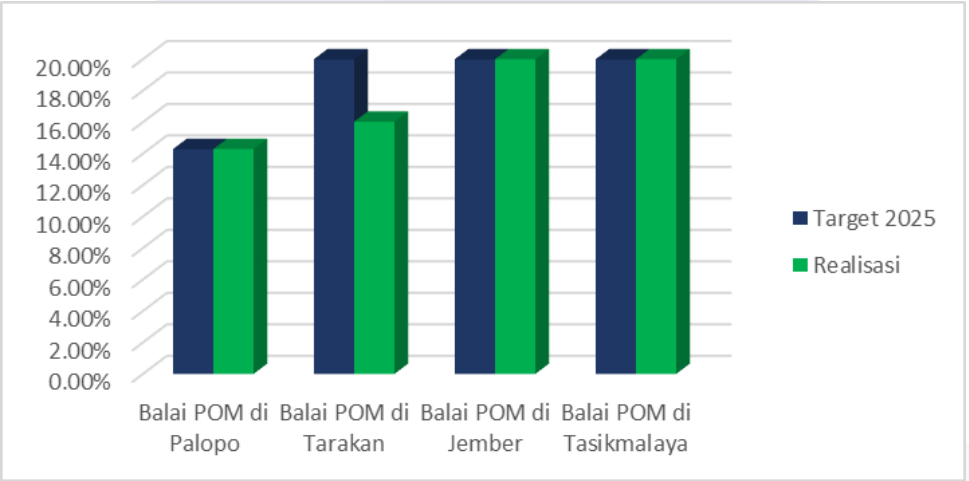
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra 2025	Realisasi	Capaian (%)	Kinerja
Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BPOM Palopo	Persentase Kab/Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kab/Kota Pangan Aman	71,43%	14,29%	20%	▲ Akan Tercapai

Realisasi IKSK Persentase Kab/Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kab/Kota Pangan Aman tahun 2025 sebesar 14,28%. Apabila dibandingkan dengan target akhir periode Renstra 2025-2029 sebesar 71,43%, capaiannya baru mencapai mencapai 20% dari target akhir Renstra. Capaian ini menunjukkan progres yang positif dan berada pada jalur yang tepat untuk memenuhi target pada akhir periode Renstra. Hal ini mengingat tahun 2025 merupakan tahun pertama periode Renstra sekaligus tahun awal pengukuran indikator ini, sehingga masih diperlukan upaya-upaya sosialisasi dan pendampingan kepada kab/kota di wilayah kerja Balai POM di Palopo guna meningkatkan kinerja TKPPOM sehingga dapat mencapai target yang ditetapkan.

d. Perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis

Tabel 71. Perbandingan realisasi kinerja IKSK Persentase Kab/Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kab/Kota Pangan Aman dengan UPT lainnya yang sejenis

Unit Kerja	Target 2025	Realisasi	Capaian
Balai POM di Palopo	14,29%	14,29%	100%
Balai POM di Tarakan	20%	16,03%	80,15%
Balai POM di Jember	20%	20%	100%
Balai POM di Tasikmalaya	20%	20%	100%
Target Nasional	**14%**		



Gambar 10. Perbandingan realisasi kinerja IKSK Persentase Kab/Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kab/Kota Pangan Aman dengan UPT lainnya yang sejenis

Berdasarkan grafik di atas, dibandingkan dengan UPT lain yang sejenis, realisasi Balai POM di Palopo merupakan realisasi terendah yaitu 14,29%, sedangkan realisasi Balai POM di Tarakan sebesar 16,03%, dan 20% untuk realisasi Balai POM di Jember dan Balai POM di Tasikmalaya. Perbedaan realisasi ini dipengaruhi oleh penentuan target dan jumlah kab/kota dalam wilayah kerja masing-masing UPT.

Meskipun realisasi kinerja dari Balai POM di Palopo merupakan yang terendah dibandingkan 3 UPT BPOM lainnya, capaian Balai POM di Palopo tetap berada pada kategori sangat baik karena telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 14,29%.

Bila dibandingkan dengan target nasional yaitu sebesar 14%, realisasi kinerja Balai POM di Palopo, Balai POM di Tarakan, Balai POM di Jember, dan Balai POM di Tasikmalaya pada indikator kinerja Persentase Kab/Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kab/Kota Pangan Aman tahun 2025 berada di atas target nasional.

e. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Capaian terhadap indikator Persentase Kab/Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kab/Kota Pangan Aman pada tahun pertama pengukuran menunjukkan kinerja yang sangat baik, yaitu 100% dari target yang ditetapkan. Keberhasilan ini didukung oleh perencanaan lokus pendampingan yang tepat, koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah, serta pelaksanaan pendampingan yang berjalan sesuai jadwal. Faktor pendukung lainnya adalah adanya komitmen pemerintah kab/kota dalam menindaklanjuti

rekomendasi hasil pendampingan, sehingga pengisian tools penilaian mandiri dapat memperoleh nilai yang maksimal.

Meskipun demikian, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pendampingan, seperti kurangnya pemahaman pemerintah daerah terkait program, kurangnya koordinasi antara OPD terkait dalam pengumpulan data dukung, dan waktu pelaksanaan yang relatif singkat karena sosialisasi terkait indikator ini baru dilaksanakan pada triwulan II tahun 2025 dengan batas akhir pengisian tools penilaian pada triwulan III tahun 2025. Di kab/kota untuk hal ini menunjukkan bahwa pendampingan yang dilakukan terhadap kab/kota telah efektif.

Tabel 72. Rekomendasi Tindak Lanjut IKSK Persentase Kab/Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kab/Kota Pangan Aman

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase Kab/Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kab/Kota Pangan Aman	Masih rendahnya pemahaman pemerintah daerah terkait program penilaian Kab/Kota Pangan Aman	Peningkatan koordinasi dan sosialisasi terkait program penilaian mandiri Kab/kota pangan Aman dengan pemerintah daerah yang menjadi target pendampingan tahun berjalan	1. Pelaksanaan advokasi lintas sektor secara luring 2. Penguatan peran Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan	Maret s.d. Desember 2026	T	-	-
		Waktu pendampingan yang terbatas karena kegiatan baru dimulai pada pertengahan tahun anggaran	Pelaksanaan pendampingan di tahun 2026 dilakukan sejak awal tahun	1. Penyusunan perencanaan dan penetapan target pendampingan 2. Kegiatan pendampingan mulai dimonitoring sejak triwulan I 2026	Triwulan I 2026	T	-	-
		Tidak tersedianya anggaran khusus untuk pelaksanaan pendampinga	Mengintegrasikan kegiatan advokasi/koordinasi kepada pemerintah daerah pada	1. Melakukan advokasi terkait KKPA kepada Pemerintah Kab. Toraja	Triwulan I 2026	T	-	-

		n kepada kab/kota di wilayah kerja Balai POM di Palopo	saat pelaksanaan pemeriksaan sarana di wilayah kab/kota yang bersangkutan	Utara pada saat pelaksanaan advokasi program Desa, Sekolah dan Pasar pendampingan 2. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kab. Luwu Utara pada saat kegiatan DAK BOK NF POM				

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan/atau informasi deskriptif program/kegiatan yang paling mendukung ketercapaian kinerja dan yang tidak terlalu mendukung ketercapaian kinerja berdasarkan besaran alokasi anggaran

Pencapaian indikator Persentase Persentase Kab/Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kab/Kota Pangan Aman yang mencapai 100%, didukung adanya DAK BOK NF BPOM yang diberikan kepada pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan terkait. Alokasi DAK Non Fisik ini memberikan penguatan signifikan terhadap kapasitas pemerintah daerah dalam melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan secara lebih terstruktur dan berkelanjutan. Melalui dukungan DAK Non Fisik BPOM, pemerintah daerah memiliki sumber pendanaan untuk melaksanakan berbagai kegiatan, seperti pengawasan sarana produksi IRTP, pembinaan pelaku usaha melalui penyuluhan keamanan pangan, sampling dan pengujian produk IRTP, serta pengawasan iklan dan label produk IRTP.

Selain itu, salah satu faktor yang mempengaruhi optimalisasi pencapaian indikator Persentase Kab/Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kab/Kota Pangan Aman adalah masih terbatasnya pemahaman petugas pendamping BPOM maupun petugas daerah dalam melengkapi dan memilah data dukung yang sesuai khususnya untuk data dukung terkait pengawasan produk pangan segar asal hewan (PSAH), pangan segar asal tumbuhan (PSAT, dan pangan segar asal ikan (PSAI). Ketiga produk tersebut merupakan komoditi yang pengawasannya secara regulatif menjadi kewenangan K/L lain.

IKU.16 Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Perbandingan target 2025 dan realisasi kinerja tahun 2025

Tabel 73. Perbandingan target 2025 dan realisasi kinerja tahun 2025 IKSK Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi	Capaian (%)	Kinerja
Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	67%	67%	100%	Baik

Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan didefinisikan sebagai berikut.

- Indikator ini mengukur sejauh mana ketercakupan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerja masing-masing UPT yang ditindak lanjuti berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku.
- Sarana Produksi Pangan Fortifikasi adalah sarana produksi pangan yang memproduksi minyak goreng sawit, garam konsumsi dan tepung terigu baik skala usaha mikro, skala usaha kecil, skala usaha menengah dan skala usaha besar.
- Sarana Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah Sarana produksi pangan fortifikasi yang berada di wilayah kerja UPT yang diperiksa dan ditindak lanjuti berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi kesesuaian tindak lanjut serta koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pemeriksaan dan hasil uji sampling produk pangan fortifikasi (jika diperlukan).

Cara perhitungan dan formula :

Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan = Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan / Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Keseluruhan yang berada di wilayah UPT X 100%.

Keterangan:

*Jumlah sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah total jumlah sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti di tahun berjalan, serta dilaporkan ke Pusat melalui SIPT.

*Jumlah sarana produksi pangan fortifikasi keseluruhan yang berada di wilayah UPT menggunakan baseline data sarana produksi pangan fortifikasi tahun 2023 yang memiliki nomor izin edar.

Realisasi hasil pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Tahun 2025 adalah 67% dengan capaian 100%. Target tercapai dengan kategori Baik.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tahun 2025 merupakan tahun pertama penerapan Renstra sehingga tren perbandingan realisasi dan capaian kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya belum dapat dipetakan.

c. Perbandingan realisasi kinerja dengan target RENSTRA

Tabel 74. Perbandingan realisasi kinerja IKSK Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan target Renstra

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra 2025	Realisasi	Capaian (%)	Kinerja
Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100%	67%	67%	▲ Akan Tercapai

Nilai persentase capaian diperoleh dari perbandingan antara nilai realisasi kinerja tahun 2025 dan target jangka menengah yang diambil dari nilai target tahun terakhir periode Renstra. Pada tahun 2025 sebagai tahun pertama dari periode Renstra 2025-2029, Balai POM di Palopo belum mencapai target renstra Tahun 2029 dengan kriteria **Akan Tercapai**.

d. Perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis

Tabel 75. Perbandingan realisasi kinerja IKSK Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan UPT lainnya yang sejenis

Unit Kerja	Target 2025	Realisasi	Capaian
Balai POM di Palopo	67%	67%	100%
Balai POM di Tarakan	0%	0%	0%
Balai POM di Jember	67%	67%	100%
Balai POM di Tasikmalaya	60%	60%	100%
Target Nasional	**59%**		

Perbandingan Capaian Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan Balai Sejenis dan Target Nasional

Dari grafik dapat dilihat Balai POM di Tarakan pada tahun 2025 tidak terdapat target untuk IKU tersebut. Sedangkan tiga unit kerja yaitu Balai POM di Palopo, Balai POM di Jember, dan Balai POM di Tasikmalaya telah mencapai target yang ditetapkan dengan kriteria **Baik**.

e. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Realisasi Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada tahun 2025 sudah mencapai target dengan kriteria baik. Pemeriksaan sarana produksi fortifikasi dilakukan setelah berkoordinasi dengan laboratorium pengujian. Pada bulan Mei 2025 telah dilakukan pemeriksaan 2 sarana fortifikasi garam sekaligus dilakukan pengambilan sampel fortifikasi. Capaian Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi pada bulan Mei sudah memenuhi target yaitu 100 % atau 67% terhadap jumlah sarana produksi pangan fortifikasi keseluruhan yang berada di wilayah Kerja Balai POM Palopo menggunakan baseline data sarana produksi pangan fortifikasi tahun 2024 yang memiliki izin edar (terdapat 3 sarana yang berada di wilayah Balai POM di Palopo). Dari 3 sarana tersebut, terdapat 1 sarana yang kemungkinan tidak akan memperpanjang perizinannya di tahun berikutnya karena kondisi keuangan tidak memungkinkan.

Rekomendasi perbaikan kinerja ke depan disertai dengan timeline penyelesaian dengan format sebagai berikut:

Tabel 76. Rekomendasi Tindak Lanjut IKSK Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase cakupan sarana produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Sebagian sarana produksi pangan fortifikasi tidak berproduksi dan/atau tidak bersedia memperpanjang perizinan karena kendala keuangan	Memperbaharui baseline data sarana produksi pangan fortifikasi dan membuat usulan perubahan target sesuai dengan data sarana produksi pangan fortifikasi terbaru	Membuat surat usulan perubahan target output kepada unit pengampu	Desember 2026	Y	O-05	Target output sarana produksi pangan fortifikasi tidak sesuai dengan database sarana terkini

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan/atau informasi deskriptif program/kegiatan yang paling mendukung ketercapaian kinerja dan yang tidak terlalu mendukung ketercapaian kinerja berdasarkan besaran alokasi anggaran

Kegiatan yang menunjang keberhasilan Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan antara lain :

a. Mengikutsertakan petugas dalam pelatihan FI dasar tahap 1 pada bulan Maret 2025
b. Mengikutsertakan petugas pada kegiatan Bimbingan Teknis Pengawasan Pangan Fortifikasi pada tanggal 19-20 Februari 2025
c. Mengingatkan petugas agar membuat Surat Tindak Lanjut sesuai ketentuan dan melaporkan tepat waktu melalui SIPT
d. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan rutin setiap bulan

e. Berkoordinasi dengan laboratorium pengujian terkait jadwal pengujian sampel pangan fortifikasi.
f. Adanya dukungan anggaran berupa biaya perjalanan dinas luar kota yang memadai dalam melakukan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi mengingat Lokasi sarana produksi pangan fortifikasi berada di wilayah pengawasan yang letaknya cukup jauh (Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Enrekang)

IKU.17 Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BPOM di Palopo

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025

Tabel 77. Perbandingan target 2025 dan realisasi kinerja tahun 2025 IKSK Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja BPOM di Palopo

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi	Capaian (%)	Kinerja
Meningkatnya Efektivitas KIE	Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT	85,01	85,84	100,98%	Sangat Baik

Tingkat Efektivitas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan diukur melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE melalui berbagai media pada tahun berjalan. Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:

a. Sumber atau Narasumber KIE
b. Konten atau Informasi KIE
c. Pemahaman Audiens KIE
d. Manfaat KIE bagi Audiens KIE

Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE BPOM di Palopo sepanjang tahun 2025. Teknik survei dapat berupa *face to face interview*, penyebaran kuesioner, dan online survei.

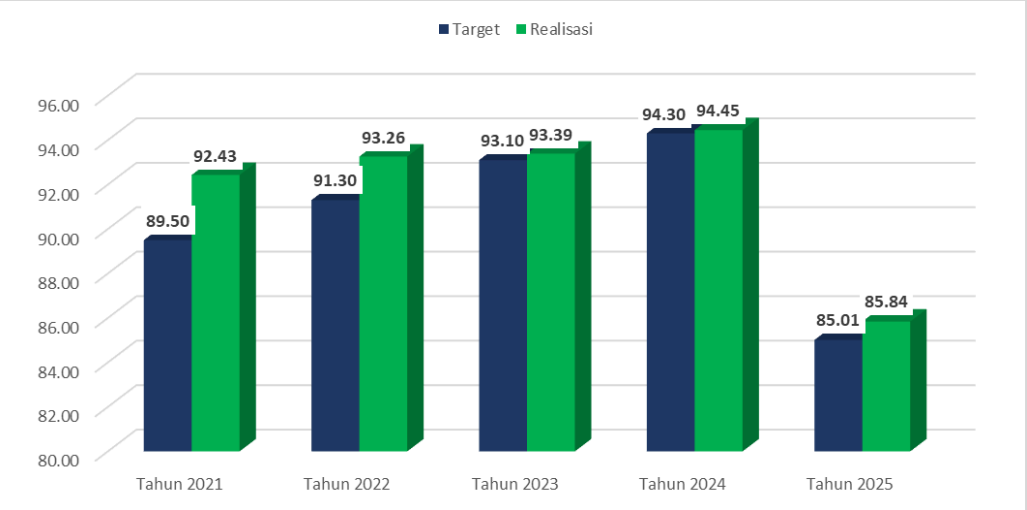
Tingkat Efektivitas Komunikas, Informasi, dan Edukasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT adalah ukuran efektivitas Pelaksanaan kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi yang dilakukan Unit Pelaksana

Teknis (UPT). Adapun ragam jenis KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) di BPOM Palopo meliputi: KIE Tatap Muka dan KIE Media Sosial.

BPOM di Palopo melaksanakan Survei Efektivitas KIE pada tahun 2025 dengan jumlah responden sebanyak 201 dari target 192 orang. Capaian Tingkat Efektivitas KIE BPOM di Palopo pada tahun 2025 adalah 85,84 dari target 85,01 atau dengan capaian 100,98% yang artinya sudah mencapai target yang ditetapkan dengan kriteria Efektif, dengan rincian masing-masing komponen sebagai berikut :

a. Narasumber/Petugas : 91,72
b. Konten/Informasi : 91,06
c. Pemahaman Audiens : 79,03
d. Manfaat : 81,56

b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya



Gambar 11. Perbandingan realisasi kinerja IKSK Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BPOM di Palopo

Berdasarkan grafik di atas, Pada tahun 2025 persentase capaian Tingkat Efektivitas KIE Balai POM di Palopo telah melampaui capaian di tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2025 terjadi penurunan target yang ditetapkan untuk indikator ini menjadi 85,01, sedangkan target di tahun 2024 adalah 94,3. Penurunan target ini dilakukan sehubungan dengan adanya perubahan pada kuesioner/survei KIE dibandingkan dengan kuesioner survei yang digunakan pada tahun-tahun sebelumnya.

Perubahan ini meliputi simplifikasi pertanyaan dan perubahan parameter/indikator pengukuran. Pada tahun 2024, kuesioner survei memuat pertanyaan yang digunakan untuk mengukur ragam kegiatan, pemahaman,

manfaat, dan minat. Sedangkan pada kuesioner survei yang digunakan pada tahun 2025, pengukuran dilakukan terpisah antara KIE Tatap Muka dan KIE Media. Pada KIE Tatap Muka, parameter yang diukur meliputi Narasumber/petugas, konten/informasi, pemahaman audiens, dan manfaat. Sedangkan untuk KIE Media, parameter yang diukur adalah sumber informasi, konten/informasi, pemahaman audiens dan manfaat.

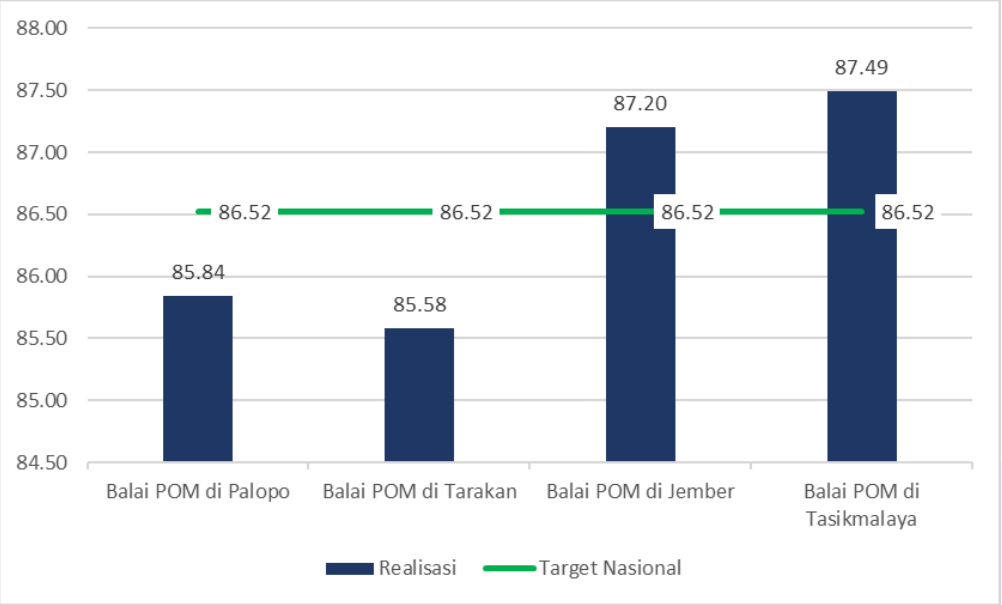
c. Perbandingan realisasi kinerja dengan target RENSTRA

Tabel 78. Perbandingan realisasi kinerja IKSKTingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja BPOM di Palopo dengan target Renstra

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra 2029	Realisasi	Capaian (%)	Kinerja
Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi di masing-masing wilayah kerja Balai POM di Palopo	Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja BPOM di Palopo	88,41	85,84	97,09%	▲ Akan Tercapai

Berdasarkan tabel di atas, realisasi kinerja Indikator Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Palopo pada tahun 2025 yaitu sebesar 85,84 masih berada di bawah target akhir periode Renstra (88,41) dengan capaian 97,09% (Akan Tercapai). Hal ini memberikan peluang bagi Balai POM di Palopo untuk terus meningkatkan kinerja pada tahun-tahun mendatang sehingga diharapkan pada tahun 2029, Balai POM di Palopo dapat mencapai target yang ditetapkan.

d. Perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis



Gambar 12. Perbandingan realisasi kinerja IKSK Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja BPOM di Palopo

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa dari perbandingan terhadap realisasi unit pembanding yang ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian klasifikasi UPT, capaian Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2025 yang tertinggi adalah BPOM di Tarakan (102,23%) dan yang terendah adalah BPOM di Palopo (100,98%). Namun demikian, baik Balai POM di Palopo maupun tiga balai lain yang dibandingkan telah berhasil mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2025.

e. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Berdasarkan hasil survei Tingkat Efektivitas KIE Tahun 2025, capaian yang diperoleh sesuai target. Hal-hal yang mempengaruhi capaian target :

1. Materi KIE yang akurat dan relevan

   Informasi yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, seperti cara memilih produk pangan yang aman, sehingga menarik perhatian peserta KIE.
2. Sasaran yang Jelas dan Spesifik

   Program KIE diarahkan kepada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan, yaitu pelaku usaha dan masyarakat yang belum pernah terpapar KIE dari BPOM.
3. Metode Penyampaian yang Tepat

KIE menggunakan pendekatan yang sesuai seperti penyuluhan tatap muka secara langsung. Kegiatan KIE juga menyediakan sesi tanya jawab atau diskusi interaktif selama penyuluhan sehingga mampu meningkatkan partisipasi aktif peserta untuk mengajukan pertanyaan dan peserta mendapatkan jawaban dari narasumber.

4. Narasumber yang Kompeten

   KIE dilakukan oleh narasumber yang memahami materi dan mampu berkomunikasi secara persuasif.

5. Ketersediaan Sarana Pendukung

   Ketersediaan alat peraga dan media visual berupa leaflet yang cukup mendukung dalam penyampaian informasi.

Rekomendasi perbaikan kinerja ke depan disertai dengan timeline penyelesaian dengan format sebagai berikut:

Tabel 79. Rekomendasi Tindak Lanjut IKSK Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja BPOM di Palopo

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT	KIE obat dan Makanan yang dilaksanakan tidak menjangkau seluruh wilayah kerja BPOM di Palopo	Pemanfaatan media lain untuk pelaksanaan KIE yang dapat menjangkau seluruh wilayah kerja Balai POM di Palopo	1. Melakukan KIE Melalui Media Sosial 2. Melakukan KIE Melalui SIPOMKLILING 3. Melakukan Penyebaran Informasi Melalui Media Cetak/*Leaflet*	Januari - Desember 2026	Y	O-01	KIE obat dan Makanan yang dilaksanakan tidak menjangkau seluruh wilayah kerja BPOM di Palopo
		Masih rendahnya keterlibatan Balai POM di Palopo dalam Edukasi terkait Stunting dalam kegiatan Penyuluhan yang dilakukan	Mengoptimalkan peran serta Balai POM di Palopo dengan sosialisasi keterkaitan keamanan pangan dengan stunting pada kegiatan Program Desa dan PPABK serta optimalisasi KIE Stunting	1. Penambahan materi terkait stunting pada Bimtek Kader dan komunitas pada program Desa, Pasar, dan Sekolah 2. Publikasi terkait stunting dilakukan setiap bulan di media sosial Balai POM di Palopo	Januari - Desember 2026	Y	R-01	Masih rendahnya keterlibatan Balai POM di Palopo dalam Edukasi terkait Stunting dalam kegiatan Penyuluhan yang dilakukan

			melalui media sosial					

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan/atau informasi deskriptif program/kegiatan yang paling mendukung ketercapaian kinerja dan yang tidak terlalu mendukung ketercapaian kinerja berdasarkan besaran alokasi anggaran

Keberhasilan capaian kinerja indikator Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang dilaksanakan oleh Balai POM di Palopo pada tahun 2025 ditunjang oleh beberapa faktor, diantaranya:

- Perencanaan kegiatan telah disusun dengan baik disesuaikan dengan struktur anggaran yang tersedia
- Kegiatan KIE tidak terbatas pada kegiatan yang bersifat pertemuan, tetapi juga dilakukan KIE *door to door* dengan mengunjungi rumah atau sarana distribusi pangan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat.
- Pelaksanaan KIE media dilakukan dengan mengoptimalkan KIE melalui media sosial yang diselaraskan dengan Agenda Setting untuk memastikan keselarasan informasi yang disampaikan oleh seluruh UPT BPOM. Pelaksanaan KIE Media sosial juga memungkinkan penyebaran informasi hingga ke wilayah Balai POM di Palopo lainnya yang tidak berkesempatan dikunjungi secara langsung.
- Adanya peningkatan kompetensi petugas yang menunjang perbaikan pelaksanaan KIE

IKU.18 Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025

Tabel 80. Perbandingan target 2025 dan realisasi kinerja tahun 2025 IKSK Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi	Capaian (%)	Kinerja
Meningkatnya Efektivitas KIE di masing - masing wilayah kerja Balai POM di	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	4	4	100%	Baik

Palopo					

Pada tahun 2025, program sekolah dengan PJAS Aman berganti menjadi Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan. Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan dihitung berdasarkan jumlah sekolah yang memiliki Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif, melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah, dan mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan.

Lokasi penyedia Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan dapat diperoleh dari jalur distribusi yang dapat diakses oleh Anak Usia Sekolah baik di sekolah, lingkungan sekitar sekolah, rumah tinggal, dan atau *e-commerce*.

Waktu akses Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan adalah sepanjang waktu, kapan pun anak usia sekolah (baik yang di sekolah maupun di rumah dan tempat lain) untuk mendapatkan keamanan pangan.

Satuan Pendidikan yang dilakukan intervensi terhadap Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan terdiri dari SD/MI/SLB, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA. Intervensi yang dilakukan terhadap Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan adalah semua tahapan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan, meliputi tahapan advokasi lintas sektor, sosialisasi keamanan pangan di sekolah, Bimtek kader keamanan pangan sekolah, pemberian paket edukasi keamanan pangan, monitoring pemberdayaan kader keamanan pangan sekolah, sertifikasi Sekolah yang Membudayakan Keamanan Pangan.

Tujuan intervensi Program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan yaitu menjamin keamanan pangan yang dikonsumsi anak usia sekolah serta memastikan anak usia sekolah khususnya dan komunitas sekolah umumnya memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku keamanan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan Kesehatan.

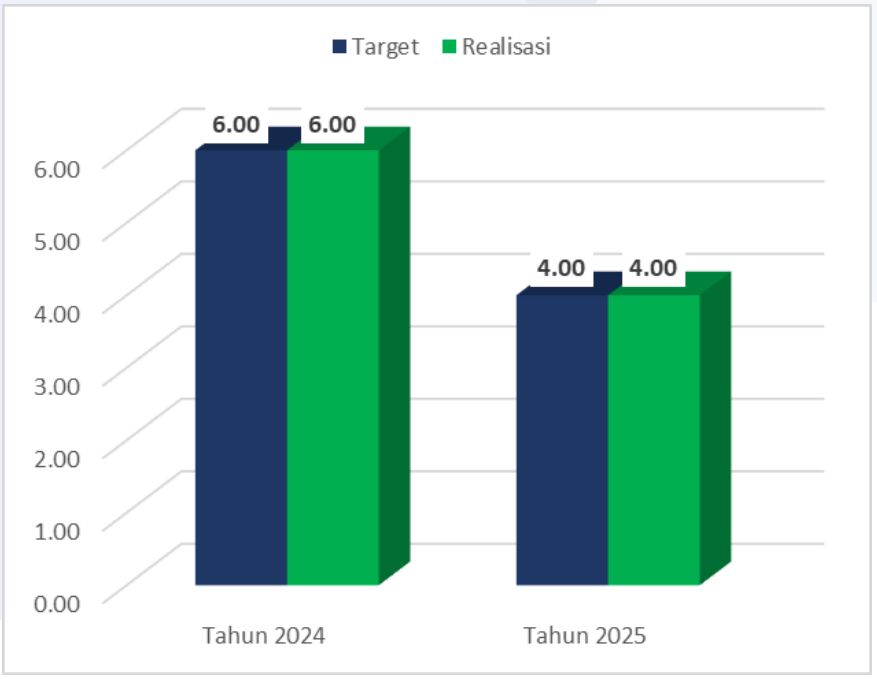
Sekolah yang dilakukan intervensi dalam Program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan terdiri dari SD/MI dan SMP/MTS, di Kab. Luwu. Target tahun 2025 adalah 4 sekolah intervensi dan 25 sekolah perluasan cakupan.

Hingga akhir triwulan IV tahun 2025, semua tahapan intervensi program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan telah

dilaksanakan sampai pengawalan sekolah yang diintervensi tahun sebelumnya dan persiapan mengikuti Lomba Nasional Program Sekolah yang Membudayakan Keamanan Pangan. Salah satu tahapan yang dilaksanakan adalah Sertifikasi Sekolah yang Membudayakan Keamanan Pangan. Dari 4 Sekolah yang diintervensi, seluruhnya memenuhi syarat untuk mendapatkan predikat Sekolah yang Membudayakan Keamanan Pangan.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

IKU Sekolah dengan Program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan pada Tahun 2024 dan 2025 terealisasi secara keseluruhan (100%). Seluruh sekolah yang menjadi target pada Tahun 2024 (6 Sekolah) dan 2025 (4 Sekolah), tercapai 100%.



Gambar 13. Perbandingan realisasi kinerja IKSK Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan

Pada tahun 2025, sejalan dengan dimulainya periode Renstra 2025 -2029, target sekolah yang diintervensi mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan struktur anggaran di Badan POM, termasuk UPT – UPT di bawahnya, akibat adanya efisiensi anggaran.

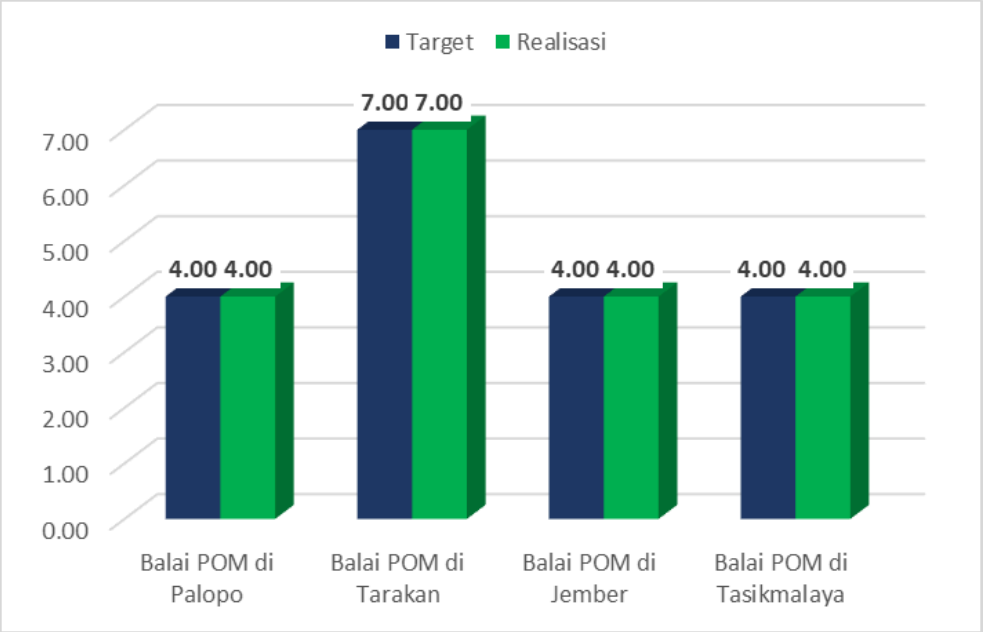
c. Perbandingan realisasi kinerja dengan target RENSTRA

Tabel 81. Perbandingan realisasi kinerja IKSK Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan dengan target Renstra

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra 2029	Realisasi	Capaian (%)	Kinerja
Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi di masing-masing wilayah kerja Balai POM di Palopo	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	8 Sekolah	4 Sekolah	50%	▼ Perlu Upaya Keras

Realisasi IKSK Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan tahun 2025 adalah sebanyak 4 (empat) sekolah, yang terdiri dari 2 (dua) Sekolah Dasar dan 2 (dua) Sekolah Menengah Pertama. Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra 2025-2029 yaitu sebanyak 8 sekolah, capaian kegiatan sudah mencapai 50% dari target akhir Renstra. Capaian ini menunjukkan progress yang positif. Meski demikian, masih diperlukan adanya upaya yang lebih keras lagi untuk mendorong secara maksimal adanya peningkatan capaian sampai dengan akhir periode Renstra.

d. Perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis



Gambar 14. Perbandingan realisasi kinerja IKSK Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan

Berdasarkan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi IKU Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan Tahun 2025 dari Balai POM di Jember, Balai POM di Tasikmalaya, dan Balai POM di Tarakan telah berhasil mencapai target yang ditetapkan dengan capaian kinerja 100%. Balai POM di Tarakan memiliki target yang lebih tinggi dibandingkan Balai POM di Palopo, Balai POM di Jember, dan Balai POM di Tasikmalaya Hal ini disebabkan karena Balai POM di Tarakan telah lebih dahulu meningkat klasifikasinya dari Loka POM menjadi Balai POM pada tahun 2021, sedangkan ketiga UPT lainnya baru menjadi balai pada Oktober 2023.

e. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan Balai POM di Palopo pada tahun 2025 menunjukkan capaian Balai POM di Palopo yang sangat baik (100%). Keberhasilan pencapaian ini didukung oleh beberapa faktor, di antaranya adanya pra advokasi yang dilakukan di awal pelaksanaan kegiatan, koordinasi yang baik dengan Dinas Pendidikan dan sekolah- sekolah yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu sebagai sekolah intervensi.

Meskipun adanya efisiensi anggaran pada Tahun 2025, tidak menyebabkan target yang ditetapkan tidak tercapai. Adanya media komunikasi bersama seluruh UPT yang melaksanakan program dan pendampingan dari PIC

program dari Direktorat PMPUPO, merupakan salah satu penunjang dari keberhasilan program tersebut, sehingga informasi mutakhir terkait pelaksanaan program maupun solusi dari kendala-kendala yang dihadapi di tingkat UPT, dan pelaksanaan program Sekolah yang Membudayakan Keamanan Pangan Tahun 2025 dapat terlaksana sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan.

Tabel 82. Rekomendasi Tindak Lanjut IKSK Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Jumlah Sekolah yang Membudayakan Keamanan Pangan	1. Sekolah yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sebagai sekolah yang akan dintervensi belum memiliki komitmen dan kesediaan keberlanjutan program. 2. Adanya efisiensi anggaran menyebabkan ada beberapa tahapan kegiatan dan penyediaan sarana bagi keamanan pangan di sekolah yang tidak terlaksana dengan baik	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program	1. Melaksanakan kegiatan pengawalan sekolah intervensi tahun 2025 pada tahun 2026 2. Mengusulkan pengadaan sarana keamanan pangan di sekolah berupa pengadaan *test* kit	Desember 2026	Y	S-02	Program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan tidak dilaksanakan secara berkelanjutan

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan/atau informasi deskriptif program/kegiatan yang paling mendukung ketercapaian kinerja dan yang tidak terlalu mendukung ketercapaian kinerja berdasarkan besaran alokasi anggaran

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja indikator Jumlah Sekolah yang Membudayakan Keamanan Pangan di wilayah kerja Balai POM Palopo pada tahun 2025 antara lain sosialisasi keamanan pangan di sekolah dan bimtek kader keamanan pangan di sekolah. Adanya koordinasi yang baik antara Balai POM di Palopo dengan sekolah yang diintervensi juga menjadi salah satu faktor penunjang keberhasilan pencapaian tersebut.

Namun demikian, pelaksanaan program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan Tahun 2025 juga mengalami beberapa kendala, terutama dari segi penganggaran kegiatan akibat adanya efisiensi anggaran. Hal ini menyebabkan adanya tahapan yang tidak terlaksana secara maksimal, disamping itu, tidak dilakukan pula pemberian *test* kit pada sekolah yang diintervensi. Sehingga pemeriksaan terhadap produk jajanan di sekolah oleh kader keamanan pangan di sekolah tidak dapat dilaksanakan secara berkala.

IKU.19 Jumlah Desa Pangan Aman

Desa Pangan Aman merupakan aksi nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat desa dalam menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang aman sampai pada tingkat perseorangan dan memperkuat ekonomi desa. Pelaksanaan Desa Pangan Aman perlu disesuaikan dengan kebijakan pemerintah saat ini dengan tujuan untuk mendukung pencapaian target pemerintah salah satunya program percepatan penurunan stunting. Kebijakan pemerintah lainnya yang perlu didukung adalah pemulihan ekonomi nasional karena dampak pandemi Covid-19. Program Desa Pangan Aman ini dapat mendukung pemulihan ekonomi di desa melalui pencapaian target-target pembangunan keberlanjutan di desa.

Intervensi keamanan pangan dalam program Desa Pangan Aman meliputi tahapan: advokasi, pelatihan kader keamanan pangan desa, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas dan fasilitasi sarana, monitoring dan evaluasi serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan. Desa yang diintervensi mempunyai kriteria antara lain: desa maju, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting, desa kerja sama dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Target jumlah desa yang diintervensi oleh Balai POM di Palopo pada tahun 2025 adalah sebanyak satu desa intervensi dan 1

desa/keluaranan yang dikawal. Keberhasilan program ini diukur dengan terpenuhinya beberapa indikator yaitu:

- Kader keamananan pangan desa yang aktif
- Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa
- Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri baik dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain

Adapun tahapan kegiatan yang wajib dipenuhi untuk desa intervensi baru program Desa Pangan Aman dengan persentase bobot per kegiatan sebagai berikut:

Tabel 83. Kegiatan Program Desa Pangan Aman

Tahapan	Bobot
Advokasi Kelembagaan Desa	25%
Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa	25%
Bimtek Komunitas	20%
Fasilitasi Keamanan Pangan	0%
Monitoring dan Evaluasi	20%
Pengawalan	10%

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025

Tabel 84. Perbandingan target 2025 dan realisasi kinerja tahun 2025 IKSK Jumlah Desa Pangan Aman

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi	Capaian (%)	Kinerja
Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi di masing-masing wilayah kerja Balai POM di Palopo	Jumlah Desa Pangan Aman	1	1	100%	Baik

Pada tahun 2025, indikator kinerja Persentase Kab/Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kab/Kota Pangan Aman ditetapkan dengan target sebesar 14,29%. Realisasi yang dicapai pada akhir tahun anggaran juga sebesar 14,29%, yang dihitung dari satu kabupaten yang telah didampingi dalam mengisi tools penilaian mandiri dengan nilai 65,40 dibandingkan dengan

jumlah kab/kota di wilayah kerja Balai POM di Palopo yaitu sebanyak 7 kab/kota. Realisasi ini memberikan capaian sebesar 100% dengan kriteria sangat baik.

Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pendampingan kepada pemerintah kab/kota dalam rangka mewujudkan kab/kota pangan aman telah terlaksana sesuai dengan perencanaan.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tabel 85. Perbandingan realisasi kinerja IKSK Jumlah Desa Pangan Aman

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Jumlah Desa Pangan Aman	2024	1 Desa	1 Desa	100	Baik
	2025	1 Desa	1 Desa	100	Baik

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024, capaian indikator Jumlah Desa Pangan Aman pada tahun 2024 dan 2025 menunjukkan kinerja yang konsisten dan sesuai dengan target yang ditetapkan. Pada kedua tahun tersebut, target intervensi sebanyak satu desa berhasil direalisasikan sepenuhnya sehingga mencapai 100%. Konsistensi capaian ini mencerminkan bahwa pelaksanaan Program Desa Pangan Aman telah dilaksanakan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan, serta didukung oleh koordinasi dan pendampingan yang efektif sehingga target kinerja dapat dipenuhi secara stabil dari tahun ke tahun.

c. Perbandingan realisasi kinerja dengan target RENSTRA

Tabel 86. Perbandingan realisasi kinerja IKSK Desa Pangan Aman dengan target Renstra

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra 2029	Realisasi	Capaian (%)	Kinerja
Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi di masing-masing wilayah kerja	Jumlah Desa Pangan Aman	3 Desa	1 Desa	33,33%	Akan Tercapai

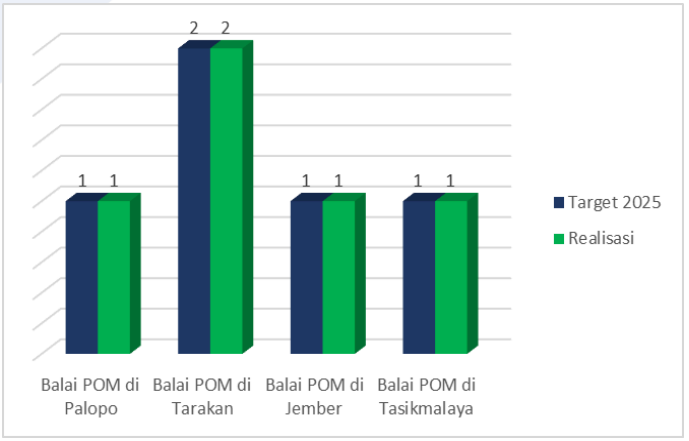
Balai POM di Palopo					

Realisasi IKSK Jumlah Desa Pangan Aman tahun 2025 adalah sebanyak satu desa. Apabila dibandingkan dengan target akhir periode Renstra 2025-2029 yaitu sebanyak 3 desa, capaiannya baru mencapai mencapai 33,33% dari target akhir Renstra. Capaian ini menunjukkan progres yang positif dan dan memungkinkan adanya peningkatan sampai dengan akhir periode Renstra. Tahun 2025 sendiri merupakan tahun kedua pelaksanaan Program Desa Pangan Aman di wilayah kerja Balai POM di Palopo.

d. Perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis

Tabel 87. Perbandingan realisasi kinerja IKSK Jumlah Desa Pangan Aman dengan UPT lainnya yang sejenis

Unit Kerja	Target 2025	Realisasi	Capaian
Balai POM di Palopo	1 Desa	1 Desa	100%
Balai POM di Tarakan	2 Desa	2 Desa	100%
Balai POM di Jember	1 Desa	1 Desa	100%
Balai POM di Tasikmalaya	1 Desa	1 Desa	100%
Target Nasional	**172 Desa**		



Gambar 15. Perbandingan realisasi kinerja IKSK Jumlah Desa Pangan Aman

Berdasarkan grafik di atas, dibandingkan dengan UPT lain yang sejenis, baik Balai POM di Palopo, Balai POM di Tarakan, Balai POM di Jember, dan Balai POM di Tasikmalaya berhasil mencapai target masing-masing. Tarakan memiliki target yang lebih tinggi dibandingkan 3 UPT lain karena sudah lebih dahulu melaksanakan program ini, yaitu sejak tahun 2023, sedangkan untuk

Balai POM di Palopo, Balai POM di Tasikmalaya dan Balai POM di Jember, merupakan tahun kedua pelaksanaan program.

Perbandingan capaian indikator ini tidak bisa dibandingkan dengan target nasional karena merupakan target kumulatif seluruh UPT Badan POM di Indonesia.

e. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Tercapainya target kinerja indikator Jumlah Desa Pangan Aman di wilayah kerja Balai POM di Palopo tahun 2025 didukung oleh terbentuknya komitmen pelaksanaan kegiatan intervensi dengan diawali adanya audiensi dan advokasi dengan Pemerintah Kabupaten Luwu sebagai lokus intervensi yang telah menunjuk desa intervensi berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.

Sebagai bagian dari penguatan pelaksanaan kegiatan, telah dibentuk forum komunikasi yang melibatkan Tim dan Kader Keamanan Pangan Desa, yang berfungsi memudahkan koordinasi dan monitoring selama pelaksanaan intervensi. Melalui kegiatan pelatihan kader, telah terbentuk sebanyak 10 orang Kader Keamanan Pangan Desa yang juga telah melakukan bimbingan teknis kepada 20 orang warga desa yang diintervensi sebgai sasaran pendampingan praktik keamanan pangan.

Meskipun demikian, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanan intervensi program, diantaranya belum optimalnya peran kader keamanan pangan yang terbentuk setelah seluruh tahapan intervensi telah dilakukan. Hal ini disebabkan karena intensitas pertemuan dengan Kader Keamanan Pangan yang terbentuk hanya terbatas saat kegiatan Pelatihan Kader dan Bimtek Komunitas. Belum adanya monitoring dan evaluasi dan peningkatan kompetensi serta kapasitas kader keamanan pangan secara berkala, mengakibatkan pemantauan dan bimbingan praktik keamanan pangan di desa intervensi tidak berlanjut sebagaimana diharapkan.

Tabel 88. Rekomendasi Tindak Lanjut IKSK Jumlah Desa Pangan Aman

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Jumlah Desa Pangan Aman	Kader Keamanan Pangan tidak	Melakukan monitoring dan evaluasi	Pengawalan Desa intervensi tahun 2025 pada tahun	Desember 2026	Y	S-02	Program Desa Pangan Aman yang telah

		berkontribusi aktif terhadap keberlanjutan program setelah tahap intervensi selesai dilaksanakan	secara berkala terhadap pelaksanaan program dan efektivitas kader keamanan pangan dalam melakukan pendampinga n/fasilitasi keamanan pangan terhadap komunitas, termasuk dokumentasi hasil temuan dan tindak lanjut	2026				diintervensi tidak dilaksanakan secara berkelanjutan

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan/atau informasi deskriptif program/kegiatan yang paling mendukung ketercapaian kinerja dan yang tidak terlalu mendukung ketercapaian kinerja berdasarkan besaran alokasi anggaran

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja indikator Jumlah Desa Pangan Aman di wilayah kerja Balai POM di Palopo pada tahun 2025 ini antara lain kegiatan Pelatihan Kader Keamanan Pangan dan Bimtek Komunitas yang bertujuan membangun kader dan komunitas desa sebagai agen perubahan penerapan keamanan pangan dalam kehidupan sehari-hari di wilayahnya masing-masing. Sebagai hasil kegiatan telah terbentuk 10 orang kader dan 20 komunitas keamanan pangan desa.

IKU.20 Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025

Tabel 89. Perbandingan target 2025 dan realisasi kinerja tahun 2025 IKSK Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi	Capaian (%)	Kinerja
Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi di	Jumlah pasar pangan aman berbasis	1	1	100%	Baik

masing-masing wilayah kerja Balai POM di Palopo	komunitas				

Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas dihitung dari jumlah pasar yang mendapatkan seluruh tahapan intervensi menjadi pasar pangan aman berbasis komunitas dan berkomitmen untuk melaksanakan keamanan pangan di pasar tersebut dan pasar-pasar lain di sekitarnya.

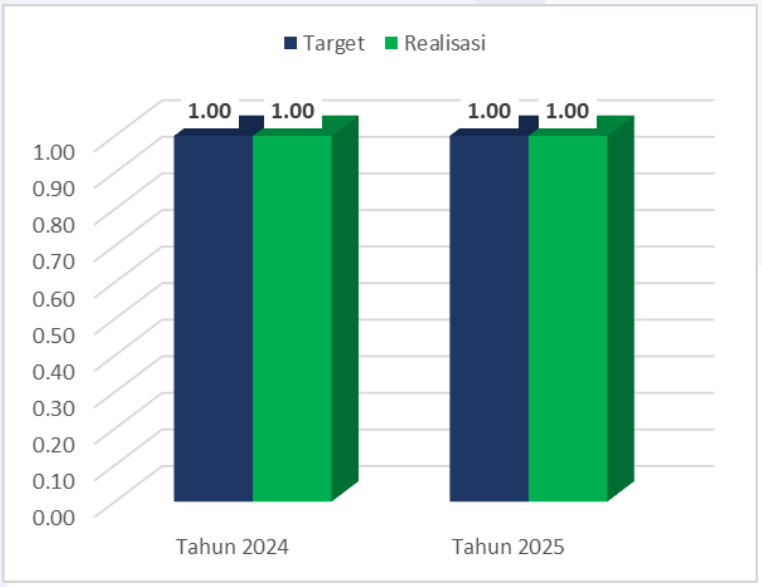
Pasar adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh OPD terkait sebagai pasar percontohan untuk pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas. Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja survey pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek dan penyuluhan komunitas pasar, sosialisasi keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan serta pengawalan dalam rangka mencapai pasar pangan aman berbasis komunitas. Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *supply* dan *demand*.

Bentuk intervensi yang dilakukan berupa survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek dan penyuluhan komunitas pasar, sosialisasi keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan serta pengawalan. Komunitas pasar adalah kelompok meliputi pedagang pasar, pengelola pasar, pengunjung pasar, anggota asosiasi pasar yang melakukan kegiatan utama di dalam pasar dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat. Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa keberlanjutan program (replikasi pasar) dan penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya serta rencana program pengawalan pada tahun berikutnya. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *supply* dapat berupa penerapan Cara Peredaran Pangan Olahan Yang Baik oleh pedagang pasar. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi demand dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi. Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata. Pada tahun 2025, seluruh tahapan program pasar pangan aman berbasis komunitas telah

dilaksanakan oleh Balai POM di Palopo. Tahapan capaian jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 100%.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

IKU Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas pada Tahun 2024 dan 2025 terealisasi secara keseluruhan dengan tahapan intervensi yang telah ditetapkan (100%). Jumlah pasar yang diintervensi pada tahun 2024 sebanyak 1 (satu) pasar, yaitu Pasar Andi Tadda di Kota Palopo. Pada tahun 2025, jumlah pasar yang diintervensi sebanyak 1 (satu) pasar, yaitu Pasar Rakyat Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu. Seluruh pasar yang menjadi target intervensi pada tahun 2024 dan 2025 telah terealisasi 100%.



Gambar 16. Perbandingan realisasi kinerja IKSK Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

c. Perbandingan realisasi kinerja dengan target RENSTRA

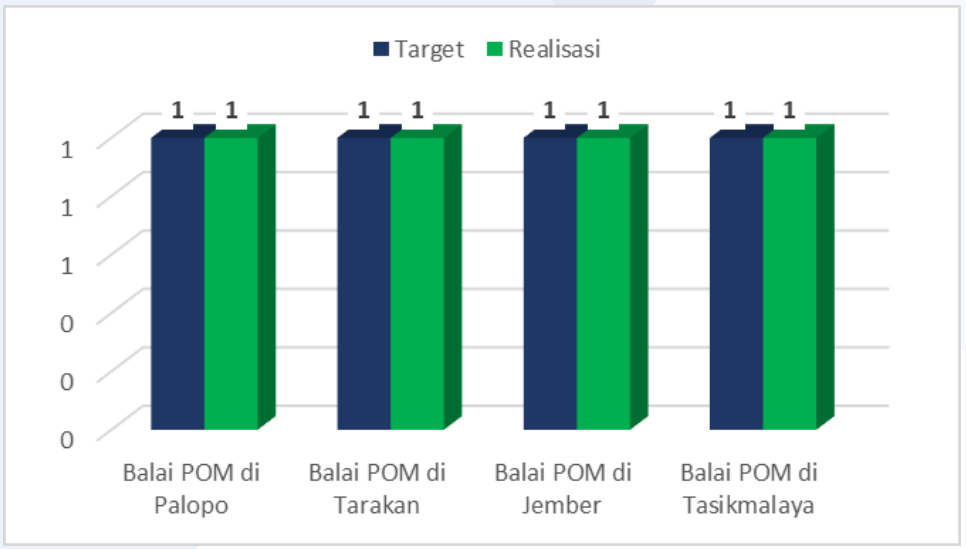
Tabel 90. Perbandingan realisasi kinerja IKSK Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dengan target Renstra

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra 2029	Realisasi	Capaian (%)	Kinerja
Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi di masing-masing wilayah kerja	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	2 Pasar	1 Pasar	50%	▼ Perlu Upaya Keras

Balai POM di Palopo					

Realisasi IKSK Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas tahun 2025 adalah sebanyak 1 (satu) pasar. Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra 2025-2029 yaitu sebanyak 2 pasar, capaian kegiatan sudah mencapai 50% dari target akhir Renstra. Capaian ini menunjukkan progress yang positif. Meski demikian, masih diperlukan adanya upaya yang lebih keras lagi untuk mendorong secara maksimal adanya peningkatan capaian sampai dengan akhir periode Renstra.

d. Perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis



Gambar 17. Perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja unit lain yang setara IKSK Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

Berdasarkan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi IKU Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK) Tahun 2025 dari Balai POM di Jember, Balai POM di Tasikmalaya, dan Balai POM di Tarakan telah berhasil mencapai target yang ditetapkan dengan capaian kinerja 100%.

e. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Balai POM di Palopo pada tahun 2025 menunjukkan capaian Balai POM di Palopo yang sangat baik (100%). Keberhasilan pelaksanaan IKU ini ditunjang dengan keberhasilan pelaksanaan program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas yang dimulai

tahapannya sejak awal tahun 2025 hingga November 2025. Adapun faktor-faktor pendukung keberhasilannya antara lain:

- Adanya pra advokasi yang dilakukan di awal pelaksanaan kegiatan
- Koordinasi yang baik dengan Dinas Perdagangan sebagai OPD yang membawahi pasar, pengelola dan asosiasi Pasar Rakyat Kecamatan Bua sebagai pasar yang ditunjuk Pemerintah Kabupaten Luwu, Puskesmas Bua sebagai puskesmas yang berada di kawasan sekitar Pasar Rakyat Kecamatan Bua, dan beberapa OPD terkait lainnya seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu.
- Adanya media komunikasi bersama seluruh UPT yang melaksanakan program dan pendampingan dari PIC program dari Direktorat PMPUPO, sehingga informasi mutakhir terkait pelaksanaan program maupun solusi dari kendala-kendala yang dihadapi di tingkat UPT.
- Pelaksanaan program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas tahun 2024 di Kota Palopo memberikan gambaran dalam pelaksanaan program pada tahun-tahun berikutnya.

Namun demikian, pelaksanaan program PPABK tahun 2025 ini mengalami beberapa kendala internal dan eksternal diantaranya adalah adanya efisiensi anggaran serta adanya kegiatan Pemilihan Umum di awal tahun yang menyebabkan beberapa rencana pelaksanaan kegiatan harus disesuaikan. Meskipun adanya efisiensi anggaran di tahun 2025, tidak menjadi penghalang bagi terlaksananya program PPABK.

Tabel 91. Rekomendasi Tindak Lanjut IKSK Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	1. Pasar yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sebagai pasar yang akan dintervensi belum memiliki komitmen dan kesediaan keberlanjutan program. 2. Adanya	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program	1. Melaksankan kegiatan pengawalan PPABK tahun 2025 pada tahun 2026 2. Mengusulkan pengadaan sarana teskit untuk digunakan oleh pasar yang diintervensi	Desember 2026	Y	S-02	Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK) tidak dilaksanakan secara berkelanjutan

		efisiensi anggaran menyebabkan ada beberapa tahapan kegiatan dan penyediaan sarana bagi program PPABK tidak terlaksana dengan baik						

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan/atau informasi deskriptif program/kegiatan yang paling mendukung ketercapaian kinerja dan yang tidak terlalu mendukung ketercapaian kinerja berdasarkan besaran alokasi anggaran

Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Balai POM di Palopo pada tahun 2025 menunjukkan capaian Balai POM di Palopo yang sangat baik (100%). Keberhasilan pelaksanaan IKU ini ditunjang dengan keberhasilan pelaksanaan program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas yang dimulai tahapannya sejak awal tahun 2025 hingga November 2025. Adapun faktor-faktor pendukung keberhasilannya antara lain:

- Adanya pra advokasi yang dilakukan di awal pelaksanaan kegiatan.
- Koordinasi yang baik dengan Dinas Perdagangan sebagai OPD yang membawahi pasar, pengelola dan asosiasi Pasar Rakyat Kecamatan Bua sebagai pasar yang ditunjuk Pemerintah Kabupaten luwu sebagai pasar yang diintervensi keamanan pangannya, Puskesmas Bua sebagai puskesmas yang berada di kawasan sekitar Pasar Rakyat Kecamatan Bua, dan beberapa OPD terkait lainnya seperti Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu.
- Adanya media komunikasi bersama seluruh UPT yang melaksanakan program dan pendampingan dari PIC program dari Direktorat PMPUPO, sehingga informasi mutakhir terkait pelaksanaan program maupun solusi dari kendala-kendala yang dihadapi di tingkat UPT.

IKU.21 Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan

- Ruang Lingkup UMKM:
  1. UMK pada pangan olahan mencakup Usaha Mikro dan Kecil:

a) Usaha mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
b) Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

2. Ruang Lingkup UMKM OBA dan Kosmetik:
   a) UMKM pada OBA mencakup UKOT dan UMOT meliputi :
      - Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan
      - Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya.
   b) UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

- UMKM yang memenuhi standar adalah:
  1. UMK yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi adalah UMK Pangan Olahan yang mampu menerapkan prinsip CPPOB ditandai dengan diterbitkannya IP CPPOB skala UMK;
  2. UMKM OBA yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan Obat Bahan Alam yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat CPOTB secara Bertahap (tahap 1 atau tahap 1 ke tahap 2 atau tahap 2 ke tahap 3);
  3. UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat Pemenuhan Aspek (SPA) CPKB.
- Kriteria UMKM yang didampingi:

  Untuk UMK Pangan Olahan:
  a) UMK yang didampingi mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan Olahan.
  b) UMK dihitung berdasarkan UMK yang difasilitasi BPOM melalui UPT BPOM selama tahun berjalan.

  Untuk UMKM OBA:
  a) Usaha yang sudah mempunyai produk obat bahan alam dan/ atau obat kuasi namun belum memiliki izin edar

b) Start-up yang akan memproduksi obat bahan alam dan/ atau obat kuasi, khususnya *start-up* yang telah mendapatkan pendampingan dari program Dana Alokasi Khusus (DAK);
c) UMKM yang sudah mempunyai nomor izin edar PIRT dan harus beralih ke obat bahan alam;
d) UMKM Obat Bahan Alam yang sudah didampingi namun belum memiliki Sertifikat Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap;
e) UMKM Obat Bahan Alam yang akan melakukan Sertifikasi Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap ke tahap selanjutnya (tahap 2 dan/ atau tahap 3); dan
f) UMKM Obat Bahan Alam yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor

Prioritas pemilihan Start-up / UMKM Obat Bahan Alam yang akan didampingi memiliki kriteria sebagai berikut:

- Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor KBLI 21022 dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) setempat dan akan mengajukan sertifikasi Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap;
- Telah memiliki rencana lokasi sarana produksi yang akan digunakan sebagai fasilitas produksi; dan
- Memiliki komitmen yang tinggi dalam pemenuhan aspek CPOTB secara Bertahap

Untuk UMKM Kosmetik:

1) UMKM yang memproduksi kosmetik;
2) UMKM kosmetik yang masih merintis dalam pemenuhan aspek CPKB (start-up);
3) UMKM kosmetik yang sudah didampingi namun belum memiliki SPA CPKB/ Sertifikat CPKB; dan
4) UMKM kosmetik yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor.

Prioritas pemilihan UMKM kosmetik yang akan didampingi pada tahun berjalan, dengan salah satu kriteria sebagai berikut:

- Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor KBLI 20232 dari PTSP setempat dan akan mengajukan sertifikasi CPKB;
- Telah memiliki rencana lokasi sarana produksi yang akan dijadikan fasilitas produksi; dan
- Memiliki komitmen yang tinggi dalam pemenuhan aspek CPKB.

- Tahapan Pendampingan UMKM
  1) Pangan Olahan

Tabel 92. Tahapan Pendampingan UMKM Pangan Olahan

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)	Keterangan
1	KIE/ Sosialisasi Keamanan Pangan	Januari - Maret	5	Setiap UPT melakukan KIE/ Sosialisasi KP. Metode secara luring atau daring (webinar) atau *hybrid* disesuaikan dengan sumber daya. Bukti dukung: daftar hadir, nilai pre *post test* dan foto kegiatan
2	Penetapan UMK pangan olahan target	Maret	10	Penetapan dalam bentuk SK Kepala UPT BPOM
3	Bimtek CPPOB	Maret - April	30	Pelaksanaan Bimtek CPPOB sesuai dengan metode dan kurikulum yang ditetapkan dalam Pedoman/ Juklak Pendampingan
4	Fasilitasi Pendampingan Penerapan CPPOB	April – Oktober	50	Pelaksanaan Fasilitasi Pendampingan Penerapan CPPOB sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam

				Pedoman/ Juklak Pendampingan
5	Monev dan Pelaporan	November - Desember	5	Monev dilaksanakan per TW, dan Monev akhir dilaksanakan November – Desember. Pelaporan bentuk *soft file* ke Dit. PMPU PO cc Deputi III

2) Obat Bahan Alam

Tabel 93. Tahapan Pendampingan UMKM Obat Bahan Olahan

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)	Keterangan
1	Penetapan target UMKM obat tradisional	Januari - Februari	10	Setiap UPT melaporkan ke Dit. PMPU OT, SK, Kosmetik
2	Bimbingan teknis UMKM Obat Bahan Alam oleh Fasilitator	Maret - April	20	Pelaksanaan bimbingan teknis disesuaikan dengan kebutuhan
3	Pendampingan UMKM Obat Bahan Alam oleh Fasilitator	April - Oktober	40	Pelaksanaan pendampingan disesuaikan dengan kebutuhan
4	Sertifikasi	September - Desember	20	Pelaksanaan dilakukan mulai dari pengajuan sertifikasi, pendampingan penyusunan CAPA sampai dengan

				penerbitan rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB secara Bertahap
5	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	September - Desember	10	

3) Kosmetik

Tabel 94. Tahapan Pendampingan UMKM Obat Bahan Olahan

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)	Keterangan
1	Penetapan target UMKM Kosmetik	Januari - Februari	10	Setiap UPT melaporkan ke Dit. PMPU OTSKK
2	Bimbingan teknis UMKM Kosmetik Fasilitator	Maret - April	20	Pelaksanaan bimbingan teknis disesuaikan dengan kebutuhan
3	Pendampingan UMKM Kosmetik oleh Fasilitator	April - Oktober	40	Pelaksanaan pendampingan disesuaikan dengan kebutuhan
4	Sertifikasi	September - Desember	20	Pelaksanaan dilakukan mulai dari pengajuan persetujuan, denah bangunan, sertifikasi SPA CPKB, pendampingan penyusunan CAPA sampai dengan penerbitan rekomendasi

				pemenuhan aspek CPKB
5	Monev dan Pelaporan	September - Desember	10	

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025

Tabel 95. Perbandingan target 2025 dan realisasi kinerja tahun 2025 IKSK Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi	Capaian (%)	Kinerja
Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan mutu di wilayah kerja BPOM Palopo	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	13,04%	13,04%	100%	Baik

Tahapan Pendampingan UMKM

1) **Pangan Olahan** (berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pedoman Pendampingan Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik Bagi Usaha Mikro dan Kecil Pangan Olahan dan Manual IKU Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan).
2) **Obat Bahan Alam** (berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 281 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pendampingan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Obat Bahan Alam dan Kosmetik oleh Fasilitator Badan Pengawas Obat dan Makanan serta Manual IKU Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan).
3) **Kosmetik** (berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 281 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis

Pendampingan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Obat Bahan Alam dan Kosmetik oleh Fasilitator Badan Pengawas Obat dan Makanan serta Manual IKU Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan)

Pada indikator ini, cara perhitungan B1-B11 (Januari – November) berbeda dengan B12 (Desember), yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. **Perhitungan target B1 – B11** = Jumlah progress tahapan pendampingan (UMK Pangan Olahan, UMKM OBA, dan UMKM Kosmetik) / Jumlah Target UMK Pangan Olahan, UMKM OBA, dan UMKM Kosmetik yang didampingi di tahun berjalan. Adapun target output untuk perhitungan B1 – B11 Balai POM di Palopo pada tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 96. Target *output* pendampingan UMKM Tahun 2025 Balai POM di Palopo

Jenis UMK	Target *Output* (sarana)
Pangan Olahan	4
Obat Bahan Alam	1
Kosmetik	1
Total	**6**

b. **Perhitungan target tahunan (B12)** = ((Jumlah UMK Pangan Olahan yang memperoleh IP-CPPOB + Jumlah UMKM yang memperoleh rekomendasi sertifikat CPOTB Bertahap + Jumlah UMKM yang memperoleh rekomendasi SPA CPKB) dari tahun 2025 sd tahun berjalan / Jumlah target UMK Pangan Olahan, UMKM OBA, dan UMKM Kosmetik yang didampingi selama 2025-2029) x 100%. Untuk Balai POM di Palopo

Tabel 97. Jumlah sertifikat Cara Pembuatan yang Baik yang terbit di tahun 2025 dan target UMK yang didampingi selama 2025 - 2029

Jenis Sertifikat	Jumlah yang terbit (sertifikat)	Target UMK yang didampingi selama 2025 - 2029 (sarana)
IP-CPPOB	4	**46**
CPOTB Bertahap	1	
SPA CPKB	1	
Total	**6**	

Indikator “Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan” pada Balai POM di Palopo mulai diimplementasikan pada tahun 2025 sebagai bagian dari periode Renstra 2025–2029. Pada tahun 2025 sebagai tahun awal implementasi, Balai POM di Palopo telah dapat mencapai target dengan capaian sebesar 100% dan termasuk kriteria **Baik**.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tahun 2025 merupakan tahun pertama implementasi indikator “Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan sehingga data pembanding untuk melihat tren realisasi dan capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya belum tersedia.

c. Perbandingan realisasi kinerja dengan target RENSTRA

Tabel 98. Perbandingan realisasi kinerja IKSK Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan dengan target Renstra

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra 2029	Realisasi	Capaian (%)	Kinerja
Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan mutu di wilayah kerja BPOM Palopo	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	100%	13,04%	13,04%	▼ Perlu Upaya Keras

Dibandingkan dengan target jangka menengah (target Renstra tahun 2029), realisasi yang dicapai oleh Balai POM Palopo di periode awal Renstra masih berada pada kriteria “perlu upaya keras”, dimana target Renstra pada tahun 2029 sebesar 100% sedangkan realisasi yang dicapai oleh Balai POM di

Palopo sebesar 13,04%.

Hal ini disebabkan karena perhitungan realisasi pada B12 2025 diperoleh dengan membandingkan jumlah UMK yang memperoleh sertifikat Cara Pembuatan yang Baik di tahun berjalan (sebanyak 6 UMK) dengan target jumlah UMK yang didampingi tahun 2025 – 2029 (sebanyak 46 UMK). Dengan demikian, perlu diatur strategi dalam agar target sarana yang didampingi dan memperoleh sertifikat Cara Pembuatan yang Baik hingga tahun 2029 dapat mencapai minimal 46 UMK.

d. Perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis

Tabel 99. Perbandingan realisasi kinerja IKSK Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahandengan UPT lainnya yang sejenis

Unit Kerja	Target 2025	Realisasi	Capaian (%)
Balai POM di Palopo	13,04%	13,04%	100
Balai POM di Tarakan	14,29%	18,18%	127,22
Balai POM di Jember	15,38%	15,38%	100
Balai POM di Tasikmalaya	16%	16%	100
Target Nasional	**14,18%**		

Dari data perbandingan realisasi kinerja Balai POM di Palopo dengan UPT lain yang sejenis, seluruhnya telah mencapai target, dimana realisasi tertinggi yaitu Balai POM di Tarakan sebesar 18,18% dari target 14,29% sedangkan terendah yaitu Balai POM di Palopo sebesar 13,04% dari target 13,04%. Dari tabel dapat dilihat bahwa target nasional sebesar 14,18% lebih tinggi dibandingkan dengan target Balai POM di Palopo pada tahun 2025 yakni sebesar 13,04% sehingga meskipun Balai POM Palopo telah mencapai target tahunan, namun belum mencapai target nasional.

e. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Keberhasilan Balai POM di Palopo dalam mencapai target pada indikator "Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan" di tahun 2025 didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

1) Adanya pendampingan UMK yang telah mulai dilakukan sejak tahun 2024 dan berlanjut hingga tahun 2025 sehingga di tahun berjalan, pemenuhan persyaratan dapat lebih mudah dipenuhi oleh UMK.
2) Adanya dukungan bagi UMK pangan olahan dari Orang Tua Angkat (OTA) terkait pembiayaan konsumsi dan transport untuk mengikuti Bimtek CPPOB secara luring.
3) Tersedianya fasilitator pendamping pangan olahan, OBA, maupun kosmetik di UPT yang secara intensif melakukan pendampingan bagi UMK dalam pemenuhan persyaratan untuk memperoleh sertifikat Cara Pembuatan yang Baik

Di balik keberhasilan pencapaian target pada indikator ini, masih terdapat kendala yang dihadapi, yaitu kurangnya komitmen pelaku usaha dalam penyusunan dokumen maupun pembenahan sarana dalam proses pendampingan, sehingga masih terdapat beberapa pelaku UMK yang tidak menunjukkan progress yang baik hingga akhir tahun berjalan.

Tabel 100. Rekomendasi Tindak Lanjut IKSK Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	Kurangnya komitmen pelaku usaha dalam penyusunan dokumen maupun pembenahan sarana dalam proses pendampingan, sehingga masih terdapat beberapa pelaku UMK yang tidak menunjukkan progress yang baik hingga akhir tahun berjalan	Melakukan monitoring yang lebih intensif terhadap progress pendampingan UMK	Menyiapkan matriks untuk melakukan monitoring yang lebih intensif terhadap progress pendampingan UMK dan mengidentifikasi kendala	Desember 2026	Y	O-06	Progres pendampingan UMKM tidak sesuai dengan timeline yang ditentukan

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan/atau informasi deskriptif

program/kegiatan yang paling mendukung ketercapaian kinerja dan yang tidak terlalu mendukung ketercapaian kinerja berdasarkan besaran alokasi anggaran

Dukungan anggaran dalam pencapaian indikator "Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan" sebesar Rp9.544.000,- memiliki peran yang sangat penting, namun besaran anggaran masih belum memadai, khususnya untuk kegiatan Bimbingan Teknis dengan penjelasan sebagai berikut :

1) Anggaran Bimtek hanya tersedia untuk Bimtek CPPOB.
2) Pada anggaran Bimtek CPPOB, hanya tersedia anggaran untuk konsumsi, sedangkan dibutuhkan pula anggaran untuk transport dan penginapan peserta Bimtek sebab Bimtek dilaksanakan secara luring dan sebagian besar peserta berasal dari luar kota Palopo. Bimtek tidak dilaksanakan secara daring karena mempertimbangkan efektivitas, kendala jaringan, dan keterbatasan sarana prasarana yang dimiliki pelaku usaha UMK dan Balai POM di Palopo

IKU.22 Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di BPOM di Palopo

Penindakan adalah serangkaian kegiatan yang diawali dengan proses penyelidikan melalui kajian terkait Kerawanan Kasus Obat dan Makanan, Kegiatan Intelijen dengan teknik penjejakan digital melalui Patroli Siber dan Verifikasi Lapangan melalui Operasi Intelijen. Selanjutnya dilakukan Operasi Penindakan terhadap kasus yang diduga melanggar Ketentuan Perundang-Undangan di bidang pengawasan obat dan makanan yang didasarkan pada hasil gelar kasus. Sebuah kasus naik menjadi perkara jika kasus tersebut diketahui adanya dugaan kuat yang mengarah pada pemenuhan unsur pelanggaran terhadap Perundang-Undangan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Hal ini ditentukan oleh proses gelar perkara. Selanjutnya perkara tersebut akan masuk ke dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya yang terdiri dari tahapan :

1) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) 15 %.
2) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum) 40%.

3) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) 30%.
4) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum) 15%

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025

Tabel 101. Perbandingan target 2025 dan realisasi kinerja Tahun 2025 IKSK Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi	Capaian (%)	Kinerja
Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	95	100	105,25%	Sangat Baik

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palopo diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

= ((Jumlah perkara SPDP x 0.15 + Jumlah perkara Tahap I x 0.55+ Jumlah perkara P21 x 0.85 + Jumlah perkara Tahap II x 1) /Jumlah target perkara) x 100%

Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan). Apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai oleh perkara SP3 tersebut. Perkara adalah kasus yang ditindaklanjuti secara pro justitia berdasarkan hasil gelar kasus, sedangkan Tahap II adalah perkara yang telah diselesaikan hingga penyerahan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum. Target perkara tahun 2025 sebanyak 2 (dua) perkara dengan realisasi sebanyak 3 (tiga) perkara sampai Tahap II dengan tidak ada perkara carry over. Dengan terealisasinya 3 (tiga) perkara pada tahun 2025 sehingga dilakukan penyesuaian target yang menjadi 3 (tiga) perkara. Capaian

persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palopo tahun 2025 diatas target yang ditetapkan (95) dengan realisasi 100 % dengan kriteria ”Sangat Baik”. Sampai dengan Desember 2025, ketiga perkara yang ditangani oleh PPNS Balai POM di Palopo telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) sebagai berikut:

1. Putusan PN Masamba Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Plp tanggal 14 Agustus 2025
   - Pidana Penjara Waktu Tertentu (4 Tahun)
2. Putusan PN Palopo Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Plp tanggal 12 Agustus 2025
   - Pidana Penjara Selama 6 (enam) Tahun
3. Putusan PN Palopo Nomor 115/Pid.Sus/2025/PN plp tanggal 10 November 2025
   - Pidana Penjara Selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan

b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Adanya Target Tahun 2025 yang menetapkan target 95% sedangkan tahun sebelumnya 2024 target adalah 100% dengan realisasi yang sama sehingga terjadi peningkatan capaian kinerja 105,26% di tahun 2025.

c. Perbandingan realisasi kinerja dengan target RENSTRA

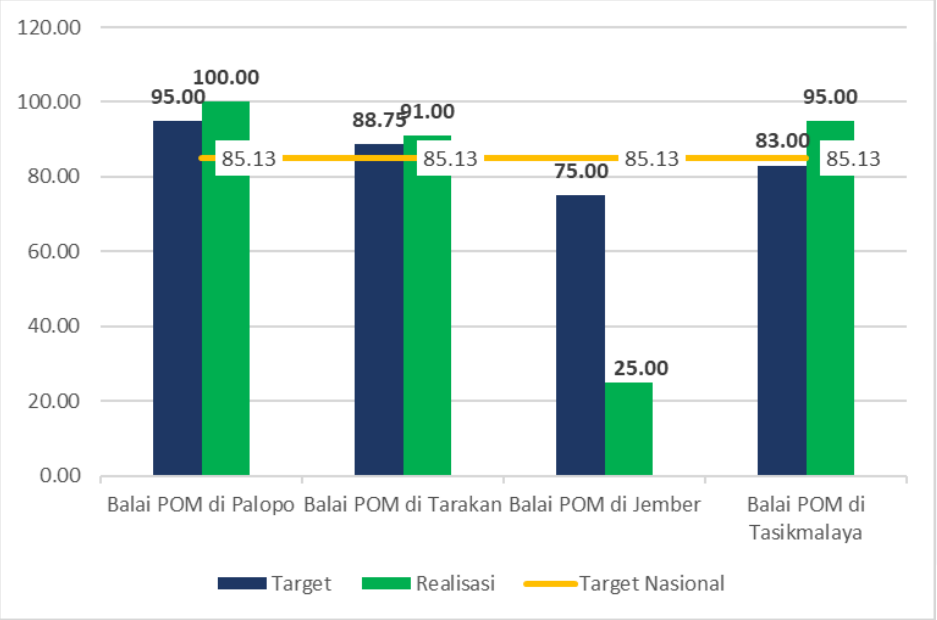
Tabel 102. Perbandingan realisasi kinerja IKSK Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT dengan target Renstra

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra 2029	Realisasi	Capaian (%)	Kinerja
Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	99%	100%	101,01%	▲ Tercapai / Melampaui

Realisasi IKSK Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT Tahun 2025 sebesar 100%. Apabila

dibandingkan dengan target akhir periode renstra 2025-2029 sebesar 99%, Capaian telah mencapai 101,01% yaitu dengan kriteria melampaui. Untuk menjaga stabilitas nilai capaian tersebut, diperlukan upaya mempertahankan kinerja yang telah optimal disertai peningkatan kinerja secara berkelanjutan guna memastikan konsistensi dan kualitas hasil pada periode berikutnya.

d. Perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis



Gambar 18. Perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja unit lain yang setara IKSK Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di BPOM di Palopo

Berdasarkan grafik diatas, realisasi Balai POM di Palopo memiliki realisasi tertinggi dengan realisasi 100% disusul oleh balai POM di Tasikmalaya dengan realisasi 95%. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa Balai POM di Palopo berada pada kelompok kinerja tinggi dan telah melebihi capaian Target 2025.

e. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Capaian indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT :

1. Komitmen petugas dalam melakukan kegiatan Patroli Siber dan melaporkan tepat waktu
2. Adanya informasi pengiriman paket indikasi berisi Obat-Obat Ilegal dari Direktorat Intelijen Obat dan Makanan yang telah ditindaklanjuti ke

tahapan Penyidikan lintas sektor terkait yang ditindaklanjuti sehingga ada penambahan perkara untuk penyidikan

3. Adanya dukungan penuh dari Criminal Justice System dalam operasi Penindakan
4. Adanya komitmen dari Penyidik dalam menyelesaikan tahapan penyidikan perkara sesuai perencanaan

Perlu dilakukan perbaikan secara berkelanjutan guna mewujudkan target Persentase Keberhasilan Penyidikan Tindak Pidana Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT pada Tahun 2026. Hal ini sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mulai berlaku pada Januari 2026. Mengingat peraturan tersebut merupakan landasan hukum dalam pelaksanaan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), diperlukan penyesuaian dan penguatan kapasitas dalam proses penyidikan.

Tabel 103. Rekomendasi Tindak Lanjut IKSK Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di BPOM di Palopo

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	PPNS dan petugas penindakan belum siap dan belum kompeten dalam melaksanakan kewenangan yang baru berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang akan berlaku di Bulan Januari Tahun 2026	Mengikuti Pelatihan dan bimbingan teknis terkait pelaksanaan UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP dan Peraturan lainnya	Intens Melakukan koordinasi dengan APH terkait penambahan kewenangan PPNS Badan POM dan teknis pelaksanaan terhadap kewenangan di UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP	Januari - Desember 2026	Y	H-05	PPNS dan petugas penindakan belum siap dan belum kompeten dalam melaksanakan kewenangan yang baru

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan/atau informasi deskriptif program/kegiatan yang paling mendukung ketercapaian kinerja dan yang tidak terlalu mendukung ketercapaian kinerja berdasarkan besaran alokasi anggaran

Analisa keberhasilan dari pencapaian indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT yang paling mendukung ketercapaian kinerja yaitu :

1. Kegiatan patroli siber yang rutin dilakukan oleh petugas setiap bulannya.
2. Tindak lanjut terhadap informasi pengiriman paket indikasi berisi Obat-Obat Ilegal dari Direktorat Intelijen Obat dan Makanan , Bea Cukai dan Pihak Ekspedisi.
3. Koordinasi dengan Criminal Justice System dan BNN, Bea Cukai dan pihak ekspedisi.

IKU.23 Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar

Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:

a. Analisis Penelusuran Siber adalah Hasil Kegiatan Patroli Siber dan Penjejakan Digital (Profiling Siber) yang dilakukan berdasarkan identifikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diperjual-belikan atau didistribusikan secara daring di lingkup wilayah kerja UPT BPOM yang dilaporkan setiap bulan kepada Direktur Siber Obat dan Makanan sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.02.22.97 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Siber Obat dan Makanan dan Surat Direktur Siber Obat dan Makanan Nomor T-PD.04.01.63.01.24.16 tanggal 15 Januari 2024 perihal Pelaporan Laporan Siber (Patroli Siber dan Profiling) UPT BPOM
b. Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan di UPT sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.01.22.12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang terdiri dari :
    1) Laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan (1 laporan dilaporkan tiap tahun).
    2) Laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan (1 laporan dilaporkan tiap tahun).

a. Perbandingan target 2025 dan realisasi kinerja tahun 2025

Tabel 104. Perbandingan target 2025 dan realisasi kinerja Tahun 2025 IKSK Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi	Capaian (%)	Kinerja
Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan dibidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	99	110%	Sangat Baik

Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Dengan Ketentuan dihitung berdasarkan rata-rata dari nilai:

a. Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber (50%)
b. Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan (25%)
c. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT (25%)

Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber dihitung dari jumlah laporan analisis penelusuran siber yang dilaporkan tepat waktu dibagi dengan jumlah laporan analisis penelusuran siber yang disusun. Laporan analisis siber disusun sebanyak 1 laporan setiap bulannya yaitu Total 12 laporan dalam 1 tahun. Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan dihitung dari nilai analisis kerawanan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dibagi dengan nilai maksimal penilaian analisis yaitu 25. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT dihitung dari jumlah rekomendasi cegah tangkal yang telah ditindaklanjuti UPT dibagi jumlah seluruh rekomendasi cegah tangkal yang disampaikan ke UPT.

Target Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2025 yaitu 14 Laporan yang terdiri dari 12 Laporan Siber, 1 Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan dan 1 laporan Tindak Lanjut

Rekomendasi Cegah Tangkal. Capaian Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar oleh Balai POM di Palopo Tahun 2025 di atas target yang ditetapkan yaitu 90% dengan realisasi 99% dengan kriteria ”Sangat Baik”. Target perkara tahun 2025 sebanyak 2 (dua) perkara dengan realisasi sebanyak 3 (tiga) perkara.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar merupakan merupakan indikator yang baru diukur pada periode Renstra 2025-2029 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan realisasi pada tahun-tahun sebelumnya.

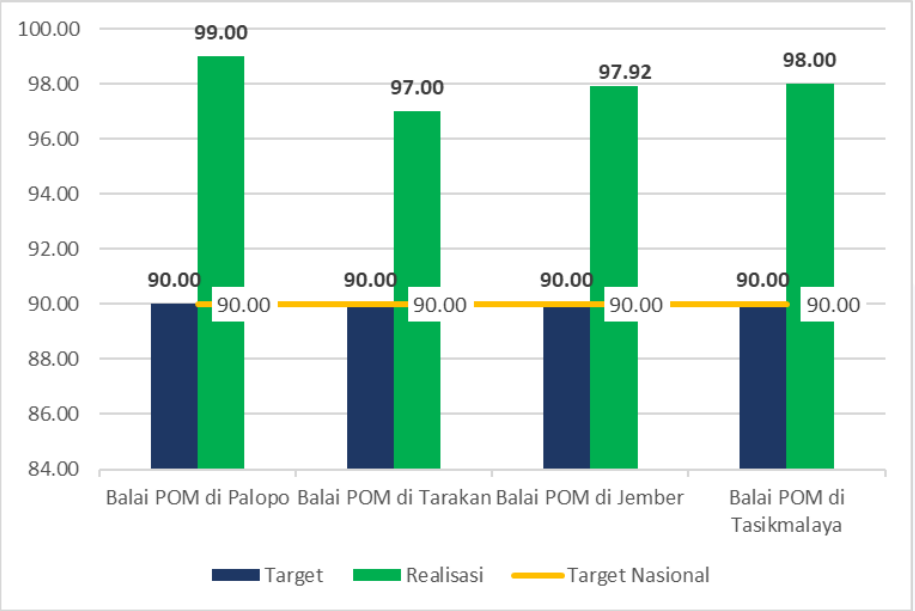
c. Perbandingan realisasi kinerja dengan target RENSTRA

Tabel 105. Perbandingan realisasi kinerja IKSK Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar dengan target Renstra

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra 2029	Realisasi	Capaian (%)	Kinerja
Terlaksanan ya kegiatan deteksi kejahatan dibidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaika n sesuai standar	94%	99%	105,31%	▲ Tercapai / Melampaui

Realisasi IKSK Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar Tahun 2025 sebesar 99%. Apabila dibandingkan dengan target akhir periode renstra 2025-2029 sebesar 94%, Capaian telah mencapai 105,31% yaitu dengan kriteria melampaui. Untuk menjaga stabilitas nilai capaian tersebut, diperlukan upaya mempertahankan kinerja yang telah optimal disertai peningkatan kinerja secara berkelanjutan guna memastikan konsistensi dan kualitas hasil pada periode berikutnya.

d. Perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis



Gambar 19. Perbandingan realisasi kinerja IKSK Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

Berdasarkan grafik diatas , realisasi Balai POM di Palopo memiliki realisasi tertinggi dengan realisasi 99% disusul oleh balai POM di Tasikmalaya dengan realisasi 98%. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa Balai POM di Palopo berada pada kelompok kinerja tinggi dan telah melebihi capaian Target 2025.

e. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Capaian indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT :

1. Komitmen petugas dalam melakukan kegiatan Patroli Siber dan melaporkan tepat waktu
2. Adanya efisiensi anggaran sehingga kegiatan difokuskan pada kegiatan patroli siber dan pemetaan Kerawanan Kejahatan
3. Menindaklanjuti semua rekomendasi cegah tangkal
4. Penyusunan Laporan Analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai pedoman

Dalam rangka menunjang capaian indikator Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar,

khususnya dalam penyusunan laporan analisis, diperlukan akurasi dalam penginputan data kerawanan kejahatan oleh petugas. Data yang diinput harus valid, lengkap, dan tepat waktu agar dapat dijadikan landasan yang kuat dalam penyusunan laporan analisis. Dengan demikian, laporan analisis yang dihasilkan akan memiliki tingkat akurasi yang tinggi dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan serta langkah tindak lanjut yang tepat.

Tabel 106. Rekomendasi Tindak Lanjut IKSK Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Penginputan Data Kerawanan Kejahatan melalui Aplikasi Dashboard Penindakan tidak akurat	Mengikuti Pelatihan dan bimbingan teknis terkait Penginputan Data Kerawanan Kejahatan	1. Mengikuti pelatihan 2. Sharing knowledge antar petugas 3. Memasukkan penyusunan laporan analisis dan cegah tangkal ke dalam butir Sasaran Kinerja Pegawai (indikator kuantitas, kualitas dan waktu)	Januari s.d. Desember 2026	Y	SDM-09	Tidak akuratnya hasil analisis, rekomendasi tindak lanjut dan kerawanan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palopo sebagai upaya deteksi dini dan cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan/atau informasi deskriptif program/kegiatan yang paling mendukung ketercapaian kinerja dan yang tidak terlalu mendukung ketercapaian kinerja berdasarkan besaran alokasi anggaran

Analisa keberhasilan dari pencapaian indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT yang paling mendukung ketercapaian kinerja yaitu :

1. Kegiatan patroli siber yang rutin dilakukan oleh petugas setiap bulannya
2. Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah tangkal dilakukan dengan memperhatikan ketepatan waktu pelaporan
3. Laporan Analisis dilaporkan sesuai dengan *timeline*.

IKU.24 Indeks Pelayanan Publik UPT

Indeks Pelayanan Publik adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian dan lembaga berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi kebijakan pelayanan, profesionalitas SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi.

Pengukuran Indeks Pelayanan Publik mengacu pada Pedoman Menpan RB Nomor 1 Tahun 2022 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik. Bobot masing-masing aspek adalah sebagai berikut:

Tabel 107. Bobot Aspek Indeks Pelayanan Publik

Aspek	Bobot
Kebijakan Pelayanan	24%
Profesionalitas SDM	25%
Sarana Prasarana	18%
Sistem Informasi Pelayanan Publik/SIPP	11%
Konsultasi dan Pengaduan	10%
Inovasi	12%

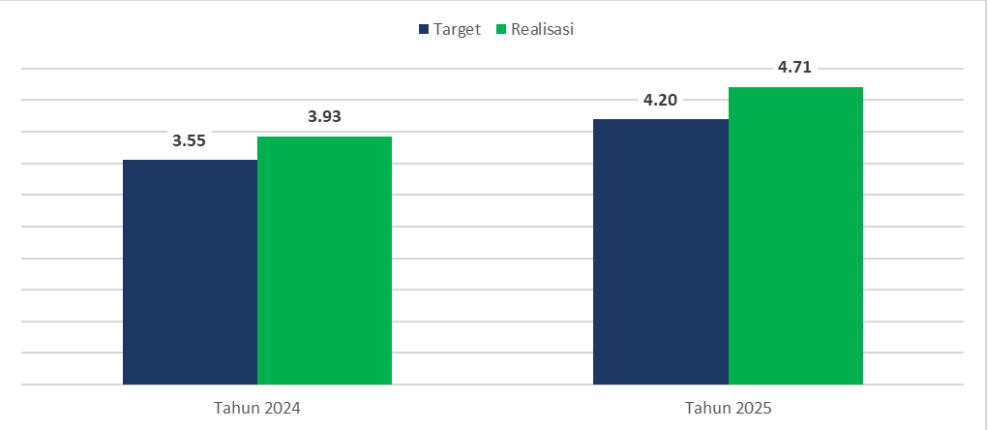
a. Perbandingan target 2025 dan realisasi kinerja tahun 2025

Tabel 108. Perbandingan target 2025 dan realisasi kinerja tahun 2025 IKSK Indeks Pelayanan Publik

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi	Capaian (%)	Kinerja
Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,2	4,71	112,14	Tidak Dapat Disimpulkan

Penilaian Indeks Pelayanan Publik (IPP) dilakukan oleh Biro Hukum dan Organisasi Badan POM dengan pengumpulan bukti dukung oleh UPT melalui https://evortala.pom.go.id. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, Balai POM di Palopo mendapatkan indeks sebesar 4,71 dengan capaian 112,14% yang berarti telah melampaui target yang ditetapkan. Kriteria capaian adalah Tidak Dapat Disimpulkan karena melebihi 110% dari target yang ditetapkan.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya



Gambar 20. Perbandingan realisasi kinerja IKSK Indeks Pelayanan Publik

Balai POM di Palopo meningkat klasifikasinya menjadi Balai POM pada Triwulan IV tahun 2023 dari sebelumnya berstatus Loka POM. Pengukuran indikator ini di lingkup Balai POM di Palopo baru dilakukan pada tahun 2024 Sedangkan pada tahun – tahun sebelumnya, indikator ini tidak menjadi target untuk Loka POM. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024, capaian indikator Indeks Pelayanan Publik pada tahun 2025 mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa Balai POM di Palopo telah menindaklanjuti rekomendasi dari penilaian PEKPPP yang dilakukan di tahun 2024 dan berkomitmen mewujudkan pelayanan publik yang prima.

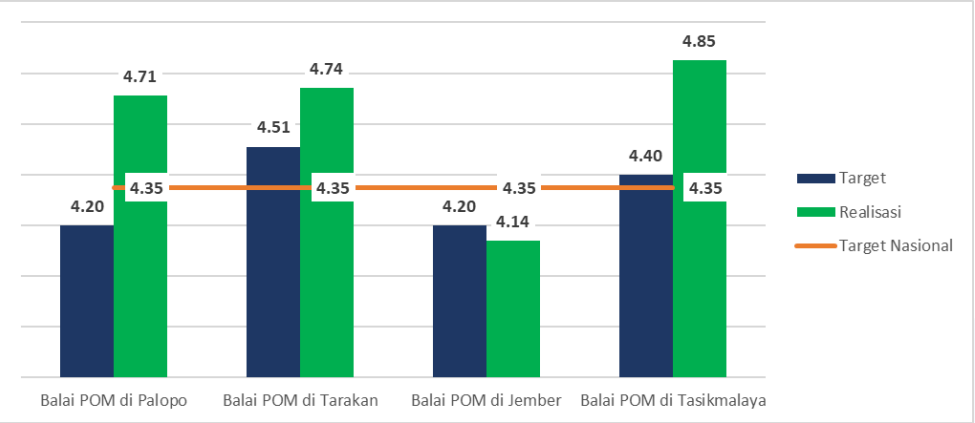
c. Perbandingan realisasi kinerja dengan target RENSTRA

Tabel 109. Perbandingan realisasi kinerja IKSK Indeks Pelayanan Publik dengan target Renstra

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra 2029	Realisasi	Capaian (%)	Kinerja
Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,6	4,71	102,39	▲ Tercapai / Melampaui

Berdasarkan tabel di atas, realisasi IKSK Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Palopo tahun 2025 adalah sebesar 4,71. Apabila dibandingkan dengan target akhir periode Renstra 2025-2029 yaitu 4,6, realisasi tahun 2025 telah melampaui target akhir periode Renstra. Hal ini menunjukkan penetapan target pada indikator Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Palopo terlalu rendah sehingga perlu dilakukan reviu terhadap penetapan target Renstra Balai POM di Palopo untuk tahun 2026 hingga 2029. Reviu target diperlukan untuk memastikan adanya peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

d. Perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis



Gambar 21. Perbandingan realisasi kinerja IKSK Indeks Pelayanan Publik

Berdasarkan grafik di atas, dibandingkan dengan UPT lain yang sejenis, realisasi Balai POM di Palopo berada di bawah realisasi dari Balai POM di Tarakan (4,74) dan Balai POM di Tasikmalaya (4,85), namun lebih tinggi dibandingkan realisasi Balai POM di Jember (4,14). Apabila dibandingkan dengan target nasional sebesar 4,35, Balai POM di Palopo, Balai POM di Tarakan, dan Balai POM di Tasikmalaya telah melampaui target nasional, sedangkan Balai POM di Jember masih berada di bawah target nasional.

e. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Keberhasilan pencapaian Indeks Pelayanan Publik di lingkup Balai POM di Palopo tahun 2025 disebabkan oleh beberapa faktor terkait aspek penilaian PEKPPP, antara lain:

5. Kebijakan pelayanan telah disusun melalui tahapan Forum Konsultasi Publik yang mengikutsertakan masyarakat yang mewakili berbagai unsur, yaitu masyarakat pengguna layanan, praktisi/akademisi, instansi terkait, organisasi masyarakat, dan media massa.
6. Standar Pelayanan Publik dan hasil SKM telah dipublikasikan pada berbagai media.
7. Tindak lanjut terhadap hasil SKM periode sebelumnya telah dilakukan
8. Penyusunan dokumen kode etik internal, penghargaan dan sanksi bagi pelaksana layanan, dan penerapan budaya pelayanan oleh petugas layanan publik.

9. Pemenuhan sarana prasarana seperti pengadaan kursi roda untuk mendukung layanan bagi kelompok rentan, tempat bermain anak, dan beberapa sarana penunjang lainnya.
10. Pendokumentasian rencana aksi dan rencana tindak lanjut konsultasi dan pengaduan.
11. Pelaksanaan inovasi yang mendukung layanan publik seperti SIJALLING dan SIPAKATAU.

Penilaian kinerja Unit Pelayanan Publik berdasarkan Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik, diperoleh tabel sebagai berikut:

Tabel 110. Rekomendasi Tindak Lanjut IKSK Indeks Pelayanan Publik

No	Aspek	Rekomendasi
1	Kebijakan Pelayanan	Agar melaksanakan SKM sesuai dengan Permenpan RB yang berlaku dan dipublikasikan pada media non-elektronik dan elektrobik serta dilakukan tindak lanjut hasil SKM
2	Profesionalisme SDM	• Agar menyediakan kebijakan jam pelayanan/kerja dan 4 atau lebih unsur lainnya • Agar menyediakan lebih dari 4 jenis mekanisme peningkatan motivasi kerja
3	Sarana Prasarana	Agar menyediakan 13 atau lebih sarana prasarana bagi pengguna layanan kelompok rentan
4	Sistem Informasi Pelayanan Publik	Pemutakhiran data dan informasi pelayanan publik agar dilakukan secara harian dan detail/sangat lengkap
5	Konsultasi dan Pengaduan	**Semua indikator telah terpenuhi**
6	Inovasi	Inovasi yang dilaksanakan perlu mendapatkan prestasi pada level (apapun)

Tabel 111. Rekomendasi Tindak Lanjut IKSK Indeks Pelayanan Publik

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Indeks	Penerapan	Melakukan	Pembuatan	Desember	Y	R-02	Tidak

	Pelayanan Publik UPT	terhadap pemenuhan aspek PEKPPP belum dilakukan secara konsisten dan terpantau	monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pemenuhan aspek PEKPPP Pelaksanaan pendampingan di tahun 2026 dilakukan sejak awal tahun	matriks monitoring evaluasi internal pemenuhan aspek PEKPPP	2026			terpenuhinya sarana prasarana pendukung pelayanan publik sesuai standar yang ditetapkan
							R-03	Layanan yang diterima masyarakat kurang lengkap dan memadai

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan/atau informasi deskriptif program/kegiatan yang paling mendukung ketercapaian kinerja dan yang tidak terlalu mendukung ketercapaian kinerja berdasarkan besaran alokasi anggaran

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja indikator Indeks Pelayanan Publik di lingkup Balai POM di Palopo tahun 2025 antara lain:

- Implementasi inovasi pelayanan publik untuk memudahkan masyarakat mengakses layanan Balai POM di Palopo, yaitu SISOLA (layanan melalui Whatsapp), SIPAKATAU (pendampingan pelaku usaha Pangan, Obat Tradisional, dan Kosmetik), SIJALLING (layanan mobil keliling).
- Peningkatan kompetensi petugas pelayanan publik dalam penanganan pengaduan dan KIE.
- Pengadaan sarana penunjang kelompok rentan berupa kursi roda, meja layanan kelompok rentan, dan ruang bermain anak.

IKU.25 Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM di Palopo

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti dimuat dalam RPJMN 2025-2029 dan Renstra BPOM 2025-2029, BPOM di Palopo berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 6 (enam) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik BPOM di Palopo terus meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Sumber daya meliputi 5M (*man, material, money, method, and machine*) merupakan modal penggerak organisasi. Dengan sumber daya yang terbatas

baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan BPOM di Palopo untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin agar dapat mewujudkan sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi. Untuk melaksanakan tugas fungsi BPOM di Palopo, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional sehingga menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan. Penatalaksanaan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, ditetapkan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU), yang merupakan tolak ukur terhadap keberhasilan pencapaian sasaran strategis kedelapan. Capaian ketiga indikator kinerja pada Sasaran Strategis kedelapan sebagai berikut:

Tabel 112. Rekomendasi Tindak Lanjut IKSK Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM di Palopo

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah BPOM di Palopo yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI BPOM di Palopo	71,00	70,29	99,00	Baik
	Nilai AKIP BPOM di Palopo	79,62	77,18	96,94	Baik
	Nilai Kinerja Anggaran BPOM di Palopo	5,00	5,00	100,00	Sangat Baik
	Indeks Manajemen Risiko BPOM di Palopo	2,60	2,59	99,62	Baik

Pengukuran capaian untuk masing-masing indikator kinerja serta analisis capaian masing-masing indikator kinerja pada Sasaran Strategis 8 (delapan) di Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Perbandingan target 2025 dan realisasi kinerja tahun 2025

Tabel 113. Perbandingan target 2025 dan realisasi kinerja tahun 2025 Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM di Palopo

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi	Capaian (%)	Kinerja

Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI Balai POM di Palopo	71,00	70,29	99,00	Baik

Realisasi Nilai Pembangunan ZI Balai POM di Palopo tahun 2025 adalah 70,29 dari target 71,00. Capaian nilai ini belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 99,00% dengan kategori **Baik**.

Persentase Nilai Pembangunan ZI Balai POM di Palopo diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 114. Perbandingan target 2025 dan realisasi kinerja tahun 2025 IKSK Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM di Palopo

Penilaian			Bobot	Aspek Pemenuhan	Aspek *Reform*	Total Nilai	Keterangan (MS/TMS)
A	**Komponen Pengungkit**		60,00				
	I.	Manajemen Perubahan	8,00	1,65	2,33	3,98	**TMS**
	II.	Penataan Tatalaksana	7,00	1,24	1,67	2,91	**TMS**
	III.	Penataan Sistemn Manjemen SDM	10,00	2,79	4,25	7,04	**MS**
	IV.	Penguatan Akuntabilitas	10,00	3,19	2,95	6,14	**MS**
	V.	Penguatan Pengawasan	15,00	2,83	6,25	9,08	**MS**
	VI.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	10,00	2,88	2,30	5,18	**TMS**
TOTAL PENGUNGKIT						**34,33**	
B	**Komponen Hasil**		40,00				
	I.	Birokrasi Bersih dan Akuntabel	22,50			19,69	
		1. Nilai Survey Persepsi Kepuasan Pelayanan dan Anti Korupsi (SPAK)	17,50			17,19	**MS**
		2. Capaian Kinerja lebih baik	5,00			2,50	**MS**
	II.	Pelayanan Publik yang Prima	17,50			16,28	

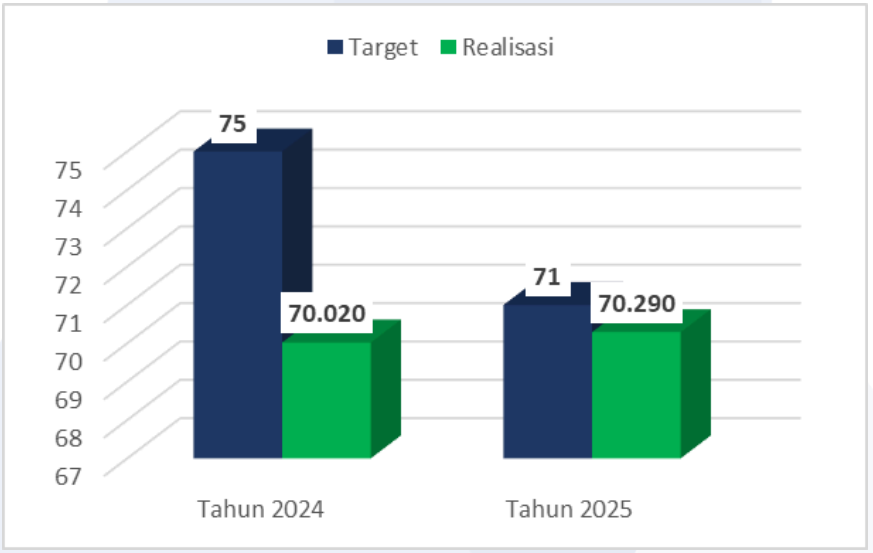
		Nilai Survey Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)	17,50			16,28	**MS**
TOTAL HASIL						**35,97**	
NILAI PMPZI						**70,29**	

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PermenPANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Rincian bobot komponen pengungkit penilaian satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM sebesar 60% antara lain: Manajemen Perubahan (bobot 8%), Penataan Tatalaksana (bobot 7%), Penataan Sistem Manajemen SDM (bobot 10%), Penguatan Akuntabilitas Kinerja (bobot 10%), Penguatan Pengawasan (bobot 15%), Penguatan Kualitas Pelayanan Publik (bobot 10%). Sedangkan rincian bobot komponen Hasil satker/unit kerja dan BB/BPOM sebesar 40% antara lain :

- Birokrasi Bersih dan Akuntabel (bobot 22,50%) terdiri Nilai Survei Persepsi Kepuasan Pelayanan dan Anti Korupsi (SPAK) (bobot 17,50%) dan Capaian Kinerja lebih baik (bobot 5,00%);
- Pelayanan Publik yang Prima (bobot 17,50%) berupa Nilai Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP).

b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya



Gambar 22. Perbandingan realisasi kinerja IKSK Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM di Palopo

Realisasi dan capaian Nilai Pembangunan ZI Balai POM di Palopo tahun 2025 mengalami kenaikan dari realisasi dan capaian tahun 2024. Pada tahun 2025 capaian indikator Pembangunan Nilai ZI Balai POM di Palopo yaitu sebesar 70,29% dengan kriteria Baik. Hal ini menunjukkan bahwa Balai POM di Palopo perlu meningkatkan upaya dalam memenuhi target Pembangunan Nilai ZI untuk menuju predikat WBK/WBBM di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

c. Perbandingan realisasi kinerja dengan target RENSTRA

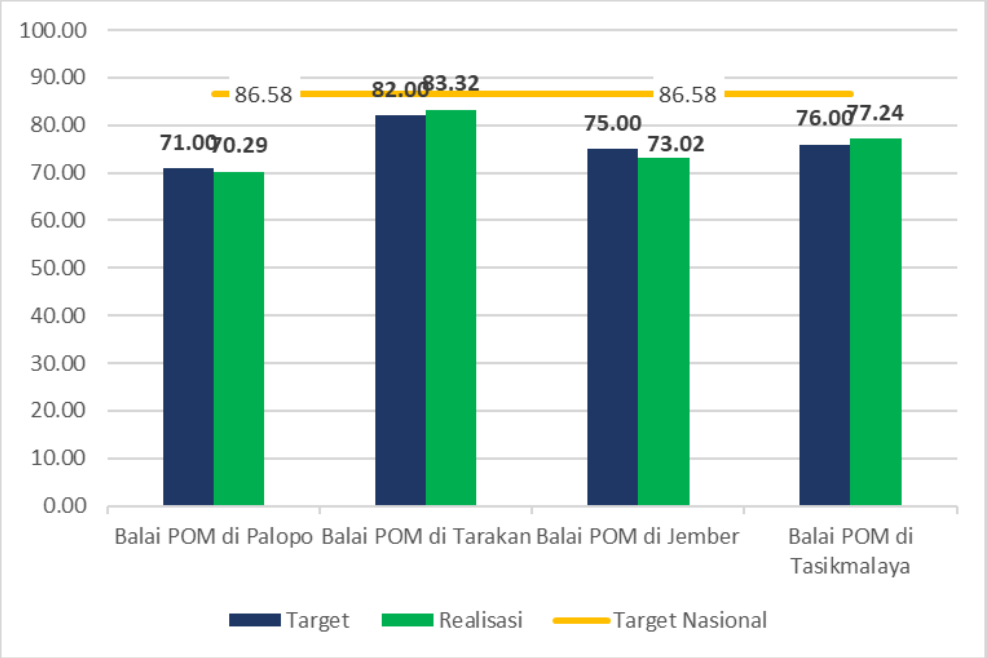
Tabel 115. Perbandingan realisasi kinerja IKSK Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM di Palopo dengan target Renstra

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra 2029	Realisasi	Capaian (%)	Kinerja
Terwujudnya tata Kelola pemerintah unit organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI BPOM di Palopo	75,00	70,29	93,72	▲ Akan Tercapa

Berdasarkan tabel diatas, realisasi IKSK Nilai Pembangunan ZI Balai POM di Palopo tahun 2025 adalah sebesar 70,29. Apabila dibandingkan dengan target akhir periode Renstra 2025-2029 yaitu 75,00, realisasi tahun 2025 belum mencapai target akhir periode Renstra. Hal ini menunjukkan penetapan target pada indikator Nilai Pembangunan ZI Balai POM di Palopo terlalu tinggi

sehingga perlu dilakukan reviu penetapan target Renstra Balai POM di Palopo untuk tahun 2026 hingga 2029. Reviu target diperlukan untuk memastikan adanya peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

d. Perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis



Gambar 23. Perbandingan Target Realisasi IKSK Nilai Pembangunan ZI UPT dengan UPT lainnya

Berdasarkan grafik diatas, dibandingkan dengan UPT lain yang sejenisnya, realisasi Balai POM di Palopo berada di bawah realisasi dari UPT sejenis lainnya dengan capaian 70,29. Apabila dibandingkan dengan target nasional sebesar 86,58, Balai POM di Palopo, Balai POM di Tarakan, Balai POM di Jember, Balai POM di Tasikmalaya belum mencapai target nasional.

e. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Berdasarkan realisasi Nilai Pembangunan ZI tahun 2025 dapat dipetakan penyebab tidak tercapainya target sebagai berikut:

Belum menyusun dan menetapkan target-target prioritas pada seluruh area perubahan;

Tidak optimalnya update seluruh informasi pada subsite maupun seluruh media publikasi lain serta melakukan monitoring evaluasi terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi public di unit kerja;

Tidak optimalnya monev dalam pengisian LKE ZI secara berkala untuk menyusun kendala dan rencana aksi tindak lanjut serta memastikan data dukung pada komponen pengungkit telah sesuai dengan hasil penilaian evaluator.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan/atau informasi deskriptif program/kegiatan yang paling mendukung ketercapaian kinerja dan yang tidak terlalu mendukung ketercapaian kinerja berdasarkan besaran alokasi anggaran

Untuk pencapaian target indikator Nilai Pembangunan ZI tahun 2025, Balai POM di Palopo telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- Pencantuman Larangan Gratifikasi pada surat tugas dan materi publikasi media sosial Balai POM di Palopo;
- Monitoring dan Evaluasi rencana kerja RB dari setiap pokja perubahan secara berkala;
- *Sharing session* implementasi RB dengan UPT lain, baik menerima kunjungan ataupun *benchmarking*;
- *Monday Motivation* setiap hari senin di minggu kedua dan ketiga setiap bulannya dalam rangka internalisasi implementasi reformasi birokrasi dan core value ASN BerAKHLAK untuk seluruh pegawai.

IKU.26 Nilai AKIP BPOM di Palopo

a. Perbandingan target 2025 dan realisasi kinerja tahun 2025

Tabel 116. Perbandingan target 2025 dan realisasi kinerja tahun 2025 IKSK Nilai AKIP BPOM di Palopo

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi	Capaian (%)	Kinerja
Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai AKIP	79,62	77,18	96,94	Baik

Tujuan pelaksanaan evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi;

3. Menilai tingkat akuntabilitas;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
5. Melakukan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang Lingkup evaluasi SAKIP mulai dari perencanaan kinerja jangka panjang, perencanaan kinerja jangka menengah dan perencanaan jangka pendek. Termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pengukuran kinerja dan monitoring pengelolaan data kinerja, sampai pada pelaporan hasil kinerja serta evaluasi atas pencapaian kinerja.

Nilai AKIP digunakan menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan. Pelaksanaan penilaian AKIP Balai POM di Palopo dilakukan oleh Inspektorat Utama BPOM berdasarkan:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 311 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BPOM;
3. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
4. Surat Edaran Nomor B-PI.04.7.08.25.320 Tahun 2025 Tentang Sub Kriteria Lembar Kerja Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BPOM;
5. Surat Tugas Inspektur Utama Nomor PI.04.7.07.25.136 tanggal 30 Juli 2025 dan Nomor PI.04.7.09.25.166 tanggal 8 September 2025.

Penilaian SAKIP mencakup beberapa komponen, yaitu : perencanaan kinerja (24%), pengukuran kinerja (24%), pelaporan kinerja (12%), evaluasi internal (20%) dan pencapaian sasaran/kinerja (20%). Penilaian dilakukan terhadap kinerja tahun n-1.

Rincian Nilai AKIP per komponen Balai POM di Palopo tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 117. Perbandingan target 2025 dan realisasi kinerja tahun 2025 IKSK Nilai AKIP BPOM di Palopo

No.	Komponen	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	24	20.16
2	Pengukuran Kinerja	24	17.76
3	Pelaporan Kinerja	12	10.08
4	Evaluasi Internal	20	15.20
5	Capaian Kinerja	20	13.98
Nilai Hasil Evaluasi		**100**	**77.18**
Tingkat Akuntabilitas		**Sangat Baik (BB)**	

b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tabel 118. Perbandingan target 2025 dan realisasi kinerja tahun 2025 IKSK Nilai AKIP BPOM di Palopo

No.	Komponen	Bobot	Nilai	
			2024	2025
1	Perencanaan Kinerja	24	19,44	20.16
2	Pengukuran Kinerja	24	19,20	17.76
3	Pelaporan Kinerja	12	9,72	10.08
4	Evaluasi Internal	20	14,80	15.20
5	Capaian Kinerja	20	15,46	13.98
Nilai Hasil Evaluasi		**100**	**78,62**	**77.18**
Predikat			**BB**	**BB**

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terdapat penurunan sebesar 1.44. Dari lima komponen penilaian terdapat 3 komponen yang mengalami peningkatan dan 2 komponen yang mengalami penurunan.

c. Perbandingan realisasi kinerja dengan target RENSTRA

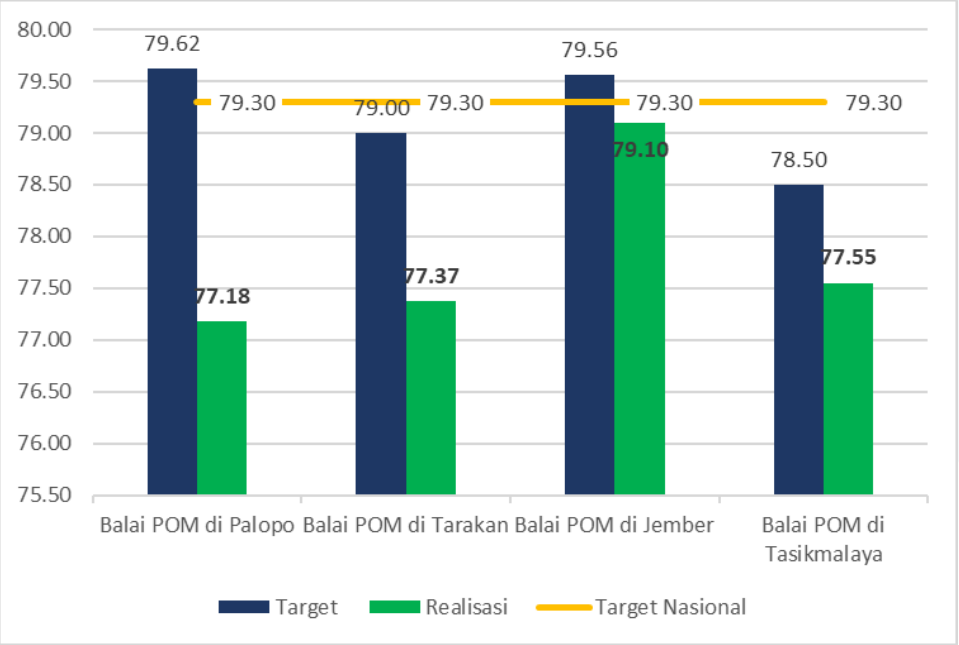
Tabel 119. Perbandingan realisasi kinerja IKSK Nilai AKIP dengan target Renstra

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra 2029	Realisasi	Capaian (%)	Kinerja
Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit	Nilai AKIP	81,62	77,18	94,56	▲ Akan Tercapai

Organisasi yang optimal					

Apabila dibandingkan dengan target renstra maka realisasi 2025 belum mencapai mencapai target renstra 2029. Perlu dilakukan langkah-langkah strategis dalam melakukan perbaikan kedepannya agar target renstra dapat tercapai.

d. Perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis



Gambar 24. Perbandingan realisasi kinerja IKSK Nilai AKIP BPOM di Palopo

Jika dibandingkan dengan unit kerja sejenis dan Badan POM maka keseluruhan tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Jika dilihat capaiannya semuanya di atas 95% dengan capaian Balai POM di Palopo yang paling rendah yaitu 96,94%.

e. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Kegagalan pencapaian target Nilai AKIP di Balai POM di Palopo disebabkan oleh:

1. Perencanaan Kinerja

   Balai POM di Palopo telah melaksanakan implementasi perencanaan kinerja berikut:

a. Telah menyusun rancangan Renstra 2025-2029, namun hingga pelaksanaan evaluasi AKIP oleh Inspektorat Utama, dokumen Renstra 2025 – 2029 belum diformalkan dan belum dapat dimanfaatkan untuk penyusunan dokumen kinerja berkelanjutan;
b. Telah menyusun dokumen perencanaan kinerja jangka menengah, jangka pendek dan dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja;
c. Seluruh dokumen perencanaan kinerja yang telah disusun telah dipublikasikan melalui media yang mudah diakses oleh stakeholder.

Namun dalam implementasi perencanaan kinerja yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa kelemahan yaitu Penetapan target PK 2024 dan 2025 belum didukung dengan Kertas Kerja Penetapan Target yang memadai.

2. Pengukuran Kinerja

Dalam proses pengukuran kinerja, terdapat beberapa kriteria pada komponen pengukuran kinerja yang telah dipenuhi oleh Balai POM di Palopo, antara lain:

a. Penyusunan Manual Indikator Kinerja Utama (IKU);
b. Penyusunan Mekanisme/SOP dalam rangka pengumpulan data kinerja;
c. Pimpinan Satuan Kerja terlibat dalam pembahasan capaian kinerja;
d. Dokumentasi kertas kerja penghitungan capaian kinerja indikator;
e. Penginputan data kinerja dan analisisnya pada Aplikasi SIMETRIS setiap bulan dan triwulan.

Berdasarkan pemenuhan komponen pengukuran kinerja tersebut, masih terdapat beberapa kelemahan antara lain:

a. SOP pengumpulan data kinerja telah disusun namun terdapat beberapa catatan yang belum memenuhi kriteria antara lain:
    1) Belum terdapat media pengumpulan data kinerja yang memuat informasi sumber data pengumpulan kinerja valid dan mudah telusur, yang dilengkapi dengan kertas kerja pengukuran data kinerja yang tertuang dalam SOP;
    2) Telah terdapat mekanisme jika terjadi kesalahan/perubahan data, namun pada alur belum sepenuhnya menggambarkan proses usulan perubahan data dan persetujuan data ke Biro Perencanaan dan Keuangan;

3) Susunan tim yang tertuang dalam SK tim monitoring dan evaluasi kinerja, kegiatan dan anggaran belum selaras dan belum mengakomodir aktivitas yang ada SOP Mikro Pengumpulan Data Kinerja.

b. Dalam pengisian RHPK, beberapa RHPK tidak terdapat pengisian target maupun realisasi, misalnya pada indikator Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan;

c. Perhitungan capaian kinerja (angka pembilang dan penyebut) yang tercantum pada Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK)/kertas kerja tidak dapat ditelusuri dengan dokumen monev (sumber data) serta metode perhitungannya, misalnya pada indikator Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan, Jumlah desa pangan aman, dan Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas;

d. Telah terdapat mekanisme pemberian reward dan punishment yang mengaitkan kontribusi kinerja individu dengan kinerja organisasi, namun belum terdapat implementasi yang memadai atas pemberian reward tersebut;

e. Pelaporan pada Aplikasi SIMETRIS belum dilakukan dengan tertib yaitu kendala/hambatan dan Rencana Tindak Lanjut belum diisi secara lengkap dan detail setiap bulannya, terutama untuk indikator yang belum terdapat realisasi atau belum tercapai, misalnya pada indikator:

1) Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan (Januari);
2) Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar (Februari).

3. Pelaporan Kinerja

Laporan Kinerja Balai POM di Palopo telah menyajikan informasi mengenai hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja, antara lain:

a. Perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan;
b. Perbandingan realisasi kinerja dengan target triwulan dan tahunan;
c. Upaya terkait keberhasilan dalam pencapaian kinerja dan hambatan terkait kegagalan dalam pencapaian kinerja;
d. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dan analisisnya;

e. Pemanfaatan informasi kinerja

Namun masih terdapat beberapa kelemahan antara lain:

a. Laporan Kinerja Interim triwulan I dan II tahun 2025 belum dipublikasikan pada subsite Unit Kerja;
b. Laporan Kinerja Tahun 2024 telah menyajikan Evaluasi Akhir Periode Renstra Tahun 2020-2024, namun pada hasil analisis gap evaluasi kategori kinerja dinyatakan sebagai Baik/Sangat Baik, sedangkan berdasarkan Pedoman Penyelenggaraan SAKIP BPOM, hasil analisis ini dinyatakan dalam kategori Tercapai/Tidak Tercapai;
c. Laporan Kinerja Tahun 2024 pada analisis terhadap pencapaian setiap indikator kinerja, belum membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun bersangkutan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra;
d. Laporan Kinerja Tahun 2024 telah membandingkan realisasi kinerja dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis, namun terdapat unit kerja pembanding yang berbeda dengan indikator lain, yaitu pada indikator Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi;
e. Laporan Kinerja telah menyajikan pemanfaatan informasi kinerja pada beberapa indikator kinerja, namun penjelasan yang dituangkan dalam pemanfaatan informasi belum spesifik dan konkret terhadap capaian masing- masing indikator kinerja;
f. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya telah disajikan dalam analisis setiap indikator, namun belum terdapat uraian upaya yang telah dilakukan dan/atau penyebab yang spesifik terkait penggunaan sumber daya yang tidak efisien dalam mencapai masing-masing indikator kinerja;
g. Laporan Kinerja tahun 2024 belum menyajikan monitoring rekomendasi tindak lanjut yang memadai untuk seluruh indikator kinerja. Selain itu pada Laporan Kinerja interim triwulan II tahun 2025, belum menyajikan hasil monitoring tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi tindak lanjut periode pelaporan sebelumnya, misalnya pada indikator Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM dan Nilai AKIP UPT BPOM;
h. Beberapa indikator kinerja yang tidak tercapai pada Laporan Kinerja Interim triwulan I tahun 2025, belum menyajikan rekomendasi atau rencana aksi misalnya pada indikator:

i. Terdapat perbedaan penyajian data target dan capaian kinerja pada dokumen pelaporan kinerja pada RHPK, Laporan Evaluasi Internal, Laporan Kinerja dan Aplikasi SIMETRIS, misalnya pada beberapa IKU

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Balai POM di Palopo telah menyusun laporan evaluasi internal secara berkala setiap triwulanan dengan menyajikan:

a. Berita Acara Evaluasi Internal;
b. Evaluasi atas pelaksanaan program/kegiatan;
c. Evaluasi atas realisasi Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK);
d. Kertas Kerja terkait capaian program/kegiatan dan indikator kinerja;
e. Notulen rapat.

Berdasarkan hasil evaluasi internal yang telah dilaksanakan, masih terdapat beberapa kelemahan antara lain:

a. Laporan Evaluasi Internal triwulan I dan II tahun 2025 belum menyajikan Kertas Kerja pengukuran realisasi indikator kinerja;
b. Terdapat personil yang terlibat dalam Tim Monitoring dan Evaluasi Kinerja, Kegiatan, dan Anggaran yang belum mengikuti pelatihan terkait SAKIP;
c. Beberapa indikator kinerja yang tidak tercapai pada laporan evaluasi internal belum menyajikan rekomendasi atau rencana aksi
d. Terdapat uraian rekomendasi/tindak lanjut pada LEI triwulan II tahun 2025 yang tidak memiliki waktu/timeline sehingga pemantauan/monitoring atas tindak lanjut dalam rangka pencapaian target kurang optimal;
e. Monitoring evaluasi rekomendasi/tindak lanjut pada LEI tidak dapat dilihat kesinambungannya, yaitu pada rekomendasi periode sebelumnya ditetapkan timeline pada triwulan II namun pada LEI triwulan II 2025 belum terdapat penyajian progres RTL periode sebelumnya tersebut;
f. Tugas dan tanggung jawab yang tertuang dalam SK tim monitoring dan evaluasi kinerja, kegiatan dan anggaran belum selaras dan belum mengakomodir aktivitas yang ada SOP Mikro Pengumpulan Data Kinerja.

Terhadap penyebab kegagalan pencapaian kinerja maka direncanakan rekomendasi perbaikan kedepannya yaitu:

1. Perencanaa Kinerja

   Melengkapi kertas kerja reviu target indikator yang dilengkapi dengan penyajian argumen/justifikasi dan perhitungan yang logis serta hasil analisa atas capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya.

2. Pengukuran Kinerja
   a. Menyusun/menyempurnakan SOP pengumpulan data kinerja yang memenuhi kriteria tahapan pengumpulan data kinerja yang baik seperti:
      1) Adanya informasi sumber data pengumpulan kinerja valid dan mudah telusur, yang dilengkapi dengan kertas kerja pengukuran data kinerja;
      2) Terdapat mekanisme yang jelas dan spesifik jika terjadi kesalahan/perubahan data antara lain:
         a) tahap usulan perubahan data ke Biro Perencanaan dan Keuangan;
         b) tahap persetujuan data dari Biro Perencanaan dan Keuangan;
         c) tahap perbaikan pelaporan data.
      3) Terdapat PIC terkait (misal pemilik, penanggung jawab, tim SAKIP, dll) yang jelas serta selaras dengan SK tim SAKIP yang telah ditetapkan Unit Kerja;
   b. Memastikan agar tim SAKIP aktif dalam melakukan pelaporan kinerja pada RHPK secara berkala untuk seluruh indikator kinerja Unit Kerja;
   c. Menyusun kertas kerja perhitungan data capaian kinerja yang dapat menunjukkan tahapan perhitungan dan kesimpulan hasil akhir capaian kinerja yang disajikan dalam dokumen laporan kinerja dan Aplikasi pelaporan kinerja;
   d. Mengimplementasikan pemberian reward dan punishment secara berkala sesuai dengan Surat Keputusan/mekanisme pemberian reward dan punishment yang telah ditetapkan oleh Unit Kerja;
   e. Memastikan seluruh pengisian data kinerja pada Aplikasi SIMETRIS telah lengkap dengan menyajikan informasi terkait kendala/hambatan dan rekomendasi/rencana tindak lanjut yang akan dan telah dilaksanakan secara berkala sesuai dengan periode pelaporan yang telah ditetapkan.
3. Pelaporan Kinerja

a. Memanfaatkan subsite Unit Kerja atau Media Sosial sebagai media publikasi dokumen pelaporan kinerja secara berkala sehingga mudah diakses oleh stakeholder/masyarakat;
b. Menyempurnakan penyajian informasi capaian kinerja dalam Laporan Kinerja tahunan dan/atau Laporan Kinerja Interim sesuai pedoman SAKIP BPOM;
c. Menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis;
d. Melaksanakan penyesuaian penyajian informasi dalam Laporan Kinerja atau melaksanakan evaluasi berdasarkan informasi capaian kinerja setiap IKU pada Laporan Kinerja dengan tujuan untuk melakukan perbaikan misalnya berupa:
    1) Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja;
    2) Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja;
    3) Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja; dan
    4) Penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya.
e. Menyajikan upaya efisiensi yang telah dilaksanakan atau penyebab adanya inefisiensi dalam proses pencapaian target kinerja pada masing-masing Sasaran dan/atau IKU dalam Laporan Kinerja Interim dan atau Tahunan;
f. Memastikan agar seluruh indikator yang tidak tercapai pada periode tertentu telah ditetapkan kendala/hambatan serta rekomendasi/rencana aksi yang memadai sebagai upaya perbaikan berkelanjutan;
g. Menyajikan hasil monitoring tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi tindak lanjut periode sebelumnya pada Laporan Kinerja Interim dan Tahunan dilengkapi dengan simpulan status rekomendasi/rencana aksi tindak lanjut (selesai/belum selesai);
h. Mengoptimalkan pelaksanaan reviu berjenjang agar dapat meminimalkan adanya kesalahan penyajian data target dan realisasi capaian kinerja dalam dokumen pelaporan kinerja.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
    a. Menyusun LEI secara lengkap dan rinci sesuai kebijakan implementasi SAKIP Badan POM dengan menyajikan:

1) Kertas Kerja pengukuran realisasi seluruh indikator kinerja dan/atau sumber data realisasi kinerja;
2) Rencana aksi dengan timeline yang memadai/memudahkan proses pemantauan/monitoring sehingga evaluasi internal optimal;
3) Monitoring tindak lanjut atas rencana aksi yang mengakomodir progres / capaian rencana aksi dari periode sebelumnya.

b. Merencanakan dan melaksanakan pengembangan kompetensi yang mendukung implementasi SAKIP terutama untuk personil yang ditetapkan sebagai Tim SAKIP Unit Kerja;
c. Melakukan reviu terhadap SK tim monitoring dan evaluasi kinerja, kegiatan dan anggaran dengan penyesuaian uraian tugas dan tanggung jawab sesuai dengan SOP Mikro pengumpulan data kinerja Unit Kerja.

Tabel 120. Rekomendasi Tindak Lanjut IKSK Nilai AKIP BPOM di Palopo

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Nilai AKIP	Penetapan target PK 2024 dan 2025 belum didukung dengan Kertas Kerja Penetapan Target yang memadai	Melakukan rekomendasi perbaikan dari hasil LHE penilaian AKIP	Melengkapi kertas kerja reviu target indikator yang dilengkapi dengan penyajian argumen/justifikasi dan perhitungan yang logis serta hasil analisa atas capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya	Juni 2026	T		
2		SOP pengumpulan data kinerja telah disusun namun terdapat beberapa catatan yang belum memenuhi kriteria		Menyusun/menyempurnakan SOP pengumpulan data kinerja yang memenuhi kriteria tahapan pengumpulan data kinerja yang baik	Juni 2026	T		
3		Dalam pengisian RHPK, beberapa RHPK		Memastikan agar tim SAKIP aktif dalam melakukan pelaporan kinerja	Juni 2026	T		

		tidak terdapat pengisian target maupun realisasi		pada RHPK secara berkala untuk seluruh indikator kinerja Unit Kerja				
4		Perhitungan capaian kinerja (angka pembilang dan penyebut) yang tercantum pada Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK)/kertas kerja tidak dapat ditelusuri dengan dokumen monev (sumber data) serta metode perhitungannya		Menyusun kertas kerja perhitungan data capaian kinerja yang dapat menunjukkan tahapan perhitungan dan kesimpulan hasil akhir capaian kinerja yang disajikan dalam dokumen laporan kinerja dan Aplikasi pelaporan kinerja	Juni 2026	T		
5		Telah terdapat mekanisme pemberian reward dan punishment yang mengaitkan kontribusi kinerja individu dengan kinerja organisasi, namun belum terdapat implementasi yang memadai atas pemberian reward tersebut		Mengimplementasikan pemberian reward dan punishment secara berkala sesuai dengan Surat Keputusan/mekanisme pemberian reward dan punishment yang telah ditetapkan oleh Unit Kerja	Juni 2026	T		
6		Pelaporan pada Aplikasi SIMETRIS belum dilakukan dengan tertib yaitu kendala/hambatan dan Rencana Tindak Lanjut belum diisi secara lengkap		Memastikan seluruh pengisian data kinerja pada Aplikasi SIMETRIS telah lengkap dengan menyajikan informasi terkait kendala/hambatan dan rekomendasi/rencana tindak lanjut yang akan dan telah dilaksanakan secara berkala sesuai dengan periode pelaporan yang telah ditetapkan	Juni 2026	T		
7		Pelaporan		Memanfaatkan	Juni 2026	T		

		kinerja belum secara keseluruhan dipublikasikan di subsite		subsite Unit Kerja atau Media Sosial sebagai media publikasi dokumen pelaporan kinerja secara berkala sehingga mudah diakses oleh stakeholder/masyarakat				
8		Informasi capaian kinerja dalam laporan kinerja belum diungkapkan secara sempurna		Menyempurnakan penyajian informasi capaian kinerja dalam Laporan Kinerja tahunan dan/atau Laporan Kinerja Interim sesuai pedoman SAKIP BPOM	Juni 2026	T		
9		Upaya efisiensi belum disajikan secara menyeluruh		Menyajikan upaya efisiensi yang telah dilaksanakan atau penyebab adanya inefisiensi dalam proses pencapaian target kinerja pada masing-masing Sasaran dan/atau IKU dalam Laporan Kinerja Interim dan atau Tahunan	Juni 2026	T		
10				Memastikan agar seluruh indikator yang tidak tercapai pada periode tertentu telah ditetapkan kendala/hambatan serta rekomendasi/rencana aksi yang memadai sebagai upaya perbaikan berkelanjutan	Juni 2026	T	S-04	Tidak adanya peningkatan kinerja UPT
11		Beberapa indikator kinerja yang tidak tercapai pada Laporan Kinerja Interim triwulan I tahun 2025, belum menyajikan rekomendasi		Menyajikan hasil monitoring tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi tindak lanjut periode sebelumnya pada Laporan Kinerja Interim dan Tahunan	Juni 2026	Y	S-04	Tidak adanya peningkatan kinerja UPT

		atau rencana aksi misalnya pada indikator		dilengkapi dengan simpulan status rekomendasi/renc ana aksi tindak lanjut (selesai/belum selesai)				
12		Terdapat perbedaan penyajian data target dan capaian kinerja pada dokumen pelaporan kinerja pada RHPK, Laporan Evaluasi Internal, Laporan Kinerja dan Aplikasi SIMETRIS		Mengoptimalkan pelaksanaan reviu berjenjang agar dapat meminimalkan adanya kesalahan penyajian data target dan realisasi capaian kinerja dalam dokumen pelaporan kinerja	Juni 2026	T		
13		LEI belum disusun secara lengkap dan rinci sesuai kebijakan pedoman SAKIP		Menyusun LEI secara lengkap dan rinci sesuai kebijakan implementasi SAKIP Badan POM	Juni 2026	Y	S-04	Tidak adanya peningkatan kinerja UPT

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan/atau informasi deskriptif program/kegiatan yang paling mendukung ketercapaian kinerja dan yang tidak terlalu mendukung ketercapaian kinerja berdasarkan besaran alokasi anggaran

1. Menyusun dokumen Perencanaan periode lima tahunan maupun tahunan telah dilakukan dan diwujudkan dalam dokumen Rencana Strategis 2025-2029, dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) 2025-2029, Rencana Kerja Tahunan 2025, Rencana Kerja Anggaran 2025, Perjanjian Kinerja (PK) dan revisi 2025, Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) dan revisi 2025;
2. Melakukan pengukuran kinerja dan monitoring dan evaluasi kinerja setiap bulan dan triwulan;
3. Menyusun Matriks Peran Hasil (MPH) dan melakukan cascading Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja ke ketua tim dan anggota tim dalam bentuk Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);
4. Memanfaatkan aplikasi SIMETRIS (e-planning dan e-performance) dalam menginput data kinerja balai setiap bulan sehingga dapat terlihat capaian indikator kinerja sasaran kegiatan Balai POM di Palopo serta dapat

dilakukan langkah perbaikan terhadap capaian yang tidak memenuhi target kinerja;

5. Penyusunan Laporan Kinerja Balai POM di Palopo secara triwulanan dan tahunan yang menyajikan perbandingan data kinerja antara realisasi tahun berjalan dengan target tahunan, target jangka menengah, standar nasional dan capaian Balai POM yang setara, menyajikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja maupun hambatannya serta tindak lanjut rekomendasi periode sebelumnya. Namun, Laporan kinerja belum menyajikan informasi pemanfaatan informasi kinerja dalam rangka memberikan dampak signifikan terkait penyesuaian strategi/kebijakan pencapaian kinerja berikutnya;
6. Melakukan rapat evaluasi internal setiap triwulan dengan membahas realisasi capaian kinerja dan anggaran serta kendala/hambatan yang dihadapi dalam rangka pencapaian kinerja;
7. Mendorong peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja.

IKU.27 Nilai Kinerja Anggaran BPOM di Palopo

a. Perbandingan target 2025 dan realisasi kinerja tahun 2025

Tabel 121. Perbandingan target 2025 dan realisasi kinerja tahun 2025 IKSK Nilai Kinerja Anggaran BPOM di Palopo

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi	Capaian (%)	Kinerja
Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Kinerja Anggaran	5	5	100	Sangat Baik

Nilai Kinerja Anggaran merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran dengan masing-masing memiliki bobot penilaian yang sama. Nilai kinerja anggaran dikategorikan menjadi:

a) Nilai 1 memiliki rentang nilai 0 s.d 50 dengan kategori Sangat Kurang;
b) Nilai 2 memiliki rentang nilai 50,01 s.d 60 dengan kategori Kurang;
c) Nilai 3 memiliki rentang nilai 60,01 s.d 80 dengan kategori Cukup;
d) Nilai 4 memiliki rentang nilai 80,01 s.d 90 dengan kategori Baik;
e) Nilai 5 memiliki rentang nilai 90,01 s.d 100 dengan kategori Sangat Baik

Tabel 122. Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Palopo Tahun 2025

NO	VARIABEL PENILAIAN	NILAI
1	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (50%)	85,02
2	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (50%)	100,00
Nilai Kinerja Anggaran		**92,51**
Konversi Nilai		5,00
Kategori		**Sangat Baik**

Nilai kinerja anggaran Balai POM di Palopo tahun 2025 mencapai nilai 92.51 dan berada pada kategori 'Sangat Baik'.

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran atau Evaluasi Kinerja Anggaran terhadap Perencanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat EKA Perencanaan Anggaran adalah serangkaian proses untuk melakukan pengukuran, penilaian dan analisis secara sistematis dan objektif atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. EKA Perencanaan Anggaran Kementerian/Lembaga merupakan instrumen penganggaran berbasis kinerja untuk pelaksanaan:

1. Fungsi akuntabilitas (Proving) EKA Perencanaan Anggaran Kementerian/Lembaga dilaksanakan untuk membuktikan dan mempertanggungjawabkan secara profesional kepada pemangku kepentingan atas penggunaan anggaran belanja Kementerian/Lembaga.
2. Fungsi peningkatan kualitas (Improving) EKA Perencanaan Anggaran Kementerian/Lembaga dilaksanakan mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan kendala atas pelaksanaan RKA-K/L untuk peningkatan kinerja anggaran dan bahan masukan penyusunan kebijakan.

Mulai Tahun Anggaran 2024, penilaian kinerja perencanaan anggaran menggunakan skema, variabel, dan formula yang baru. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023, nilai kinerja perencanaan anggaran diperoleh dari nilai variabel efektivitas penggunaan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran.

1. Efektivitas penggunaan anggaran

Efektivitas penggunaan anggaran diukur berdasarkan capaian keluaran/*output* dan hasil/*outcome* yang dilaporkan oleh Menteri/pimpinan lembaga, pimpinan Unit Eselon I, dan pimpinan Satker sesuai lingkup kewenangannya kepada Menteri Keuangan melalui sistem informasi meliputi:

1) Capaian RO yang dilaporkan Satker dikaitkan dengan sasaran program dan sasaran strategis;
2) Capaian indikator kinerja program yang dilaporkan Unit Eselon I;
3) Capaian indikator kinerja sasaran strategis yang dilaporkan Kementerian/Lembaga.

2. Efisiensi penggunaan anggaran

Efisiensi penggunaan anggaran berkaitan dengan hubungan antara sumber daya yang digunakan dan keluaran yang diperoleh dalam hal kuantitas, kualitas dan waktu. Variabel efisiensi penggunaan anggaran diukur dengan menghitung secara agregat variabel penggunaan SBK dengan bobot 40% (empat puluh persen) dan variabel efisensi SBK dengan bobot 60% (enam puluh persen). Pengukuran efisiensi pada EKA Perencanaan Anggaran Kementerian/Lembaga dilakukan pada level RO dengan mengacu pada ketentuan terkait Standar Biaya yang meliputi:

1) Penggunaan SBK baik SBKK maupun SBKU sebagaimana yang tertuang dalam PMK Nomor 113 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Keluaran TA 2024. Indikator Penggunaan SBK dilakukan dengan membandingkan jumlah RO yang menggunakan SBKK dalam RKA-K/L dibandingkan dengan jumlah RO yang telah ditetapkan menjadi SBKK serta jumlah RO yang menggunakan standar biaya keluaran umum (SBKU) dalam RKA-K/L dibandingkan dengan jumlah RO yang memenuhi kriteria untuk menggunakan SBKU. RO yang menggunakan SBKK merupakan RO dimana perbandingan antara penyerapan dengan RVRO pada RO tersebut kurang dari atau sama dengan indeks yang telah ditetapkan dalam PMK SBK. Terhadap RO SBKK yang telah memiliki ijin prinsip pelampauan dari Menteri Keuangan, akan tetap dianggap menggunakan SBKK meskipun perbandingan antara penyerapan dengan RVRO pada RO tersebut melebihi indeks yang telah ditetapkan dalam PMK SBK. RO yang menggunakan SBKU merupakan RO dimana perbandingan antara penyerapan dengan RVRO pada RO tersebut kurang dari atau sama dengan indeks yang telah ditetapkan dalam PMK SBK.

Terhadap RO SBKU yang telah memiliki ijin prinsip pelampauan dari Menteri Keuangan, akan tetap dianggap menggunakan SBKU meskipun perbandingan antara penyerapan dengan RVRO pada RO tersebut melebihi indeks yang telah ditetapkan dalam PMK SBK

2) Efisiensi SBK.

Efisiensi SBK Per RO merupakan perbandingan hasil pengurangan antara besaran indeks RO SBK dan indeks realisasi per RO SBK dengan indeks RO SBK. Ketentuan perhitungan efisiensi SBK sebagai berikut:

- Efisiensi Alokasi Per RO yang diperhitungkan paling besar 20% dan paling kecil 0%;
- Efisiensi Alokasi Per RO SBKU yang bernilai lebih dari 20% diperhitungkan maksimal sebesar 20%, sedangkan Efisiensi Alokasi per RO SBKU kurang dari 0% akan diperhitungkan sebesar 0%;
- Efisiensi Alokasi Per RO SBKK bernilai lebih dari 20% serta kurang dari 0% akan diperhitungkan 0%.

Tabel 123. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Balai POM di Palopo Tahun 2025

NO	Aspek	Komponen Penilaian	Nilai	Bobot	Niali Akhir	Nilai Aspek
1	Efektivitas Penggunaan Anggaran	Efektivitas Penggunaan Anggaran (Capaian RO)	100,00	75%	75,00	75,00
2	Efisiensi Penggunaan Anggaran	Penggunaan SBK	100,00	10%	10,00	10,02
		Efisiensi SBK	00,13	15%	0,02	
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran						**85,02**

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran atau Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan indikator yang ditetapkan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

1. Kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran

   Pengukuran dan penilaian aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran merupakan penilaian terhadap kesesuaian antara pelaksanaan

anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA. Indikator kinerja untuk pengukuran dan penilaian aspek ini adalah revisi DIPA dan deviasi halaman III DIPA

2. Kualitas implementasi pelaksanaan anggaran

   Pengukuran dan penilaian aspek kualitas implementasi pelaksanaan anggaran merupakan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan pada DIPA. Indikator kinerja untuk pengukuran dan penilaian aspek ini adalah penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan (UP dan TUP), dan dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM).

3. Kualitas hasil pelaksanaan anggaran

   Pengukuran dan penilaian aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran merupakan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam pencapaian *output* sebagaimana ditetapkan pada DIPA. Indikator kinerja untuk pengukuran dan penilaian aspek ini adalah berupa capaian *output*.

Nilai IKPA dikategorikan menjadi:

a. sangat baik, apabila nilai IKPA ≥ 95;
b. baik, apabila 89 ≤ nilai IKPA < 95;
c. cukup, apabila 70 ≤ nilai IKPA < 89; atau
d. kurang, apabila nilai IKPA < 70.

Tabel 124. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai POM di Palopo Tahun 2025

Aspek	Komponen Penilaian	Nilai	Bobot	Niali Akhir	Nilai Aspek
Kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran	1. Revisi DIPA	100.00	10.00	10.00	100,00
	2. Deviasi halaman III DIPA	100.00	15.00	15.00	
Kualitas pelaksanaan anggaran	3. Penyerapan anggaran	100.00	20.00	20.00	100,00
	4. Belanja kontraktual	100.00	10.00	10.00	
	5. Penyelesaian tagihan	100.00	10.00	10.00	
	6. Pengelolaan UP dan TUP	100.00	10.00	10.00	
	7. Dispensasi SPM (Pengurang Nilai			0.00	

	IKPA)				
Kualitas hasil pelaksanaan anggaran	8. Capaian output	100.00	25	25.00	25,00
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran		100,00			
Konversi Bobot (%)		100,00			
Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (Nilai Total/Konversi Bobot)		**100,00**			

Nilai Indikator Kinerja Anggaran (IKPA) Balai POM di Palopo 2025 sebesar 100, berada pada kategori "Sangat Baik".

b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Pada tahun 2025, indikator kinerja 'Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM' mengalami perubahan definisi operasional pada konversi nilai. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM pada tahun 2025 dikonversi dengan range nilai 1-5. 'Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM' Balai POM di Palopo pada tahun 2025 sebesar 92,51 yang jika dikonversi menghasilkan nilai 5 (Sangat Baik), sedangkan Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Palopo tahun 2024 sebesar 90,42. Dengan demikian capaian kinerja pada tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2024.

c. Perbandingan realisasi kinerja dengan target RENSTRA

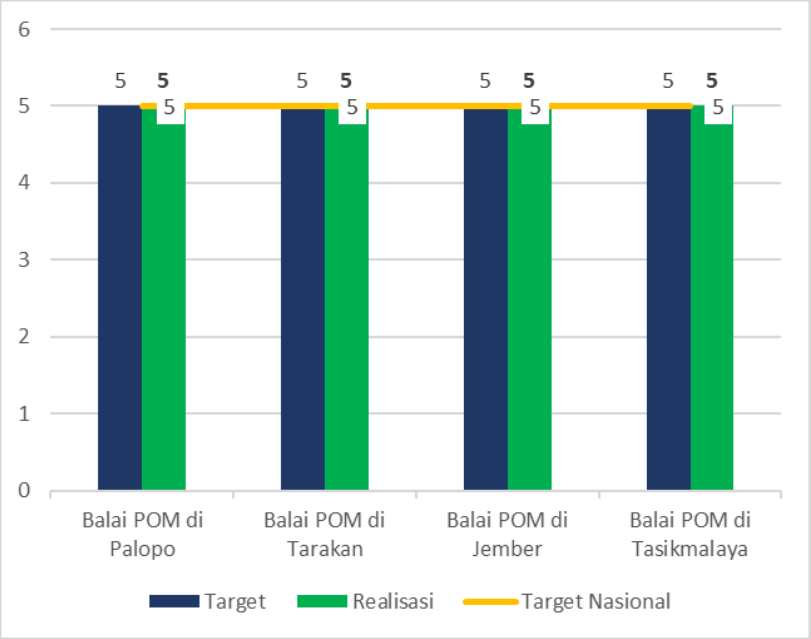
Tabel 125. Perbandingan realisasi kinerja IKSK Nilai Kinerja Anggaran dengan target Renstra

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra 2029	Realisasi	Capaian (%)	Kinerja
Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Kinerja Anggaran	5	5	100	▲ Tercapai / Melampaui

Apabila dibandingkan dengan target renstra maka realisasi 2025 telah mencapai target renstra 2029. Namun tentunya perlu dilakukan langkah-langkah strategis dalam mempertahankan capaian atau meningkatkan capaian mengingat berkaitan dengan penilaian kinerja

anggaran Instansi Pengampu dalam hal ini Kementerian Keuangan sangat dinamis dalam melakukan penilaian kinerja anggaran.

d. Perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis



Gambar 25. Perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja unit lain yang sejenis IKSK Nilai Kinerja Anggaran

Jika dibandingkan dengan unit kerja sejenis dan target nasional memiliki target dan realisasi yang semuanya sama.

e. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Keberhasilan pencapaian indikator Nilai Kinerja Anggaran di Balai POM di Palopo disebabkan oleh:

1. Komitmen antara pimpinan, ketua tim, dan anggota tim kerja Balai POM di Palopo dalam melaksanakan program dan kegiatan pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai dengan perencanaan anggaran pada DIPA dan POK.
2. Pengendalian revisi pagu tetap yang termasuk dalam 14 jenis revisi yang diperhitungkan dalam IKPA.
3. Monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran dilakukan secara rutin;
4. Penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran serta penyelesaian tagihan penyedia dengan tepat waktu;

5. Penyampaian laporan keuangan yang lengkap dan benar sesuai dengan waktu yang ditentukan;
6. Mengajukan Uang Persediaan (UP) secara rasional sesuai kebutuhan operasional bulanan dengan mengoptimalkan pembayaran langsung dalam proses pembayaran serta mempercepat revolving UP;
7. Menyelesaikan tagihan segera dan tidak menunda proses pembayaran untuk pekerjaan yang telah sesuai terminnya atau kegiatan yang telah selesai pelaksanaannya sesuai batas waktu penyelesaian tagihan untuk menghindari penumpukan tagihan akhir tahun anggaran;
8. Kedisiplinan dalam penyampaian data-data keuangan dan dokumen pembayaran yang digunakan untuk proses pencairan anggaran;
9. Tertib dalam penyampaian data supplier dan data kontrak ke KPPN;
10. Memaksimalkan capaian output serta melaporkan capaian output pada aplikasi SAKTI tepat waktu;
11. Penggunaan SBK (SBKK) dalam penyusunan RKAKL.

Walaupun secara umum target kinerja tercapai namun beberapa kendala yang juga menghambat diantaranya:

1. Masih terdapat beberapa LPJ keuangan yang tidak sesuai aturan sehingga menghambat pencairan anggaran
2. Kurang maksimalnya efisiensi pada realisasi anggaran dan output SBKK

Tabel 126. Rekomendasi Tindak Lanjut IKSK Nilai Kinerja Anggaran

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Nilai Kinerja Anggaran	Masih terdapat beberapa LPJ keuangan yang tidak sesuai aturan sehingga menghambat pencairan anggaran	Melakukan pemeriksaan berlapis dalam hal ini memaksimalkan peran verifikator serta melakukan peningkatan kompetensi pengelola keuangan	1. Membuat instrumen pemeriksaan berupa ceklis pemeriksaan yang efektif dan efisien 2. Melakukan peningkatan kompetensi untuk seluruh pengelola keuangan termasuk verifikator/staf pengelola keuangan baik melalui daring	Maret 2026	Y	K-01	Pertanggungjawaban keuangan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku

				ataupun luring				
		Kurang maksimalnya efisiensi pada realisasi anggaran dan output SBKK	Melakukan penyesuaian realisasi output agar tidak melebihi 120% serta memaksimalkan efisiensi penggunaan anggaran [ada RO SBBK	1. Membuat instrumen pemeriksaan berupa ceklis pemeriksaan yang efektif dan efisien 2. Melakukan peningkatan kompetensi untuk seluruh pengelola keuangan termasuk verifikator/staf pengelola keuangan baik melalui daring ataupun luring	Desember 2026	T		

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan/atau informasi deskriptif program/kegiatan yang paling mendukung ketercapaian kinerja dan yang tidak terlalu mendukung ketercapaian kinerja berdasarkan besaran alokasi anggaran

1. Monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran dilakukan secara rutin dalam rapat monev yang dilakukan secara berkala;
2. Memaksimalkan penggunaan KKP dalam pembayaran;
3. Penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran serta penyelesaian tagihan penyedia dengan tepat waktu;
4. Mengajukan Uang Persediaan (UP) secara rasional sesuai kebutuhan operasional bulanan dengan mengoptimalkan pembayaran langsung dalam proses pembayaran serta mempercepat revolving UP;
5. Menyelesaikan tagihan segera dan tidak menunda proses pembayaran untuk pekerjaan yang telah sesuai terminnya atau kegiatan yang telah selesai pelaksanaannya;
6. Memaksimalkan capaian output serta melaporkan capaian output pada aplikasi SAKTI tepat waktu.
7. Koordinasi dan komunikasi yang intens dengan KPPN.

IKU.28 Indeks Manajemen Risiko BPOM di Palopo

Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang memiliki ruang lingkup yang luas yaitu mencakup proyek kegiatan, atau proses bisnis secara luas. Proses Manajemen Risiko berdasarkan ISO 31000:2018 terdiri dari komunikasi dan konsultasi, penetapan konteks, identifikasi risiko, penilaian

risiko, evaluasi risiko, penanganan risiko, serta pemantauan dan reviu. Upaya pengelolaan risiko berpedoman pada Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.7.07.20.267 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pada tahun 2025 Balai POM di Palopo telah melakukan kegiatan mengidentifikasi risiko selama 2 periode yaitu pada Periode Semester I dan Semester II dan melakukan penyusunan manajemen risiko berdasarkan perjanjian kinerja pada awal tahun 2025. Adapun pelaporan dokumen manajemen risiko melalui Aplikasi SAPA APIP.

Dari hasil identifikasi risiko pada semester I terdapat sebanyak 52 (lima puluh dua) daftar risiko dengan 5 (lima) diantaranya telah dibuatkan rencana tindak pengendalian (RTP) dan 47 (empat puluh tujuh) lainnya adalah risiko yang cukup dikelola dengan pengendalian interen yang telah dibangun.

Tabel 127. Daftar Risiko Semester I Tahun 2025 Balai POM di Palopo

No.	Sasaran	Peristiwa Risiko	Tingkat Eksposur Risiko (Kemungkinan dan Dampak)	
			Level Inheren	Level Risiko Residu
1.	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Terjadi kesalahan sampling yang tidak sesuai dengan pedoman sampling	19	13
2.	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Terjadi kesalahan sampling yang tidak sesuai dengan pedoman sampling	19	13
3.	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Adanya kesulitan memperoleh sampel PIRT dengan masa	14	11

		simpan lebih dari 6 (enam) bulan		
4.	Meningkatnya tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas sektor	Pembuatan dan pengiriman surat tindak lanjut kepada pelaku usaha dan lintas sektor belum sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan di dalam SOP Mikro	19	13
5.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas tidak menyeluruh	12	7
6.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Tidak diterapkannya Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik	19	17
7.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Masih adanya sarana sediaan farmasi yang belum diperiksa di wilayah yang sulit dijangkau	10	7
8.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Terdapat sarana yang tidak menerapkan pengelolaan pangan olahan yang baik	16	14
9.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Petugas pengawasan iklan yang baru belum	14	11

		menyeluruh dalam melakukan penilaian pengawasan iklan		
10	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Tidak diterapkannya Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik	16	14
11.	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Progres pendampingan UMKM tidak sesuai dengan timeline yang ditentukan	14	7
12.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Potensi penerimaan gratifikasi oleh petugas dari pihak pelaku usaha pada saat melakukan pengawasan Obat dan Makanan	13	8
13.	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Belum dapat melakukan pengujian sampel KLB secara mandiri	17	13
14.	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Sarana dan Prasarana belum memadai untuk pemenuhan alat laboratorium	19	17
15.	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Peralatan yang terdapat di Laboratorium hanya tersedia untuk	19	17

		beberapa parameter uji.		
16.	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Kelebihan beban kerja Fungsi Tim Kerja Pengujian.	19	17
17.	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Tidak ada laporan KTD/ESO yang diterima dari sarana pelayanan kesehatan yang telah diberikan KIE	17	13
18.	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	KIE obat dan Makanan yang dilaksanakan tidak menjangkau seluruh wilayah kerja BPOM di Palopo	16	11
19.	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Masih rendahnya keterlibatan Balai POM di Palopo dalam Edukasi terkait Stunting dalam kegiatan Penyuluhan yang di lakukan	19	17
20.	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Program PJAS Aman di sekolah yang telah diintervensi tidak dilaksanakan secara berkelanjutan	19	13

21.	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Program Desa Pangan Aman yang telah diintervensi tidak dilaksanakan secara berkelanjutan	19	13
22.	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas yang telah diintervensi tidak dilaksanakan secara berkelanjutan	19	13
23.	Layanan Publik UPT yang Prima	Tidak terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik sesuai standar yang ditetapkan	17	13
24.	Layanan Publik UPT yang Prima	Layanan yang diterima masyarakat kurang lengkap dan memadai	17	13
25.	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Hilangnya Barang Bukti Tindak Pidana selama proses penyidikan	13	8
26.	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Hilangnya Barang Bukti Tindak Pidana selama proses penyidikan	13	8
27.	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan	Tidak akuratnya hasil analisis, rekomendasi	17	13

	Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	tindak lanjut dan kerawanan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palopo sebagai upaya deteksi dini dan cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan		
28.	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Tidak akuratnya hasil analisis, rekomendasi tindak lanjut dan kerawanan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palopo sebagai upaya deteksi dini dan cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan	17	13
29.	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Kompetensi petugas intelijen belum memadai	13	8
30.	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Terbongkarnya cover petugas intelijen pada saat melakukan kegiatan/operasi intelijen	17	13
31.	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi	Kompetensi petugas dalam melakukan	13	8

	dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	operasi Penindakan belum memadai		
32.	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Terancamnya keselamatan petugas pada saat melakukan operasi penindakan	17	13
33.	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Terjadinya kebocoran informasi	13	8
34.	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Terjadinya kebocoran informasi	13	8
35.	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Kurir ekspedisi tidak bersedia untuk diajak bekerja sama dalam melakukan operasi penindakan	11	5
36.	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Kurir jasa ekspedisi merupakan bagian dari jaringan Tindak Pidana	13	8
37.	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Kesalahan dalam melakukan tahapan pemberkasan	13	8
38.	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Kesalahan dalam melakukan tahapan pemberkasan	13	8
39.	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi	Praperadilan	17	13

	dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT			
40.	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	PPNS dan petugas penindakan belum siap dan belum kompeten dalam melaksanakan kewenangan yang baru	13	8
41.	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Potensi penerimaan gratifikasi oleh PPNS atau petugas penindakan dari pihak pelaku kejahatan / perkara yang sedang ditangani	13	8
42.	Terwujudnya Tata kelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Potensi pengumpulan LKE ZI melewati time line	14	11
43.	Terwujudnya Tata kelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	pelaksanaan pendataan sarana melalui sistem PAMMUNTU (Pemetaan sArana Menggunakan Maps Untuk Navigasi akTUal) tidak terlaksana	13	8
44.	Terwujudnya Tata kelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Kelalaian bendahara dalam pengelolaan kas	13	8

45.	Terwujudnya Tata kelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Pertanggungjawaban keuangan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.	13	8
46.	Terwujudnya Tata kelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Tidak adanya peningkatan kinerja UPT.	13	8
47.	Terwujudnya Tata kelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Adanya penerimaan gratifikasi dan Benturan Kepentingan oleh pejabat pengadaan dan PPK pada kegiatan pengadaan barang dan jasa.	17	13
48.	Terwujudnya Tata kelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Terjadinya kecelakaan kerja	13	8
49.	Terwujudnya Tata kelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Karena Keterbatasan SDM masih terdapat beberapa pegawai yang menerima Tugas Tambahan yang Berlebih.	17	13
50.	Terwujudnya Tata kelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Terdapat Aset yang tidak berada pada ruangan yang telah ditentukan (DBR)	13	8
51.	Terwujudnya Tata kelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Adanya Aset BMN yang hilang.	13	8
52.	Terwujudnya Tata kelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Hilangnya Data Petugas pada	17	13

		perangkat Pengolah Data yang digunakan untuk operasional perkantoran.		

Berikut rincian besaran risiko Semester I Tahun 2025 Balai POM di Palopo adalah sebagai berikut:

- 1 (satu) risiko berada pada level sangat rendah, tingkat risiko yang nilainya kurang dari atau sama dengan 5.
- 18 (delapan belas) risiko berada pada level sedang, tingkat risiko yang nilainya 12 sampai dengan 15.
- 25 (dua puluh lima) risiko berada pada level rendah, tingkat risiko yang nilainya 6 sampai dengan 11.
- 5 (lima) risiko berada pada level tinggi, tingkat risiko yang nilainya 16 sampai dengan 19.

Pada semester II Tahun 2025 terdapat penambahan 2 (dua) daftar risiko diantaranya yaitu:

Tabel 128. Daftar Tambahan Risiko Semester I Tahun 2025 Balai POM di Palopo

No.	Sasaran	Peristiwa Risiko	Tingkat Eksposur Risiko (Kemungkinan dan Dampak)	
			Level Inheren	Level Risiko Residu
1.	Terwujudnya Tata kelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Hilangnya Data Petugas pada perangkat Pengolah Data yang digunakan untuk operasional perkantoran.	17	13
2.	Terwujudnya Tata kelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Tidak adanya peningkatan kinerja UPT. (Proses Bisnis:	19	8

		Nilai AKIP UPT)		

Adapun daftar risiko yang dimitigasi sampai dengan berakhirnya tahun 2025 adalah risiko dengan tingkat level tinggi, yaitu sebegai berikut:

Tabel 129. Rencana Tindak Pengendalian Manajemen Risiko Tahun 2025 Balai POM di Palopo

No.	Peristiwa Risiko	Deskripsi Tindakan Mitigasi	Jenis Eksposur Risiko		
			Tingkat Eksposur Inheren	Tingkat Eksposur Residual	Tingkat Eksposur Mitigasi
1.	Tidak diterapkannya Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik	Monitoring Tindakan Perbaikan dan Pencegahan dari Pelaku Usaha.	19	17	13
2.	Sarana dan Prasarana belum memadai untuk pemenuhan alat laboratorium	Melakukan penyesuaian dan pengaturan ruang laboratorium untuk menghindari kepadatan	19	17	13
3.	Peralatan yang terdapat di Laboratorium hanya tersedia untuk beberapa parameter uji.	1. Berkoordinasi dengan BBPOM Makassar selaku Balai Pengampu dan Pendamping terkait pengujian sampel Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang akan dilakukan 2. Pengembangan rencana pengadaan	19	17	13

		peralatan yang dibutuhkan			
4.	Keterlambatan penerimaan hasil uji dari Balai lain yang melakukan pengujian terhadap sampel Balai POM di Palopo	1. Menunjuk PIC penghubung antar balai penguji untuk memudahkan update status 2. Mengecek dan mencatat status sampel setiap minggu dan menginput progres ke dalam rekapan manual 3. Koordinasi yang lebih intens dengan balai penguji	19	17	13
5.	Masih rendahnya keterlibatan Balai POM di Palopo dalam Edukasi terkait Stunting dalam kegiatan Penyuluhan yang di lakukan	Meningkatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait untuk melibatkan Balai POM di Palopo dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting di 7 Kabupaten/Kota	19	17	13

Penilaian maturitas penerapan manajemen risiko pada Balai POM di Palopo dilaksanakan dengan berpedoman pada Keputusan Inspektur Utama Nomor HK.02.02.7.72.03.21.05 tentang Pedoman Penilaian Tingkat Maturitas Manajemen Risiko di Lingkungan Badan POM. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya.

a. Perbandingan target 2025 dan realisasi kinerja tahun 2025

Tabel 130. Perbandingan target 2025 dan realisasi kinerja tahun 2025 IKSK Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi	Capaian (%)	Kinerja
Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,6	2,294	99,77%	Baik

Berdasarkan perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025, indikator Indeks Manajemen Risiko Balai POM di Palopo pada sasaran kegiatan Terwujudnya tata kelola pemerintahan Unit Organisasi yang optimal menunjukkan realisasi sebesar 2,594 dari target yang ditetapkan sebesar 2,6. Meskipun realisasi belum mencapai target, namun terjadi peningkatan nilai indeks sebesar 0,250 dibandingkan periode sebelumnya.

Capaian tersebut menempatkan tingkat maturitas manajemen risiko UPT pada kategori Risk Aware, yang menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko telah dilaksanakan secara terstruktur dan mulai terintegrasi dalam proses pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Kondisi ini mencerminkan adanya peningkatan kesadaran risiko, pelaksanaan identifikasi risiko secara sistematis, serta penerapan pengendalian risiko pada kegiatan utama organisasi.

Meskipun realisasi indikator belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan, peningkatan nilai indeks dan capaian tingkat maturitas menunjukkan tren perbaikan tata kelola berbasis manajemen risiko di lingkungan UPT. Ke depan, diperlukan penguatan konsistensi penerapan manajemen risiko, khususnya pada aspek pemantauan efektivitas pengendalian dan integrasi manajemen risiko dalam pengambilan keputusan, guna mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tabel 131. Perbandingan Target 2025 Dengan Tahun-Tahun Sebelumnya IKSK Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun	Realisasi	Tingkat Maturitas

Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2023	2,7	*Risk Aware*
		2024	2,3	*Risk Aware*
		2025	2,594	*Risk Aware*

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja indikator Indeks Manajemen Risiko Balai POM di Palopo selama periode 2023–2025, capaian kinerja menunjukkan pola fluktuatif dengan kecenderungan perbaikan pada tahun terakhir di 2025. Pada tahun 2023 nilai indeks tercatat sebesar 2,7, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi 2,3, dan kembali meningkat pada tahun 2025 menjadi 2,594.

Peningkatan capaian pada tahun 2025 dibandingkan tahun 2024 menunjukkan adanya perbaikan dalam penerapan manajemen risiko organisasi, khususnya pada penguatan proses identifikasi risiko, pelaksanaan pengendalian risiko, dan pemantauan pelaksanaan pengendalian. Meskipun demikian, capaian tahun 2025 masih belum sepenuhnya menyamai tingkat kinerja tahun 2023.

Dari sisi tingkat maturitas, seluruh capaian pada periode 2023–2025 berada pada kategori Risk Aware, yang menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko telah dilakukan secara terstruktur dan menjadi bagian dari pelaksanaan tugas organisasi, namun belum sepenuhnya terintegrasi secara optimal dalam proses pengambilan keputusan strategis.

Secara umum, tren kinerja menunjukkan adanya pemulihan dan penguatan implementasi manajemen risiko setelah penurunan pada tahun 2024. Untuk mencapai tingkat kinerja yang lebih tinggi dan berkelanjutan, diperlukan peningkatan konsistensi penerapan manajemen risiko.

c. Perbandingan realisasi kinerja dengan target RENSTRA

Manajemen risiko sangat krusial dalam pencapaian target Rencana Strategis (Renstra) karena berfungsi sebagai mekanisme proaktif untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memitigasi potensi gangguan yang dapat menghambat pencapaian sasaran jangka panjang organisasi. Renstra yang baik harus mengintegrasikan manajemen risiko agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien.

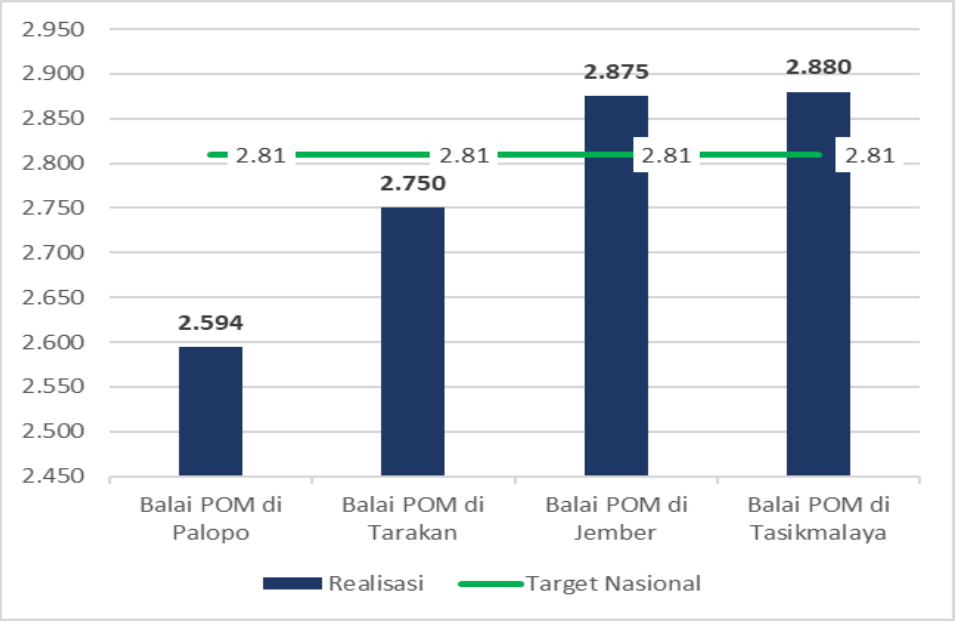
Tabel 132. Perbandingan realisasi kinerja IKSK Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM dengan target Renstra

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra	Realisasi	Capaian (%)	Kinerja

		2029			
Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3	2,594	86,47	Akan Tercapai

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah (Renstra), indikator Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM menunjukkan realisasi sebesar 2,594, dibandingkan target Renstra tahun 2025 sebesar 2,60. Dengan demikian, capaian kinerja tahun 2025 telah mendekati target jangka menengah yang ditetapkan pada tahun pertama periode Renstra 2025–2029. Target kinerja Renstra menunjukkan tren peningkatan bertahap dari 2,60 pada tahun 2025 menjadi 3,00 pada tahun 2029. Pola peningkatan ini mencerminkan arah kebijakan penguatan tata kelola organisasi melalui peningkatan tingkat maturitas penerapan manajemen risiko Balai POM di Palopo secara berkelanjutan.

d. Perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja unit



Gambar 26. Perbandingan realisasi kinerja IKSK Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

Berdasarkan tabel perbandingan realisasi kinerja terhadap target Indeks Manajemen Risiko Tahun 2025, diketahui bahwa capaian masing-masing satuan kerja menunjukkan perbedaan tingkat keberhasilan dalam memenuhi target yang telah ditetapkan.

Dari empat satuan kerja yang dibandingkan, yaitu Balai POM di Palopo, Balai POM di Tarakan, Balai POM di Jember, dan Balai POM di Tasikmalaya, dua UPT kerja berhasil melampaui target yang ditetapkan, satu UPT belum mencapai target, dan satu UPT hampir mencapai target.

Balai POM di Tarakan mencatat realisasi sebesar 2,75 dari target 2,72 dengan capaian 101,10%. Demikian pula Balai POM di Tasikmalaya memperoleh realisasi sebesar 2,88 dari target 2,85 dengan capaian 101,05%. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko pada kedua UPT tersebut telah berjalan efektif dan melebihi ekspektasi kinerja yang ditetapkan. Sementara itu, Balai POM di Palopo merealisasikan nilai sebesar 2,594 dari target 2,60 dengan capaian 99,77%. Meskipun secara persentase belum mencapai 100%, selisih capaian relatif kecil sehingga secara substantif kinerja dapat dikategorikan hampir memenuhi target.

Adapun Balai POM di Jember mencatat realisasi sebesar 2,875 dari target 3,00 dengan capaian 95,83%. Capaian ini menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara target dan realisasi, sehingga diperlukan upaya peningkatan dalam implementasi manajemen risiko, khususnya pada aspek identifikasi, pemetaan, serta pemantauan tindak lanjut mitigasi risiko.

Apabila dibandingkan dengan target nasional sebesar 2,81, terdapat UPT yang telah melampaui nilai tersebut, yaitu Balai POM di Tasikmalaya dan Balai POM di Jember, sedangkan Balai POM di Tarakan dan Balai POM di Palopo masih berada di bawah nilai nasional meskipun Balai POM di Tarakan telah melampaui target internalnya. Hal ini menunjukkan bahwa penetapan target internal masing-masing UPT memiliki tingkat ambisi yang berbeda.

Secara keseluruhan, kinerja Indeks Manajemen Risiko Tahun 2025 dapat dinilai cukup baik, ditandai dengan mayoritas UPT yang telah mencapai atau melampaui target. Namun demikian, masih diperlukan penguatan penerapan manajemen risiko secara konsisten dan berkelanjutan agar seluruh UPT dapat mencapai bahkan melampaui target nasional yang telah ditetapkan.

e. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Penilaian maturitas penerapan manajemen risiko pada Balai POM di Palopo dilaksanakan dengan berpedoman pada Keputusan Inspektur Utama Nomor HK.02.02.7.72.03.21.05 tentang Pedoman Penilaian Tingkat Maturitas Manajemen Risiko di Lingkungan Badan POM.

Berdasarkan penilaian yang telah dilakukan, maka tingkat maturitas penerapan manajemen risiko pada Balai POM di Palopo dapat dikategorikan *Risk Aware*.

Berikut maturitas penerapan manajemen risiko pada Balai POM di Palopo

Tabel 133. Penerapan Manajemen Risiko pada Balai POM di Palopo

Uraian	Nilai 2024	Nilai 2025	Target Nilai sesuatu Renstra 2025	Selisih Capaian
Nilai Maturitas	2,344	2,594	2,600	-0,006
Tingkat Maturitas	*Risk Aware*			

Penerapan manajemen risiko di lingkungan Balai POM di Palopo tahun 2025 telah meningkat dari hasil penilaian tahun 2024, meskipun nilai tahun 2025 belum mencapai 2,6 sesuai dengan target renstra tahun 2025, namun demikian perlu dilakukan perbaikan berkelanjutan agar nilai maturitas manajemen risiko dapat mencapai tingkat maturitas level selanjutnya dan dapat mencapai target Rencana Strategis Badan POM. Berikut adalah kendala utama penerapan manajemen risiko di lingkungan Balai POM di Palopo:

Tabel 134. Rekomendasi Tindak Lanjut IKSK Penerapan Manajemen Risiko Balai POM di Palopo

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	Belum memiliki perencanaan peningkatan kompetensi manajemen risiko secara berkesinambungan.	Menyusun rencana dan melakukan pengembangan kompetensi manajemen risiko secara berkesinambungan (pelatihan/sertifikasi/*workshop*).	Menyusun kurikulum dan jadwal pelatihan/*workshop* manajemen risiko bagi pegawai secara periodik.	Selama tahun 2025 belum ada perencanaan pelatihan Manajemen Risiko	T	-	-

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan/atau informasi deskriptif program/kegiatan yang paling mendukung ketercapaian kinerja dan

yang tidak terlalu mendukung ketercapaian kinerja berdasarkan besaran alokasi anggaran

Balai POM di Palopo telah melakukan identifikasi risiko secara tepat waktu pada periode Semester I dan Semester II Tahun 2025, juga telah melakukan penilaian risiko sesuai pedoman serta melengkapi kertas kerja penentuan skor risiko sebagai dasar dalam menentukan level kemungkinan dan dampak, mampu memanage risiko dan melakukan rencana tindak pengendalian meskipun dalam penerapannya masih terhadap tahapan proses yang terlewatkan seperti pengujian aktivitas pengendalian pada semester II, namun pada tahun 2025 Auditor Internal Balai POM di Palopo telah turut mengevaluasi dokumen manajemen risiko pada semester II serta telah mampu memitigasi seluruh risiko tinggi dengan respon risiko *Reduce*, pemilik risiko dapat menyajikan langkah-langkah yang diperlukan untuk mereduksi kemungkinan, dampak atau keduanya atas suatu risiko. Mengurangi kemungkinan terjadinya risiko, yaitu penanganan terhadap penyebab risiko agar kemungkinan terjadinya risiko semakin kecil.

Tabel 135. Tindak Lanjut Rencana Tindak Pengendalian Manajemen Risiko Tahun 2025 Balai POM di Palopo

No.	Peristiwa Risio	Deskripsi Tindakan Mitigasi	Hasil Penanganan Risiko
1	Tidak diterapkannya Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik	Monitoring Tindakan Perbaikan dan Pencegahan dari Pelaku Usaha.	Balai POM di Palopo telah menerima laporan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan dari Pelaku Usaha
2	Sarana dan Prasarana belum memadai untuk pemenuhan alat laboratorium	Melakukan penyesuaian dan pengaturan ruang laboratorium untuk menghindari kepadatan	Mendapatkan persetujuan dan anggaran pembangunan laboratorium
3	Peralatan yang terdapat di Laboratorium hanya tersedia untuk beberapa parameter	1. Berkoordinasi dengan BBPOM Makassar selaku Balai Pengampu dan Pendamping	Balai POM di Palopo dapat melakukan pengujian mandiri

	uji	terkait pengujian sampel Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang akan dilakukan 2. Pengembangan rencana pengadaan peralatan yang dibutuhkan	
4	Keterlambatan penerimaan hasil uji dari Balai lain yang melakukan pengujian terhadap sampel Balai POM di Palopo	1. Menunjuk PIC penghubung antar balai penguji untuk memudahkan update status 2. Mengecek dan mencatat status sampel setiap minggu dan menginput progres ke dalam rekapan manual 3. Koordinasi yang lebih intens dengan balai penguji	Tercapainya IKU Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar
5	Masih rendahnya keterlibatan Balai POM di Palopo dalam Edukasi terkait Stunting dalam kegiatan Penyuluhan yang di lakukan	Meningkatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait untuk melibatkan Balai POM di Palopo dalam Tim Percepatan	Balai POM di Palopo terlibat dalam Tim Percepatan Stunting

		Penurunan Stunting di 7 Kabupaten/Kota	

3.2 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Pada tahun 2025 telah dilaksanakan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal pada semua Indikator Kinerja Utama antara lain pemetaan terhadap kondisi awal, rekomendasi perbaikan, progres rencana aksi dan kondisi setelah rencana aksi dilaksanakan oleh semua fungsi satuan kerja Balai POM di Palopo, seperti matriks dibawah ini :

Tabel 136. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

No	Indikator	Kendala /Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T) *	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan							Y	SDM-01	Terjadi kesalahan sampling yang tidak sesuai dengan pedoman sampling
2	Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	Dari 57 fasyankes yang telah diberikan KIE, 30 fasyankes (52,63%) telah mengajukan permohonan akun, dan 10 diantaranya	1. Meningkatkan koordinasi dengan seluruh peserta yang telah mengikuti KIE Farmak	1. Meningkatkan koordinasi dengan seluruh peserta yang telah mengikuti KIE Farmak		1. KIE Farmakovigilans kepada 45 Sarana Pelayanan Kefarmasian di wilayah kerja Balai	31 Desember 2025	Y	O-09	Tidak ada laporan KTD/ESO yang diterima dari sarana pelayanan kesehatan yang telah diberikan KIE

		(33,33%) telah aktif. Masih terdapat 27 fasyankes yang belum mengajukan akun (9 RS, 4 Klinik, 8 PKM, 6 Apotek). Telah dibentuk WA grup dengan peserta KIE Farmakovigilans 25 Juni 2025 untuk memudahkan koordinasi, namun respon yang diterima masih minim.	ovigilans untuk segera membuat akun dan melaporkan bila terdapat dugaan KTD/ESO di fasyankesnya. Koordinasi dapat intens dilakukan dengan mekanisme menghubungi langsung kontak peserta. 2. Memberikan apresiasi kepada fasyankes yang telah mengajukan laporan KTD/ESO berupa surat yang juga disampaikan kepada fasyankes lain untuk meningkatkan laporan	ovigilans untuk segera membuat akun dan melaporkan bila terdapat dugaan KTD/ESO di fasyankesnya. Koordinasi dapat intens dilakukan dengan mekanisme menghubungi langsung kontak peserta. 2. Memberikan apresiasi kepada fasyankes yang telah mengajukan laporan KTD/ESO berupa surat yang juga disampaikan		POM di Palopo 2. Farmakovigilans kepada 45 Sarana Pelayanan Kefarmasian di wilayah kerja Balai POM di Palopo 3. Pembuatan akun EMESO peserta KIE Farmakovigilans				

			nya.	kepada fasyankes lain untuk meningkatkan laporannya.						
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan							Y	SDM-02	Terjadi kesalahan sampling yang tidak sesuai dengan pedoman sampling
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	Belum terdapat sampel KLB hingga TW IV						Y	SDM-06	Belum dapat melakukan pengujian sampel KLB secara mandiri
5	Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar							Y	O-01	Adanya kesulitan memperoleh sampel PIRT dengan masa simpan lebih dari 6 (enam) bulan
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	1. Lambat/tidak mengirimkan STL kepada Stakeholder 2. Stake holder tidak menindaklanjuti keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang	Melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan langsung ke sarana yang tidak meresp	Melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan langsung ke sarana yang tidak		Sebagian sarana yang telah diperiksa di awal tahun di Kab. Luwu Timur telah dikunjungi dalam rangka monitoring dan	31 Desember 2025	Y	SDM-03	Pembuatan dan pengiriman surat tindak lanjut kepada pelaku usaha dan lintas sektor belum sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan

		disampaikan	on STL yang dikirimkan	merespon STL yang dikirimkan		evaluasi tindakan perbaikan yang telah dilakukan				di dalam SOP Mikro
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Target sarana produksi Sediaan Farmasi (industri kosmetik golongan B) tahun 2025 hanya 1 dan telah diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku di bulan Mei	Mempertahankan kinerja yang dilakukan dan meningkatkannya	Mempertahankan kinerja yang dilakukan dan meningkatkannya	Selesai	Target sudah terpenuhi	31 Desember 2025	Y	O-02	Pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas tidak menyeluruh
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan (IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Sebagian besar pembuatan rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pelaporan SIPT dapat dilakukan tepat waktu	Mempertahankan kinerja yang dilakukan dan meningkatkannya	Mempertahankan kinerja yang dilakukan dan meningkatkannya	Selesai	Target sudah terpenuhi	31 Desember 2025	Y	SDM-04	Tidak diterapkannya cara produksi pangan olahan yang baik
9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Sebagian besar pembuatan rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pelaporan SIPT dapat dilakukan tepat waktu	Mempertahankan kinerja yang dilakukan dan meningkatkannya	Mempertahankan kinerja yang dilakukan dan meningkatkannya	Selesai	Target sudah terpenuhi	31 Desember 2025	Y	o-03	Masih adanya sarana sediaan farmasi yang belum diperiksa di wilayah yang sulit dijangkau
10	Persentase	Sebagian	Memper	Mempe	Sele	Target	31	Y	O-04	Terdapat

	sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	besar pembuatan rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pelaporan SIPT dapat dilakukan tepat waktu	tahankan kinerja yang dilakukan dan meningkatkannya	rtahankan kinerja yang dilakukan dan meningkatkannya	sai	sudah terpenuhi	Desember 2025			sarana yang tidak menerapkan pengelolaan pangan olahan yang baik
11	Persentase iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Sebagian besar iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan yang berlaku telah dilaporkan tepat waktu	Mempertahankan kinerja yang dilakukan dan meningkatkannya	Mempertahankan kinerja yang dilakukan dan meningkatkannya	Selesai	Target sudah terpenuhi	31 Desember 2025	Y	SDM-05	Petugas pengawasan iklan yang baru belum menyeluruh dalam melakukan penilaian pengawasan iklan
12	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Target sarana produksi pangan fortifikasi di tahun 2025 yaitu sebanyak 2 (dua) sarana dari total 3 (tiga) sarana produksi pangan fortifikasi yang berada di wilayah kerja BPOM Palopo dan telah diperiksa semua di bulan Mei karena sampel pangan	Mempertahankan kinerja yang dilakukan dan meningkatkannya	Mempertahankan kinerja yang dilakukan dan meningkatkannya	Selesai	Target sudah terpenuhi	31 Desember 2025	Y	O-05	Tidak diterapkannya cara produksi pangan olahan yang baik

		fortifikasi (termasuk yang diperoleh dari sarana produksi) harus tersampling di bulan Mei								
13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Keberhasilan dari tercapainya target diakrenakan telah terpenuhinya kompetensi penguji (aspek 1 dan 2) untuk penilaian standar kemampuan laboratorium di TW III	Penambahan data kemampuan SRL dan kompetensi penguji untuk TW IV	Dilakukan pengerjaan PU oleh minimal 2 orang	Selesai	Keberhasilan dari tercapainya target diakrenakan: a. telah terpenuhinya kompetensi penguji (aspek 1 dan 2) untuk penilaian standar kemampuan laboratorium di TW IV b. telah terealisasinya target pengujian obat secara rapid test dan verifikasi metode analisis mikrobiologi menggunakan media ready to use	31 Desember 2025	Y	O-07; O-08; SDM-07	a. Sarana a. dan prasarana belum memadai untuk pemenuhan alat laboratorium b. Peralatan yang terdapat di laboratorium hanya tersedia untuk beberapa Parampara uji c. Kelebihan beban kerja fungsi tim kerja pengujian

						c. telah terselesaikannya pengadaan alat laboratorium tahun 2025				
14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Beberapa kendala yang dapat menghambat efektivitasnya, antara lain: 1. Tingkat Pendidikan dan Literasi yang Rendah Masyarakat dengan pemahaman rendah terhadap informasi seringkali kesulitan mencerna materi KIE, terutama jika disampaikan dengan istilah atau bahasa yang kurang sederhana. 2. Keterbatasan Anggaran Anggaran yang kurang membuat kegiatan tidak dapat dilangsungkan di tempat yang representatif dan hanya	1. Meningkatkan kualitas materi KIE yang diberikan baik melalui media maupun secara tatap muka dengan menyesuaikan tren dan kebutuhan masyarakat. 2. Meningkatkan kompetensi petugas agar dapat menyusun materi KIE yang menarik dan mudah dipahami. 3. Dibutuhkan penamb	1. Meningkatkan kualitas materi KIE yang diberikan baik melalui media maupun secara tatap muka dengan menyesuaikan tren dan kebutuhan masyarakat. 2. Meningkatkan kompetensi petugas agar dapat menyusun materi KIE yang menarik dan mudah dipahami. 3. Dibutu	Selesai	1. KIE Tatap muka pada 19 Januari di Lapangan Pancasila Kota Palopo 2. Pelaksanaan KIE Media Sosial dan berita aktual pada subsite Januari-Juli 2025 3. KIE Door to Door 20 Mei 2025 4. KIE Door to Door 20 Juni 2025 5. KIE Door to Door 26 Juni 2025 6. KIE Door to Door 10 Juli 2025 7. Telah disediakan akun Canva	31 Desember 2025	Y	O-10; R-01	1. KIE Obat dan Makanan yang dilaksanakan tidak menjangkau seluruh wilayah kerja BPOM di Palopo 2. Masih rendahnya keterlibatan BPOM di Palopo dalam edukasi terkait stunting dalam kegiatan penyuluhan yang di lakukan

		meminjam ruangan dari stakeholder sehingga sarana dan prasarana pendukung kegiatan masih kurang memadai.	ahan anggaran untuk mendukung pelaksanaan KIE tatap muka. 4. Melaksanakan KIE tatap muka dan media sesuai dengan jadwal dan tema yang telah disusun	hkan penambahan anggaran untuk mendukung pelaksanaan KIE tatap muka. 4. Melaksanakan KIE tatap muka dan media sesuai dengan jadwal dan tema yang telah disusun		dan Capcut Premium untuk mendukung pembuatan materi KIE yang menarik				
15	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Telah terlaksana sesuai yang direncanakan dengan dukungan dan kerjasama yang baik dari lintas sektor dan antusiasme sekolah yang diintervensi.	Perlu dilakukan penyesuaian target rhpk dengan menyesuaikan surat edaran terbaru (Nomor PM.02.01.5.05.25.09 Tahun 2025 Tentang Pelaksanaan Program	1. Melaksanakan tahapan kegiatan sesuai dengan renlak yang telah disusun. 2. Melakukan pengawalan pelaksanaan pembudaayaa	Selesai	1. Melaksanakan Advokasi 2. Melaksanakan sosialisasi Keamanan Pangan bagi Sekolah yang diintervensi 3. Melaksanakan Bimtek Kader Keamanan Pangan	31 Desember 2025	Y	S-01	Program PJAS aman di sekolah yang telah diintervensi tidak dilaksanakan secara berkelanjutan

			Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Sara Pangan Aman (Germas Sapa)	n keamanan pangan untuk sekolah yang diintervensi tahun sebelumnya.		4. Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan 5. Melaksanakan pengawalan sekolah yang diintervensi tahun 2024				
16	Jumlah desa pangan aman	Telah terlaksana sesuai yang direncanakan dengan dukungan dan kerjasama yang baik dari lintas sektor dan antusiasme desa yang diintervensi.	Perlu dilakukan penyesuaian target rhpk dengan menyesuaikan surat edaran terbaru (Nomor PM.02.01.5.05.25.09 Tahun 2025 Tentang Pelaksanaan Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Sara Pangan Aman	1. Melaksanakan tahapan kegiatan sesuai dengan renlak yang telah disusun. 2. Melakukan pengawalan Desa yang diintervensi tahun sebelumnya.	Selesai	1. Melaksanakan Advokasi 2. Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa 3. Bimtek Komunitas Desa 4. Monitoring dan Evaluasi Desa yang diintervensi tahun berjalan 5. Melaksanakan pengawalan desa yang diintervensi tahun 2024	31 Desember 2025	Y	S-02	Program desa pangaman yang telah diintervensi tidak dilaksanakan secara berkelanjutan

			(Germa s Sapa)							
17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Telah terlaksana sesuai yang direncanaka n dengan dukungan dan kerjasama yang baik dari lintas sektor dan antusiasme pengelola dan komunitas pasar yang diintervensi.	Perlu dilakuka n penyesu aian target rhpk dengan menyes uaikan surat edaran terbaru (Nomor PM.02.0 1.5.05.2 5.09 Tahun 2025 Tentang Pelaksa naan Program Gerakan Masyara kat Hidup Sehat Sara Pangan Aman (Germa s Sapa)	Menye suaika n pelapor an tahapa n progra m sesuai dengan kegiata n yang telah terlaks ana.	Sele sai	1. Melaksan akan Advokasi 2. Bimtek dan Penyuluh an Komunita s Pasar 3. Sosialisa si keamana n pangan bagi komunita s pasar 4. Pengawa san Keamana n Pangan dan Monitorin g evaluasi 5. Pengawa lan	31 Dese mber 2025	Y	S-03	Program pasar pangan aman berbasis komunitas yang telah diintervensi tidak dilaksanak an secara berkelanjut an
18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	1. Terdapat 4 sarana produksi pangan olahan yang mengikuti semua tahapan pendamping an yang telah terbit IPCPPOBny a dan telah memenuhi target pendamping an UMK PO	Pendam pingan dan fasilitasi tetap dilanjutk an bagi UMK yang belum terbit sertifikat IP CPPOB/ CPKBny a dan melakuk	Penda mpinga n dan fasilitas i tetap dilanjut kan bagi UMK yang belum terbit sertifik at IP CPPO B/CPK Bnya	Sele sai	Pendamp ingan dan fasilitasi tetap dilanjutka n bagi UMK yang belum terbit sertifikat IP CPPOB/ CPKBny a dan melakuka	31 Dese mber 2025	Y	O-06	Progres pendampin gan UMKM tidak sesuai dengan timeline yang ditentukan

		2. Target pendampingan UMK OT telah tercapai dengan terbitnya izin penerapan CPOTB Tahap I sarana UMOT di bulan Agustus 3. Target pendampingan UMK Kosmetik telah tercapai dengan terbitnya izin penerapan CPKB Industri Kosmetik Golongan B di awal tahun	an pelaporan monev secara berkala	dan melakukan pelaporan monev secara berkala		n pelaporan monev secara berkala				
19	Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	1. danya dukungan penuh dari Criminal Justice System (CJS) dalam penyelesaian Berkas Perkara sehingga 3 (tiga) perkara telah Tahap II 2. Adanya komitmen dari Penyidik dalam menyelesai	1. Pengawalan persidangan perkara ke-3 hingga mendapatkan putusan yang inkracht 2. Pelaporan Kemajuan Penyidikan melalui ADP	1. Pengawalan persidangan perkara ke-3 hingga mendapatkan putusan yang inkracht 2. Pelaporan Kemajuan Penyidikan melalui	Selesai	3 (tiga) perkara telah mendapatkan putusan inkracht	31 Desember 2025	Y	H-01	Hilangnya barang bukti tindak pidana selama proses penyidikan

		kan tahapan penyidikan perkara sesuai perencanaan	secara lengkap dan tepat waktu	ADP secara lengkap dan tepat waktu						
20	Persentase laporan analisis kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Komitmen petugas dalam melakukan kegiatan Patroli Siber dan melaporkan tepat waktu	Mempertahankan komitmen pelaporan Patroli Siber tepat waktu	Mempertahankan komitmen pelaporan Patroli Siber tepat waktu	Selesai	A. Laporan hasil kegiatan Patroli Siber Bulan Januari-Desember 2025 telah dikirimkan tepat waktu B. Kegiatan Cegah Tangkal telah terlaksana berupa: 1. Penyusunan Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makana 2. Pelaksanaan kegiatan Cegah Tangkal (Penggalangan) dan tindak lanjut rekomendasi Laporan Analisis Kejahatan Obat	31 Desember 2025	Y	SDM-09	Tidak akuratnya hasil analisis, rekomendasi tindak lanjut dan kerawanan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palopo sebagai upaya deteksi dini dan cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan

						dan Makanan 3. Penyusunan Laporan Cegah Tangkal				
21	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar							T		
22	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT							T		
23	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	1. Telah dilakukan advokasi kepada seluruh kab/kota di wilayah kerja Balai POM di Palopo dengan mengundang Sekda, Kepala Bapenda, Kadis Kesehatan, KaDPMPTSP, Kadis Perdagangan, Kadis Perindustrian, Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk menyampaikan terkait	1. Advokasi dilakukan untuk tiap kab/kota sehingga dapat lebih dikuatkan komitmen pelaksanaannya 2. Advokasi dilakukan secara luring dan dipimpin oleh Kepala UPT dengan mengundang	1. Advokasi dilakukan untuk tiap kab/kota sehingga dapat lebih dikuatkan komitmen pelaksanaannya 2. Advokasi dilakukan secara luring dan dipimpin oleh	Selesai	1. Advokasi Lintas Sektor (Agustus 2025) 2. Pendampingan (Agustus-September 2025) 3. Pelaporan (September 2025)	31 Desember 2025	T		

		Penilaian Mandiri Kab/Kota Pangan Aman 2. Adanya program DAK BOK NF POM yang diterima oleh seluruh Kab/Kota wilayah kerja Balai POM di Palopo sehingga mendukung pengumpulan bukti dukung pada tools penilaian mandiri 3. Adanya pendampingan yang dilakukan kepada kab/kota yang ditargetkan sehingga bukti dukung yang disampaikan dapat dioptimalkan kesesuaian nya	Sekda dan Pimpinan OPD 3. Perkuatan TKPPOM 4. Pendampingan dilakukan lebih awal kepada kab/kota yang ditargetkan	Kepala UPT dengan mengundang Sekda dan Pimpinan OPD 3. Perkuatan TKPPOM 4. Pendampingan dilakukan lebih awal kepada kab/kota yang ditargetkan						
24	Indeks Pelayanan Publik UPT						31 Desember 2025	Y		
25	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM						31 Desember 2025	Y		

26	Nilai AKIP UPT BPOM						31 Desember 2025	Y		
27	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM						31 Desember 2025	Y		
28	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM						31 Desember 2025	Y		

3.3 Pemanfaatan Informasi Kinerja

Laporan Kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban atas program dan anggaran yang digunakan, dan sebagai alat evaluasi kinerja organisasi melalui sasaran kegiatan dan indikator kinerja, dimana dapat terlihat apakah target tercapai atau tidak dan mana program efektif dan yang perlu diperbaiki.

Tahun 2025 Laporan Kinerja BPOM Palopo memberikan manfaat sebagai acuan perbaikan secara terus menerus dalam peningkatan kinerja yang lebih baik yang diawali dari Laporan Interim setiap Triwulan melalui monitoring evaluasi, rekomendasi maupun rencana aksi atas rekomendasi yang berkelanjutan sehingga target Tahun 2025 dapat tercapai.Selain hal di atas manfaat disusunnya Laporan Kinerja antara lain:

1. Dimanfaatkan dalam penyesuaian kegiatan untuk mencapai target kinerja.
2. Dimanfaatkan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja dengan melakukan Revisi Anggaran baik Revisi POK atau Revisi DIPA.
3. Dimanfaatkan sebagai evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi / rencana aksi kinerja.
4. Dimanfaatkan dalam penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya seperti perubahan target kinerja. Seperti pada Bulan Agustus terdapat Revisi Perjanjian Kinerja 2025 yang disebabkan
5. Penyesuaian target dikarenakan adanya perubahan perhitungan berdasarkan Manual IKU yaitu pada indikator: Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan; Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kosmetik yang baik da0tau IP CPPOB pangan olahan.
6. Perubahan sasaran kegiatan yang awalnya ada 9 (Sembilan) menjadi 8 (delapan (delapan) Sasaran kegiatan yaitu pada Sasaran Kegiatan Menguatnya laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, sedangkan untuk indikator yang mendukung sasaran kegiatan tersebut masuk ke dalam sasaran kegiatan Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
7. Dimanfaatkan sebagai masukan dan dasar pertimbangan dalam penyesuaian strategi penyusunan tim kerja, pembagian peran tim kerja, penyederhanaan dan pengendalian pengolahan data, pengumpulan dan pengendalian analisis capaian kinerja, perencanaan pengembangan kompetensi, penguatan tim kerja, dengan mempertimbangkan kekuatan individu dalam tim SAKIP, dan mentoring dalam menyusun analisis data untuk menghasilkan laporan analisis yang memadai.

8. Dimanfaatkan sebagai sumber data dalam melakukan evaluasi kinerja indikator kinerja yang lain.
9. Dimanfaatkan sebagai dasar reviu dan revisi target kinerja pada tahun berikutnya yaitu sebagai data baseline kertas kerja penentuan target tahun berikutnya.

3.4 Realisasi Anggaran

a. Realisasi Anggaran Tahun 2025

Anggaran BPOM di Palopo bersumber dari APBN sesuai DIPA tahun 2025 No. DIPA-063.01.2.672845/2025 yang diterbitkan pada tanggal 29 November 2024 sebesar Rp6.715.332.000,00 (enam milyar tujuh ratus lima belas juta tiga ratus tiga puluh dua juta rupiah). Selama tahun 2025 terdapat beberapa kali revisi DIPA. Revisi yang menyebabkan perubahan pagu DIPA yaitu pada tanggal 14 Juli 2025 mengalami kenaikan pagu menjadi Rp6.813.032.000,00 (enam milyar delapan ratus tiga belas juta tiga puluh dua ribu rupiah) revisi tersebut untuk pemenuhan kebutuhan belanja pegawai dan belanja barang. Pergeseran atau perubahan pagu anggaran yang terjadi pada tahun 2025 terdiri dari:

1. Revisi DIPA pada kewenangan DJA sesuai Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia, Tanggal 24 Januari 2025 Nomor S-37/MK.02/2025 Hal Efisiensi belanja Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025. Tanggal penetapan 22 Februari 2025;
2. Revisi DIPA pada kewenangan DJA yang berdasar pada Siaran Pers Badan Kepegawaian Negara Nomor: 015/RILIS/BKN/III/2025 tentang Penetapan NIP CASN 2024 Sampai Penetapan SK Pengangkatan dalam rangka memenuhi kebutuhan anggaran pelaksanaan tugas dan fungsi yang belum teranggarkan pada proses perencanaan. Tanggal penetapan 21 Maret 2025;
3. Revisi DIPA pada kewenangan DJA yang berdasar pada surat Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor B-PR.05.03.1.2.03.25.84 hal Permohonan Relaksasi Pemanfaatan Efisiensi Anggaran TA 2025 dalam rangka memenuhi kebutuhan anggaran pelaksanaan tugas dan fungsi yang belum teranggarkan pada proses perencanaan. Tanggal penetapan 10 April 2025;
4. Revisi DIPA dalam rangka pemutakhiran Halaman III DIPA pada kanwil DJPb Sulawesi Selatan. Tanggal Penetapan 23 April 2025;
5. Revisi DIPA pada kewenangan DJA pada tanggal 4 Juli 2025;
6. Revisi DIPA kewenangan DJA pada tanggal 29 Oktober 2025;
7. Revisi DIPA kewenangan DJA pada tanggal 10 November 2025.

Pengelolaan anggaran BPOM di Palopo senantiasa menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.

Upaya yang telah dilakukan BPOM di Palopo dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah:

- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala
- Revisi anggaran untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan
- Percepatan pengadaan barang dan jasa

Dari total anggaran sebesar Rp6.813.032.000,00 (enam milyar delapan ratus tiga belas juta tiga puluh dua ribu rupiah) sampai dengan akhir tahun 2025 terealisasi sebesar Rp5.504.403.816 (lima milyar lima ratus empat juta empat ratus tiga ribu delapan ratus enam belas rupiah) dengan persen realisasi sebesar 99,88%.

b. Realisasi Kinerja Dibandingkan dengan Realisasi Anggaran

Realisasi kinerja pada Balai POM di Palopo tahun 2025 dibandingkan dengan realisasi anggaran ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 137. Realisasi Kinerja Dibandingkan dengan Realisasi Anggaran pada Balai POM di Palopo Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja	Volume			Anggaran		
		T	R	%	P	R	%
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	83	100	120,48	70.989.250,00	57.096.408,75	80,43
2	Persentase sarana pelayanan kesehatan yangtelah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26	26,67	102,56	44.550.000	0	0
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	100	133,33	29.417.000,00	17.277.914,75	58,73
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar **	100	0	0,00	5.301.400,00	2.941.388,60	55,48
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	100,00	109,89	7.952.100,00	4.412.082,90	55,48
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan	91,7	91,7	100,00	9.440.250,00	8.258.750,00	87,48

	Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder						
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan *	80	100,00	125,00	9.440.250,00	8.258.750,00	87.48
8	Persentase sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan**	85	92,47	108,79	25.110.500,00	16.517.500,00	65,78
9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan**	90	93,37	103,74	196.209.100	113.145.434,90	57,67
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	86,67	108,34	131.651.100	57.368.048,40	43,58
11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	90,60	97,47	107,58	46.198.000	55.777.386,50	120,74
12	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan *	67	67	100,00	4.180.000	3.880.000	92.82
13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	14	15,19	108,50	818.260.000	715.348.649	87,42
14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	85,01	86,14	101,33	137.439.000	10.035.750	7,30
15	Jumlah Sekolah yang melaksanakan	4	4	100,00	157.729.000	12.569.000	7,97

	pembudayaan keamanan pangan						
16	Jumlah desa pangan aman	1	1	100,00	138.245.000	17.476.224	12,64
17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	1	100,00	93.319.000	17.821.100	19,10
18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	13,04	13,04	100,00	37.327.000	8.324.000	22,30
19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	95	100	105,26	129.730.000	104.269.250	80,37
20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar	90	99	110,00	61.000.000	0	0
21	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	91	93,80	103,08	20.467.750	16.765.126,25	81,91
22	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	103,96	103,96	25.439.800	23.233.374,20	91,33
23	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	14,29	14,29	100,00	10.343.500	4.782.499,75	46,24
24	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,2	4,7	111,90	81.703.000	10.431.885	12,77
25	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	71	70,29	99,00	2.573.361.000	2.385.533.316	92,70
26	Nilai AKIP UPT BPOM	79,62	77,18	96,94	386.000.000	24.741.312	6,41

27	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	5	100,00	80.710.000	50.620.000	62,72
28	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,6	2,59	99,62	1.394.144.000	892.593.306	64,02

Dari tabel diatas diketahui bahwa capaian kinerja yang terendah sebesar 96,94% yaitu pada indikator Nilai AKIP UPT BPOM dengan realisasi anggaran sebesar 6,41%. Sedangkan capaian kinerja tertinggi sebesar 125,00% terdapat pada indikator Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan realisasi anggaran sebesar 87,48%.

c. Realisasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Tabel 138. Realisasi Anggaran Per Sasaran Strategis beserta Capaiannya pada BPOM di Palopo Tahun 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran Per Sasaran Strategis		
			Pagu	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sedian Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	70.989.250,00	57.096.408,75	80,43
		Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	44.550.000	0	0
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	29.417.000,00	17.277.914,75	58,73
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar **	5.301.400,00	2.941.388,60	55,48
		Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar	7.952.100,00	4.412.082,90	55,48
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	9.440.250,00	8.258.750,00	87,48
		Persentase sarana produksi Sediaan	9.440.250,00	8.258.750,00	87.48

		Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan *			
		Persentase sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan**	25.110.500,00	16.517.500,00	65,78
		Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan**	196.209.100	113.145.434,90	57,67
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	131.651.100	57.368.048,40	43,58
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	46.198.000	55.777.386,50	120,74
		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	20.467.750	16.765.126,25	81,91
		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	25.439.800	23.233.374,20	91,33
		Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	818.260.000	715.348.649	87,42
		Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	10.343.500	4.782.499,75	46,24
		Total	**1.450.770.000**	**1.101.183.313,25**	**67,98**

2	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan *	**4.180.000**	**3.880.000**	**92,82**
3	Meningkatnya efektivitas KIE dimasing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	137.439.000	10.035.750	7,30
		Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	157.729.000	12.569.000	7,97
		Jumlah desa pangan aman	138.245.000	17.476.224	12,64
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	93.319.000	17.821.100	19,10
		Total	**526.732.000**	**57.902.074**	**11,75**
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	**37.327.000**	**8.324.000**	**22,30**
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	**129.730.000**	**104.269.250**	**80,37**
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan dibidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar	**61.000.000**	**0**	**0**

	wilayah kerja UPT				
7	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	**81.703.000**	**10.431.885**	**12,77**
8	Terwujudnya tata Kelola pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	2.573.361.000	2.385.533.316	92,70
		Nilai AKIP UPT BPOM	386.000.000	24.741.312	6,41
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	80.710.000	50.620.000	62,72
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	1.394.144.000	892.593.306	64,02
		Total	**4.434.215.000**	**3.353.487.934**	**56,46**

Dari tabel diatas diketahui bahwa realisasi anggaran terendah pada sasaran strategis Meningkatnya Efektifitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT dengan persentase realisasi anggaran sebesar 11,75%. Sedangkan realisasi anggaran tertinggi terdapat pada sasaran strategis Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi dengan realisasi anggaran sebesar 92,82%.

d. Realisasi Anggaran Per Kegiatan

Tabel 139. Realisasi Anggaran Per Kegiatan Beserta Capaiannya pada Balai POM di Palopo Tahun 2025

No.	Kegiatan	Anggaran			Volume		
		Anggaran	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	2	3	4	5	6	7	9
1.	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	61.000.000,00	0,00	0	14	14	100,00
2.	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	81.703.000,00	81.639.105,00	99,92	18	18	100,00
3.	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	92.645.000,00	8.760.000,00	9,46	126	126	126
4.	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	386.000.000,00	24.741.312,00	6,41	1	1	100,00

5.	Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	44.794.000,00	1.429.750,00	3,19	19	19	100,00
6.	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	63.000.000,00	0,00	0	1	1	25
7.	Perangkat pengolah data dan komunikasi	100.000.000,00	0,00	0	7	7	25
8.	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	271.385.000,00	271.048.673,00	99,88	1	1	100,00
9.	PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KOTA PALOPO	215.944.000,00	215.904.247,00	99,98	2	2	100,00
10.	Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	157.729.000,00	13.139.000,00	8,33	4	4	100,00
11.	Desa Pangan Aman	138.245.000,00	19.405.224,00	14,04	1	1	100,00
12.	Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	93.319.000,00	19.801.100,00	21,22	1	1	100,00
13.	Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans	44.550.000,00	0,00	0	45	45	100,00
14.	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	37.327.000,00	9.544.000,00	25,57	6	6	100,00
15.	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	53.014.000,00	52.042.206,00	98,17	133	133	100,00

16.	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	91.457.000,00	82.247.265,00	89,93	291	291	100,00
17.	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	43.991.000,00	41.088.160,00	93,40	31	31	100,00
18.	Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT	4.180.000,00	4.180.000,00	100,00	2	2	100,00
19.	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	399.498.000,00	398.390.531,00	99,72	227	227	100,00
20.	Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	548.036.000,00	542.943.793,00	99,07	1	1	100,00
21.	Layanan BMN	8.000.000,00	0,00	0,00	1	1	100,00
22.	Layanan Perkantoran	3.877.215.000,00	3.691.176.904,00	95,20	1	1	100,00

Berdasarkan tabel diatas diperoleh informasi bahwa terdapat 1 (satu) kegiatan yang anggarannya terealisasi 100% yaitu pada rincian output Layanan Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa oleh UPT dengan capaian volume sebesar 100%. Sedangkan realisasi anggaran yang terendah sebesar 3,19% yaitu pada rincian output Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT dengan capaian volume sebesar 100%.

e. Pengukuran efisiensi dari kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output

yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentaase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input. Diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input:

$$\mathbf{IE} = \frac{\%\ \boldsymbol{CapaianOutput}}{\%\ \mathbf{Capaianinput}} \mathbf{IE} = \frac{100\ \%}{100\%} = 1$$

Efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Apabila IE ≥ SE maka kegiatan dianggap efisien, apabila IE ≤ SE maka kegiatan dianggap tidak efisien. Selanjutnya terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien diukur Tingkat efisiensi (TE) yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada setiap kegiatan dengan menggunakan persamaan:

$$\mathbf{TE} = \frac{\mathbf{IE} - \mathbf{SE}}{\mathbf{SE}}$$

Tingkat efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

Tabel 140. Tingkat Efisiensi

No	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	<0	Tidak Efisien
2	0 – 0,2	100% (efisien)
3	0,21 – 0,4	95% (efisien)
4	0,41 – 0,6	92% (efisien)
5	0,61 – 0,8	90% (efisien)
6	0,81 – 1,0	88% (efisien)
7	1,01 – 1,2	86% (tidak efisien)
8	1,21 – 1,4	84% (tidak efisien)
9	1,41 – 1,6	80% (tidak efisien)
10	1,61 – 1,8	78% (tidak efisien)
11	>1,81	75% (tidak efisien)

Tingkat efisiensi anggaran yang dilaksanakan BPOM di Palopo tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 141. Tingkat Efisiensi Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	TE	Capaian
1.	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	-1	Tidak Efisien
2.	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	0,06	Efisien
3.	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	0,06	Efisien

4.	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	0	Efisien
5.	Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	0	Efisien
6.	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	-1	Tidak Efisien
7.	Perangkat pengolah data dan komunikasi	-1	Tidak Efisien
8.	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	0	Efisien
9.	Perkara di bidang penyidikan obat dan makanan di BPOM Palopo	0	Efisien
10.	Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	0	Efisien
11.	Desa Pangan Aman	0	Efisien
12.	Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	0	Efisien
13.	Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans	-1	Tidak Efisien
14.	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	0	Efisien
15.	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	0	Efisien
16.	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	0	Efisien
17.	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	0,03	Efisien
18.	Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT	0,00	Efisien
19.	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	0,03	Efisien

20.	Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	0	Efisien
21.	Layanan BMN	-1	Tidak Efisien
22.	Layanan Perkantoran	0	Efisien

Pada tahun 2025 BPOM di Palopo melaksanakan 22 (dua puluh dua) program/kegiatan untuk mendukung pencapaian 8 sasaran strategis dengan hasil 17 program/kegiatan **Efisien** dan 5 program/kegiatan lainnya dengan hasil **Tidak Efisien.** Nilai Tingkat Efisiensi (TE) kegiatan diperoleh bervariasi antara -1 hingga 0,06. Dalam hal ini, semakin tinggi TE maka semakin rendah tingkat efisiensinya. Berdasarkan data tabel diatas dapat disimpulkan bahwa walaupun dengan sumber daya (dana) terbatas, BPOM di Palopo mampu menghasilkan kinerja yang optimal untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis melalui pelaksanaan kegiatan yang efisien dan efektif. Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya.

Perhitungan efisiensi kegiatan didasarkan pada rasio antara output dan input, dalam bentuk anggaran. Ke depan, pengukuran efisiensi kegiatan perlu mempertimbangkan input yang lain, dengan dukungan data yang lebih memadai. Pengukuran efisiensi kegiatan secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran.

Tabel 142. Perhitungan Pengukuran Efisiensi

No.	Sasaran Kegiatan	Capaian Indikator	Capaian Anggaran	IE	TE	Kategori
1	Meningkatnya efektifitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	102,35	67,98	1,51	0,51	Efisien
2	Meningkatnya efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	100,00	92,82	1,08	0,08	Efisien

3	Meningkatnya efektifitas KIE dimasing-masing wilayah kerja UPT	100,33	11,75	8,54	7,54	Tidak Efisien
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	100,00	22,30	4,48	3,48	Tidak Efisien
5	Terlaksananya penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	105,26	80,37	1,31	0,31	Efisien
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan dibidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	110,00	0	0	-1	Tidak Efisien
7	Layanan Publik UPT yang Prima	111,90	12,77	8,76	7,76	Tidak Efisien
8	Terwujudnya tata Kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	98,89	56,46	1,75	0,75	Efisien

Pada tahun 2025 BPOM di Palopo melaksanakan 8 (delapan) sasaran strategis dengan hasil semua kegiatan Efisien. Nilai Tingkat Efisiensi (TE) kegiatan diperoleh bervariasi antara -1 hingga 7,76. Hal ini mencerminkan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran strategis belum sepenuhnya efektif dan berdampak untuk pencapaian sasaran, namun untuk kedepannya masih perlu dilakukan beberapa upaya seperti menghapuskan kegiatan-kegiatan yang tidak berdampak langsung pada pencapaian sasaran, dan memfokuskan anggaran untuk

membiayai kegiatan-kegiatan yang menunjang peningkatan realisasi indikator pada sasaran strategi.

Analisa untuk tingkat efisiensi anggaran untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

I. Anggaran yang direalisasikan pada sasaran strategis pertama “Meningkatnya efektifitas pengawasan seediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja UPT” sebesar Rp1.101.183.313,25,- atau 23,74% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk kegiatan sampling dan pengujian obat dan makanan beserta sarana penunjangnya. Kegiatan kegiatan tersebut sudah cukup memberikan dampak terhadap peningkatan efektivitas. Meningkatnya efektifitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di wiayah kerja UPT ditunjukkan dengan telah tercapainya hampir semua target indikator. 1 (satu) indikator yaitu Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar belum berhasil tercapai dikarenakan tidak ditemukannya kasus KLB keracunan pangan yang diuji di wilayah UPT. Berdasarkan hasil pengukuran Tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis pertama adalah efisien karena capaian outcome yang dihasilkan melebihi dari anggaran yang dikeluarkan.

II. Pada sasaran strategis kedua yaitu “Meningkatnya Efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja Balai POM di Palopo”, anggaran yang direalisasikan sebesar Rp3.880.000,00 atau 0,08% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis kedua adalah efisien karena capaian outcome yang dihasilkan melebihi dari anggaran yang dikeluarkan.

III. Pada sasaran strategis ketiga yaitu “Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing di wilayah kerja BPOM di Palopo”, anggaran yang direalisasikan sebesar Rp57.902.074,- atau 1,25% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan KIE kepada masyarakat dan pelaksanaan intervensi komunitas sekolah, desa dan pasar. Kegiatan-kegiatan tersebut berdampak nyata terhadap peningkatan efektivitas KIE ditunjukkan dengan tercapainya semua target 4 indikator. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasasaran strategis ketiga adalah tidak efisien karena

capaian outcome yang dihasilkan tidak melebihi dari anggaran yang dikeluarkan.

IV. Pada sasaran strategis keempat yaitu “Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu”, anggaran yang direalisasikan sebesar Rp8.324.000,00 atau 0,18% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk mendampingi UMKM dalam pembuatan OBA Kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasasaran strategis keempat adalah tidak efisien karena capaian outcome yang dihasilkan tidak melebihi dari anggaran yang dikeluarkan.

V. Pada sasaran strategis kelima yaitu “Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja BPOM di Palopo”, anggaran yang direalisasikan sebesar Rp104.269.250,00 atau 2,25% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan investigasi, penindakan, pemberkasan, koordinasi, serta peningkatan kompetensi penyidik. Kegiatan-kegiatan tersebut berdampak nyata terhadap peningkatan efektivitas penindakan kejahatan obat dan makanan ditunjukkan dengan tercapainya target indikator. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasasaran strategis kelima adalah efisien karena capaian outcome yang dihasilkan melebihi dari anggaran yang dikeluarkan.

VI. Pada sasaran strategis keenam yaitu “Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan yang efektif di wilayah kerja BPOM di Palopo”, anggaran yang direalisasikan sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini tidak ada dikarenakan adanya pemblokiran pagu KRO/RO AEA. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasasaran strategis ketiga adalah tidak efisien karena capaian outcome yang dihasilkan tidak melebihi dari anggaran yang dikeluarkan.

VII. Pada sasaran strategis ketujuh yaitu “Layanan Publik UPT yang Prima”, anggaran yang direalisasikan sebesar Rp10.431.885,00 atau 0,22% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan sertifikasi, . Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasasaran strategis ketiga adalah tidak efisien karena capaian outcome yang dihasilkan tidak melebihi dari anggaran yang dikeluarkan.

VIII. Pada sasaran strategis kedelapan yaitu “Terwujudnya tata Kelola pemerintahan Unit Organisasi yang optimal”, anggaran yang direalisasikan sebesar Rp3.353.487.934,00 atau 72,28% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran yang dipergunakan pada sasaran ini merupakan anggaran dengan proporsi terbesar dibandingkan anggaran pada sasaran lainnya. Anggaran ini dipergunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan, operasional perkantoran, pertemuan koordinasi/advokasi, pertemuan dalam rangka RB, penyusunan lapkin, laptah, renstra, dan rapat evaluasi. Kegiatan tersebut cukup efektif untuk dapat mencapai target indeks RB dan AKIP tahun 2025. Kegiatan tersebut belum cukup memberikan dampak terhadap peningkatan efektivitas Terwujudnya tata Kelola pemerintahan ditunjukkan dengan belum tercapainya tiga target indikator (3
indikator : Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM, Nilai AKIP UPT BPOM, dan Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM). Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis kedelapan adalah efisien karena capaian outcome yang dihasilkan melebihi anggaran yang dikeluarkan.

BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pada tahun 2025, diperoleh nilai NKO sebesar 94 dengan predikat Baik. Hasil tersebut merupakan evaluasi dari 8 (delapan) sasaran strategis yang dibagi menjadi 28 indikator kinerja utama, Adapun sasaran strategis yang dievaluasi, diperoleh 6 (enam) sasaran strategis memperoleh capaian kategori Sangat Baik, 1 (satu) sasaran strategis memperoleh capaian dengan kategori Baik, dan 1 (satu) sasaran strategis lainnya memperoleh capaian dengan kategori Tidak Dapat Disimpulkan. Hasil capaian tiap sasaran strategis adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator pada sasaran strategis pertama sebesar 109,86% dengan kriteria Sangat Baik, menunjukkan keberhasilan BPOM di Palopo dalam meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BPOM di Palopo Tahun 2025;
2. Capaian indikator sasaran strategis kedua pada tahun 2025 sebesar 100% dengan kriteria Sangat Baik, ini merupakan keberhasilan BPOM di Palopo dalam meningkatkan efektifitas pengawasan Sarana Produksi pangan Fortifikasi dilingkup BPOM di Palopo;
3. Capaian indikator pada sasaran strategis ketiga sebesar 100,33% dengan kriteria Sangat Baik, menunjukkan keberhasilan BPOM di Palopo dalam menguatkan Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BPOM di Palopo tahun 2025;
4. Capaian indikator sasaran strategis keempat pada tahun 2025 sebesar 100% dengan kriteria Sangat Baik, ini merupakan keberhasilan BPOM di Palopo dalam meningkatkan efektifitas KIE di lingkup BPOM di Palopo;
5. Pada tahun 2025 pada sasaran strategis kelima yaitu meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu lingkup BPOM di Palopo, memperoleh capaian kinerja indikator utama sebesar 105,25% dengan kriteria Sangat Baik;
6. Pada tahun 2025 pada sasaran strategis keenam yaitu Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif lingkup BPOM di Palopo, memperoleh capaian kinerja indikator utama sebesar 110,00% dengan kriteria Sangat Baik;
7. Capaian indikator sasaran strategis ketujuh pada tahun 2025 sebesar 111,90% dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan, hal ini menunjukkan bahwa BPOM di Palopo berhasil dalam melaksanakan kegiatan deteksi kejahatan di bidang

Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di lingkup kerja BPOM di Palopo;

8. Capaian indikator pada sasaran strategis kedelapan sebesar 98,93% dengan kriteria Baik, menunjukkan bahwa keberhasilan BPOM di Palopo dalam memberikan Layanan Publik UPT yang Prima di wilayah kerja BPOM di Palopo Tahun 2025 masih perlu untuk ditingkatkan.

Persentase capaian target indikator kinerja BPOM di Palopo pada tahun 2025 antara 98,93% sampai dengan 111,90%. Capaian indikator kinerja tertinggi terdapat pada indikator "Indeks Pelayanan Publik UPT" dan capaian indikator kinerja terendah terdapat pada indikator "Terwujudnya tata Kelola pemerintah Unit Organisasi yang Optimal".

Pelaksanaan program dan kegiatan Balai POM di Palopo pada tahun 2025 didukung anggaran APBN TA 2025 sebesar Rp6.813.032.000,00. Realisasi anggaran pada tahun 2025 adalah Rp5.504.403.709,00 atau 80,79%. Pada tahun 2025 pula Balai POM di Palopo mendapatkan Blokir Anggaran sebesar Rp1.301.824.000,00 sehingga anggaran yang tersedia yang dapat digunakan adalah sebesar Rp5.511.208.000,00. Apabila dibandingkan dengan Pagu Anggaran yang tersedia (dikurangi blokir) maka realisasi anggaran Balai POM di Palopo yaitu sebesar 99,88%. Balai POM di Palopo berupaya melakukan perbaikan secara terus-menerus dalam rangka meningkatkan kinerja pada tahun selanjutnya. Secara keseluruhan tingkat efisiensi anggaran Capaian Kinerja di Balai POM di Palopo bernilai 100% atau masuk dalam kategori Efisien.

4.2 Saran

Dari 21 indikator kinerja yang dievaluasi, masih terdapat 3 indikator yang belum mencapai target tahun 2025, terkait hal tersebut akan dilakukan Langkah-langkah antisipatif sebagai berikut:

1. Diperlukan penguatan konsistensi penerapan manajemen risiko, khususnya pada aspek pemantauan efektivitas pengendalian dan integrasi manajemen risiko dalam pengambilan keputusan, guna mencapai target kinerja yang telah ditetapkan
2. Terhadap penyebab kegagalan pencapaian kinerja maka direncanakan rekomendasi perbaikan kedepannya yaitu:
    1. Perencanaa Kinerja

       Melengkapi kertas kerja reviu target indikator yang dilengkapi dengan penyajian argumen/justifikasi dan perhitungan yang logis serta hasil analisa atas capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya.

2. Pengukuran Kinerja
    a. Menyusun/menyempurnakan SOP pengumpulan data kinerja yang memenuhi kriteria tahapan pengumpulan data kinerja yang baik seperti:
        1) Adanya informasi sumber data pengumpulan kinerja valid dan mudah telusur, yang dilengkapi dengan kertas kerja pengukuran data kinerja;
        2) Terdapat mekanisme yang jelas dan spesifik jika terjadi kesalahan/perubahan data antara lain:
            a) tahap usulan perubahan data ke Biro Perencanaan dan Keuangan;
            b) tahap persetujuan data dari Biro Perencanaan dan Keuangan;
            c) tahap perbaikan pelaporan data.
        3) Terdapat PIC terkait (misal pemilik, penanggung jawab, tim SAKIP, dll) yang jelas serta selaras dengan SK tim SAKIP yang telah ditetapkan Unit Kerja;
    b. Memastikan agar tim SAKIP aktif dalam melakukan pelaporan kinerja pada RHPK secara berkala untuk seluruh indikator kinerja Unit Kerja;
    c. Menyusun kertas kerja perhitungan data capaian kinerja yang dapat menunjukkan tahapan perhitungan dan kesimpulan hasil akhir capaian kinerja yang disajikan dalam dokumen laporan kinerja dan Aplikasi pelaporan kinerja;
    d. Mengimplementasikan pemberian reward dan punishment secara berkala sesuai dengan Surat Keputusan/mekanisme pemberian reward dan punishment yang telah ditetapkan oleh Unit Kerja;
    e. Memastikan seluruh pengisian data kinerja pada Aplikasi SIMETRIS telah lengkap dengan menyajikan informasi terkait kendala/hambatan dan rekomendasi/rencana tindak lanjut yang akan dan telah dilaksanakan secara berkala sesuai dengan periode pelaporan yang telah ditetapkan.
3. Pelaporan Kinerja
    a. Memanfaatkan subsite Unit Kerja atau Media Sosial sebagai media publikasi dokumen pelaporan kinerja secara berkala sehingga mudah diakses oleh stakeholder/masyarakat;
    b. Menyempurnakan penyajian informasi capaian kinerja dalam Laporan Kinerja tahunan dan/atau Laporan Kinerja Interim sesuai pedoman SAKIP BPOM;

c. Menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis;
d. Melaksanakan penyesuaian penyajian informasi dalam Laporan Kinerja atau melaksanakan evaluasi berdasarkan informasi capaian kinerja setiap IKU pada Laporan Kinerja dengan tujuan untuk melakukan perbaikan misalnya berupa:
    1) Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja;
    2) Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja;
    3) Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja; dan
    4) Penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya.
e. Menyajikan upaya efisiensi yang telah dilaksanakan atau penyebab adanya inefisiensi dalam proses pencapaian target kinerja pada masing-masing Sasaran dan/atau IKU dalam Laporan Kinerja Interim dan atau Tahunan;
f. Memastikan agar seluruh indikator yang tidak tercapai pada periode tertentu telah ditetapkan kendala/hambatan serta rekomendasi/rencana aksi yang memadai sebagai upaya perbaikan berkelanjutan;
g. Menyajikan hasil monitoring tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi tindak lanjut periode sebelumnya pada Laporan Kinerja Interim dan Tahunan dilengkapi dengan simpulan status rekomendasi/rencana aksi tindak lanjut (selesai/belum selesai);
h. Mengoptimalkan pelaksanaan reviu berjenjang agar dapat meminimalkan adanya kesalahan penyajian data target dan realisasi capaian kinerja dalam dokumen pelaporan kinerja.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
    a. Menyusun LEI secara lengkap dan rinci sesuai kebijakan implementasi SAKIP Badan POM dengan menyajikan:
        1) Kertas Kerja pengukuran realisasi seluruh indikator kinerja dan/atau sumber data realisasi kinerja;
        2) Rencana aksi dengan timeline yang memadai/memudahkan proses pemantauan/monitoring sehingga evaluasi internal optimal;
        3) Monitoring tindak lanjut atas rencana aksi yang mengakomodir progres / capaian rencana aksi dari periode sebelumnya.

b. Merencanakan dan melaksanakan pengembangan kompetensi yang mendukung implementasi SAKIP terutama untuk personil yang ditetapkan sebagai Tim SAKIP Unit Kerja;
c. Melakukan reviu terhadap SK tim monitoring dan evaluasi kinerja, kegiatan dan anggaran dengan penyesuaian uraian tugas dan tanggung jawab sesuai dengan SOP Mikro pengumpulan data kinerja Unit Kerja.

3. Menyusun kurikulum dan jadwal pelatihan/workshop manajemen risiko bagi pegawai secara periodik.

LAMPIRAN

Target Kinerja Jangka Menengah Balai POM di Palopo Tahun 2025-2029

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target Kinerja				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	**Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT**	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	83,00	84,50	86,00	87,50	89,00
		2	Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26	27	28	29	30
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	77	79	81	83
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		5	Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar	85	87	89	92	95
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	91,7	91,9	92,1	92,3	92,5
		7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	93	95	97	99
		8	Persentase sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	88	90	92	95
		9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90,00	91,00	91,75	92,50	93,25
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80,00	82,00	84,00	87,00	90,00
		11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	83,49	85,49	87,49	89,49	91,49
2	**Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi**	12	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	67	100	100	100	100
3	**Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT**	13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	14,0	16,0	19,0	22,0	25,0
4	**Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT**	14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	85,01	85,86	86,71	87,56	88,41
		15	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	4	5	6	7	8
		16	Jumlah desa pangan aman	1	2	3	3	3
		17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	1	1	2	2
5	**Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu**	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	91,0	92,0	93,0	94,0	95,0
6	**Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT**	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	95	96	97	98	99
7	**Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT**	20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar	90	91	92	93	94

8	**Layanan Publik UPT yang prima**	21	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,20	4,30	4,40	4,50	4,60
9	**Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal**	22	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	71	72	73	74	75
		23	Nilai AKIP UPT BPOM	79,62	80,12	80,62	81,12	81,62
		24	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	5	5	5	5
		25	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,6	2,7	2,8	2,9	3

Tabel 10. Sasaran STrategis, IKU dan Target BPOM di Palopo

Perjanjian Kinerja Tahun 2025



BADAN POM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI POM DI KOTA PALOPO
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BURHAM SIDOBEJO

Jabatan : KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALOPO

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TARUNA IKRAR

Jabatan : KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PALOPO, 12 February 2025

Pihak Pertama
KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALOPO

BURHAM SIDOBEJO

Pihak Kedua
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN RI

TARUNA IKRAR

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI POM DI KOTA PALOPO

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	83 Persen
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26 Persen
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75 Persen
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100 Persen
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persen
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	91.7 Persen
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91 Persen
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persen
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90 Persen
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90 Persen
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	83.49 Persen
2.	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	67 Persen
3.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	14 Nilai
4.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	85.01 Nilai
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	4 Nilai
		03 - Jumlah desa pangan aman	1 Nilai
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Nilai
5.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	91 Persen
6.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	95 Persen

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
9.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	71 Nilai
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM	79.62 Nilai
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5 Nilai
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.6 Nilai

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 6,715,332,000 (Enam Miliar Tujuh Ratus Lima Belas Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	2,927,817,000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	3,787,515,000

PALOPO, 12 February 2025

Pihak Pertama
KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALOPO

BURHAM SIDOBEJO

Pihak Kedua
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN RI

TARUNA IKRAR

Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2025

No	Nama Unit Kerja	Nilai Pengawasan 2025	Kategori	Keterangan
35.	Balai POM di Balikpapan	77.92	BB (Sangat Baik)	Dinilai sebagai Loka
36.	Balai POM di Tarakan	77.38	BB (Sangat Baik)	
37.	Balai POM di Bogor	76.06	BB (Sangat Baik)	
38.	Balai POM di Mamuju	75.71	BB (Sangat Baik)	
39.	Balai POM di Kediri	75.68	BB (Sangat Baik)	
40.	Balai POM di Tasikmalaya	75.34	BB (Sangat Baik)	
41.	Balai Besar POM di Surabaya	74.76	BB (Sangat Baik)	
42.	Balai POM di Tulang Bawang	74.53	BB (Sangat Baik)	Dinilai sebagai Loka
43.	Balai POM di Jambi	73.5	BB (Sangat Baik)	
44.	Balai POM di Jember	71.65	BB (Sangat Baik)	
45.	Balai POM di Bau-bau	70.59	BB (Sangat Baik)	Dinilai sebagai Loka
46.	Balai POM di Tangerang	69.77	B (Baik)	
47.	Balai POM di Dumai	69.65	B (Baik)	Dinilai sebagai Loka
48.	Balai POM di Sanggau	69.06	B (Baik)	Dinilai sebagai Loka
49.	Balai POM di Palopo	65.53	B (Baik)	
50.	Balai POM di Ende	64.19	B (Baik)	Dinilai sebagai Loka
51.	Balai POM di Bima	63.94	B (Baik)	Dinilai sebagai Loka
52.	Balai POM di Tanjungbalai	63.16	B (Baik)	Dinilai sebagai Loka
53.	Balai POM di Surakarta	59.03	CC (Cukup)	

Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)

Indikator	1.1 Tindak Lanjut Temuan pada LHP BPK atas LKPP terkait BMN	1.2.1 Realisasi PNBP dari Pengelolaan BMN	1.2.2 Realisasi PNBP dari pemanfaatan BMN berdasarkan persetujuan Pengelola Barang	2.1.1 Ketepatan waktu penyampaian RKBMN	2.2 Pengelolaan Persediaan Uang/Rusak	2.2.1 Ketepatan waktu penyampaian LBP Semester 1	2.2.2 Ketepatan waktu penyampaian LBP Tahunan	2.2.3 Ketepatan waktu penyampaian LBP Audited	2.3.1 Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian laporan wasdal Semester 1	2.3.2 Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian laporan wasdal Tahunan	3.1 Tindak lanjut Pemanfaatan, Pemindahtangan dan Penghapusan BMN	3.2 Tindak lanjut BMN Rusak Berat	4.1.1 BMN bersertipikat sesuai ketentuan	4.1.2 Penuntasan Target Sertipikasi BMN	4.2.1 Tindak Lanjut Barang Milik Negara yang sudah berlokasi	4.2.2 BMN yang Sudah Ditetapkan Status Penggunaan	Rata-rata Keseluruhan	Total Keseluruhan (Manual)	Keterangan
Korwil Aceh	**15.00**	**5.00**	**5.00**	**3.00**	**10.00**	**1.00**	**1.00**	**0.83**	**2.00**	**2.00**	**15.00**	**5.00**	**10.00**	**5.00**	**9.63**	**4.50**	**5.87**	**93.96**	Baik Sekali
Balai Besar POM di Banda Aceh	15.00	5.00	5.00	3.00	10.00	1.00	1.00	0.75	2.00	2.00	15.00	2.50	**10.00**	5.00	7.88	4.50	5.60	89.63	Baik
Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah	15.00	5.00	5.00	3.00	10.00	1.00	1.00	0.75	2.00	2.00	15.00	2.50	**10.00**	5.00	10.50	4.50	5.77	92.25	Baik Sekali
Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	15.00	5.00	5.00	3.00	10.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	15.00	10.00	**10.00**	5.00	10.50	4.50	6.25	100.00	Baik Sekali
Korwil Bandung	**15.00**	**5.00**	**5.00**	**2.75**	**10.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**2.00**	**2.00**	**15.00**	**10.00**	**7.50**	**5.00**	**10.50**	**4.50**	**6.08**		
Balai Besar POM di Bandung	15.00	5.00	5.00	2.25	10.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	15.00	10.00	**10.00**	5.00	10.50	4.50	6.20	99.25	Baik Sekali
Balai POM di Bogor	15.00	5.00	5.00	3.00	10.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	15.00	10.00	**2.50**	5.00	10.50	4.50	5.78	92.50	Baik Sekali
Balai POM di Tasikmalaya	15.00	5.00	5.00	3.00	10.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	15.00	10.00	**10.00**	5.00	10.50	4.50	6.25	100.00	Baik Sekali
Korwil Banjarmasin	**15.00**	**5.00**	**5.00**	**3.00**	**10.00**	**1.00**	**0.95**	**1.00**	**2.00**	**2.00**	**15.00**	**10.00**	**9.00**	**5.00**	**10.50**	**4.50**	**6.18**		
Balai Besar POM di Palangka Raya	15.00	5.00	5.00	3.00	10.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	15.00	10.00	**10.00**	5.00	10.50	4.50	6.25	100.00	Baik Sekali
Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu	15.00	5.00	5.00	3.00	10.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	15.00	10.00	**10.00**	5.00	10.50	4.50	6.25	100.00	Baik Sekali
Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat	15.00	5.00	5.00	3.00	10.00	1.00	0.75	1.00	2.00	2.00	15.00	10.00	**5.00**	5.00	10.50	4.50	5.92	94.75	Baik Sekali
Balai Besar POM di Banjarbaru	15.00	5.00	5.00	3.00	10.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	15.00	10.00	**10.00**	5.00	10.50	4.50	6.25	100.00	Baik Sekali
Balai POM di Tabalong	15.00	5.00	5.00	3.00	10.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	15.00	10.00	**10.00**	5.00	10.50	4.50	6.25	100.00	Baik Sekali
Korwil Denpasar	**15.00**	**5.00**	**5.00**	**3.00**	**8.50**	**1.00**	**0.90**	**1.00**	**2.00**	**2.00**	**15.00**	**10.00**	**8.50**	**5.00**	**10.50**	**4.50**	**6.06**		
Balai Besar POM di Denpasar	15.00	5.00	5.00	3.00	10.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	15.00	10.00	**10.00**	5.00	10.50	4.50	6.25	100.00	Baik Sekali
Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat	15.00	5.00	5.00	3.00	10.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	15.00	10.00	**2.50**	5.00	10.50	4.50	5.78	92.50	Baik Sekali
Loka POM di Kabupaten Buleleng	15.00	5.00	5.00	3.00	10.00	1.00	0.75	1.00	2.00	2.00	15.00	10.00	**10.00**	5.00	10.50	4.50	6.23	99.75	Baik Sekali
Balai Besar POM di Kupang	15.00	5.00	5.00	3.00	2.50	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	15.00	10.00	**10.00**	5.00	10.50	4.50	5.78	92.50	Baik Sekali
Balai POM di Ende	15.00	5.00	5.00	3.00	10.00	1.00	0.75	1.00	2.00	2.00	15.00	10.00	**10.00**	5.00	10.50	4.50	6.23	99.75	Baik Sekali
Korwil Jakarta	**15.00**	**5.00**	**5.00**	**3.00**	**10.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**2.00**	**2.00**	**15.00**	**10.00**	**10.00**	**5.00**	**10.50**	**4.50**	**6.25**		
Balai Besar POM di Jakarta	15.00	5.00	5.00	3.00	10.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	15.00	10.00	**10.00**	5.00	10.50	4.50	6.25	100.00	Baik Sekali
Balai POM di Tangerang	15.00	5.00	5.00	3.00	10.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	15.00	10.00	**10.00**	5.00	10.50	4.50	6.25	100.00	Baik Sekali
Balai Besar POM di Serang	15.00	5.00	5.00	3.00	10.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	15.00	10.00	**10.00**	5.00	10.50	4.50	6.25	100.00	Baik Sekali
Korwil Jambi	**15.00**	**5.00**	**5.00**	**3.00**	**10.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**2.00**	**2.00**	**15.00**	**10.00**	**10.00**	**5.00**	**9.84**	**4.50**	**6.21**		
Balai POM di Jambi	15.00	5.00	5.00	3.00	10.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	15.00	10.00	**10.00**	5.00	10.50	4.50	6.25	100.00	Baik Sekali
Balai POM di Bengkulu	15.00	5.00	5.00	3.00	10.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	15.00	10.00	**10.00**	5.00	7.88	4.50	6.09	97.38	Baik Sekali
Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	15.00	5.00	5.00	3.00	10.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	15.00	10.00	**10.00**	5.00	10.50	4.50	6.25	100.00	Baik Sekali
Loka POM di Kabupaten Bungo	15.00	5.00	5.00	3.00	10.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	15.00	10.00	**10.00**	5.00	10.50	4.50	6.25	100.00	Baik Sekali
Korwil Jayapura	**15.00**	**5.00**	**5.00**	**3.00**	**10.00**	**1.00**	**0.95**	**1.00**	**2.00**	**2.00**	**14.25**	**10.00**	**10.00**	**5.00**	**8.93**	**4.50**	**6.10**		
Balai Besar POM di Jayapura	15.00	5.00	5.00	3.00	10.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	15.00	10.00	**10.00**	5.00	10.50	4.50	6.25	100.00	Baik Sekali
Balai POM di Manokwari	15.00	5.00	5.00	3.00	10.00	1.00	0.75	1.00	2.00	2.00	11.25	10.00	**10.00**	5.00	10.50	4.50	6.00	96.00	Baik Sekali
Loka POM di Kabupaten Sorong	15.00	5.00	5.00	3.00	10.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	15.00	10.00	**10.00**	5.00	10.50	4.50	6.25	100.00	Baik Sekali
Loka POM di Kabupaten Mimika	15.00	5.00	5.00	3.00	10.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	15.00	10.00	**10.00**	5.00	5.25	4.50	5.92	94.75	Baik Sekali
Loka POM di Kabupaten Merauke	15.00	5.00	5.00	3.00	10.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	15.00	10.00	**10.00**	5.00	7.88	4.50	6.09	97.38	Baik Sekali
Korwil Makassar	**15.00**	**5.00**	**5.00**	**3.00**	**10.00**	**1.00**	**1.00**	**0.85**	**2.00**	**1.90**	**15.00**	**10.00**	**10.00**	**5.00**	**9.98**	**4.50**	**6.20**		
Balai Besar POM di Makassar	15.00	5.00	5.00	3.00	10.00	1.00	1.00	0.75	2.00	1.50	15.00	10.00	**10.00**	5.00	10.50	4.50	6.20	99.25	Baik Sekali
Balai POM di Ambon	15.00	5.00	5.00	3.00	10.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	15.00	10.00	**10.00**	5.00	10.50	4.50	6.25	100.00	Baik Sekali
Balai POM di Palopo	15.00	5.00	5.00	3.00	10.00	1.00	1.00	0.50	2.00	2.00	15.00	10.00	**10.00**	5.00	10.50	4.50	6.22	99.50	Baik Sekali
Balai POM di Mamuju	15.00	5.00	5.00	3.00	10.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	15.00	10.00	**10.00**	5.00	10.50	4.50	6.25	100.00	Baik Sekali
Loka POM di Kepulauan Tanimbar	15.00	5.00	5.00	3.00	10.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	15.00	10.00	**10.00**	5.00	7.88	4.50	6.09	97.38	Baik Sekali
Korwil Manado	**15.00**	**5.00**	**5.00**	**3.00**	**8.50**	**1.00**	**1.00**	**0.85**	**2.00**	**2.00**	**13.50**	**10.00**	**10.00**	**5.00**	**9.98**	**4.50**	**6.02**		
Balai Besar POM di Manado	15.00	5.00	5.00	3.00	10.00	1.00	1.00	0.75	2.00	2.00	15.00	10.00	**10.00**	5.00	10.50	4.50	6.23	99.75	Baik Sekali
Balai POM di Sofifi	15.00	5.00	5.00	3.00	2.50	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	15.00	10.00	**10.00**	5.00	10.50	4.50	5.78	92.50	Baik Sekali
Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	15.00	5.00	5.00	3.00	10.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	15.00	10.00	**10.00**	5.00	7.88	4.50	6.09	97.38	Baik Sekali
Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe	15.00	5.00	5.00	3.00	10.00	1.00	1.00	0.75	2.00	2.00	7.50	10.00	**10.00**	5.00	10.50	4.50	5.77	92.25	Baik Sekali

Nilai Zona Integritas

PENILAIAN			Bobot	Aspek Pemenuhan	Aspek Reform	Total Nilai	Keterangan (diisi MS/TMS)
A.	**Komponen Pengungkit**		60,00				
	I.	Manajemen Perubahan	8,00	1,65	2,33	3,98	**TMS**
	II.	Penataan Tatalaksana	7,00	1,24	1,67	2,91	**TMS**
	III.	Penataan Sistem Manajemen SDM	10,00	2,79	4,25	7,04	**MS**
	IV.	Penguatan Akuntabilitas	10,00	3,19	2,95	6,14	**MS**
	V.	Penguatan Pengawasan	15,00	2,83	6,25	9,08	**MS**
	VI.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	10,00	2,88	2,30	5,18	**TMS**
TOTAL PENGUNGKIT						**34,33**	
B.	**Komponen Hasil**		40,00				
	I.	Birokrasi Bersih dan Akuntabel	22,50			19,69	
		1. Nilai Survei Persepsi Kepuasan Pelayanan dan Anti Korupsi (SPAK)	17,50			17,19	**MS**
		2. Capaian Kinerja lebih baik	5,00			2,50	**MS**
	II.	Pelayanan Publik yang Prima	17,50			16,28	
		Nilai Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)	17,50			16,28	**MS**
TOTAL HASIL						**35,97**	
NILAI PMPZI						**70,29**	

Nilai SAKIP

Lampiran-2
Nota Dinas Inspektur Utama
Nomor : PI.04.71.7.01.26.03
Tanggal : 5 Januari 2026

Nilai Hasil Evaluasi SAKIP pada Balai POM di Palopo Tahun 2025

No	Komponen	Bobot	Nilai		Keterangan (Kenaikan/Penurunan Nilai)
			2024	2025	
1.	Perencanaan Kinerja	24	19,44	20,16	+0.72
2.	Pengukuran Kinerja	24	19,20	17,76	-1,44
3.	Pelaporan Kinerja	12	9,72	10,08	+0,36
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	20	14,80	15,20	+0,40
5.	Capaian Kinerja	20	15,46	13,98	-1,48
Nilai Hasil Evaluasi		**100**	**78,62**	**77,18**	**-1,44**
Predikat			**BB**	**BB**	**Tetap**



Formulir	Kode	Aspek	Bobot	Indeks Per Aspek
F02	I	Kebijakan Pelayanan	24%	4.83
	II	Profesionalisme SDM	25%	4.7
	III	Sarana Prasarana	18%	4.6
	IV	Sistem Informasi Pelayanan Publik	11%	4.7
	V	Konsultasi dan Pengaduan	10%	5
	VI	Inovasi	12%	4
	Indeks Formulir F02		4.66	
F03	Indeks Formulir F03		4.8714285714286	
Indeks Pelayanan Publik			4.71	

Persentase Terlaksananya Seluruh Tahapan Program Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan sesuai perencanaan

Presentase Terlaksananya Seluruh Tahapan Program sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan sesuai perencanaan

No	Tahapan	Bobot	Realisasi	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Tahun 2025
1	Advokasi Lintas Sektor	25%	25%	4 Sekolah	4 Sekolah	100.00%
2	Sosialisasi Keamanan Pangan	20%	20%			
3	Bimbingan Teknis Kader Keamanan Pangan Sekolah	25%	25%			
4	Monitoring Kader KP Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan dan Sertifikasi Sekolah	25%	25%			
5	Pengawalan	5%	5%			
	TOTAL	100%	100%			

Persentase Terlaksananya Seluruh Tahapan Program Desa Pangan Aman sesuai perencanaan

No	Tahapan	Bobot Akhir	Realisasi	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian
1	Advokasi Lintas Sektor	25%	25%	1 Desa	1 Desa	100%
2	Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa	25%	25%			
3	Bimbingan Teknis Komunitas	20%	20%			
4	Monitoring dan Evaluasi	20%	20%			
5	Pengawalan	10%	10%			
	TOTAL	100%	100%			

Persentase Terlaksananya Seluruh Tahapan Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas sesuai perencanaan

No	Tahapan	Bobot Akhir	Realisasi	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian
1	Advokasi Lintas Sektor	25%	25%	1 Pasar	1 Pasar	100.00%
2	Bimtek Komunitas Pasar	25%	25%			
3	Sosialisasi Keamanan Pangan	20%	20%			
4	Monitoring dan Evaluasi	20%	20%			
5	Pengawalan	10%	10%			
	TOTAL	100%	100%			

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALOPO

NOTA DINAS
NOMOR : PW.01.11.19B.01.26.01

Yth. : Direktur Pengawasan KMEI ONPPZA
Dari : Kepala Balai POM di Palopo
Lampiran : 2 (dua) Berkas
Hal : Laporan Monev Pelaksanaan KIE Farmakovigilans Desember 2025
Tanggal : 2 Januari 2026

Menindaklanjuti surat Direktur Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif Nomor B-PW.01.11.35.02.25.190 tanggal 6 Februari 2025 perihal Permohonan Rencana Pelaksanaan dan Penyampaian Petunjuk Pelaksanaan KIE Farmakovigilans oleh UPT Badan POM, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. KIE Farmakovigilans telah dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2025 secara hybrid dengan jumlah peserta 45 (empat puluh lima) sarana pelayanan kesehatan sesuai dengan renlak.
2. Berdasarkan pelaporan e-MESO s.d 31 Desember 2025, dari 45 fasyankes yang telah diberikan KIE PV, sebanyak 12 (dua belas) fasyankes (26,67%) telah melaporkan KTD/ESO melalui aplikasi e-MESO. Target IKU Pelaporan KTD/ESO adalah 26%, sehingga capaian IKU sampai dengan Desember 2025 adalah 102,58% (kategori Sangat Baik).
3. Laporan monitoring pelaksanaan KIE Farmakovigilans oleh Balai POM di Palopo sesuai dengan format sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Darman

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

CAPAIAN INDIKATOR PERSENTASE FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN YANG TELAH MELAPORKAN KTD/ESO KE BALAI POM

Lampiran 2
Nota Dinas Kepala Balai POM di Palopo
Nomor : PW.01.11.19B.01.26.01
Tanggal : 2 Januari 2026

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR
PERSENTASE FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
YANG TELAH MELAPORKAN KTD/ESO KE BPOM
TAHUN 2025
BALAI POM DI PALOPO

Cara Perhitungan: A / B x 100%

A	:	merupakan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan
B	:	merupakan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM

Hasil Perhitungan : 26,67%
Target : 26%

A	:	12
B	:	45

Palopo, 2 Januari 2026
Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan
di Palopo,

Darman

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PERSENTASE KAB/KOTA YANG SELESAI DIDAMPINGI SESUAI PEDOMAN

Persentase Kab / Kota Wilayah I yang selesai didampingi sesuai pedoman

No.	Target	Kab/Kota yang berhasil didampingi dengan nilai verifikasi awal > 60	Jumlah Kab/Kota di Wilayah Kerja Balai POM di Palopo	Realisasi	%Capaian
1	14.28%	1	7	14.29%	100%

PERJANJIAN KINERJA SETELAH REVISI TAHUN 2025

BADAN POM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI POM DI KOTA PALOPO
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DARMAN

Jabatan : Kepala Balai POM di Palopo

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TARUNA IKRAR

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palopo, 29 August 2025

Pihak Pertama	Pihak Kedua
Kepala Balai POM di Palopo	Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI
DARMAN	TARUNA IKRAR

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI POM DI KOTA PALOPO

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	83 Persen
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26 Persen
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75 Persen
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100 Persen
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91 Persen
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	91.7 Persen
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80 Persen
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persen
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan	90 Persen

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		ditindaklanjuti sesuai ketentuan	
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80 Persen
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	90.6 Persen
		12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	91 Persen
		13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100 Persen
		14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	14 Nilai
		15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	14.29 Persen
2.	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	67 Persen
3.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	85.01 Nilai
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	4 Nilai

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		03 - Jumlah desa pangan aman	1 Nilai
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Nilai
4.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	13.04 Persen
5.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	95
6.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90 Persen
7.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	4.2 Nilai
8.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	71 Nilai
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM	79.62 Nilai
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5 Nilai
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.6 Nilai

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 6,795,800,000 (Enam Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	2,927,817,000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	3,867,983,000

Palopo, 29 August 2025

Pihak Pertama	Pihak Kedua
Kepala Balai POM di Palopo	Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI
DARMAN	TARUNA IKRAR

BADAN POM

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI POM DI KOTA PALOPO
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	71,092,750

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIA.002 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	053 - Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	B - PENGIRIMAN SAMPEL	10,000,000	10,000,000
2.	DR.3165.QIA.002 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	053 - Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	A - PENGADAAN SAMPEL DI LOKA PALOPO	81,457,000	61,092,750

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO												26	44,550,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QDC.001 - Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans	051 - Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans	D - Pelaksanaan KIE	44,550,000	44,550,000

03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	29,417,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	A - PENGADAAN SAMPEL LOKA	41,374,000	20,687,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
2.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	B - Pengiriman Sampel	11,640,000	8,730,000

04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		5,301,400

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	A - PENGADAAN SAMPEL LOKA	41,374,000	4,137,400
2.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	B - Pengiriman Sampel	11,640,000	1,164,000

05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91		7,952,100

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	B - Pengiriman Sampel	11,640,000	1,746,000
2.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	A - PENGADAAN SAMPEL LOKA	41,374,000	6,206,100

06 - Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder		91.7	91.7	91.7	91.7	91.7	91.7	91.7	91.7	91.7	91.7	91.7		8,687,750

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI OMKA OLEH PETUGAS BALAI(DALAM LUAR KOTA) DI LOKA PALOPO	34,751,000	8,687,750

07 - Persentase	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80		8,687,750

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan													

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI OMKA OLEH PETUGAS BALAI(DALAM LUAR KOTA) DI LOKA PALOPO	34,751,000	8,687,750

08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	26,615,500

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat	A - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI OMKA OLEH	34,751,000	17,375,500

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	Makanan yang Diperiksa oleh UPT	tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	PETUGAS BALAI(DALAM LUAR KOTA) DI LOKA PALOPO		
2.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	B - PENGAWALAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI OLEH INSTANSI TERKAIT DAN PELAKU USAHA	9,240,000	9,240,000

09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	202,405,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	D - Pemeriksaan Dalam rangka Penelusuran Kasus, Intensifikasi Pengawasan/Public Warning	29,760,000	14,880,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
2.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OMKA NAPZA OLEH PETUGAS BALAI(DALAM LUAR KOTA) DI LOKA PALOPO	122,640,000	49,056,000
3.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	B - AKSI PENERTIBAN KOSMETIK ILEGAL DAN TMS	29,840,000	29,840,000
4.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	C - PENGAWALAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN	18,080,000	9,040,000
5.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	A - Rapat Koordinasi Pusat dan Balai POM Dalam Manajemen Sampling Obat	6,532,000	3,266,000
6.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik,	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	B - Rapat Koordinasi Pusat dan Balai dalam Manajemen Sampling (Kegiatan gabungan dengan	6,926,000	3,463,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		Kedeputian I dan III)		
7.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	E - Pertemuan Koordinasi Inspektur OT-SK dalam rangka memaksimalkan kinerja pengawasan OT-SK	12,698,000	6,349,000
8.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	F - Forum Komunikasi Pengawasan Sarana Distribusi dan Pelayanan ONPP	3,457,000	1,728,500
9.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	G - Pelatihan Sampling OT dan SK	6,926,000	3,463,000
10.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	H - Bimbingan Teknis Pengawasan Produk Tembakau untuk UPT BPOM di seluruh Indonesia (Acara back to back meeting dengan kegiatan Tim Kerja Pengawasan Mutu ONPP dan Tim Kerja Pengawasan	9,918,000	4,959,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
			Informasi ONPP		
11.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	J - Monitoring dan Evaluasi Hasil Pengawasan Iklan dan Label Produk Tembakau bersama UPT BPOM	6,402,000	3,201,000
12.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	K - Perkuatan Strategi dan Pemantapan Teknis Pengawasan Mutu Obat Beredar	4,155,000	2,077,500
13.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	L - On the Job Training Pengawasan Sarana Produksi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)	7,028,000	3,514,000
14.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	M - Workshop Fasilitasi Standardisasi Keamanan,Mutu Dan Manfaat Pangan Olahan	6,772,000	3,386,000
15.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka	N - RAPAT KOORDINASI PUSAT DAN BALAI BESAR/BALAI/LOKA	14,620,000	7,310,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	pemeriksaan sarana	POM DALAM MANAJEMEN SAMPLING OBAT DAN MAKANAN TAHUN ANGGARAN 2024		
16.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	O - Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan DAK Non Fisik POM	26,688,000	13,344,000
17.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	P - Forum Komunikasi Inspektur Kosmetika	19,052,000	9,526,000
18.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	Q - Forum Koordinasi dan Komunikasi Perkuatan Pengawasan dan Pelayanan Publik terkait Pemasukan Kosmetik dan Sertifikasi CPKB	13,790,000	6,895,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
19.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	R - Pembentukan Inspektur Junior Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	4,798,000	2,399,000
20.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	S - Workshop registrasi pangan olahan untuk fasilitator	5,134,000	2,567,000
21.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	T - Perencanaan dan Monev Kinerja Pengawasan serta Penguatan Kompetensi Pengawas Sarana Produksi Pangan Olahan	6,672,000	3,336,000
22.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	U - Forum Komunikasi Fasilitator UMKM Obat Bahan Alam	6,080,000	3,040,000
23.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik,	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	I - Pengawasan Iklan dan Label Obat Beredar dan Koordinasi Obat dan Makanan	31,530,000	15,765,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT				

10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	156,800,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	K - Perkuatan Strategi dan Pemantapan Teknis Pengawasan Mutu Obat Beredar	4,155,000	2,077,500
2.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	L - On the Job Training Pengawasan Sarana Produksi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)	7,028,000	3,514,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
3.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	D - Pemeriksaan Dalam rangka Penelusuran Kasus, Intensifikasi Pengawasan/Public Warning	29,760,000	14,880,000
4.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OMKA NAPZA OLEH PETUGAS BALAI(DALAM LUAR KOTA) DI LOKA PALOPO	122,640,000	49,056,000
5.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	A - Rapat Koordinasi Pusat dan Balai POM Dalam Manajemen Sampling Obat	6,532,000	3,266,000
6.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	B - Rapat Koordinasi Pusat dan Balai dalam Manajemen Sampling (Kegiatan gabungan dengan Kedeputian I dan III)	6,926,000	3,463,000
7.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik,	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	S - Workshop registrasi pangan olahan untuk fasilitator	5,134,000	2,567,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT				
8.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	E - Pertemuan Koordinasi Inspektur OT-SK dalam rangka memaksimalkan kinerja pengawasan OT-SK	12,698,000	6,349,000
9.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	F - Forum Komunikasi Pengawasan Sarana Distribusi dan Pelayanan ONPP	3,457,000	1,728,500
10.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	T - Perencanaan dan Monev Kinerja Pengawasan serta Penguatan Kompetensi Pengawas Sarana Produksi Pangan Olahan	6,672,000	3,336,000
11.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	G - Pelatihan Sampling OT dan SK	6,926,000	3,463,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
12.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	H - Bimbingan Teknis Pengawasan Produk Tembakau untuk UPT BPOM di seluruh Indonesia (Acara back to back meeting dengan kegiatan Tim Kerja Pengawasan Mutu ONPP dan Tim Kerja Pengawasan Informasi ONPP	9,918,000	4,959,000
13.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	U - Forum Komunikasi Fasilitator UMKM Obat Bahan Alam	6,080,000	3,040,000
14.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	J - Monitoring dan Evaluasi Hasil Pengawasan Iklan dan Label Produk Tembakau bersama UPT BPOM	6,402,000	3,201,000
15.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	M - Workshop Fasilitasi Standardisasi Keamanan,Mutu Dan Manfaat Pangan Olahan	6,772,000	3,386,000
16.	DR.3165.QIC.004 - Sarana	055 - Pelaksanaan	N - RAPAT KOORDINASI PUSAT	14,620,000	7,310,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	DAN BALAI BESAR/BALAI/LOKA POM DALAM MANAJEMEN SAMPLING OBAT DAN MAKANAN TAHUN ANGGARAN 2024		
17.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	O - Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan DAK Non Fisik POM	26,688,000	13,344,000
18.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	P - Forum Komunikasi Inspektur Kosmetika	19,052,000	9,526,000
19.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	Q - Forum Koordinasi dan Komunikasi Perkuatan Pengawasan dan Pelayanan Publik terkait Pemasukan Kosmetik dan Sertifikasi CPKB	13,790,000	6,895,000
20.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan	C - PENGAWALAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN	18,080,000	9,040,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	oleh UPT	berbahaya			
21.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	R - Pembentukan Inspektur Junior Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	4,798,000	2,399,000

11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	90.6	90.6	90.6	90.6	90.6	90.6	90.6	90.6	90.6	90.6	90.6	90.6	15,765,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	I - Pengawasan Iklan dan Label Obat Beredar dan Koordinasi Obat dan Makanan	31,530,000	15,765,000

12 - Persentase label produk tembakau								91	91	91	91	91	20,364,250

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

	dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar														

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIA.002 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	053 - Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	A - PENGADAAN SAMPEL DI LOKA PALOPO	81,457,000	20,364,250

13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT														100	24,528,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OMKA NAPZA OLEH PETUGAS BALAI(DALAM LUAR KOTA) DI LOKA PALOPO	122,640,000	24,528,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			9	9	9	11	11	11	12	12	12	14	819,421,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian	C - Koordinasi dan Advokasi dalam Rangka Peningkatan Kemampuan Laboratorium	16,140,000	16,140,000
2.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian	D - Penunjang Laboratorium Lainnya	16,190,000	16,190,000
3.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium	B - PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENGUJIAN DI BBPOM MAKASSAR	29,520,000	29,520,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
4.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian	A - KEBUTUHAN PENUNJANG LABORATORIUM	170,336,000	170,336,000
5.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium	A - Monitoring dan Evaluasi Efektivitas dan Efisiensi Penerapan Sistem Regionalisasi Laboratorium	7,129,000	7,129,000
6.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium	C - In House Training Bimtek Verifikasi Metode Analisis ALT Pangan dan Angka Enterobactericeae Menggunakan Media Ready to Use	14,510,000	14,510,000
7.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian	B - Optimalisasi Fungsi Laboratorium Keliling	17,560,000	17,560,000
8.	DR.3165.RAB.001 - Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Pemenuhan/ peremajaan alat laboratorium	A - Pengadaan Alat Lab	548,036,000	548,036,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		15 - Persentase Kabupaten/ Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/ Kota Pangan Aman												14.29	10,343,500

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	A - PENGADAAN SAMPEL LOKA	41,374,000	10,343,500

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
2.	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan			33.33	33.33	33.33	33.33	67	67	67	67	67	67	4,180,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.003 - Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT	053 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	A - Perjalanan ke Sarana	4,180,000	4,180,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
3.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			85.01	85.01	85.01	85.01	85.01	85.01	85.01	85.01	85.01	85.01	137,439,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT	E - WORKSHOP INFORMASI DAN KOMUNIKASI (wikom)	5,761,000	5,761,000
2.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT	A - SOSIALISASI PENYEBARAN INFORMASI PRODUK TERAPETIK,OT,KOS,KOMPL,PANGAN DAN BB DI LOKA	49,742,000	49,742,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
3.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT	B - KONSULTASI DAN KOORDINASI PENINGKATAN KERJASAMA LINTAS SEKTOR	15,420,000	15,420,000
4.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT	C - KONSULTASI DAN KOORDINASI PENINGKATAN KERJASAMA LINTAS SEKTOR	10,200,000	10,200,000
5.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT	D - WORKSHOP KIE DAN PENGADUAN MASYARAKAT	5,761,000	5,761,000
6.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT	F - MEET THE ADMINS	5,761,000	5,761,000
7.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat	A - PENYEBARAN INFORMASI DAN TALKSHOW	1,000,000	1,000,000
8.	DR.3165.BMB.001 -	051 - Pelaksanaan	B - OPERASIONAL ULPK DAN MEDIA	7,154,000	7,154,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat	SOSIAL/VIDEO CONFERENCE		
9.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat	C - PENYEBARAN INFORMASI MELALUI PROGRAM KLINIK KELILING	6,640,000	6,640,000
10.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat	D - PELATIHAN PENINGKATAN KOMPETENSI PELAYANAN PUBLIK	30,000,000	30,000,000

02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan		5	15	35	50	55	90	90	90	90	100	4	157,729,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	051 - Koordinasi lintas sektor	A - ADVOKASI DENGAN LINTAS SEKTOR 3 PRO PN	20,525,000	20,525,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
2.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	051 - Koordinasi lintas sektor	B - KONSULTASI DAN KOORDIANSI	4,380,000	4,380,000
3.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	052 - Intervensi keamanan PJAS	A - SOSIALISASI KEAMANAN PANGAN KOMUNITAS SEKOLAH	12,457,000	12,457,000
5.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	052 - Intervensi keamanan PJAS	C - Pengawalan Paket Edukasi Keamanan Pangan	2,992,000	2,992,000
6.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	052 - Intervensi keamanan PJAS	D - MONITORING PEMBERDAYAAN KADER KEAMANAN PANGAN SEKOLAH	11,054,000	11,054,000
7.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	052 - Intervensi keamanan PJAS	E - AUDIT SERTIFIKASI SEKOLAH DENGAN PJAS AMAN LEVEL 2 (Verifikasi Komitmen Sekolah Dalam Penerapan Keamanan Pangan	4,920,000	4,920,000
8.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	052 - Intervensi keamanan PJAS	B - BIMBINGAN TEKNIS KEAMANAN PANGAN SEKOLAH	4,737,000	4,737,000
9.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	052 - Intervensi keamanan PJAS	F - SAMPLING DAN PENGUJIAN	38,364,000	38,364,000
10.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak	052 - Intervensi keamanan PJAS	G - PENGAWALAN SEKOLAH YANG TELAH DIINTERVENSI TAHUN 2024	2,550,000	2,550,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	usia sekolah (PJAS) aman				
11.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	052 - Intervensi keamanan PJAS	H - Monitoring dan Evaluasi Intervensi Pro PN	55,750,000	55,750,000

03 - Jumlah desa pangan aman		5	15	30	40	60	89	89	89	90	100	1	138,245,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	051 - Perkuatan kapasitas desa	H - LOMBA DESA PAMAN (MONITORING DAN EVALUASI	8,170,000	8,170,000
2.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	051 - Perkuatan kapasitas desa	A - Advokasi Kelembagaan Desa	13,630,000	13,630,000
3.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	051 - Perkuatan kapasitas desa	B - PELATIHAN KADER KEAMANAN PANGAN	17,712,000	17,712,000
4.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	051 - Perkuatan kapasitas desa	I - PENGAWALAN DESA YANG TELAH DIINTERVENSI TAHUN 2024	20,165,000	20,165,000
5.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	051 - Perkuatan kapasitas desa	D - MONITORING DAN EVALUASI	15,600,000	15,600,000
6.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	051 - Perkuatan kapasitas desa	E - PENGAWALAN	4,545,000	4,545,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
7.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	051 - Perkuatan kapasitas desa	F - PENGAMBILAN DATA DALAM RANGKA MONEV INTERVENSI DESA PANGAN AMAN	3,530,000	3,530,000
8.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	051 - Perkuatan kapasitas desa	G - MONITORING DAN EVALUASI Intervensi Pro PN	37,915,000	37,915,000
9.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	051 - Perkuatan kapasitas desa	C - BIMBINGAN TEKNIS KOMUNITAS KEAMANAN PANGAN	16,978,000	16,978,000

		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas		5	15	40	60	65	95	95	95	100	100	1	93,319,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	051 - Perkuatan lintas sektor	E - PELATIHAN FASILITATOR PASAR AMAN	12,970,000	12,970,000
2.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	051 - Perkuatan lintas sektor	B - BIMBINGAN TEKNIS DAN PENYULUHAN KOMUNITAS PASAR	11,229,000	11,229,000
3.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	051 - Perkuatan lintas sektor	D - PENGAWALAN	2,364,000	2,364,000
4.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	051 - Perkuatan lintas sektor	F - SAMPLING DAN PENGUJIAN DI PASAR	37,045,000	37,045,000
5.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan	051 - Perkuatan	C - PENGAWASAN DAN MONEV	14,562,000	14,562,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	Aman Berbasis Komunitas	lintas sektor			
6.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	051 - Perkuatan lintas sektor	A - ADVOKASI DENGAN LINTAS SEKTOR	15,149,000	15,149,000

4.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	6	8	25	35	35	48	48	48	48	85	96	13.04	37,327,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	052 - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan	A - Penguatan pendampingan UMKM menuju NIE di UPT Badan POM	17,792,000	17,792,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
5.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT			15	15	15	55	55	90	95	95	95	95	215,944,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
2.	DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	051 - Advokasi dan Pendampingan UMKM	A - Bimtek Penerapan CPPOB bagi UMKM	19,535,000	19,535,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
2.	DR.3165.QCD.U45 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KOTA PALOPO	051 - Operasi Intelijen	B - Pelaksanaan Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan	34,600,000	34,600,000
3.	DR.3165.QCD.U45 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KOTA PALOPO	051 - Operasi Intelijen	C - Evaluasi Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan	1,312,000	1,312,000
4.	DR.3165.QCD.U45 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KOTA PALOPO	052 - Gelar Kasus dan Pelaporan	A - Gelar Kasus dan Pelaporan	800,000	800,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
5.	DR.3165.QCD.U45 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KOTA PALOPO	053 - Rapat Pembahasan Rencana Penyidikan, Skenario Penindakan dan Olah TKP	A - Rapat Pembahasan Rencana Penyidikan, Skenario Penindakan, dan Olah TKP	800,000	800,000
6.	DR.3165.QCD.U45 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KOTA PALOPO	054 - Operasi Penindakan	A - Operasi Penindakan	14,710,000	14,710,000
7.	DR.3165.QCD.U45 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KOTA PALOPO	054 - Operasi Penindakan	B - Penangkapan dan Penahanan	10,740,000	10,740,000
8.	DR.3165.QCD.U45 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KOTA PALOPO	055 - Pemberkasan	A - Pemberkasan	22,994,000	22,994,000
9.	DR.3165.QCD.U45 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KOTA PALOPO	055 - Pemberkasan	B - Konsultasi Penyelesaian Berkas Perkara	6,000,000	6,000,000
10.	DR.3165.QCD.U45 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KOTA PALOPO	055 - Pemberkasan	C - Gelar Perkara	650,000	650,000
11.	DR.3165.QCD.U45 - PERKARA DI	055 - Pemberkasan	D - Bantuan Hukum/	3,000,000	3,000,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KOTA PALOPO		Penasehat Hukum		
12.	DR.3165.QCD.U45 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KOTA PALOPO	055 - Pemberkasan	E - Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti	5,790,000	5,790,000
13.	DR.3165.QCD.U45 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KOTA PALOPO	056 - Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan (wasmalitrik)	C - Penggalangan Pemangku Kepentingan	51,988,000	51,988,000
14.	DR.3165.QCD.U45 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KOTA PALOPO	056 - Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan (wasmalitrik)	B - Pelaksanaan Wasmatlitrik	62,560,000	62,560,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
6.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	61,000,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
	UPT		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	053 - Penjejakan Digital Kejahatan Obat dan Makanan	D - Evaluasi Kegiatan Patroli Siber dan Profiling Kejahatan Obat dan Makanan	400,000	400,000
2.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan	A - Koordinasi Dengan CJS (Criminal Justice System)	10,680,000	10,680,000
3.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	052 - Penyusunan Analisis Data Kerawanan Kejahatan Aktual Obat dan Makanan	B - Pengumpulan Bahan Keterangan dalam rangka Penyusunan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan	8,458,000	8,458,000
4.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan	B - Forum Koordinasi Inteligen	6,490,000	6,490,000
5.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	052 - Penyusunan Analisis Data Kerawanan Kejahatan Aktual Obat dan Makanan	A - Penyusunan Analisis Data Kerawanan Kejahatan Aktual Obat dan Makanan	250,000	250,000
6.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	053 - Penjejakan Digital Kejahatan Obat dan Makanan	A - Rapat Perencanaan Penjejakan Digital Kejahatan Obat dan Makanan	100,000	100,000
7.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	053 - Penjejakan Digital Kejahatan Obat dan Makanan	B - Patroli Siber dan Profiling Kejahatan Obat dan Makanan	1,400,000	1,400,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
8.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan	C - Forum Komunikasi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan	7,798,000	7,798,000
9.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan	D - Pertemuan Peningkatan Kinerja, Profesionalisme dan Koordinasi PPNS	6,371,000	6,371,000
10.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan	E - Pendidikan dan Pelatihan PPNS Badan POM	6,763,000	6,763,000
11.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan	F - Supervisi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan	2,110,000	2,110,000
12.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan	G - Supervisi dan Bantuan Teknis Kegiatan Intelijen	2,110,000	2,110,000
13.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	053 - Penjejakan Digital Kejahatan Obat dan Makanan	C - Verifikasi Data Hasil Patroli Siber dan Profiling Kejahatan Obat dan Makanan	8,070,000	8,070,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
7.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT												4.2	81,703,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	051 - Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi	A - PEMERIKSAAN DALAM RANGKA KEPUTUSAN PENILAIAN SERTIFIKASI	63,870,000	63,870,000
2.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	051 - Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi	B - Workshop registrasi pangan olahan untuk fasilitator	7,522,000	7,522,000
3.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	051 - Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi	C - Bimbingan Teknis Perizinan Kosmetik	7,233,000	7,233,000
4.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	051 - Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi	F - Peningkatan Kapasitas UPT melalui Supervisi dalam rangka percepatan/ kemudahan untuk menindaklanjuti hasil kegiatan mapping untuk UMKM naik tahapan CPOTB berdasarkan beberapa kriteria	3,078,000	3,078,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
8.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM												71	2,554,849,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	001 - Gaji dan Tunjangan	A - Pembayaran Gaji dan Tunjangan	1,912,506,000	1,912,506,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
2.	DR.3165.CAB.001 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	B - Fasilitas Perkantoran	63,000,000	63,000,000
3.	DR.3165.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	A - PENGADAAN HARDWARE	100,000,000	100,000,000
4.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	M - Perjalanan Dinas Penempatan CPNS	4,899,000	4,899,000
5.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	I - SEWA SARANA PRASARANA PERKANTORAN	474,444,000	474,444,000

02 - Nilai AKIP UPT BPOM														79.62	386,000,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	ZB - Pelatihan leadership	6,890,000	6,890,000
2.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	ZC - Pemuktahiran Data Semester I	6,890,000	6,890,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
3.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	ZD - Pemuktahiran Data Tahunan 2025	6,890,000	6,890,000
4.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	ZF - Pelatihan Pelayanan Publik	6,890,000	6,890,000
5.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	ZG - BIMBINGAN TEKNIS REFRESHMENT ISO 19011:2018 PEDOMAN AUDIT SISTEM MANAJEMEN BAGI AUDITOR INTERNAL DI LINGKUNGAN BPOM	6,890,000	6,890,000
6.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	ZH - Rapat Koordinasi Monitoring Evaluasi Pemanfaatan Laporan Terpadu Badan POM	6,890,000	6,890,000
7.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	ZI - Pelatihan Teknis dan Fungsional non PFM	13,780,000	13,780,000
8.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	A - KOORDINASI PENGUATAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN LINTAS SEKTOR	64,032,000	64,032,000
9.	DR.3165.BKB.001 -	052 - Pelaksanaan	B - PERJALANAN PIMPINAN	83,210,000	83,210,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	koordinasi			
10.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	D - Keterpaduan Layanan Digital Badan POM	6,890,000	6,890,000
11.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	A - PENGIRIMAN SAMPEL DAN SURAT DINAS	2,400,000	2,400,000
12.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	B - Bimbingan Teknis Penyusunan Renstra Unit Organisasi/Satker di Lingkungan BPOM Tahun 2025-2029	6,890,000	6,890,000
13.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	C - AUDIT INTERNAL DAN RESERTIFIKASI QMS ISO 9001:2015	2,098,000	2,098,000
14.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	E - Rapat Kerja Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan	6,890,000	6,890,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
15.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	F - Sosialisasi dan Bimtek Penyusunan RKA-K/L/TOR/Data Dukung dan Desk RKA-K/L Pagu Anggaran	6,890,000	6,890,000
16.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	G - Sosialisasi dan Bimtek Penyusunan RKA-K/L Alokasi Anggaran	6,890,000	6,890,000
17.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	H - Peningkatan Kompetensi Pimpinan Perubahan dan Agen Perubahan Tahun 2025	6,890,000	6,890,000
18.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	I - Penyusunan LK Semester I TA 2024	13,780,000	13,780,000
19.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	K - Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil	6,890,000	6,890,000
20.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	L - Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi (Unaudited)	13,780,000	13,780,000
21.	DR.3165.BKB.001 -	051 - koordinasi	M - Sosialisasi Peraturan Pengelolaan	6,890,000	6,890,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	pengawasan Obat dan Makanan	Keuangan bagi PPSPM		
22.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	N - Pelatihan dan Sertifikasi LEAD Auditor	6,890,000	6,890,000
23.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	O - Workshop Analisis Kebutuhan dan Perencanaan Pengembangan Kompetensi Tahun 2026	6,890,000	6,890,000
24.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	P - Bimtek SAKIP dan Monev Online	6,890,000	6,890,000
25.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	Q - Rapat Evaluasi Nasional BPOM Tahun 2025	6,890,000	6,890,000
26.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	R - Forum Koordinasi Teknis (Forkontek) JF Pranata Komputer Badan POM	6,890,000	6,890,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
27.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	S - Workshop Penyelenggaraan Kearsipan	6,890,000	6,890,000
28.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	T - Bimbingan Teknik UKPBJ Badan POM TA 2025	6,890,000	6,890,000
29.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	U - Lokakarya Penguatan Reviu Perencanaan dan Penganggaran dalam rangka Peningkatan Akuntabilitas Laporan Keuangan BPOM	6,890,000	6,890,000
30.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	V - Akselerasi Peningkatan Belanja PDN	6,890,000	6,890,000
31.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	W - Asistensi Penyusunan Perencanaan, Penganggaranm Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegaitan, Laporan Keuangan dan Laporan DAK NF POM UPT	6,890,000	6,890,000
32.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	X - Rapat Kerja dan Koordinasi Nasional Pengawasan, Intern Berbasis Risiko di Lingkungan BPOM	6,890,000	6,890,000
33.	DR.3165.BKB.001 -	051 - koordinasi	Y - Pelatihan Kepemimpinan	6,890,000	6,890,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	pengawasan Obat dan Makanan			
34.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	Z - Pelatihan Teknis dan Fungsional PFM	6,890,000	6,890,000
35.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	ZA - Forum Koordinasi Analis Anggaran BPOM	6,890,000	6,890,000

03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM												5	82,080,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	H - PENGELOLA KEGIATAN	82,080,000	82,080,000

04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM												2.6	1,394,054,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	G - PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	17,287,000	17,287,000
2.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	J - Sewa Mobil Operasional/ Dinas	251,760,000	251,760,000
3.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	K - PEMERIKSAAN KESEHATAN RESIKO PEKERJAAN	28,000,000	28,000,000
4.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	L - PENGADAAN BAJU DINAS	101,073,000	101,073,000
5.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	C - NON PNS BALAI POM DI PALOPO	761,186,000	761,186,000
6.	WA.6384.EBA.956 - Layanan BMN	054 - Penatausahaan BMN	A - Bimtek Pengelolaan BMN	8,000,000	8,000,000
7.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	B - KEPERLUAN PERKANTORAN	39,548,000	39,548,000
8.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	A - LTGA BALAI POM DI PALOPO	136,200,000	136,200,000
9.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	F - PEMELIHARAAN KENDARAAN	51,000,000	51,000,000

Total	6,795,800,000

Perencanaan target B1 hingga B7 mengacu pada Manual IKU Rancangan Awal Renstra 2025-2029. Perhitungan terhadap realisasi berdasarkan Manual

IKU Rancangan Renstra 2025-2029 dituangkan pada Dokumen Laporan Kinerja (Interm dan Tahunan).

Palopo, 26 August 2025

Kepala Balai POM di Palopo

Darman